



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Boyolali memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Rencana ...

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Boyolali.
- (2) Rincian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH;
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK;  
dan
- f. BAB VI : PENUTUP.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

### Pasal 5

Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Boyolali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Kabupaten Boyolali, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024  
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH: (10-240/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJPN dan RTRW.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, gender, ekonomi, politik, hukum dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Boyolali hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Boyolali wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memedomani pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Boyolali. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 324

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	7
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	7
2.1.1 Geografi.....	7
2.1.2 Demografi.....	41
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	45
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	45
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya .....	55
2.3 Aspek Daya Saing .....	69
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	69
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) .....	82
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah .....	96
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi .....	109
2.4 Aspek Pelayanan Umum .....	119
2.4.1 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan .....	120
2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	121
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 .....	128
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 135	
2.6.1 Proyeksi Demografi.....	135
2.6.2 Sarana dan Prasarana.....	137
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	151
2.7.1 Kedudukan Kabupaten Boyolali Secara Regional.....	152
2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Boyolali .....	153
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	163
3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Boyolali.....	163
3.2 Isu Strategis Daerah .....	177
3.2.1. Isu Strategis Level Global .....	177
3.2.1.1. <i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> Sebagai Kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium ( <i>Millenium Development Goals</i> ) .....	177
3.2.1.2 Isu Megatren .....	178
3.2.2 Isu Strategis Level Nasional .....	183



3.2.2.1 Pengaruh Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .....	183
3.2.2.2 Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> .....	183
3.2.2.3 Peningkatan Reformasi Birokrasi.....	184
3.2.2.4 Pemenuhan Swasembada Pangan Nasional .....	184
3.2.2.5 Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Peningkatan Persaingan Global .....	184
3.2.3 Isu Strategis Daerah Jawa Tengah .....	186
3.2.4 Telaahan KLHS RPJPD .....	189
3.2.5 Isu Strategis Daerah.....	199
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	207
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....	218
5.1 Arah Kebijakan Daerah .....	218
5.2 Sasaran Pokok .....	237
BAB VI PENUTUP .....	259



## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	8
Tabel II. 2 Topografi .....	10
Tabel II. 3 Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali .....	11
Tabel II. 4 Kelembaban Suhu dan Rata-rata Kecepatan Angin .....	13
Tabel II. 5 Jumlah Program Kampung Iklim Kabupaten Boyolali .....	14
Tabel II. 6 Jenis Tanah di Kabupaten Boyolali .....	15
Tabel II. 7 Nama Mata Air di Kabupaten Boyolali .....	17
Tabel II. 8 Sungai di Kabupaten Boyolali.....	18
Tabel II. 9 Waduk/Embung/Situ di Kabupaten Boyolali .....	19
Tabel II. 10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2023 ...	22
Tabel II. 11 Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan .....	23
Tabel II. 12 Kawasan Rawan Bencana.....	26
Tabel II. 13 Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Tahun 2023.....	27
Tabel II. 14 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 .....	28
Tabel II. 15 IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2023 .....	29
Tabel II. 16 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023.....	30
Tabel II. 17 Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2022 (Ha).....	31
Tabel II. 18 Penilaian Koefisien <i>Run Off</i> Tertimbang.....	34
Tabel II. 19 Kebutuhan Beras .....	36
Tabel II. 20 Produksi Beras .....	37
Tabel II. 21 Produktivitas Lahan .....	37
Tabel II. 22 Daya Dukung Lahan Sawah .....	38
Tabel II. 23 Daya Kondisi Persampahan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 .....	39
Tabel II. 24 Kependudukan Tahun 2005-2023.....	41
Tabel II. 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan .....	41
Tabel II. 26 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	44
Tabel II. 27 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2023 .....	46
Tabel II. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2023.....	50
Tabel II. 29 Laju Indeks Harga Implisit PDRB .....	52
Tabel II. 30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Boyolali .....	57
Tabel II. 31 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Sosial .....	61
Tabel II. 32 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2005-2020 .....	66
Tabel II. 33 Perkembangan Capaian Bidang Olahraga.....	66
Tabel II. 34 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribuan/orang/tahun).....	70
Tabel II. 35 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Tahun (Rupiah) 2015-2023 .....	71
Tabel II. 36 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2015-2023 .....	71
Tabel II. 37 Rasio Kewirausahaan Tahun 2005-2023 .....	74
Tabel II. 38 Jumlah Rumah Makan/Restoran .....	74
Tabel II. 39 Jumlah Rumah Makan/Restoran .....	74
Tabel II. 40 Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur Hotel .....	75



Tabel II. 41 Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur Hotel Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023 .....	75
Tabel II. 42 Pelayanan Bidang Pariwisata Tahun 2019-2023.....	75
Tabel II. 43 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian Tahun 2019-2023 ..	76
Tabel II. 44 Capaian Aspek Produksi Peternakan Tahun 2012-2023 .....	78
Tabel II. 45 Capaian Aspek Populasi Peternakan Tahun 2012-2023 .....	78
Tabel II. 46 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perikanan.....	80
Tabel II. 47 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perdagangan .....	81
Tabel II. 48 Data Industri Tahun 2019-2023.....	81
Tabel II. 49 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perindustrian .....	82
Tabel II. 50 Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas .....	82
Tabel II. 51 Angka Literasi dan Numerasi Tahun 2022-2024 .....	85
Tabel II. 52 Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2023 .....	86
Tabel II. 53 Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2015-2023.....	86
Tabel II. 54 Angka Harapan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2023 ...	88
Tabel II. 55 Jumlah Balita <i>Stunting</i> Tahun 2019-2023.....	92
Tabel II. 56 Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2019-2023.....	92
Tabel II. 57 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis dan Sarana Kesehatan.....	92
Tabel II. 58 Perkembangan TPAK Tahun 2005-2023 .....	93
Tabel II. 59 TPAK Tahun 2023 .....	94
Tabel II. 60 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.....	96
Tabel II. 61 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kelompok Pelanggan .....	98
Tabel II. 62 Jenis Infrastruktur .....	98
Tabel II. 63 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan.....	99
Tabel II. 64 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km) .....	99
Tabel II. 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) .....	99
Tabel II. 66 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kondisi Jalan dan Irigasi Tahun 2019-2023.....	100
Tabel II. 67 Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih Tahun 2019-2023 .....	101
Tabel II. 68 Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Tahun 2019-2023... ..	102
Tabel II. 69 Kondisi Bangunan Gedung Tahun 2018-2023.....	102
Tabel II. 70 Gambaran Kinerja RTLH Tahun 2019-2023 .....	103
Tabel II. 71 Gambaran Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh .....	104
Tabel II. 72 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2005-2023 .....	106
Tabel II. 73 Rekap Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2011-2023.....	107
Tabel II. 74 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	108
Tabel II. 75 Capaian Nilai SPBE Tahun 2020 .....	108
Tabel II. 76 Capaian Nilai SPBE Tahun 2021 .....	108
Tabel II. 77 Capaian Nilai SPBE Tahun 2022 .....	108
Tabel II. 78 Capaian Nilai SPBE Tahun 2023 .....	109
Tabel II. 79 Jenis Perizinan dan Lama Perizinan Tahun 2023 .....	109
Tabel II. 80 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2019-2023 .....	111
Tabel II. 81 Aspek Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2023 .....	113
Tabel II. 82 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil .....	114



Tabel II. 83 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	115
Tabel II. 84 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal.....	115
Tabel II. 85 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi Tahun 2014-2023.....	117
Tabel II. 86 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha /Proyek dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2019-2023.....	118
Tabel II. 87 Perkembangan Investasi PMA Tahun 2019-2023.....	118
Tabel II. 88 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2017-2023.....	121
Tabel II. 89 Rekapitulasi Capaian SPM dari Tahun 2019-2023.....	121
Tabel II. 90 SPM Bidang Urusan Pendidikan.....	122
Tabel II. 91 SPM Bidang Urusan Kesehatan.....	123
Tabel II. 92 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	125
Tabel II. 93 SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman.....	125
Tabel II. 94 SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	126
Tabel II. 95 SPM Bidang Urusan Sosial.....	127
Tabel II. 96 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005–2025 ...	128
Tabel II. 97 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2005-2025.....	134
Tabel II. 98 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045.....	136
Tabel II. 99 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045.....	137
Tabel II. 100 Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2025-2045.....	138
Tabel II. 101 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2025-2045.....	140
Tabel II. 102 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045.....	142
Tabel II. 103 Sebaran Bank Sampah.....	143
Tabel II. 104 TPS 3R yang Aktif.....	145
Tabel II. 105 Standar Konsumsi Lahan per Kapita.....	145
Tabel II. 106 Proyeksi Daya Dukung Lahan Tahun 2025-2045.....	146
Tabel II. 107 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	146
Tabel II. 108 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045.....	147
Tabel II. 109 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045.....	149
Tabel II. 110 Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2025-2045.....	150
Tabel II. 111 Fungsi Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengembangan.....	156
Tabel III. 1. Keterkaitan Gambaran Kondisi Kabupaten Boyolali dengan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	174
Tabel III. 2 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung.....	195
Tabel III. 3 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.....	196
Tabel III. 4 Penentuan Isu Strategis.....	205
Tabel IV. 1 Penjelasan Pokok Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045.....	209
Tabel IV. 2 Penyelarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	210
Tabel IV. 3 Keselarasan Sasaran dan Indikator visi RPJPD dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	211
Tabel V. 1 Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045.....	237
Tabel V. 2 Sasaran Pokok Misi-1 Kabupaten Boyolali.....	240
Tabel V. 3 Sasaran Pokok Misi-2 Kabupaten Boyolali.....	242
Tabel V. 4 Sasaran Pokok Misi-3 Kabupaten Boyolali.....	244



Tabel V. 5 Sasaran Pokok Misi-4 Kabupaten Boyolali .....	246
Tabel V. 6 Sasaran Pokok Misi-5 Kabupaten Boyolali .....	248
Tabel V. 7 Sasaran Pokok Misi-6 Kabupaten Boyolali .....	250
Tabel V. 8 Sasaran Pokok Misi-7 Kabupaten Boyolali .....	253
Tabel V. 9 Matriks Visi, Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 .....	254



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	4
Gambar II. 1 Peta Administrasi sebelum adanya Perda Nomor 18 Tahun 2018	8
Gambar II. 2 Peta Administrasi .....	9
Gambar II. 3 Peta Topografi Kabupaten Boyolali .....	11
Gambar II. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali .....	12
Gambar II. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Boyolali .....	12
Gambar II. 6 Rata-rata Curah Hujan Tahun 2005-2023 .....	13
Gambar II. 7 Peta Geologi Kabupaten Boyolali .....	15
Gambar II. 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Boyolali .....	16
Gambar II. 9 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Boyolali .....	17
Gambar II. 10 Peta Penggunaan Lahan .....	21
Gambar II. 11 Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Boyolali .....	24
Gambar II. 12 Luasan Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023 (Ha) .....	25
Gambar II. 13 Peta Potensi Bencana .....	26
Gambar II. 14 Indeks Risiko Bencana Tahun 2015-2023 .....	27
Gambar II. 15 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	30
Gambar II. 16 Persentase D3TLH Air .....	31
Gambar II. 17 Persentase Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air .....	32
Gambar II. 18 Peta Status D3TLH Air .....	32
Gambar II. 19 Tren IKU Tahun 2018-2022 .....	40
Gambar II. 20 Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah.....	42
Gambar II. 21 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 .	43
Gambar II. 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan Nasional.....	45
Gambar II. 23 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan Nasional.....	48
Gambar II. 24 Angka Kemiskinan Tahun 2005-2023 .....	49
Gambar II. 25 Angka Kemiskinan Tahun 2012-2023 .....	49
Gambar II. 26 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Nasional .....	50
Gambar II. 27 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Nasional .....	51
Gambar II. 28 Laju Inflasi Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional.....	52
Gambar II. 29 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2023 .....	54
Gambar II. 30 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2023 .....	54
Gambar II. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	55
Gambar II. 32 IPG Tahun 2012-2023.....	56
Gambar II. 33 IDG Tahun 2012-2023 .....	56
Gambar II. 34 IKG Daerah .....	57
Gambar II. 35 Keterlibatan Perempuan di Perlemen.....	58
Gambar II. 36 Sumbangan Pendapatan Perempuan.....	58
Gambar II. 37 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan .....	59
Gambar II. 38 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.....	60
Gambar II. 39 Indeks Desa Membangun Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2024 .....	61
Gambar II. 40 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan .....	65

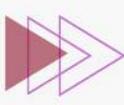


Gambar II. 41 Jumlah TFR Tahun 2019-2023 .....	67
Gambar II. 42 Cakupan Peserta KB Aktif.....	68
Gambar II. 43 <i>Unmet Need</i> KB Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022 .....	68
Gambar II. 44 MKJP .....	69
Gambar II. 45 PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah) .....	70
Gambar II. 46 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2021.....	73
Gambar II. 47 Pilar IPEI Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2021.....	73
Gambar II. 48 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2005-2023 .....	83
Gambar II. 49 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Boyolali, .....	84
Gambar II. 50 Proporsi Siswa Kelas 1 yang Menamatkan Sekolah Dasar .....	84
Gambar II. 51 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	85
Gambar II. 52 Guru Jenjang SD Lulusan S1 Tahun 2013-2023 .....	87
Gambar II. 53 Persentase Guru Jenjang SMP Lulusan S1 Tahun 2013-2023 .....	87
Gambar II. 54 AHH Tahun 2005-2023 .....	88
Gambar II. 55 Jumlah Angka Kematian Ibu di Kabupaten Boyolali.....	89
Gambar II. 56 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Boyolali .....	90
Gambar II. 57 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup .....	91
Gambar II. 58 Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Pendidikan Terakhir. ....	94
Gambar II. 59 Perkembangan UMK Tahun 2005-2023.....	95
Gambar II. 60 Angka Ketergantungan Tahun 2015-2023 (%).....	96
Gambar II. 61 Jumlah Sekolah Jenjang SD Tahun 2015-2024 .....	97
Gambar II. 62 Jumlah Sekolah Jenjang SMP Tahun 2015-2024 .....	97
Gambar II. 63 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Tahun 2015-2023 .....	100
Gambar II. 64 Data Kondisi Irigasi Tahun 2018-2023.....	101
Gambar II. 65 Data Kondisi Bangunan Gedung Tahun 2018-2023 .....	102
Gambar II. 66 Standar Sarana Pendidikan .....	149
Gambar II. 67 Ilustrasi Konsep <i>Growth Pole</i> .....	151
Gambar II. 68 Peta Hierarki Struktur Ruang .....	154
Gambar II. 69 Kawasan Strategis.....	155
Gambar II. 70 Potensi Pengembangan Wilayah .....	156
Gambar III. 1 Permasalahan Pembangunan Jangka Panjang .....	164
Gambar III. 2 Perbandingan IID Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023 .....	165
Gambar III. 3. Perbandingan IPM dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	166
Gambar III. 4. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023 .....	167
Gambar III. 5. Perbandingan LPE Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023 .....	169
Gambar III. 6. Perbandingan Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	170
Gambar III. 7. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	171
Gambar III. 8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten .....	172
Gambar III. 9. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023.....	173



Gambar III. 10 Megatren Global 2045 .....	178
Gambar III. 11 Penyelarasan Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis RJPD ....	191
Gambar III. 12 Kerangka Tujuan Penataan Ruang.....	192
Gambar III. 13 Peta Rencana Struktur Ruang.....	195
Gambar III. 14 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung (ha).....	196
Gambar III. 15 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya (ha).....	196
Gambar III. 16 Peta Rencana Pola Ruang.....	199
Gambar IV. 1 Kerangka Visi RPJPD Tahun 2025-2045 .....	207
Gambar IV. 2 Keselarasan Misi RPJPD, dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 .....	217
Gambar V.1 Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045.....	218
Gambar V. 2 Arah Kebijakan Misi-1 Kabupaten Boyolali .....	220
Gambar V. 3 Arah Kebijakan Misi-2 Kabupaten Boyolali .....	223
Gambar V. 4 Arah Kebijakan Misi-3 Kabupaten Boyolali .....	225
Gambar V. 5 Arah Kebijakan Misi-4 Kabupaten Boyolali .....	228
Gambar V. 6 Arah Kebijakan Misi-5 Kabupaten Boyolali .....	230
Gambar V. 7 Arah Kebijakan Misi-6 Kabupaten Boyolali .....	232
Gambar V. 8 Arah Kebijakan Misi-7 Kabupaten Boyolali .....	234





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di jalur transportasi yang penting di Pulau Jawa, terutama antara kota-kota besar yaitu Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang. Jalan tol dan jalan nasional yang melintasi wilayah ini memudahkan akses ke dan dari Boyolali. Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan budaya di Jawa Tengah. Pengembangan potensi-potensi ini bermuara untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka setiap pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik, sehingga pemerintah daerah memiliki kejelasan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang selanjutnya akan diimplementasikan melalui rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Kabupaten Boyolali.

Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini, salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yaitu periode 2025-2045, yang di dalamnya memuat penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW.

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai keberlanjutan dari Dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus sudah ditetapkan, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025. Dengan memperhatikan Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur adanya sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangannya jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD.

Rumusan RPJPD memiliki peran kritikal dalam menetapkan arah dan kerangka kerja bukan hanya bagi kesejahteraan yang berkeadilan, namun juga pembangunan berkelanjutan. Dengan berfokus pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, RPJPD mendorong pertumbuhan yang tidak hanya





mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kesetaraan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Pengadopsian prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan aspek keadilan sosial dengan strategi konservasi sumber daya alam di Kabupaten Boyolali melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan agar dapat menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mencegah kerusakan ekosistem.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD 2025-2045 mengacu pada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata





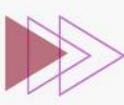
- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  10. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; dan
  11. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

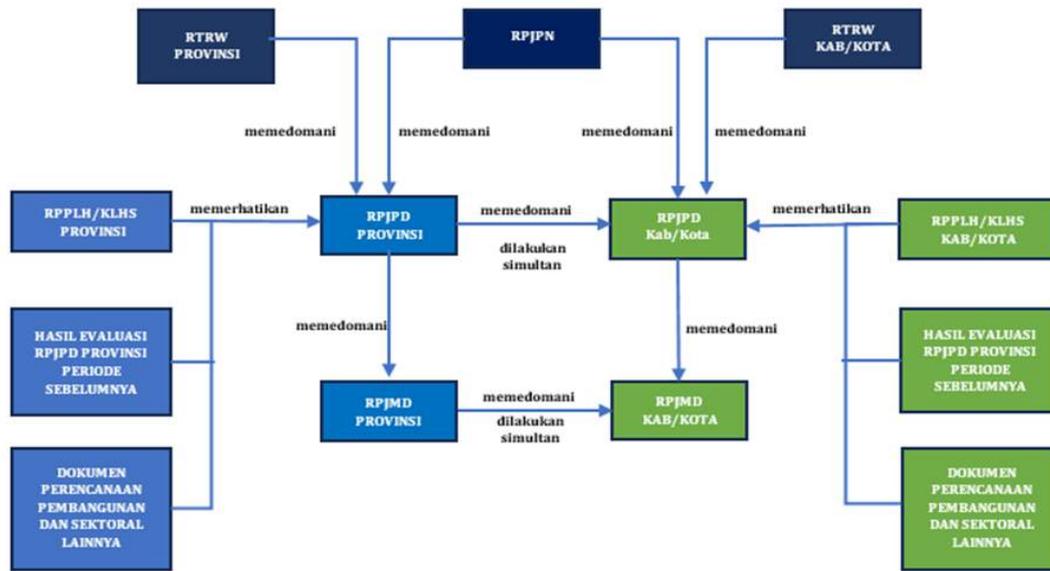
Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya.

Di samping itu, prinsip keselarasan dalam penyusunan RPJPD ini juga menunjukkan adanya kesinambungan antar waktu, di mana hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 menjadi dasar untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1, secara hierarki, penyusunan RPJPD Kabupaten Boyolali mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJP Nasional.





Gambar I. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024

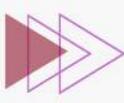
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Boyolali. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJPD Tahun 2025-2045 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi perencanaan pembangunan di daerah, termasuk dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Di samping itu, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen RPJPD juga memperhatikan RTRW. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Boyolali dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memerhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Guna menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka RPJPD Tahun 2025-2045 ini disusun dengan





mempertimbangkan poin-poin penting yang ada dalam hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagai dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritasnya. Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya menyusun RPJMD dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan periode dan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah dalam kerangka pencapaian tujuan nasional. Tujuan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

1. mendukung koordinasi antar pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan;
2. menjabarkan visi dan misi daerah dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun masa pembangunan jangka panjang 2025-2045;
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah; dan
4. meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota sekitar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah pusat.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami





permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

#### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan, dan prioritas pembangunan daerah. Tahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana 5 (lima) tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan Indikator Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

#### **BAB VI PENUTUP**

Memuat salah satunya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses kompleks yang melibatkan penyusunan rencana untuk mengarahkan dan mengelola pertumbuhan serta perkembangan suatu daerah. Esensinya mencakup aspek-aspek vital dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan dengan pijakan analisis hasil kebijakan pembangunan yang mendalam, sebagai gambaran kondisi daerah yang menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan. Gambaran umum kondisi Kabupaten Boyolali menyajikan capaian pembangunan dari periode sebelumnya secara komprehensif, dengan tahun analisis disesuaikan dengan perencanaan pembangunan pada periode yang telah berlalu. Fokus utamanya adalah pada perencanaan pembangunan jangka panjang, yang mencakup periode pembangunan 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini memiliki hierarki tertinggi sebagai panduan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sehingga relevansi setiap tahapan pembangunan harus terjaga untuk mencapai visi dan misi pada tahun 2045.

Rujukan analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali yang dicantumkan pada gambaran umum berisikan potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah pada berbagai aspek seperti aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, analisis tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman capaian pembangunan dengan basis data 20 (dua puluh) tahun terakhir 5 (lima) tahunan sesuai periode pembangunan jangka menengah. Sehingga dari capaian pembangunan tersebut mampu memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan khususnya pada tahun akhir perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Boyolali.

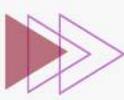
### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kedua aspek ini yaitu aspek geografi dan demografi memiliki keterkaitan yang kuat. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

#### 2.1.1 Geografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Boyolali baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali.

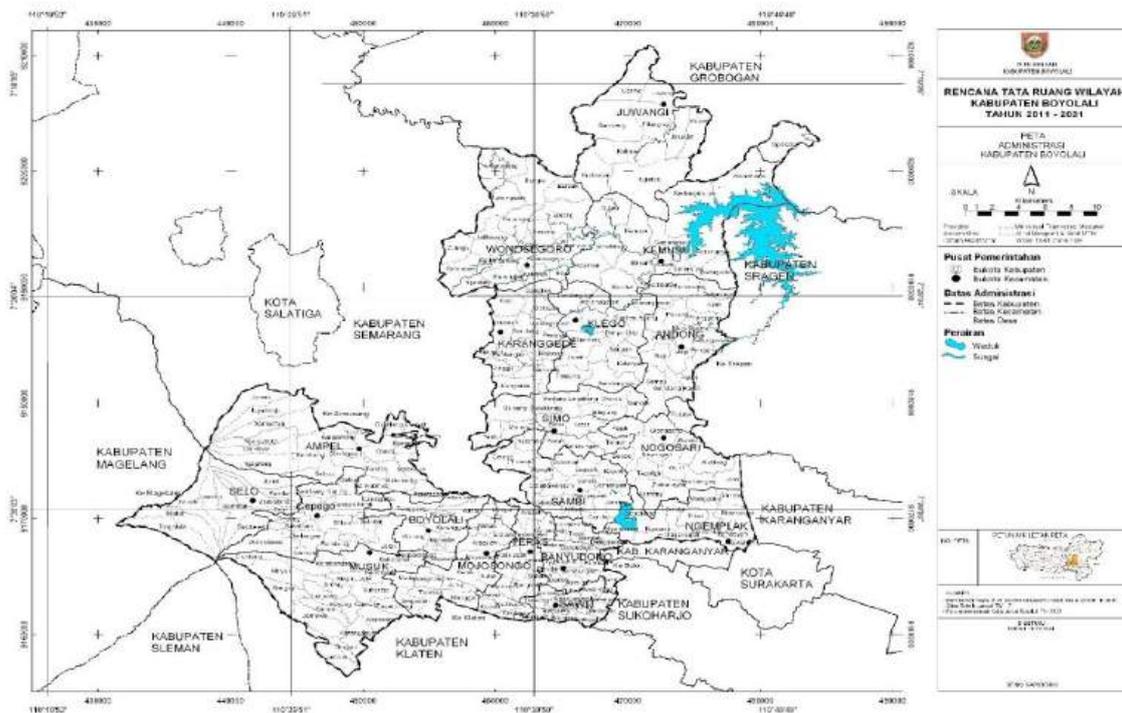




2.1.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pada Tahun 2018, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat 19 (sembilan belas) wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Boyolali. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Wonosamodro jumlah wilayah administrasi kecamatan Kabupaten Boyolali menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan yang memiliki luas wilayah 1.015,10 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.

Gambar II. 1 Peta Administrasi sebelum adanya Perda Nomor 18 Tahun 2018



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031

Kecamatan Kemusu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di antara 22 (dua puluh dua) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Boyolali, yaitu 81,43 km<sup>2</sup>. Sementara Kecamatan Sawit merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu 17,23 km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Sambu, Kecamatan Karanggede, dan Kecamatan Andong dengan jumlah desa masing-masing 16 (enam belas) desa. Kecamatan Boyolali merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu 9 (sembilan) desa/kelurahan.

Tabel II. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) 2017	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) 2024	Jumlah Desa/Kelurahan			
					Kelurahan 2017	Desa 2017	Kelurahan 2024	Desa 2024
1.	Selo	Samiran	56,08	56,08	-	10	-	10
2.	Ampel	Candi	90,39	30,38	-	20	-	10
3.	Gladagsari	Gladagsari	-	60,01	-	-	-	10
4.	Cepogo	Mliwis	53	53	-	15	-	15
5.	Musuk	Musuk	65,04	30,53	-	20	-	10
6.	Tamansari	Karangkendal	-	34,51	-	-	-	10



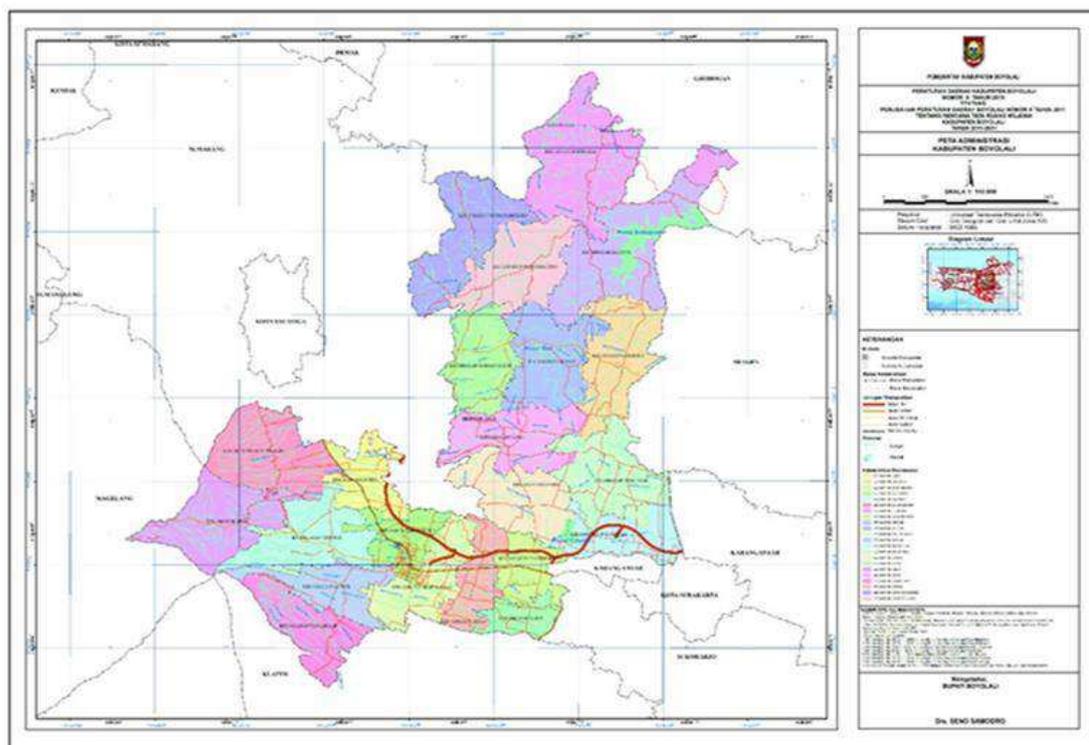
No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan			
					Kelurahan	Desa	Kelurahan	Desa
					2017	2017	2024	2024
7.	Boyolali	Banaran	26,25	26,25	3	6	3	6
8.	Mojosongo	Mojosongo	43,41	43,41	2	11	2	11
9.	Teras	Mojolegi	29,94	29,94	-	13	-	13
10.	Sawit	Kemasan	17,23	17,23	-	12	-	12
11.	Banyudono	Jembungan	25,38	25,38	-	15	-	15
12.	Sambi	Sambi	46,49	46,49	-	16	-	16
13.	Ngemplak	Sawahan	38,53	38,53	-	12	-	12
14.	Nogosari	Glonggong	55,08	55,08	-	13	-	13
15.	Simo	Simo	48,04	48,04	-	13	-	13
16.	Karanggede	Kebonan	41,76	41,76	-	16	-	16
17.	Klego	Klego	51,88	51,88	-	13	-	13
18.	Andong	Kacangan	54,53	54,53	-	16	-	16
19.	Kemusu	Klewor	99,08	81,43	-	13	-	10
20.	Wonosegoro	Wonosegoro	93	51,79	-	18	-	11
21.	Wonosamodro	Garangan	-	58,86	-	-	-	10
22.	Juwangi	Juwangi	79,99	79,99	1	9	1	9
Kabupaten Boyolali		Boyolali	1.015,10	1.015,10	6	261	6	261

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, data diolah (2024)

Berikut merupakan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Boyolali:

- Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang;
- Sebelah Selatan: Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman;
- Sebelah Barat: Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang; dan
- Sebelah Timur: Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta.

Gambar II. 2 Peta Administrasi



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031



2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Boyolali terletak antara 110° 22’- 110° 50’ bujur timur dan antara 7° 7’ - 7° 36’ lintang selatan dengan ketinggian antara 75 - 1500 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Boyolali berada pada jalur penghubung di antara 3 (tiga) kota besar yaitu Solo, Yogyakarta dan Semarang sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan, dan industri.

2.1.1.3 Kondisi Topografi

Secara umum topografi Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah yang termasuk ke dalam dataran tinggi berada di bagian barat yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Tamansari, dan Gladagsari ketinggian wilayah tersebut berada di kisaran 1.000 - > 2000 mdpl.

Tabel II. 2 Topografi

No	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1	Ampel	< 450 - 1399
2	Andong	< 450
3	Banyudono	< 450
4	Boyolali	< 450 - 1399
5	Cepogo	450 - > 2000
6	Gladagsari	450 - > 2000
7	Juwangi	< 450
8	Karanggede	< 450
9	Kemususu	< 450
10	Klego	< 450
11	Mojosongo	< 450 - 699
12	Musuk	< 450 - > 2000
13	Ngemplak	< 450
14	Nogosari	< 450
15	Sambi	< 450
16	Sawit	< 450
17	Selo	700 - > 2000
18	Simo	< 450
19	Tamansari	700 - 1999
20	Teras	< 450
21	Wonosamodro	< 450
22	Wonosegoro	< 450

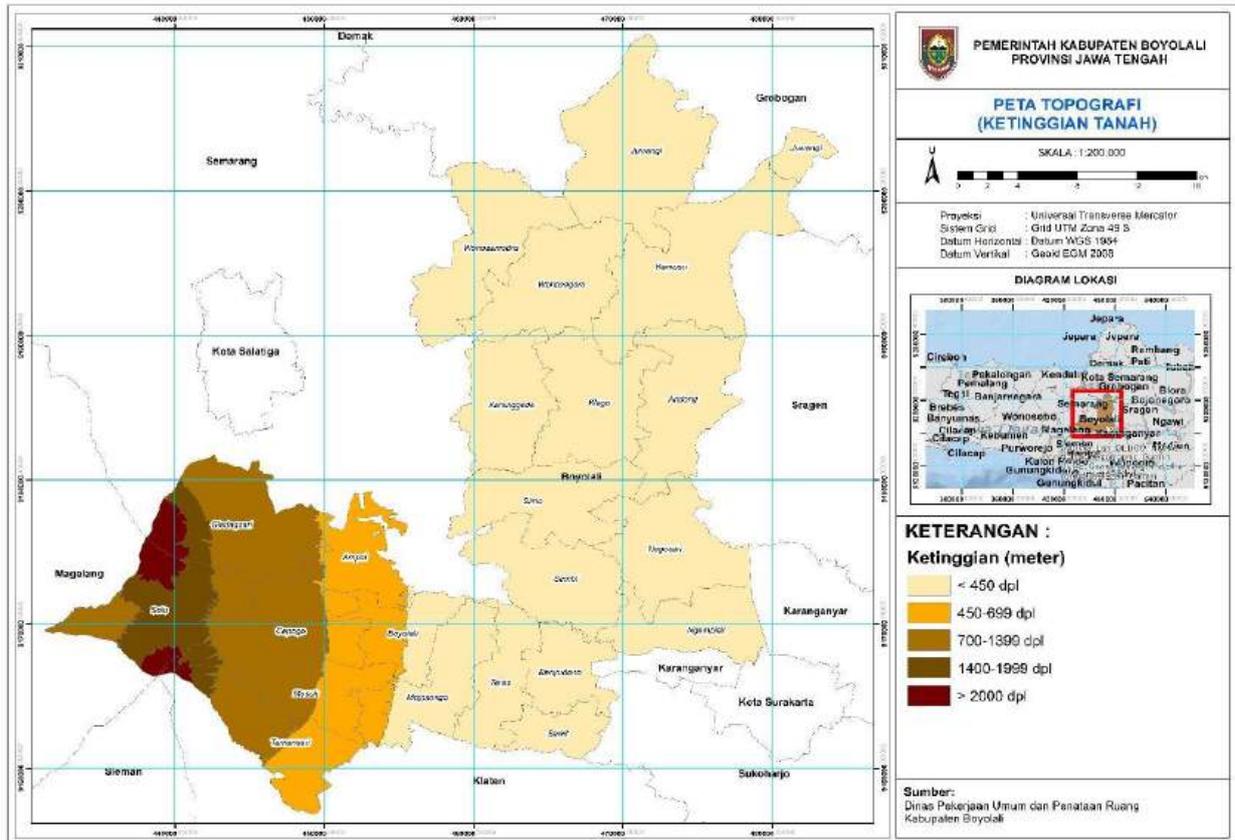
Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2024

Wilayah paling rendah secara umum berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali yang meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Wonosamodro, Juwangi, Wonosegoro, Sambi dan sebagian Kecamatan Boyolali, yaitu berada di ketinggian kurang dari 450 mdpl.





Gambar II. 3 Peta Topografi Kabupaten Boyolali



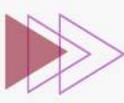
Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi 5 (lima) jenis. Secara umum wilayah Kabupaten Boyolali didominasi oleh dataran dengan tingkat kemiringan 2 – 15%. dengan penyebaran wilayah dataran berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali. Wilayah barat Kabupaten Boyolali didominasi oleh daerah yang memiliki tingkat kemiringan 15 - >40%. Jika dilihat per wilayah kecamatan, daerah yang memiliki tingkat kemiringan >40% adalah Kecamatan Selo dan Kecamatan Gladagsari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh geografis keduanya yang berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

Tabel II. 3 Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng
1	Ampel	2 – 15% s.d. > 40%
2	Andong	0 – 2% s.d. > 40%
3	Banyudono	0 – 2% s.d. 25 – 40%
4	Boyolali	2 – 15% s.d. 25 – 40%
5	Cepogo	2 – 15% s.d. > 40%
6	Gladagsari	2 – 15% s.d. > 40%
7	Juwangi	0 – 2% s.d. > 40%
8	Karanggede	0 – 2% s.d. > 40%
9	Kemus	0 – 2% s.d. > 40%
10	Klego	0 – 2% s.d. > 40%
11	Mojosongo	2 – 15% s.d. 25 – 40%
12	Musuk	2 – 15% s.d. > 40%
13	Ngemplak	0 – 2% s.d. 25 – 40%
14	Nogosari	0 – 2% s.d. > 40%
15	Sambi	0 – 2% s.d. > 40%
16	Sawit	0 – 2% s.d. 15 – 25%

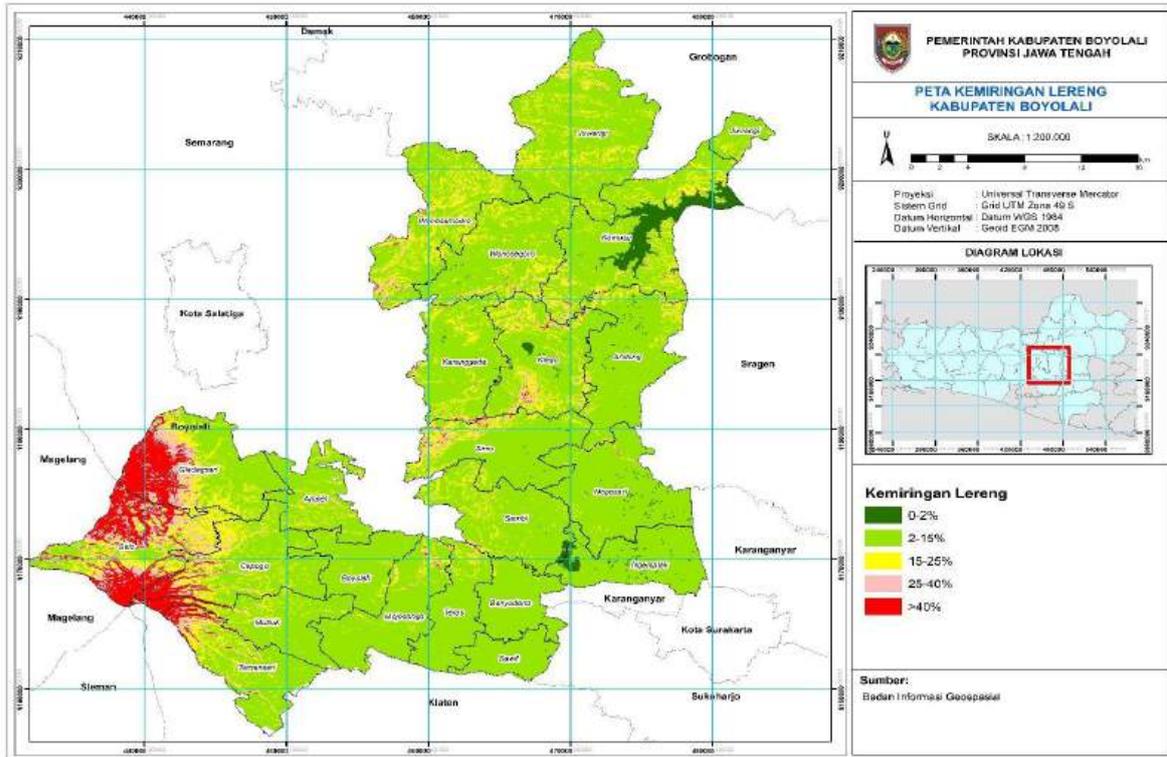




No	Kecamatan	Kemiringan Lereng
17	Selo	2 – 15% s.d. > 40%
18	Simo	0 – 2% s.d. > 40%
19	Tamansari	2 – 15% s.d. > 40%
20	Teras	2 – 15% s.d. > 40%
21	Wonosamodro	0 – 2% s.d. > 40%
22	Wonosegoro	0 – 2% s.d. > 40%

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Boyolali

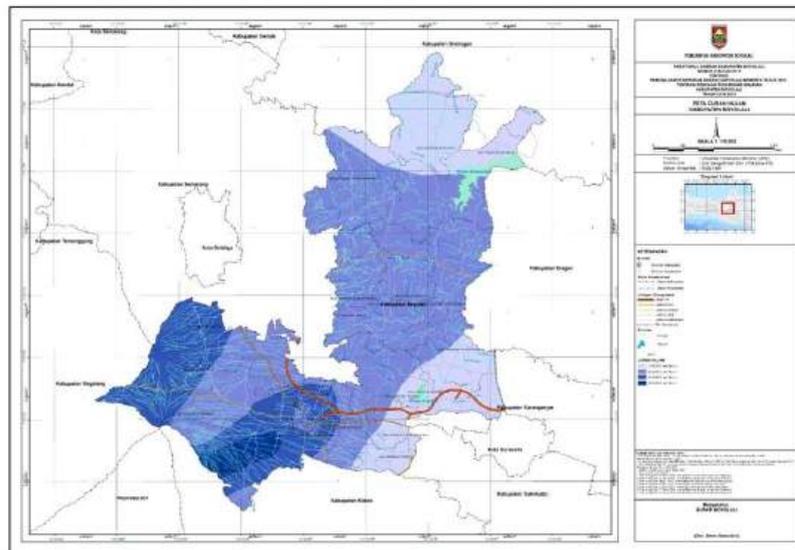


Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

#### 2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa diantaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembaban. Berikut adalah peta curah hujan Daerah.

Gambar II. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Boyolali



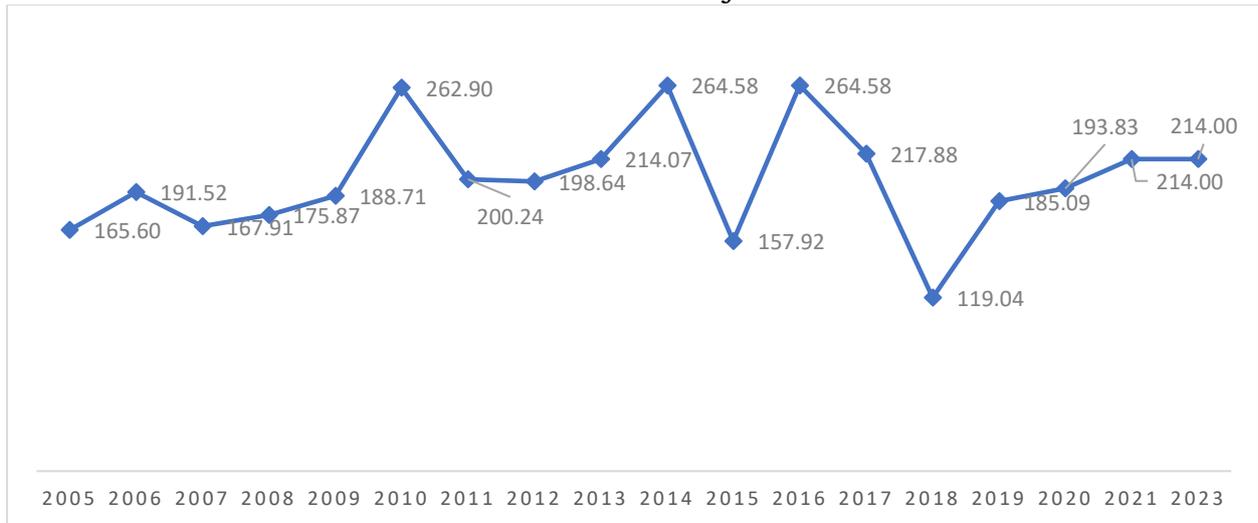
Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031





Kabupaten Boyolali termasuk daerah beriklim tropis karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Secara umum curah hujan yang dimiliki Kabupaten Boyolali cukup tinggi sehingga memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Rata-rata curah hujan dalam 20 (dua puluh) tahun sebagai berikut:

Gambar II. 6 Rata-rata Curah Hujan Tahun 2005-2023



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2024

Rata-rata curah hujan tertinggi pada periode 2005-2023 terjadi pada Tahun 2014 dan 2016 dengan curah hujan sebesar 264,58 mm. Rata-rata curah hujan terendah terjadi pada Tahun 2018 dengan curah hujan sebesar 119,04 mm.

Suhu di Kabupaten Boyolali selama Tahun 2022 juga cenderung bervariasi. Rata-rata suhu pada Tahun 2022 berkisar di antara 26,2-27,5 derajat celsius. Suhu tertinggi di Kabupaten Boyolali terjadi pada bulan September 2022 yaitu 32,9 derajat celsius. Sedangkan suhu terendah di Kabupaten Boyolali terjadi pada bulan Juli 2022 yaitu 23,0 derajat celsius.

Tabel II. 4 Kelembaban Suhu dan Rata-rata Kecepatan Angin Kabupaten Boyolali Tahun 2022

Bulan	Kelembaban			Kecepatan Angin
	Minimum (%)	Rata-Rata (%)	Maksimum (%)	Rata-Rata (m/det)
Januari	71	84	94	10
Februari	77	84	92	10
Maret	72	84	91	9
April	74	81	91	10
Mei	72	81	90	9
Juni	71	80	90	9
Juli	64	74	87	9
Agustus	61	72	83	9
September	64	73	84	10
Oktober	69	78	87	11
November	75	83	90	9
Desember	70	81	94	9

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2023

Selama tahun 2022, rata-rata tingkat kelembaban Kabupaten Boyolali berkisar diantara 72,0% - 84%. Kelembaban tertinggi yang terjadi di Kabupaten Boyolali sendiri yaitu sebesar 94,0% pada bulan Januari 2022. Sedangkan





kelembaban terendah terjadi pada bulan Agustus 2022 sebesar 61,0%. Kecepatan angin rata-rata di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2022 berkisar antara 9,0 m/det sampai dengan 11 m/det. Rata-rata kecepatan angin terendah cukup sering terjadi pada Tahun 2022 yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember. Sedangkan rata-rata kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Oktober.

#### 2.1.1.5 Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari, namun sejak Tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit Bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu.

Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung, pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama.

Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain kekeringan, kelangkaan air, kebakaran, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat dan penurunan keanekaragaman hayati. Melihat dampak perubahan iklim yang luas, pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan hal tersebut. Kabupaten Boyolali telah mencanangkan Program Kampung Iklim guna mendorong kelompok masyarakat melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Proklamasi yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali ini berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat kampung terlibat secara aktif dalam pengelolaannya. Proklamasi merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal dan merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.

Perkembangan program Kampung Iklim Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 5 Jumlah Program Kampung Iklim Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2023

No	Tahun	Jumlah Proklamasi di Kab. Boyolali
1	2016	1
2	2017	2
3	2018	5
4	2019	4
5	2020	5
6	2021	4
7	2022	9
8	2023	13
Total Jumlah Proklamasi		43

Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Boyolali, 2024

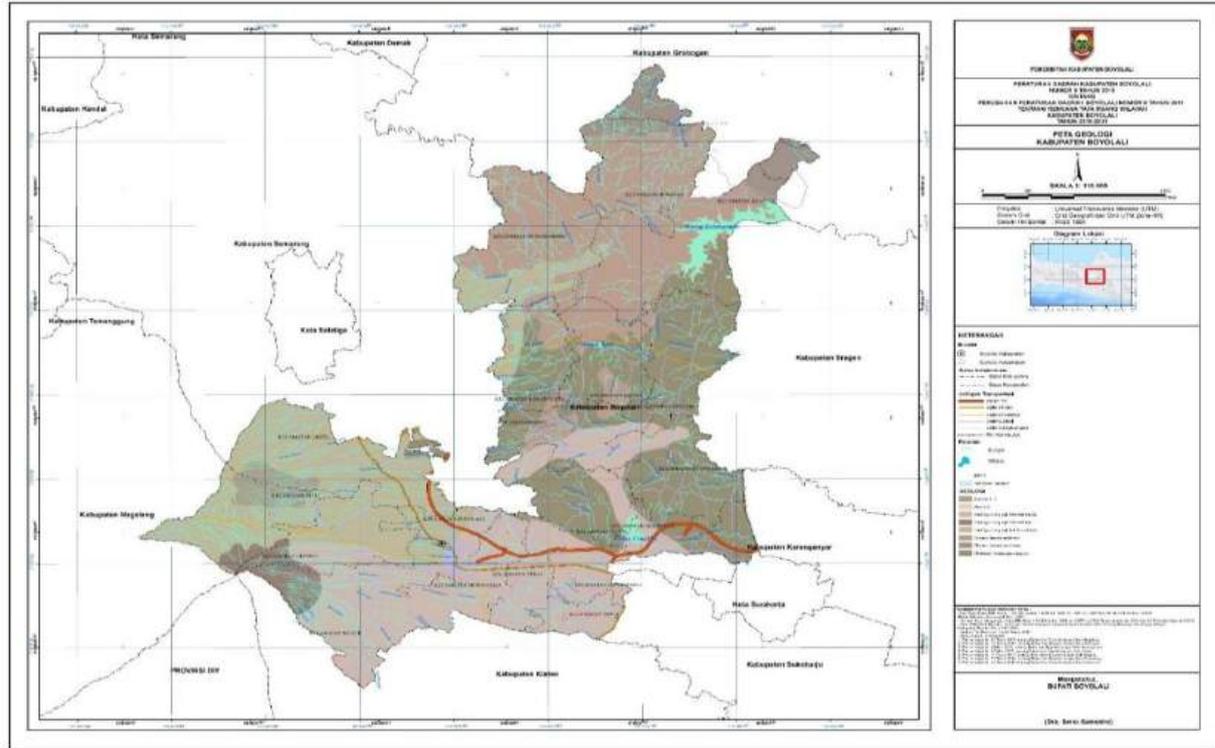




2.1.1.6 Kondisi Geologi

Pemetaan geologi Kabupaten Boyolali sangat penting untuk mitigasi bencana alam, seperti letusan gunung berapi dan gempa bumi, serta dalam eksplorasi sumber daya alam seperti air tanah. Pemetaan geologi Kabupaten Boyolali dapat terlihat pada peta di bawah ini:

Gambar II. 7 Peta Geologi Kabupaten Boyolali



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Wilayah Kabupaten Boyolali berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Salatiga dengan luas sekitar 85 km<sup>2</sup> dan CAT Karanganyar Boyolali dengan Luas 3.877 km<sup>2</sup>. CAT Salatiga yang terdapat di Kawasan Kabupaten Boyolali menggunakan sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir. Tingkat produktivitas akuifer tergolong rendah dengan debit <2 lt/detik (0,28-1,47 lt/detik) yang teletak di Kecamatan Selo dan Kecamatan Wonosegoro. Jumlah air tanah bebas pada CAT Salatiga sebesar 10 juta m<sup>3</sup>/tahun dan jumlah air tanah tertekan sebesar 2 juta m<sup>3</sup>/tahun. Sedangkan litologi akuifer utama dari Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali berupa endapan sungai: pasir-kerakal; batuan gunung api Gunung Merapi: breksi gunung api, lava vesikuler/scoria, dan tuf; batuan Gunung Lawu tak teruraikan: breksi gunung api, lava, tuf, dan breksi lahar. Jenis tanah yang ada di Kabupaten Boyolali secara geologis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 6 Jenis Tanah di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Dominasi Jenis Tanah
1	Ampel	Kambisol Eutrik, Andosol Humik, Latosol Oksik, Gleisol Distrik, Gawir ( <i>Escarpments</i> ), Kambisol Gleik
2	Andong	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Gleisol Eutrik
3	Banyudono	Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Humik
4	Boyolali	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Andosol Humik, Kambisol Humik

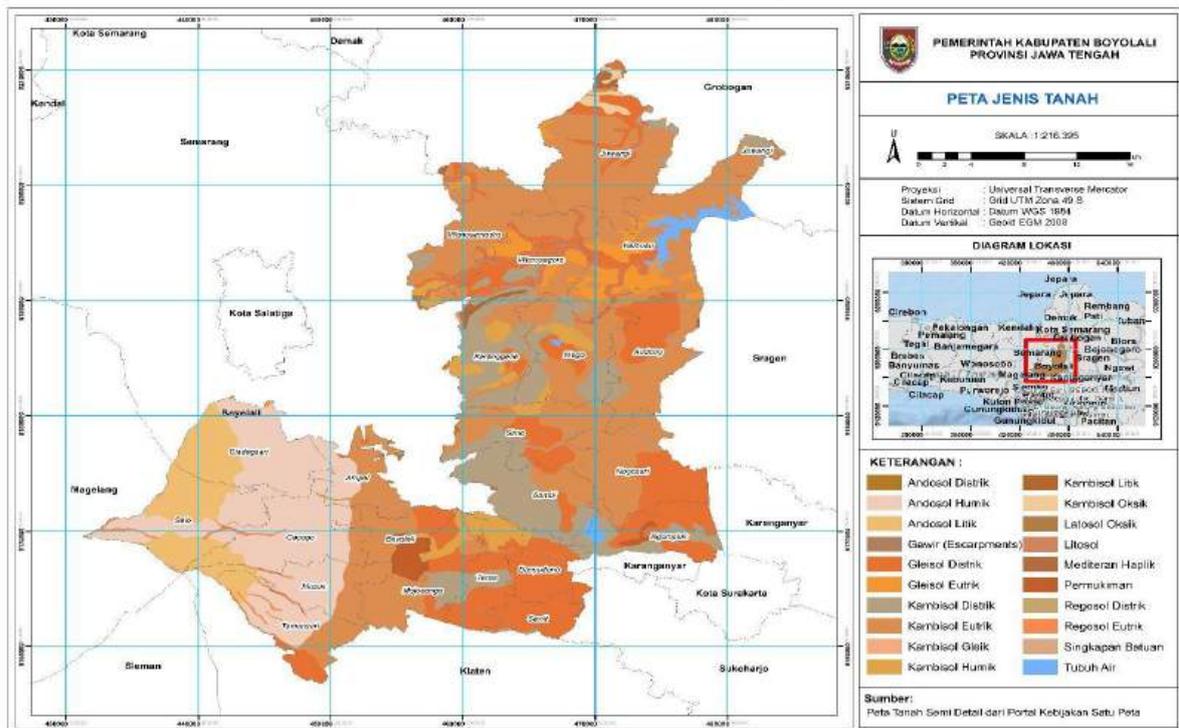




No	Kecamatan	Dominasi Jenis Tanah
5	Cepogo	Andosol Humik, Kambisol Eutrik, Andosol Litik, Regosol Eutrik
6	Gladagsari	Andosol Humik, Andosol Litik, Andosol Distrik, Litosol
7	Juwangi	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Oksik, Mediteran Haplik, Gleisol Eutrik
8	Karanggede	Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Mediteran Haplik, Gleisol Distrik, Kambisol Litik, Kambisol Gleik
9	Kemusu	Kambisol Eutrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik
10	Klego	Kambisol Eutrik, Kambisol Distrik, Gleisol Distrik, Kambisol Humik
11	Mojosongo	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Humik, Regosol Distrik
12	Musuk	Andosol Humik, Kambisol Eutrik, Andosol Litik, Regosol Eutrik
13	Ngemplak	Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik
14	Nogosari	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik
15	Sambi	Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik
16	Sawit	Gleisol Distrik, Kambisol Distrik
17	Selo	Andosol Litik, Andosol Humik, Regosol Eutrik, Singkapan Batuan, Andosol Distrik, Regosol Distrik
18	Simo	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Humik
19	Tamansari	Andosol Humik, Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Andosol Litik, Regosol Eutrik, Andosol Distrik, Regosol Distrik
20	Teras	Gleisol Distrik, Kambisol Humik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik
21	Wonosamodro	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Gleisol Eutrik, Latosol Oksik, Gawir ( <i>Escarpmnts</i> ), Kambisol Gleik
22	Wonosegoro	Kambisol Eutrik, Gleisol Distrik, Gleisol Eutrik, Kambisol Distrik, Kambisol Litik, Kambisol Gleik

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2023

Gambar II. 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Boyolali

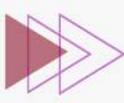


Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2023

### 2.1.1.7 Kondisi Hidrologi

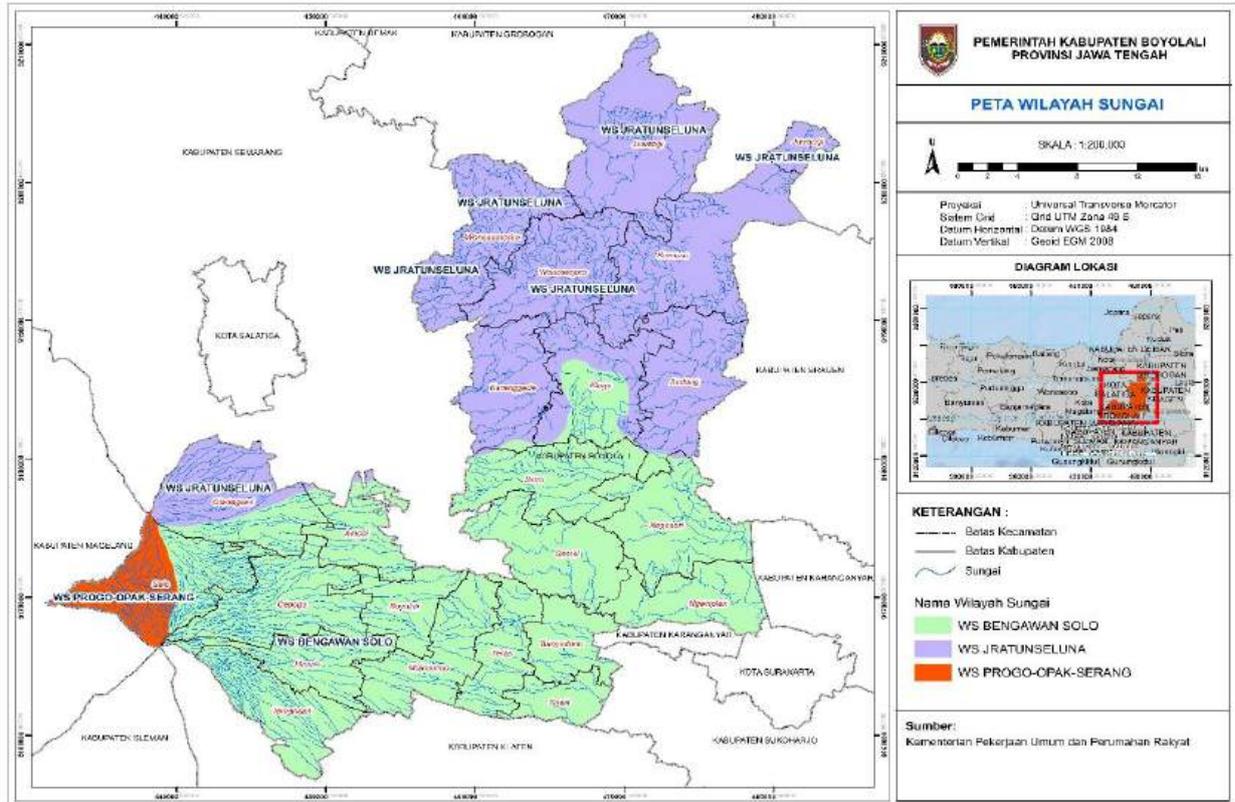
Kabupaten Boyolali termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, DAS Serang, DAS Progo, dan DAS Tuntang. Total luas masing-masing DAS





adalah sebagai berikut: DAS Bengawan Solo sebesar 1.593.902 ha, DAS Serang sebesar 401.248 ha, DAS Progo sebesar 246.208 ha, dan DAS Tuntang sebesar 130.040 ha. Pemetaan wilayah sungai Kabupaten Boyolali terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II. 9 Peta Wilayah Sungai Kabupaten Boyolali



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Kabupaten Boyolali memiliki beberapa sumber air, baik alami maupun buatan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakter hidrologi yang ada di Kabupaten Boyolali memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, kondisi topografi, maupun struktur geologi wilayah. Beberapa sumber hidrologi potensial yang dimiliki Kabupaten Boyolali antara lain adalah mata air, sungai dan waduk.

a. Mata Air Dangkal

Kabupaten Boyolali sendiri memiliki cukup banyak mata air dangkal yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan. Daftar mata air di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 7 Nama Mata Air di Kabupaten Boyolali

No	Nama Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ampel	57
2	Andong	44
3	Banyudono	15
4	Boyolali	12
5	Cepogo	34
6	Gladagsari	42
7	Juwangi	43
8	Karanggede	53
9	Kemusu	53





No	Nama Kecamatan	Jumlah Mata Air
10	Klego	61
11	Mojosongo	36
12	Musuk	2
13	Ngemplak	3
14	Nogosari	27
15	Sambi	72
16	Sawit	17
17	Selo	26
18	Simo	41
19	Tamansari	17
20	Teras	28
21	Wonosamodro	56
22	Wonosegoro	41
Total		780

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2023

**b. Sungai**

Kabupaten Boyolali memiliki total 46 (empat puluh enam) sungai. Sungai terpanjang di Kabupaten Boyolali adalah Sungai Gandul yang mengalir dari Lereng Gunung Merapi melewati Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras dan Sawit. Sedangkan jika dilihat dari ukuran debit air, Sungai Pepe memiliki debit air terbesar di Kabupaten Boyolali. Sungai ini mengalir dari lereng Gunung Merbabu hingga Sungai Bengawan Solo. Debit air yang besar menjadi salah satu potensi hidrologi yang dapat dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk lokasi wisata.

**Tabel II. 8 Sungai di Kabupaten Boyolali**

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m <sup>3</sup> /dtk) Maks/Min
1	Serang	15	63.844/0.441
2	Pepe	11.5	24.346/ 11.179
3	Jurang Grenjeng	4.8	0.830/ 0.001
4	Kapuk	3.7	0.660/ 0.001
5	Wates	5.1	0.760 /0.001
6	Gondang	5.4	0.340/0.001
7	Rejoso	5.1	0.286/ 0.001
8	Bogo	4	1.800/0.010
9	Nongko	7.4	0.530/0.001
10	Pule	8	3.698/0.010
11	Sombo	7.6	1.639/0.010
12	Luwuk	6.5	0.320/0.001
13	Gandul	28.5	7.128/ 6.960
14	Palang	4.2	0.150/0.001
15	Klumpit	7.9	0.05/0.001
16	Mati	7.3	0.050/0.001
17	Tambakan	7.2	0.050/0.001
18	Mojolegi	2.6	0.050/0.001
19	Kedungmangir	6.3	0.050/0.001
20	Selo	5.3	0.050/0.001
21	Makasih	8.7	0.050/0.001





No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m <sup>3</sup> /dtk) Maks/Min
22	Bodeh	1.9	0.050/0.001
23	Klampok	3.9	0.050/0.001
24	Grenjengan	1.9	0.050/0.001
25	Jengglong	6.2	0.180/0.001
26	Bendungan	9.7	0.130/ 0.001
27	Timo	4	1.100/ 0.010
28	Bagor	7	1.100/ 0.010
29	Bedoyo	17.3	1.100/ 0.010
30	Dungguyangan	6.6	1.100/ 0.010
31	Dungori	1	1.100/ 0.010
32	Lunyu	6	1.100/ 0.010
33	Kedungrong	12.2	0.075/ 0.001
34	Sranten	3.1	0.075/ 0.001
35	Bengle	11.6	0.180/ 0.001
36	Pringapus	7.7	0.070/ 0.001
37	Kedungbendo	4.4	1.012/ 0.10
38	Gebang	4.3	11.651/ 0.100
39	Nanas	4.3	1.100/ 0.010
40	Jowo	9.3	1.100/ 0.010
41	Cemoro	16.3	448.5/ 0.154
42	Butak	10.2	0.882/ 0.184
43	Andong	11.5	1.050/ 0.050
44	Tempel	11	11.218/ 0.292
45	Gede	9	2.100/ 0.050
46	Larangan	7	2.000/ 0.050

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2023

c. Waduk/Situ/Embung

Waduk Kedungombo merupakan salah satu potensi hidrologi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali. Waduk ini menggunakan Kali Serang sebagai sumber air utamanya. Sumber air lainnya dipasok dari beberapa anak sungai besar maupun kecil lainnya. Beberapa anak sungai yang menyuplai air ke Waduk Kedungombo antara lain adalah Sungai Braholo, Sungai Tengah, Sungai Nglanji, Sungai Tapen dan Sungai Sambas.

Tabel II. 9 Waduk/Embung/Situ di Kabupaten Boyolali

No.	Nama Waduk/Embung	Luas (Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Lokasi (Kecamatan)
1	Waduk Kedung Ombo	3.536,00	723.000.000,00	Kemusu
2	Waduk Cengklik	336,00	9.299.240,00	Sambi dan Ngeplak
3	Waduk Bade	80,00	2.844.400,00	Klego
4	Embung Drajit	12,50	79,76	Musuk
5	Embung Mliwis	0,35	7.680,00	Cepogo
6	Embung Juwangi	0,13	180,00	Juwangi
7	Embung Kalangan	0,80	8.050,00	Klego
8	Embung Kendel	1,00	10.000,00	Kemusu
9	Embung Jagir (2013)	0,15	4.786,15	Musuk

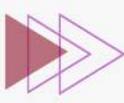




**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045**

No.	Nama Waduk/Embung	Luas (Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Lokasi (Kecamatan)
10	Embung Jemowo (2014)	0,14	4.673,20	Musuk
11	Embung Lampar (2015)	0,15	4.391,10	Musuk
12	Embung Kembang Kuning (2015)	0,14	4.205,12	Cepogo
13	Embung Cepogo (2016)	0,25	7.594,12	Cepogo
14	Embung Cepokosawit (2016)	0,16	4.227,00	Sawit
15	Embung Jenengan (2016)	0,17	4.236,00	Sawit
16	Embung Sempu (2016)	0,34	9.126,74	Andong
17	Embung Sangup (2016)	0,17	4.877,25	Musuk
18	Embung Lanjaran (2016)	0,30	8.154,00	Musuk
19	Embung Dragan (2016)	0,24	6.372,00	Musuk
20	Embung Cluntang (2016)	0,13	3.865,50	Musuk
21	Embung Sumur (2016)	0,22	4.974,54	Musuk
22	Embung Tawengan (2017)	0,19	5.104,00	Sambi
23	Embung Karanggatak (2017)	0,18	5.472,00	Klego
24	Embung Lanjaran II (2017)	0,20	6.006,00	Musuk
25	Embung Tegalrejo (2017)	0,23	6.918,00	Karanggede
26	Embung Wonosegoro (2017)	0,19	5.876,00	Wonosegoro
27	Embung Ngablak (2017)	0,15	4.400,00	Wonosegoro
28	Embung Jatisari (2017)	0,05	918,00	Sambi
29	Embung Cabean (2017)	0,05	871,00	Cepogo
30	Embung Kunti (2017)	0,04	1.050,00	Andong
31	Embung Karangjati (2017)	0,06	990,00	Wonosegoro
32	Embung Tanjung (2017)	0,04	1.230,00	Klego
33	Embung Kedungpilang (2017)	0,03	1.100,00	Wonosegoro
34	Embung Melikan I (2018)	0,09	797,63	Cepogo
35	Embung Melikan II (2018)	0,29	13.619,40	Cepogo
36	Embung Melikan III (2018)	0,59	27.178,06	Cepogo
37	Embung Melikan IV (2018)	0,31	11.670,38	Cepogo
38	Embung Gendulan Desa Jemowo (2018)	0,30	4.517,79	Musuk
39	Embung Potronayan (2018)	1,08	2.400,00	Nogosari
40	Embung Kendel (2018)	0,27	900,00	Kemusu
41	Embung Jatisari (2018)	0,27	1.125,00	Sambi
42	Embung Kalangan (2018)	0,07	216,00	Klego
43	Embung Kalinanas (2018)	0,10	400,00	Wonosegoro
44	Embung Karanganyar (2019)	0,25	7.500,00	Musuk
45	Embung Gilirejo (2019)	0,25	7.500,00	Wonosegoro
46	Embung Ngaren (2019)	0,25	7.500,00	Juwangi
47	Embung Jatilawang (2019)	0,25	7.500,00	Wonosegoro
48	Embung Watugajah (2019)	0,66	33.134,00	Cepogo
49	Embung Jerukan (2019)	0,25	7.500,00	Juwangi
50	Embung Selo (2019)	0,13	5.000,00	Selo
51	Embung Jatilawang (2019)	0,25	7.500,00	Wonosegoro
52	Embung Ringinlarik (2020)	4,00	477.730,00	Musuk
53	Embung Cabean Kunti (2020)	1,00	20.000,00	Cepogo





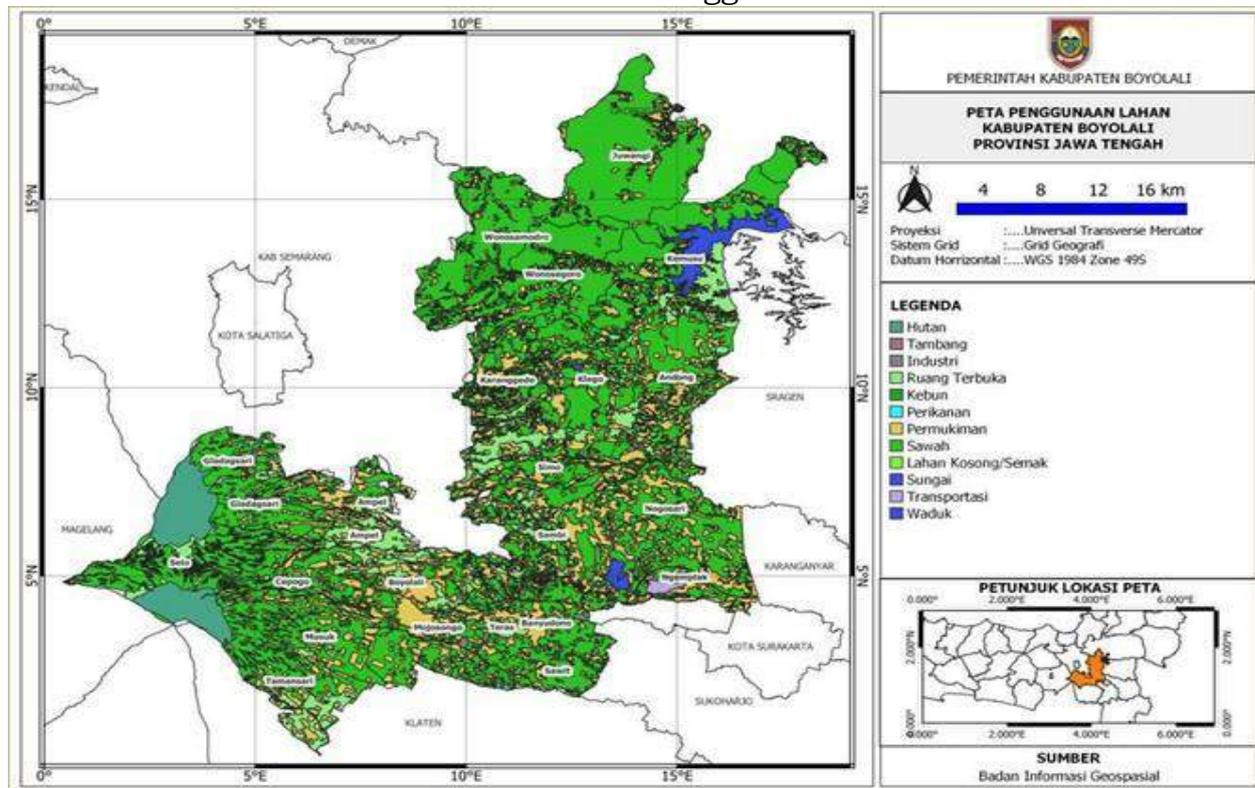
No.	Nama Waduk/Embung	Luas (Ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Lokasi (Kecamatan)
54	Embung Kayen (2020)	0,20	6.000,00	Juwangi
55	Embung Pusporenggo (2021)	3,40	283.617,00	Musuk
56	Embung Talakbroto (2022)	0,21	7.282,00	Simo
57	Embung Krobokan (2022)	0,13	2.800,00	Juwangi

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2023

### 2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Boyolali. Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali terbagi beberapa klasifikasi penggunaan antara lain lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan pertanian. Berikut adalah peta penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali:

Gambar II. 10 Peta Penggunaan Lahan



Sumber: IKPLHD Kabupaten Boyolali 2022

Data penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan pembagian yang konsisten antara lahan sawah, lahan kering, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah, yang mencakup irigasi dan tadah hujan, rata-rata berkontribusi sekitar 22% dari total luas lahan, dengan sedikit fluktuasi setiap tahunnya. Lahan kering mendominasi penggunaan lahan dengan persentase sekitar 49,33-77,94%, yang sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun dan perkebunan. Lahan bukan pertanian, termasuk jalan, pemukiman, dan perkantoran, mencakup sekitar 28,31-29,68% dari total lahan. Perubahan yang signifikan terlihat pada penggunaan lahan untuk peternakan lainnya yang mengalami peningkatan pada Tahun 2022, serta lahan HPT yang digunakan untuk padang penggembalaan yang berubah setiap tahun. Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali cenderung stabil dengan sedikit variasi dari tahun ke tahun.





**Tabel II. 10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2023**

No	Penggunaan Lahan	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Luas (Ha)	%										
1	LAHAN SAWAH	22.693	22,36	22.390	22,06	22.390	22,06	22.390	22,05	22.390	22,05	22.467	22,06
	a. Irigasi	12.181	12,00	11.562	11,39	11.343	11,17	12.310	11,17	12.310	11,17	11.305	12,13
	b. Tadah Hujan	10.512	10,36	10.828	10,67	11.047	10,88	10.080	10,88	10.080	10,88	11.162	9,93
2	LAHAN KERING	50.076	49,33	50.085	49,34	50.187	49,44	50.174	77,94	50.005	77,94	49.363	77,94
	a. Tegal/ Kebun	30.145	29,70	29.326	28,89	29.343	28,91	29.330	28,91	32.620	28,91	29.744	28,89
	b. Perkebunan	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	-	12	-	197	-
	c. Hutan Rakyat	3.460	3,41	3.460	3,41	3.445	3,39	3.445	3,39	1.340	3,39	2.889	3,39
	d. Hijauan Pakan Ternak	177	0,17	984	0,97	984	0,97	984	0,97	331	0,33	-	-
	e. Hutan Negara	14.835	14,61	14.835	14,61	14.836	14,62	14.836	14,62	13.241	14,62	14.834	14,62
	f. Sementara tidak diusahakan		-		-		-		-		-	58	0,06
	g. Peternakan	1.456	1,43	1.477	1,46	1.576	1,55	1.576	1,55	2.461	1,55	1.641	1,62
3	LAHAN BUKAN PERTANIAN (Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai dll)	28.741	28,31	29.035	28,60	28.933	28,50	28.933	28,50	28.946	28,50	29.680	29,24
	<b>JUMLAH</b>	<b>101.510</b>	<b>100</b>	<b>101.510</b>	<b>100</b>	<b>101.510</b>	<b>100</b>	<b>101.497</b>	<b>100</b>	<b>101.341</b>	<b>100</b>	<b>101.510</b>	<b>100</b>

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2023



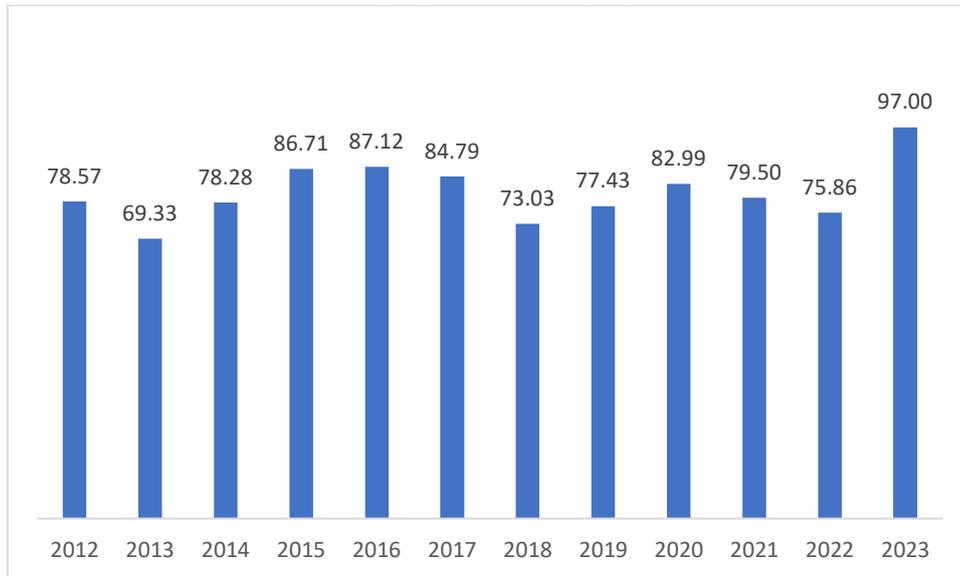
Tabel II. 11 Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Sawah			Pertanian Bukan Sawah							Bukan Pertanian	Jumlah Total	
		Irigasi	Tadah Hujan	Total	Tegal/ kebun	Perkebunan	Hutan Rakyat	HPT	Hutan Negara	Sementara tidak diusahakan	Peternakan			Total
1	SELO	15	-	15,00	2.126,0	-	800,0	-	1.351,0	-	-	4.277,0	1.296	5.588,0
2	AMPEL	508	23	531,00	1.614,2	-	-	-	-	-	-	1.614,2	892	3.037,4
3	GLADAGSARI	-	-	-	3.379,0	-	103,0	-	1.171,0	-	-	4.653,0	1.348	6.001,0
4	CEPOGO	-	-	-	3.174,0	-	-	-	265,0	-	-	3.439,0	1.806	5.245,0
5	MUSUK	-	-	-	1.869,0	-	56,0	-	123,0	-	41,8	2.089,8	963	3.053,0
6	TAMANSARI	-	-	-	1.841,7	-	-	-	151,4	-	157,7	2.150,7	1.300	3.451,0
7	BOYOLALI	285	-	285,00	760,5	-	-	-	-	56,0	-	816,5	1.524	2.625,0
8	MOJOSONGO	847	44	891,00	1.794,2	10,0	-	-	-	-	-	1.804,2	1.594	4.289,3
9	TERAS	1.359	-	1.359,00	462,6	-	-	-	-	-	-	462,6	1.166	2.988,0
10	SAWIT	1.229	-	1.229,00	24	1	-	-	-	2	15	42	436	1.706,6
11	BANYUDONO	1.488	2	1.490,00	131,0	8,0	-	-	-	-	42,0	181,0	867	2.538,0
12	SAMBI	764	1.396	2.160,00	638,8	55,2	-	-	-	-	54,0	747,9	1.741	4.649,0
13	NGEMPLAK	725	689	1.414,00	251,0	37,0	-	-	-	-	3,7	291,7	2.157	3.862,7
14	NOGOSARI	653	1.912	2.565,00	897,3	-	254,4	-	-	-	-	1.151,6	1.877	5.593,2
15	SIMO	1.138	980	2.118,00	1.136,0	32,0	84,0	-	-	-	-	1.252,0	1.466	4.836,0
16	KARANGGEDE	998	681	1.679,00	848,2	9,8	-	-	198,0	-	116,0	1.172,0	1.322	4.173,0
17	KLEGO	283	1.285	1.568,00	1.165,0	5,0	430,0	-	451,0	-	83,0	2.134,0	1.499	5.201,0
18	ANDONG	220	2.025	2.245,00	811,1	38,9	488,0	-	-	-	-	1.338,0	1.881	5.464,0
19	KEMUSU	-	503	503,00	1.164,4	-	673,9	-	3.503,5	-	774,7	6.116,5	1.524	8.143,3
20	WONOSEGORO	657	580	1.237,00	1.087,0	-	-	-	1.638,0	-	20,0	2.745,0	1.195	5.177,0
21	WONOSAMODRO	83	711	794,00	3.518,0	-	-	-	696,0	-	151,0	4.365,0	727	5.886,0
22	JUWANGI	53	331	384,00	1.050,6	-	-	-	5.286,0	-	182,6	6.519,2	1.099	8.002,3
	JUMLAH	11.305,00	11.162,00	22.467,00	29.743,5	196,8	2.889,3	-	14.833,9	58,0	1.641,5	49.363,0	29.680	101.510

Sumber: Dispartan Kabupaten Boyolali, 2024



Gambar II. 11 Persentase Pemanfaatan Ruang Kabupaten Boyolali  
Tahun 2012-2023



Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali 2012-2023

Data persentase pemanfaatan ruang Kabupaten Boyolali dari Tahun 2012-2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di setiap tahun. Persentase pemanfaatan ruang terendah terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 69,33%. Penurunan persentase pemanfaatan ruang terjadi pada Tahun 2018, 2021 dan 2022.

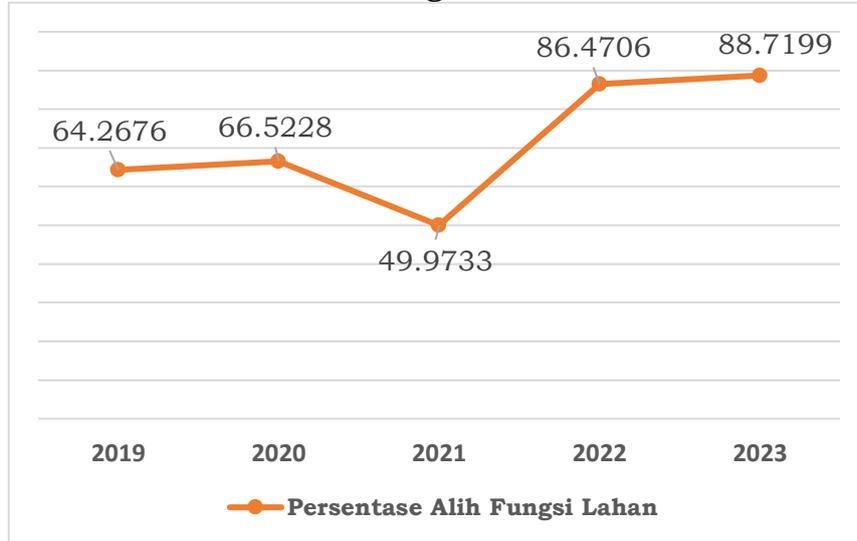
Persentase pemanfaatan ruang di Kabupaten Boyolali mengalami variasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan yang efektif dalam pemanfaatan lahan, pembangunan infrastruktur atau perubahan regulasi terkait tata ruang, dan perekonomian yang tidak stabil.

Pada Tahun 2023 persentase pemanfaatan ruang mengalami lonjakan yang cukup tinggi mencapai angka 97,00% setelah 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai tantangan, termasuk dampak ekonomi nasional atau sosial dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi proyek pembangunan dan penggunaan lahan. Persentase tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami peraturan terkait RTRW dan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta implementasi pemanfaatan ruang yang didorong oleh kebijakan strategis pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan dengan optimal. Keunggulan dari pemanfaatan ruang yang meningkat ini antara lain peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan melalui perencanaan yang berkelanjutan.





Gambar II. 12 Luasan Alih Fungsi Lahan Tahun 2019-2023 (Ha)



Sumber: BPN, 2024

Data luasan alih fungsi lahan di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi yang mencolok. Pada Tahun 2019, luas alih fungsi lahan tercatat sebesar 66,2676 ha, sedikit meningkat pada Tahun 2020 menjadi 66,5228 persen ha. Penurunan drastis terjadi pada Tahun 2021 dengan persentase hanya mencapai 49,9733 ha. Namun, pada Tahun 2022 terjadi lonjakan tajam hingga 86,4706 ha, dan peningkatan ini berlanjut pada Tahun 2023 dengan persentase mencapai 88,7199 ha.

Mengindikasikan adanya dinamika yang signifikan dalam alih fungsi lahan di Kabupaten Boyolali. Penurunan drastis pada Tahun 2021 disebabkan oleh kebijakan konservasi lahan yang lebih ketat atau pengaruh eksternal seperti pandemi COVID-19 yang memperlambat kegiatan ekonomi dan pembangunan. Lonjakan signifikan pada Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya dorongan kuat terhadap pengembangan lahan untuk keperluan perumahan, industri, atau infrastruktur. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lonjakan ini antara lain peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi lokal, serta perbaikan regulasi tata ruang yang mendukung alih fungsi lahan. Keunggulan dari alih fungsi lahan yang tinggi ini bisa termasuk peningkatan kapasitas ekonomi daerah, penyediaan fasilitas umum yang lebih baik, dan pengembangan wilayah yang lebih terstruktur dan terencana. Namun, penting juga untuk memperhatikan dampak negatif potensial seperti degradasi lingkungan dan hilangnya lahan pertanian produktif.

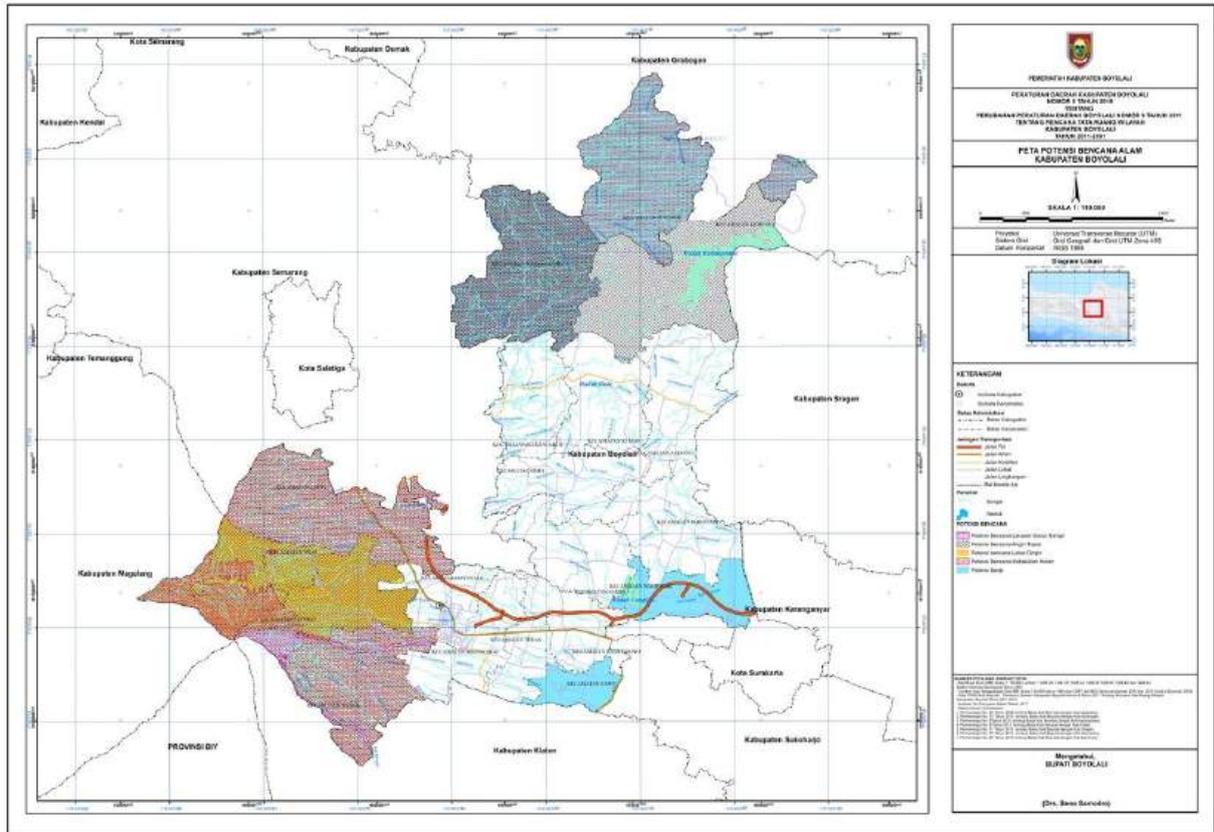
#### 2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam, sehingga memiliki kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Bencana alam yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Boyolali adalah banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan dan gempa bumi. Berikut adalah jenis bencana berdasarkan wilayah yang berpotensi.





Gambar II. 13 Peta Potensi Bencana



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Tabel II. 12 Kawasan Rawan Bencana

No	Bencana	Kawasan/Wilayah
1.	Banjir	Kecamatan Juwangi, Wonosamodro, Ngeplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, Simo, Sambu, dan Wonosegoro.
2.	Banjir Bandang	Kecamatan Selo, Gladagsari, Musuk, Cepogo, Ampel, Boyolali dan Mojosongo.
3.	Tanah longsor/Gerakan tanah	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Kemusu, Klego, Tamansari, Wonosamodro, Andong, Wonosegoro, dan Musuk.
4.	Letusan gunung berapi	Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gladagsari.
5.	Kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan Ampel, Selo, Musuk, Cepogo, Juwangi, Tamansari, dan Wonosegoro
6.	Angin Topan	Semua kecamatan di Boyolali
7.	Kekeringan	Kecamatan Musuk, Sambu, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Kemusu, Klego, Wonosamodro, Tamansari dan Juwangi.
8.	Gempa bumi	Semua kecamatan di Boyolali

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2023





Kabupaten Boyolali termasuk daerah yang memiliki risiko bencana alam sedang, kecuali kebakaran hutan dan lahan. Secara keseluruhan, potensi bencana alam pada Tahun 2023 yang mungkin terjadi di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

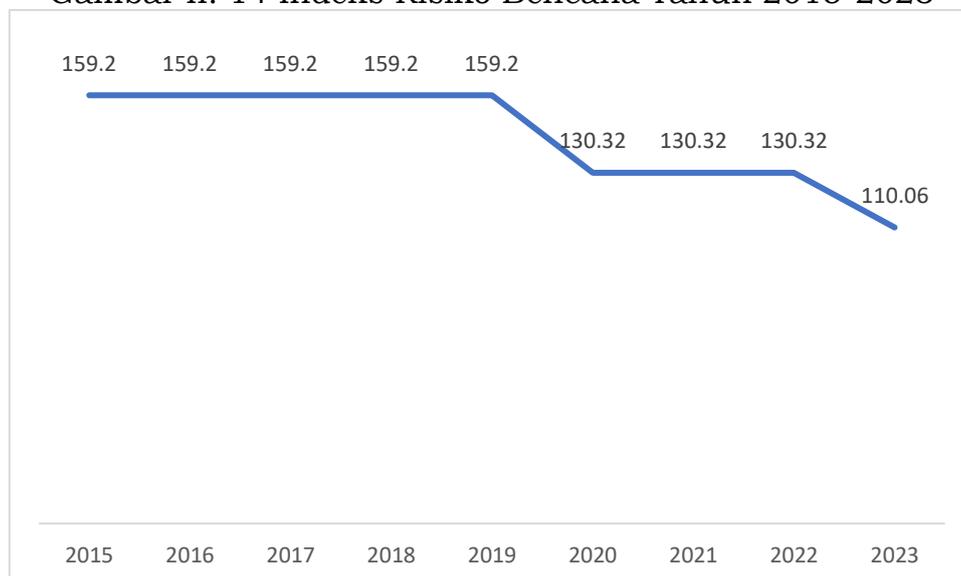
Tabel II. 13 Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Tahun 2023

Jenis Bencana	Skor	Kategori
Banjir	9,46	Sedang
Gempa Bumi	8,52	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	14,19	Tinggi
Cuaca Ekstrem	5,36	Sedang
Tanah Longsor	9,46	Sedang
Letusan Gunung Api	6,31	Sedang
Kekeringan	9,46	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2024

Diketahui indeks risiko per ancaman bencana yang paling tinggi di Kabupaten Boyolali adalah kebakaran hutan dan lahan dengan skor sebesar 14,19. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tinggi terdapat di 151 dari 267 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Boyolali. Luas wilayah terdampak risiko bencana kebakaran hutan dan lahan kelas sedang mencapai 34.014,8 ha. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Boyolali berada pada kelas risiko tinggi. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Boyolali, disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan membuat keadaan tanaman menjadi cukup kering sehingga sangat mudah terbakar dan sebagian besar kejadian terbakarnya lahan ini di karenakan aktivitas manusia yang sengaja membakar lahan untuk bercocok tanam atau menghilangkan rumput liar. Salah satu rekomendasi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan adalah peningkatan sosialisasi pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan sehingga masyarakat dalam membuka lahannya tidak langsung melakukan pembakaran, pengawasan oleh petugas harus lebih ditingkatkan pada saat kekeringan terjadi pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Gambar II. 14 Indeks Risiko Bencana Tahun 2015-2023



Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2024





Data indeks risiko bencana di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2015 -2019 memiliki nilai indeks risiko bencana sebesar 159,2. Kemudian turun menjadi 130,32 pada Tahun 2020 dan stabil pada angka yang sama hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2023, indeks ini menurun lebih lanjut menjadi 110,06. Penurunan indeks risiko bencana ini mencerminkan peningkatan efektivitas dalam manajemen risiko bencana, termasuk perbaikan dalam sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas respon bencana, serta penguatan infrastruktur tahan bencana. Faktor lainnya mencakup edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana dan peningkatan kerja sama antar lembaga terkait. Keunggulan dari penurunan indeks risiko bencana ini adalah peningkatan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kerugian ekonomi akibat bencana, yang secara keseluruhan meningkatkan ketahanan dan daya saing daerah.

Data indeks ketahanan Kabupaten Boyolali menunjukkan konsistensi dalam tiga dari lima tahun yang tercatat, dengan nilai indeks sebesar 82. Konsistensi nilai indeks ketahanan ini mengindikasikan stabilitas dalam kemampuan daerah untuk menghadapi dan pulih dari berbagai tantangan, baik itu bencana alam, perubahan ekonomi, atau krisis sosial. Faktor-faktor yang mendukung ketahanan ini mencakup kebijakan pemerintah yang efektif, infrastruktur yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko. Keunggulan dari ketahanan daerah yang stabil ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan aset lokal, serta daya tarik investasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 14 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah	NA	82	82	NA	82

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2024

#### 2.1.1.10 Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Boyolali harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH merupakan indikasi awal yang dapat menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu.

Nilai IKLH Kabupaten Boyolali dibentuk dari 3 (tiga) parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL). Nilai IKLH Kabupaten Boyolali selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel II. 15 IKLH Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2023

TAHUN	Kategori			
	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2018	52,35	84,32	48,63	60,45
2019	45	87,59	51,6	60,42
2020	58,57	87,35	40,99	60,17
2021	52,5	88,17	38,71	63,93
2022	48,42	84,18	38,71	60,77
2023	50	82,55	41,82	61,39

Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Boyolali, 2024

Dari Tahun 2018-2023, Kabupaten Boyolali konstan memperoleh IKLH sedang dengan nilai yang berkisar antara 60,17-63,93. Nilai tertinggi diperoleh pada Tahun 2021 yaitu 63,93 dan nilai IKLH terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu 60,17. Dari data tabel II.15 diketahui bahwa kualitas udara di Kabupaten Boyolali tergolong baik. Berbanding terbalik dengan tutupan lahan dengan nilai <50 sehingga masih dikategorikan sebagai IKTL yang kurang.

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu melakukan sejumlah program untuk perbaikan kualitas air. Berdasarkan data Tabel II.15, Kabupaten Boyolali dari Tahun 2018-2023 belum pernah memperoleh kategori kualitas air yang baik. Dari data tersebut, nilai IKA tertinggi yaitu pada Tahun 2020 yaitu 58,57 dengan kategori sedang dan yang paling rendah pada Tahun 2019 yaitu 45 dengan kategori kurang.

#### 2.1.1.11 Ketahanan Pangan

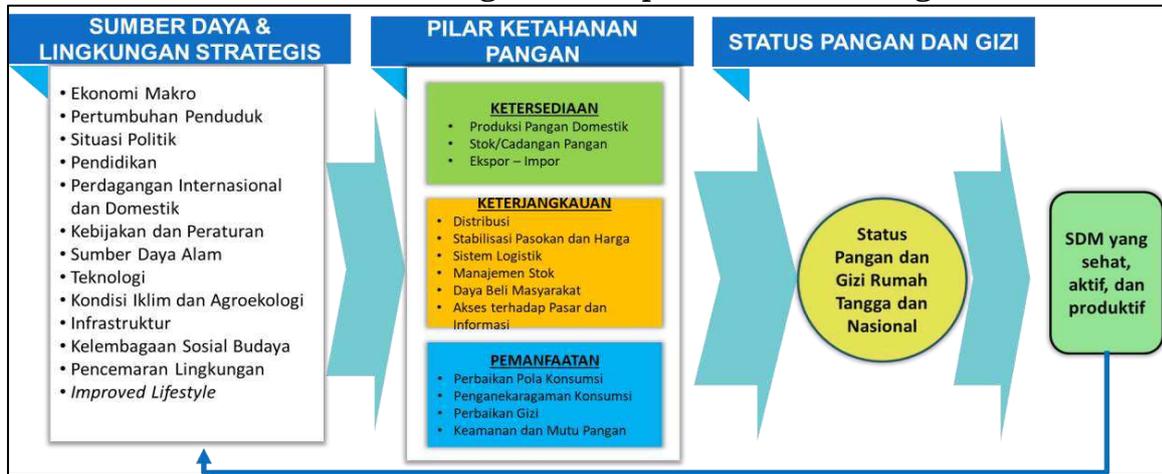
Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.





Gambar II. 15 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023, Badan Pangan Nasional, 2024

IKP Kabupaten Boyolali Tahun 2021 mencapai 85,14, Tahun 2022 mencapai 85,26 dan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 87,31. Nilai tertinggi pada indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah pada aspek “Ketersediaan” (91,81) yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Boyolali adalah sangat baik. Sementara itu aspek “Keterjangkauan” memiliki nilai terendah (85,24) diantara aspek lainnya. Dengan demikian pada aspek “Keterjangkauan”, Distribusi, Stabilisasi Pasokan Pangan, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat dan akses terhadap pasar dan informasi perlu ditingkatkan. Permasalahan ini perlu penanganan yang terintegrasi oleh semua *stakeholder* baik pemerintah, petani produsen, masyarakat konsumen, swasta/industri pangan, lembaga penelitian/pendidikan maupun organisasi non pemerintah, karena hal ini memiliki dimensi yang cukup luas. Secara nasional, dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, pada Tahun 2023 IKP Kabupaten Boyolali naik dari peringkat 34 menjadi 24 dengan nilai indeks 87,31.

Tabel II. 16 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	80,36	83,62	85,35	85,14	85,26	87,31

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan 2023, Badan Pangan Nasional, 2024

### 2.1.1.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### a. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Daya dukung air merupakan kemampuan suatu lingkungan atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan air bagi populasi (penduduk dan kegiatan budidaya di dalamnya) dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan sumber daya air. Status daya dukung air dihitung dengan menggunakan pendekatan ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten Boyolali. Perhitungan Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Boyolali merujuk pada Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020.





Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

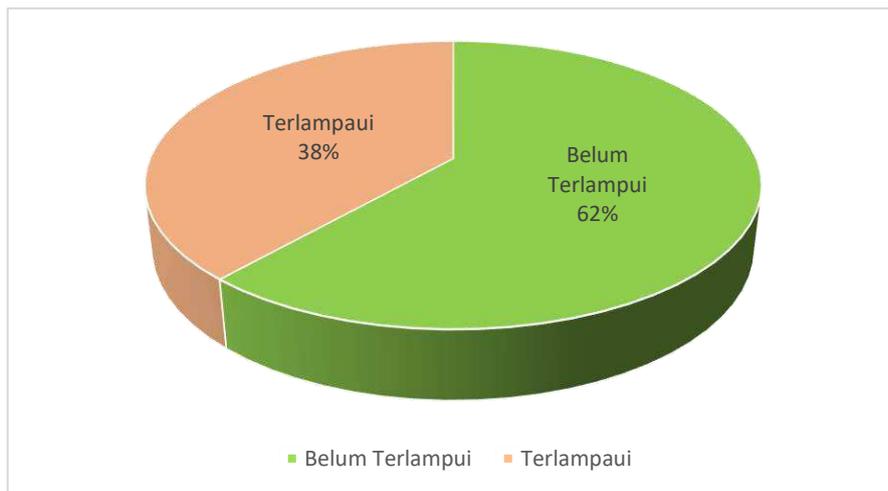
- Bila  $SA > DA$ , daya dukung air dinyatakan tidak terlampaui.
- Bila  $SA < DA$ , daya dukung air dinyatakan terlampaui.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa:

a. Status Daya Dukung Air Tahun 2022

SA (1.204.557.993 m<sup>3</sup>/tahun) < DA, (1.227.422.736,80 m<sup>3</sup>/tahun), hal ini berarti bahwa daya dukung air Tahun 2022 dinyatakan terlampaui.

Gambar II. 16 Persentase D3TLH Air



Sumber: RPPLH Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2053

Walaupun secara umum status terlampaui dan tidak terlampaui tersebar secara merata namun yang perlu mendapat perhatian adalah Kecamatan Juwangi, Kemusu dan Wonosegoro yang kondisi wilayahnya memiliki status air terlampauinya cukup besar. Secara rinci, sebaran luas kecamatan berdasarkan status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel II. 17 Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2022 (Ha)

No	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui
1	Ampel	2.659,02	197,79
2	Andong	4.134,23	1.037,55
3	Banyudono	1.904,94	621,37
4	Boyolali	2.823,23	105,00
5	Cepogo	5.048,91	297,21
6	Gladagsari	5.717,84	7,52
7	Juwangi	2.447,30	6.361,64
8	Karanggede	3.828,27	454,88
9	Kemusu	5.636,90	1.982,43
10	Klego	4.613,91	657,19
11	Mojosongo	3.562,21	417,26
12	Musuk	3.341,37	288,86
13	Ngemplak	2.653,79	729,55
14	Nogosari	3.809,77	1.222,95
15	Sambi	4.133,04	688,61
16	Sawit	1.126,38	558,63
17	Selo	5.534,07	293,04
18	Simo	3.978,98	845,92

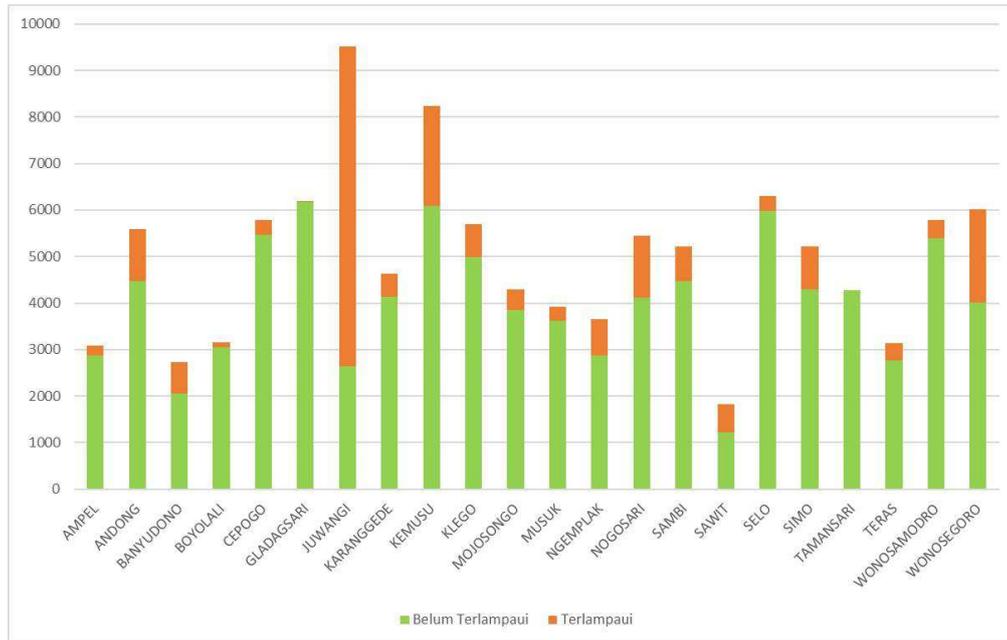




No	Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui
19	Tamansari	3.959,65	-
20	Teras	2.560,34	344,43
21	Wonosamodro	4.991,47	365,88
22	Wonosegoro	3.710,80	1.856,08
Grand Total		82.176,42	19.333,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

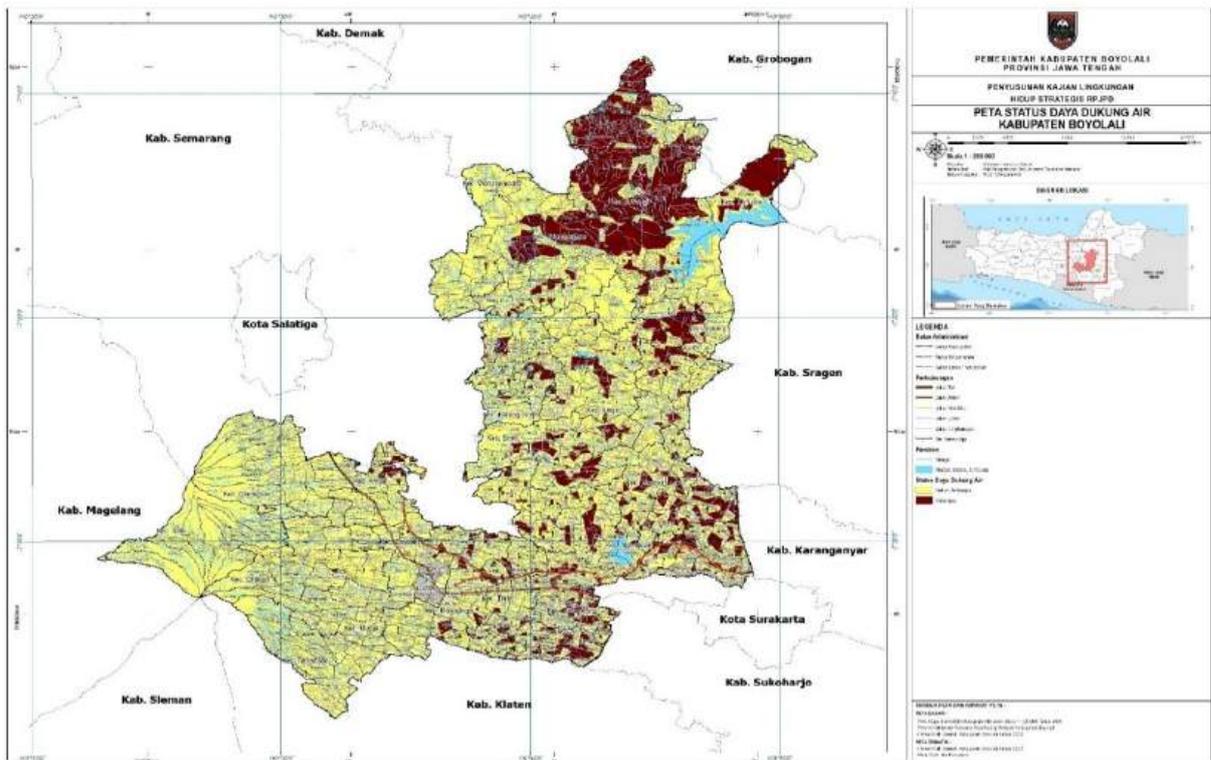
Gambar II. 17 Persentase Luasan Kecamatan Berdasarkan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Secara spasial, status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar II. 18 Peta Status D3TLH Air



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023





Posisi sebagai hulu dari DAS dengan dominasi Status Airnya terlampaui tentu sangat rawan, mengingat kawasan hulu Kabupaten Boyolali Aliran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Sungai (DAS) menyumbang suplai air ke kawasan bagian bawah atau bagian hilir. Peran vital ini sering disebut sebagai menara air bagi wilayah di bawahnya atau bertopografi lebih rendah. Oleh karena itu hal-hal yang terkait penyediaan air menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Selain berpengaruh terhadap DAS, Status Daya Dukung dan D3TLH Air di Kabupaten Boyolali juga mempengaruhi Cekungan Air Tanah yang ada. Di Kabupaten Boyolali terdapat 3 CAT, yaitu CAT Karanganyar-Boyolali, CAT Magelang-Temanggung dan CAT Salatiga. Pengaruhnya adalah terhadap keberlangsungan CAT sebagai cadangan (reserve) air.

Untuk perhitungan status D3TLH dilakukan dengan metode perhitungan status air menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Rumus yang digunakan untuk menghitung ketersediaan air adalah sebagai berikut:

$$C = \sum_{k=0}^n (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$S_A = 10 \times C \times R \times A$$

Dimana,

$S_A$  = Ketersediaan air

C = Koefisien limpasan tertimbang

R = Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun)

A = Luas Wilayah (ha)

10 = Faktor konversi dari mm.ha menjadi  $m^3$

Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air adalah

$$D_A = N \times KHL_A$$

Dimana,

DA = Total kebutuhan air ( $m^3$ / tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLA = Kebutuhan air untuk hidup layak

= 1600  $m^3$  air/kapita/tahun

= 2 x 800  $m^3$  air/kapita/tahun, dimana 800  $m^3$  air/kapita/tahun merupakan kebutuhan air untuk keperluan domestik dan untuk menghasilkan pangan

Status Air =  $S_A$  (Ketersediaan Air) – DA (Kebutuhan Air)

Status Air Positif maka berarti Belum Terlampaui

Status Air Negatif maka berarti Sudah Terlampaui

Berdasar pada data penggunaan lahan eksisting diperoleh informasi nilai koefisien limpasan tertimbang (C) di Kabupaten Boyolali tercatat sebesar 0,3710. Selengkapnya perhitungan koefisien limpasan tertimbang (C) sebagai berikut:





Tabel II. 18 Penilaian Koefisien *Run Off* Tertimbang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Nilai C	Luas x Nilai C	Nilai C Tertimbang (Total Nilai C/Total Luas)
1	Embung	1,56	0	0	0,3710
2	Hutan	3424,61	0,1	342,461	
3	Hutan Jati	11895,69	0,18	2141,2242	
4	Industri	246,4	0,9	221,76	
5	Kebun	11172,55	0,3	3351,765	
6	Kebun Campuran	1514,17	0,3	454,251	
7	Perikanan	29,7	0	0	
8	Permukiman	24374,24	0,7	17061,968	
9	Sawah Irigasi	20504,03	0,3	6151,209	
10	Sawah Tadah Hujan	1811,65	0,3	543,495	
11	Semak	216,07	0,2	43,214	
12	Sungai	716,55	0	0	
13	Tambang	5,15	0,4	2,06	
14	Tegalan	23781,86	0,3	7134,558	
15	Transportasi	230,98	0,9	207,882	
16	Waduk	1585,01	0	0	
Jumlah Total		101510,22		37655,8472	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan rerata curah hujan yang ada di stasiun-stasiun pengukuran curah hujan tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.959 mm/tahun. Dengan demikian maka diperoleh Ketersediaan Air di Kabupaten Boyolali sebesar 1.204.557.993 m<sup>3</sup>/tahun. Untuk kebutuhan air didasarkan pada jumlah penduduk, dimana kebutuhan air yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 ini adalah kebutuhan air untuk domestik dan kebutuhan air untuk memproduksi pangan, dimana diasumsikan dalam Peraturan Menteri tersebut kebutuhan domestik penduduk adalah 800 m<sup>3</sup> per kapita/tahun dan kebutuhan lain termasuk untuk memproduksi pangan juga diasumsikan sama sehingga per penduduk dibutuhkan air sebesar 1.600 m<sup>3</sup>/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa penduduk pada *baseline data* Tahun 2022 adalah sebanyak 1.079.952 jiwa. Dengan demikian maka diperoleh hasil bahwa kebutuhan air penduduk di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2022 sebesar 1.227.422.736,80 m<sup>3</sup> dengan status ketersediaan air terlampaui.

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Boyolali saat ini sudah terlampaui. Adanya kondisi tersebut perlu dilakukan beberapa skenario dalam meningkatkan kondisi daya dukung air di Kabupaten Boyolali. Selengkapnya upaya peningkatan daya dukung air sebagai berikut:

1. Peningkatan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peningkatan perlindungan kawasan sempadan sungai, waduk dan mata air;
3. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai maupun waduk;
4. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan *Higiene* Sanitasi Sarana Air Minum;
5. Pengembangan sumur resapan dan biopori;





6. Revitalisasi mata air melalui kegiatan penghijauan *recharge area*;
7. Pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan;
8. Penyediaan infrastruktur air bersih yang adaptif iklim;
9. Peningkatan peran kelembagaan sumber daya air;
10. Pengadaan tampungan-tampungan air misalnya dalam bentuk kolam retensi;
11. Pembangunan sumur resapan dan biopori baru;
12. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai fungsi ekologis resapan air;
13. Penghijauan sempadan sungai dan mata air;
14. Pemanenan air hujan melalui pengembangan embung dan penampung air lainnya;
15. Pengendalian pemanfaatan air tanah;
16. Pemberian insentif penghematan air pada sektor pertanian/perkebunan dan perindustrian; dan
17. Terinternalisasinya Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam RTRW.

Adapun kondisi kualitas air di Kabupaten Boyolali berdasarkan nilai IKA termasuk dalam kategori kurang pada Tahun 2022. Untuk meningkatkan kualitas daya tampung air yang ada di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah;
3. Pengoptimalan kinerja pengelolaan air limbah;
4. Pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap perusahaan;
6. Pengoptimalan kinerja IPAL bagi rumah tangga dan industri kecil di kawasan perkotaan;
7. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
8. Pemeliharaan saluran drainase kota dan lingkungan;
9. Pembangunan IPAL komunal untuk mengolah limbah cair rumah tangga;
10. Pengembangan kinerja pengelolaan air limbah;
11. Pengembangan serta pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya;
12. Penindakan kepada pihak yang mencemari sumber air;
13. Pengendalian kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran air melalui upaya pengendalian tata ruang, khususnya kegiatan industri;
14. Monitoring dan evaluasi kualitas air secara berkala;
15. Pembangunan IPAL pada setiap perusahaan yang memiliki potensi limbah;
16. Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas IPAL pada setiap perusahaan; dan
17. Sosialisasi peraturan terkait pengelolaan limbah kepada pelaku usaha.

**b. Daya Dukung Pangan**

Status daya dukung pangan Kabupaten Boyolali, dilakukan melalui





pendekatan analisis perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam hal ini kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan daya dukung pangan ditentukan dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan pangan serta daya dukung lahan pertanian padi.

1. Perhitungan Kebutuhan (*Demand*)

- a. Menghitung jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2022.

Jumlah penduduk Tahun 2022 : 1.079.952 jiwa

- b. Menentukan indeks konsumsi beras penduduk pertahun.

Dalam hal ini, indeks konsumsi beras per tahun ditentukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan kepada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebesar 124,89 kg/kap/tahun.

- c. Menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk hasil proyeksi dan indeks konsumsi beras penduduk per tahun dengan cara:

Kebutuhan beras total = penduduk hasil proyeksi x indeks konsumsi beras  
Hasil perhitungan kebutuhan beras Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 19 Kebutuhan Beras

Tahun	2022
Jumlah Penduduk	1.079.952
Indeks Konsumsi Beras (Kg/Kap/Thn)*)	124,89
Kebutuhan Beras (Ton)	134.875,21
Kebutuhan Padi/ GKG (Ton)	77.553
Kebutuhan Luas Panen (Ha)	444.770

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Keterangan : \*) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian, Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan kepada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebesar 124,89 kg/kap/tahun

2. Perhitungan Ketersediaan (*Supply*)

- a. Produksi padi di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan:

Total produksi padi (ton) = Luas lahan padi sawah (Ha) x IP x produktivitas padi (ton/ha)

Catatan: untuk menghitung IP (Indeks penanaman padi) digunakan rumus:

IP direncanakan 200 (dalam 1 tahun direncanakan panen sebanyak 2 kali)

Produktivitas padi (Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2023) : 5,735 ton/Ha

- b. Produksi beras di Kabupaten Boyolali dengan pendekatan:

Total produksi beras (Ton) = Total Produksi Padi / GKG (Ton) x Indeks konversi padi ke beras

Catatan: Indeks Konversi padi ke beras ( 1 Kg GKG = 0,575 Kg Beras)





Tabel II. 20 Produksi Beras

Tahun	2022
Luas Baku Sawah (ha)	66.788,98
Produksi Padi/ GKG (Ton)	768.897
Faktor Konversi Beras (Kg)*	0,575
Produksi Beras (Ton)	442.116

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

c. Tingkat produktivitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras penduduk di Kabupaten Boyolali:

- Jika total *supply* < 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.
- Jika total *supply* = 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.
- Jika total *supply* > 342 gr/org/hari atau 0,12 ton/orang/tahun, maka dapat dikatakan Kabupaten Boyolali mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk.

Produktivitas lahan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 21 Produktivitas Lahan

Tahun	2022
Jumlah Penduduk	1.079.952
Produksi Beras (Ton)	442.116
Konsumsi fisik beras minimum / tahun (Ton)	0,12
<i>Supply</i> beras (Ton)	0,41
Keterangan	Surplus

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui bahwa produktivitas lahan pertanian untuk pemenuhan pangan (beras) mempunyai nilai > 0,12 ton/orang/tahun yang berarti bahwa Kabupaten Boyolali mengalami surplus dalam pemenuhan pangan beras penduduk. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Boyolali masih mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya.

### 3. Daya dukung lahan pertanian padi di Kabupaten Boyolali

Perhitungan daya dukung lahan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$a = x / k$$

Dimana :

a = daya dukung lahan

x = luas lahan yang tersedia untuk budidaya tanaman pangan/padi (x dicari dengan menggunakan rumus)

x = luas panen/jumlah penduduk

Luas panen Tahun 2022 menggunakan luas panen Tahun 2022 seluas 51.248 ha.

k = luas lahan yang diperlukan untuk swasembada pangan. (k dicari dengan rumus)

k = konsumsi fisik minimal beras/produksi beras rata-rata

Konsumsi Fisik Minimal (KFM) dihitung dari kebutuhan beras sebesar 342 gr/orang/hari atau setara dengan 124,89 kg/org/tahun. Produksi beras rata-rata/ha dikonversikan dari padi ke beras sebesar 0,575. Nilai a,





dipergunakan sebagai indikator kemampuan lahan tanaman padi terhadap jumlah penduduk di satu wilayah.

Kriteria nilai  $\alpha$ , dimasukkan dalam standar evaluasi sebagai berikut:

- $\alpha > 1$ , berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.
- $\alpha < 1$ , berarti wilayah tersebut tidak mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya telah melampaui jumlah penduduk optimal.
- $\alpha = 1$ , berarti wilayah tersebut memiliki daya dukung yang optimal.

Perhitungan daya dukung lahan sawah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 22 Daya Dukung Lahan Sawah

Tahun	2022
Luas Lahan yang tersedia (X)	0,047
Luas Lahan yang diperlukan (k)	0,02
Daya Dukung Lahan ( $\alpha$ )	2,27
Keterangan	$\alpha > 1$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Dari perhitungan posisi daya dukung lahan sawah pada Tahun 2022, daya dukung lahan sawah mempunyai nilai  $\alpha > 1$ . Hal ini berarti bahwa Kabupaten Boyolali masih mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya belum melampaui jumlah penduduk optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan pemenuhan kebutuhan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan sebagai berikut:

1. Pengujian mutu benih;
2. Peningkatan mutu benih;
3. Peningkatan infrastruktur pertanian dalam mendukung kegiatan budidaya pertanian;
4. Pembangunan prasarana pendukung pertanian;
5. Pengawasan perubahan pemanfaatan ruang pada pertanian;
6. Pengendalian OPT;
7. Peningkatan produktivitas pertanian;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
9. Peningkatan program intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi pertanian;
10. Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
11. Sosialisasi terkait sistem kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
12. Peningkatan program diversifikasi pangan;
13. Pemberian insentif disinsentif bagi petani;
14. Penanganan kerawanan pangan;
15. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; dan
16. Peningkatan konsumsi pangan.

### c. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan di Kabupaten Boyolali berdasarkan kondisi nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada kategori kurang yang merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu dengan angka rentang  $25 \leq x < 50$ . Pada Tahun 2022 memiliki nilai IKTL sebesar 38,71. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan pada Tahun 2021. Adapun nilai IKTL pada Tahun 2017 sebesar 71,53, Tahun 2018 sebesar 48,63, Tahun 2019 sebesar





51,60 dan Tahun 2020 sebesar 40,99. Upaya dalam peningkatan daya dukung lahan sebagai berikut:

1. Penghijauan lingkungan, penghijauan RTH serta pemeliharaan dan penataan RTH;
2. Optimalisasi fungsi RTH, jalur hijau dan hutan;
3. Pembangunan RTH publik;
4. Pengendalian alih fungsi lahan;
5. Rehabilitasi pada kawasan lahan kritis; dan
6. Melaksanakan penyusunan peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

d. Pengelolaan Persampahan

Potensi timbulan sampah Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan 1,01% pada Tahun 2020-2021, dan kenaikan 0,59% pada Tahun 2021-2022, serta kenaikan 1,5% pada Tahun 2022-2023. Upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah juga mengalami peningkatan, pada Tahun 2022 sebesar 29.914,85 ton meningkat menjadi 31.529,58 ton pada Tahun 2023. Kegiatan penanganan sampah juga mengalami peningkatan, pada Tahun 2022 sebesar 30.571,31 ton meningkat menjadi 32.076,94 ton pada Tahun 2023.

**Tabel II. 23 Daya Kondisi Persampahan Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023**

KETERANGAN		2019	2020	2021	2022	2023
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (ton/tahun)	97.052,73	105.094,61	106.159,34	106.781,29	108.373,66
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH (ton/tahun)	25.079,58	24.900,16	26.628,17	29.914,85	31.529,58
	Persentase pengurangan sampah (%)	25,84	23,69	25,08	28,02	29,09
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (ton/tahun)	25.398,63	28.777,69	31.410,44	30.571,31	32.076,94
	Persentase penanganan sampah (%)	26,17	27,38	29,59	28,63	29,60
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III) (ton/tahun)	50.478,20	53.677,86	58.038,61	60.486,16	63.606,52
	Persentase sampah terkelola (%)	52,01	51,08	54,67	56,64	58,69
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA	46.575,52	51.416,75	48.120,73	46.295,13	44.767,14
	Persentase sampah tidak dikelola (%)	47,99	48,92	45,33	43,36	41,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali, 2023

Sampah yang belum terkelola inilah yang keberadaannya menjadi permasalahan lingkungan hidup karena perlakuan masyarakat terhadap sampah yang tidak tepat diantaranya dibuang sembarangan dan dibakar. Saat ini masih didapati tempat pembuangan sampah ilegal yang umumnya berada di pinggir sungai, dibawah jembatan, atau di lahan kosong yang tak dikelola.

Persampahan menjadi isu lingkungan hidup yang paling mendapat perhatian masyarakat karena dampak yang ditimbulkan diantaranya:

- a. Sampah yang tidak terkelola menumpuk atau bercecer di sembarang tempat menurunkan nilai keindahan dan kenyamanan (bau).
- b. Sampah menumpuk di tempat yang tidak semestinya berpotensi mencemari tanah dan air tanah oleh lindi.
- c. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyebabkan tersumbatnya saluran drainase dan berpotensi menimbulkan banjir.





d. Rendahnya aktivitas pengurangan sampah di tingkat masyarakat menyebabkan beban pemrosesan sampah di TPA semakin berat sementara usia TPA terbatas.

Upaya untuk meningkatkan penanganan sampah dilakukan, melalui:

1. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Bank sampah, dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R);
3. Peningkatan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah;
4. Mewujudkan pengelolaan sampah mandiri tingkat desa;
5. Mewujudkan Program Satu Desa Satu TPS 3R;
6. Optimalisasi pemrosesan sampah di TPA dalam rangka memperpanjang usia TPA;
7. Perbaiki sistem pengelolaan sampah antara lain dengan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem *sanitary landfill* dan pengembangan pengolahan sampah dengan teknologi modern; dan
8. Perluasan lahan TPA.

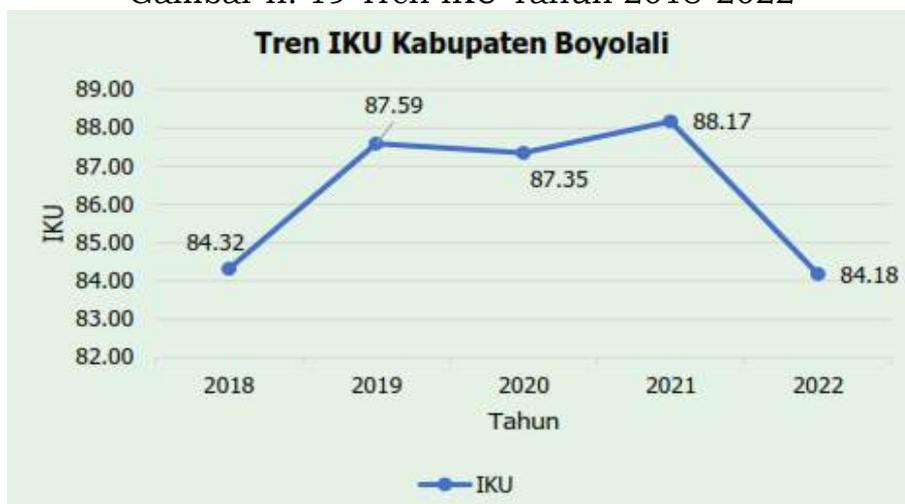
Adapun upaya untuk meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui:

1. Optimalisasi kegiatan pengolahan sampah dari sumber sampah melalui pengomposan dan daur ulang;
2. Sosialisasi pengurangan barang sekali pakai;
3. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; dan
4. Peningkatan dan pengembangan bank sampah.

e. Daya Tampung Udara dan Gas Rumah Kaca (GRK)

Kondisi daya tampung udara di Kabupaten Boyolali berdasarkan nilai IKU masih berada pada kategori baik. Nilai IKU pada Tahun 2022 sebesar 84,18. Tren IKU Kabupaten Boyolali 5 (lima) tahun terakhir mulai Tahun 2018 hingga Tahun 2022 cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif.

Gambar II. 19 Tren IKU Tahun 2018-2022



Sumber: IKPLHD Kabupaten Boyolali Tahun 2022

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi kualitas udara di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

1. Pengembangan pengolahan limbah ternak dan pemanfaatan biogas yang ditimbulkan;





2. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (gas dan *biofuel*) sebagai pengganti bahan bakar fosil;
3. Pengendalian dan optimalisasi pemakaian pupuk dan pestisida;
4. Mengembangkan energi yang ramah lingkungan, misalnya biogas dalam kegiatan rumah tangga dan industri;
5. Mewajibkan setiap industri yang menghasilkan polutan untuk melakukan pengelolaan terhadap gas buang sebelum dilepas di udara; dan
6. Pengenalan dan penerapan sistem pengolahan tanah yang meminimalkan emisi GRK.

### 2.1.2 Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu.

Tabel II. 24 Kependudukan Tahun 2005-2023

Indikator	Tahun				
	2005	2010	2015	2020	2023
Jumlah Penduduk	941.624	953.839	957.913	1.062.713	1.090.129
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,22	0,27	-0,96	0,39	-
Kepadatan Penduduk	927,67	940,00	944,00	1.047,00	1.008,51
Rasio Penduduk	95,6	96,23	97,01	101,3	101,00

Sumber: Boyolali Dalam Angka, 2005-2024

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2023, jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2005, jumlah penduduk tercatat sebesar 941.624 jiwa, dan terus meningkat menjadi 953.839 jiwa pada Tahun 2010, 957.913 jiwa pada Tahun 2015, 1.062.713 jiwa pada Tahun 2020, hingga mencapai 1.090.129 jiwa pada Tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang cukup konsisten selama periode tersebut.

Menurut data Tahun 2023, Kabupaten Boyolali memiliki jumlah penduduk 1.090.129 jiwa yang tersebar di 22 (dua puluh dua) kecamatan, sebagai berikut:

Tabel II. 25 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase
1	Selo	30.142	2,76%
2	Ampel	41.445	3,80%
3	Gladagsari	43.249	3,97%
4	Cepogo	61.054	5,60%



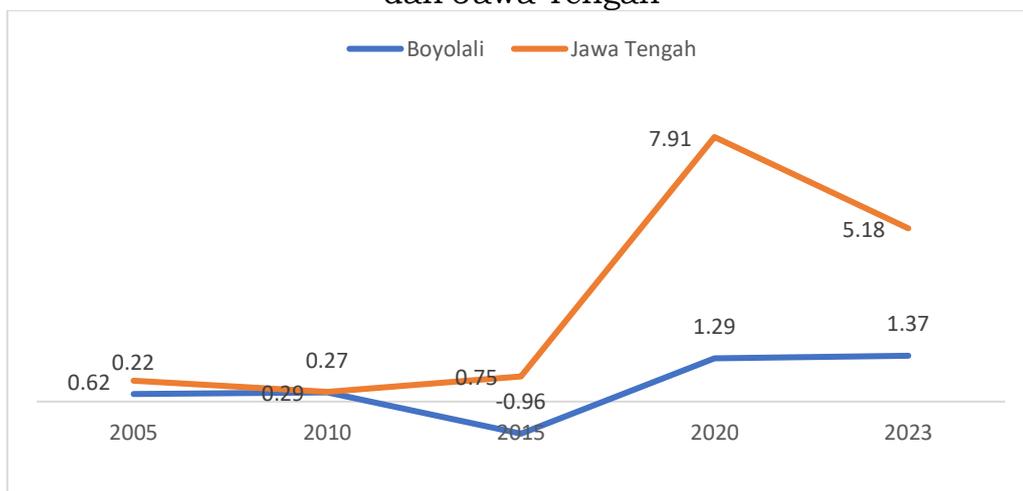


No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase
5	Musuk	32.649	2,99%
6	Tamansari	29.376	2,69%
7	Boyolali	74.150	6,80%
8	Mojosongo	61.345	5,63%
9	Teras	53.524	4,91%
10	Sawit	32.622	2,99%
11	Banyudono	54.074	4,96%
12	Sambi	48.553	4,45%
13	Ngemplak	99.782	9,15%
14	Nogosari	74.298	6,82%
15	Simo	50.836	4,66%
16	Karanggede	47.906	4,39%
17	Klego	49.891	4,58%
18	Andong	62.535	5,74%
19	Kemususu	35.197	3,23%
20	Wonosegoro	39.564	3,63%
21	Wonosamodro	31.958	2,93%
22	Juwangi	35.979	3,30%
Jumlah		1.090.129	100,00%

Sumber: Boyolali Dalam Angka, 2024

Jumlah populasi penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 99.782 jiwa atau 9,15% dari total penduduk Kabupaten Boyolali. Jumlah populasi penduduk terendah berada di Kecamatan Tamansari dengan jumlah penduduk 29.376 jiwa atau 2,69% dari total penduduk Kabupaten Boyolali.

Gambar II. 20 Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah



Sumber: BPS Jawa Tengah 2024, data diolah.

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,27%, namun pada Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar -0,96%, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk pada periode tersebut. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,29% pada Tahun 2020 dan 1,37% pada Tahun 2023, mencerminkan kembalinya tren





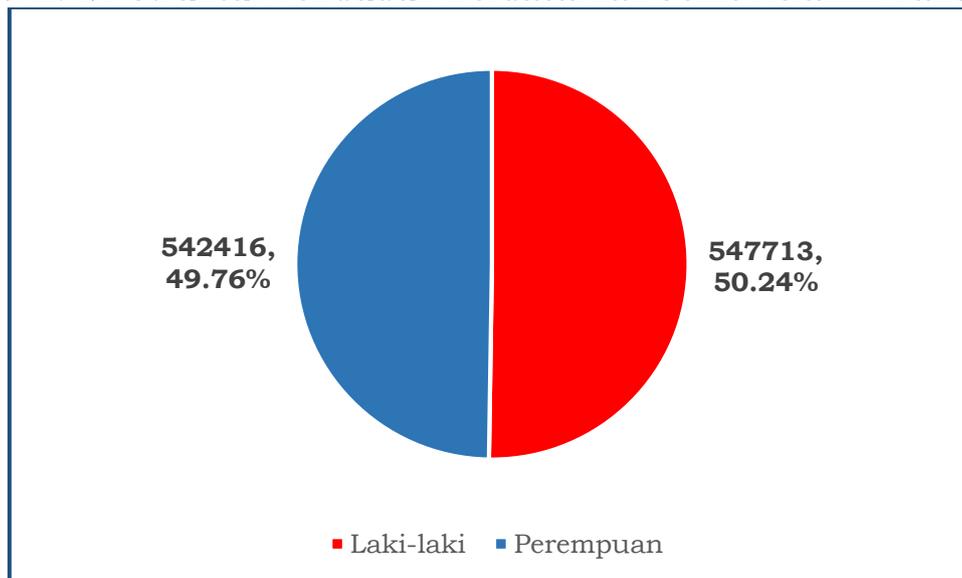
positif dalam pertumbuhan penduduk.

Kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan selama periode yang sama. Pada Tahun 2005, kepadatan penduduk tercatat sebesar 927,67 jiwa per km<sup>2</sup>, meningkat menjadi 940,00 jiwa per km<sup>2</sup> pada Tahun 2010, dan terus meningkat hingga mencapai 944,00 jiwa per km<sup>2</sup> pada Tahun 2015. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebesar 1.047,00 jiwa per km<sup>2</sup>, dan sedikit menurun menjadi 1.008,51 jiwa per km<sup>2</sup> pada Tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya jumlah penduduk dalam wilayah yang sama, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Rasio penduduk juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2005, rasio penduduk tercatat sebesar 95,6, meningkat menjadi 96,23 pada Tahun 2010, dan 97,01 pada Tahun 2015. Pada Tahun 2020, rasio penduduk meningkat tajam menjadi 101,3, dan sedikit menurun menjadi 101,00 pada Tahun 2023. Peningkatan rasio penduduk ini dapat mencerminkan perubahan struktur demografis, termasuk peningkatan jumlah penduduk usia produktif, yang dapat berdampak positif pada perekonomian daerah jika dikelola dengan baik.

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 adalah sebesar 101,00 yang berarti dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Boyolali terdapat 101 penduduk laki-laki dengan jumlah absolut penduduk laki-laki sebanyak 547.713 jiwa (50,24%) dan penduduk perempuan sebanyak 542.416 jiwa (49,76%).

Gambar II. 21 Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Kondisi demografi juga dapat dilihat dari sisi struktur penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 81.986 jiwa, diikuti kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 81.593 jiwa, dan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 81.423 jiwa. Tabel jumlah penduduk menunjukkan bahwa secara keseluruhan distribusi penduduk Kabupaten Boyolali hampir merata di semua umur dengan kecenderungan pada usia kelompok muda dan produktif.





Banyaknya jumlah populasi penduduk usia 0-14 menunjukkan penduduk Kabupaten Boyolali memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua (usia 65-75+).

Tabel II. 26 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	41.737	40.249	81.986
5-9	40.193	38.273	78.466
10-14	40.696	38.720	79.416
15-19	41.918	39.505	81.423
20-24	42.022	39.571	81.593
25-29	41.678	39.629	81.307
30-34	40.172	39.715	79.887
35-39	40.492	39.521	80.013
40-44	40.072	38.396	78.468
45-49	37.212	36.803	74.015
50-54	34.664	34.801	69.465
55-59	30.825	32.467	63.292
60-64	26.274	27.521	53.795
65-69	20.905	21.959	42.864
70-74	14.306	16.063	30.369
75+	14.547	19.223	33.770
Kabupaten Boyolali	547.713	542.416	1.090.129

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 202

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Kondisi ini juga sering disebut sebagai *population boom*. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) produktif akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 (lima belas) tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.





## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, (SDM), serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada subbab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2023.

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

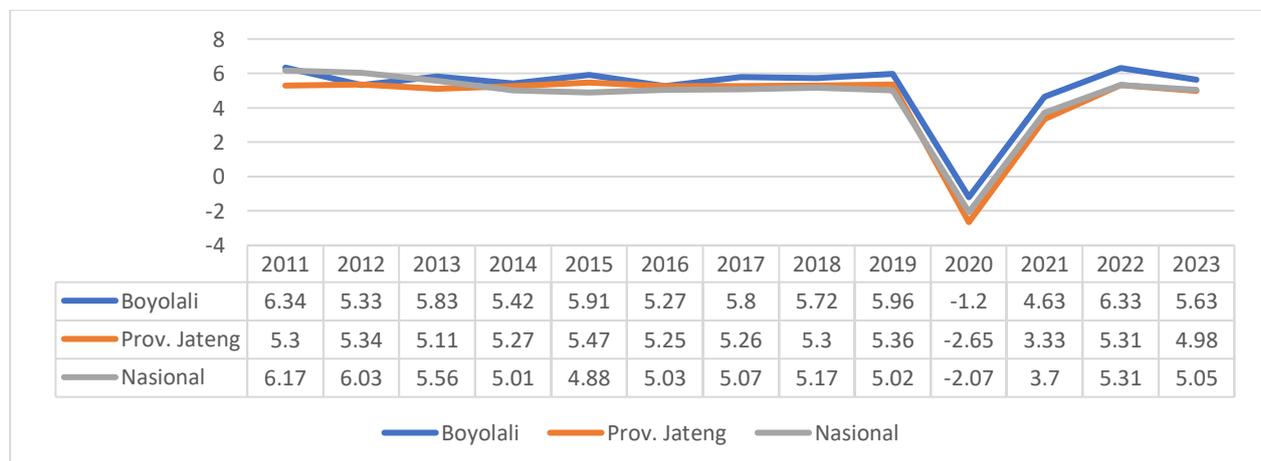
Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. Gambaran perekonomian Kabupaten Boyolali memberikan pemahaman yang berkaitan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, PDRB Per Kapita, laju inflasi, dan tingkat kemiskinan.

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan suatu daerah. Pada beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik untuk dibandingkan.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. PDRB juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010.

Gambar II. 22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber: BPS, 2024





Kabupaten Boyolali yang terkenal dengan sektor pertaniannya, telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2015-2020, Kabupaten Boyolali mencatat laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,2% per tahun. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian, peternakan, dan industri pengolahan. Kabupaten Boyolali juga mulai mengembangkan sektor pariwisata dan jasa untuk meningkatkan diversifikasi ekonominya. Namun, pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Boyolali mengalami kontraksi sekitar 1,2%. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali sebesar 5,53% atau turun 0,8% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 yang sebesar 6,33%, salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi adalah karena el nino yang terjadi dari pertengahan Tahun 2022 sampai menjelang akhir 2023. El nino berdampak pada sektor pertanian yang merupakan salah satu penunjang tertinggi perekonomian Kabupaten Boyolali.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selalu di atas atau lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional. Namun, Kabupaten Boyolali menunjukkan ketahanan yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan provinsi dan nasional selama masa pandemi. Ini mungkin disebabkan oleh ekonomi Kabupaten Boyolali yang lebih terdiversifikasi dan ketergantungan yang lebih rendah pada sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca-pandemi, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia secara keseluruhan perlu terus beradaptasi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor potensial, ketiga tingkatan ini dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat.

**Tabel II. 27 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2023**

Lapangan Usaha	2015	2020	2023
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	2,01	1,47
B, Pertambangan dan Penggalian	2,04	2,47	-0,49
C, Industri Pengolahan	6,64	1,83	7,11
D, Pengadaan Listrik dan Gas	7,17	-2,3	13,13
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05	-0,01	7,83
F, Konstruksi	6,26	-3,69	9,72
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,63	-3,72	5,6
H, Transportasi dan Pergudangan	7,78	-41,17	8,76
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,44	-5,55	12,4
J, Informasi dan Komunikasi	10,27	18,58	12,55





Lapangan Usaha	2015	2020	2023
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	7,15	3,12	6,13
L, Real Estate	8,92	-1,24	8,42
M,N, Jasa Perusahaan	9,12	-4,73	8,61
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	-0,02	-0,72
P, Jasa Pendidikan	7,47	-0,21	0,33
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,32	6,37	-0,18
R,S,T,U, Jasa Lainnya	2,97	-7,09	8,52
Produk Domestik Regional Bruto	5,91	-1,2	5,63

Sumber: *Boyolali Dalam Angka, 2015-2024*

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali didukung dari berbagai sektor lapangan usaha. Pertumbuhan seluruh lapangan usaha tidak stabil disetiap periodenya. Sektor yang terus mengalami kemerosotan pada rentang Tahun 2015-2023 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2015 adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu 10,27% dibanding Tahun 2014. Pertumbuhan terendah ada pada sektor pertambangan dan penggalian yaitu hanya tumbuh sebesar 2,04%. Pada Tahun 2020, hanya satu sektor yang mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif pada saat pandemi COVID-19 yaitu sektor informasi dan komunikasi dengan persentase pertumbuhan 18,58%. Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 telah memberikan dampak yang begitu ekstrim terhadap sektor transportasi dan perdagangan sehingga mengalami kemerosotan mencapai angka 41,17%. Pada Tahun 2023, lapangan usaha sudah menunjukkan performanya kembali. Sejumlah lapangan usaha sudah mampu bangkit dan menunjukkan pertumbuhan yang positif seperti pengadaan listrik dan gas yang mampu tumbuh sebesar 13,13%.

#### 2.2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

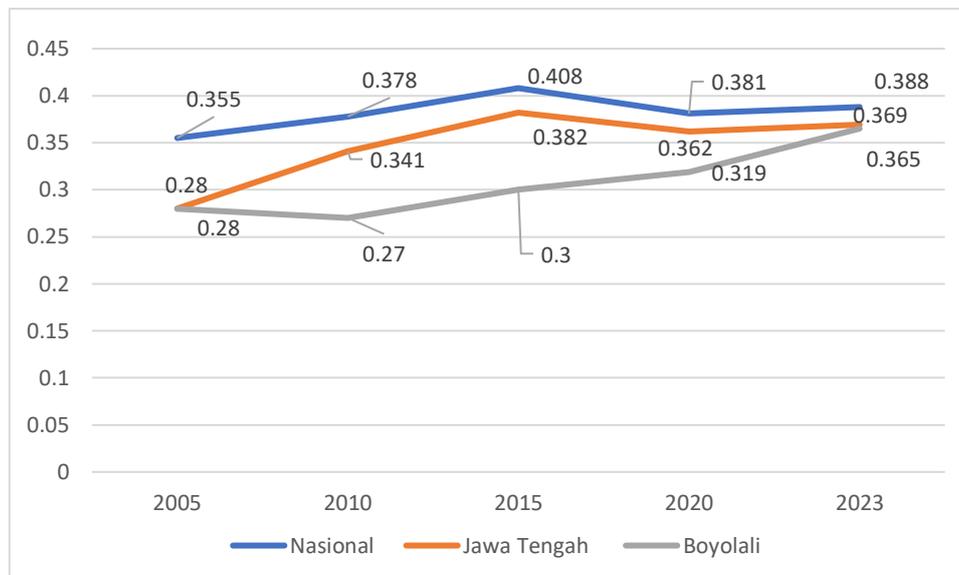
Ketimpangan distribusi pendapatan menggambarkan perbedaan distribusi pendapatan yang diterima diantara masyarakat. Salah satu ukuran yang menunjukkan derajat tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan adalah indeks gini, yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan masyarakat semakin timpang.

Data indeks gini Kabupaten Boyolali menunjukkan tren yang berfluktuasi dari Tahun 2005 hingga 2023, dengan kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2005, indeks Gini tercatat sebesar 0,280 dan menurun sedikit menjadi 0,270 pada Tahun 2010, menunjukkan ketimpangan yang relatif rendah. Namun, pada Tahun 2015, indeks gini meningkat menjadi 0,300, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan. Begitu juga di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,019 dibanding Tahun 2015 yaitu menjadi 0,319, indeks gini melonjak ke angka 0,365 di Tahun 2023, peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Boyolali telah meningkat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, perubahan struktur ekonomi, atau kurangnya akses yang merata terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Peningkatan ketimpangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.





Gambar II. 23 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2005-2024

Indeks gini Kabupaten Boyolali pada periode 2005-2023 menunjukkan kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio gini Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan di Kabupaten Boyolali lebih baik dari pada Jawa Tengah dan Nasional.

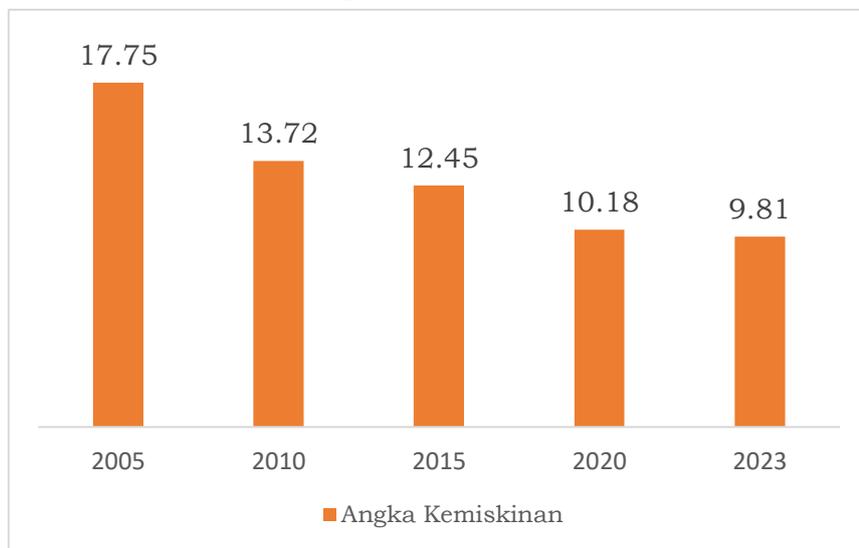
### 2.2.1.3 Kemiskinan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Boyolali, namun telah menjadi permasalahan dunia. Data angka kemiskinan Kabupaten Boyolali menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari Tahun 2005 hingga 2023. Pada Tahun 2005, angka kemiskinan tercatat sebesar 17,75%, yang kemudian menurun menjadi 13,72% pada Tahun 2010. Penurunan ini berlanjut pada Tahun 2015 dengan angka kemiskinan sebesar 12,45 %, dan semakin berkurang menjadi 10,18 % pada Tahun 2020. Pada Tahun 2023, angka kemiskinan mencapai titik terendah dalam periode yang dicatat, yaitu 9,81%. Tren penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat. Penurunan angka kemiskinan ini juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali secara keseluruhan, meskipun tantangan tetap ada untuk memastikan bahwa penurunan ini berkelanjutan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.



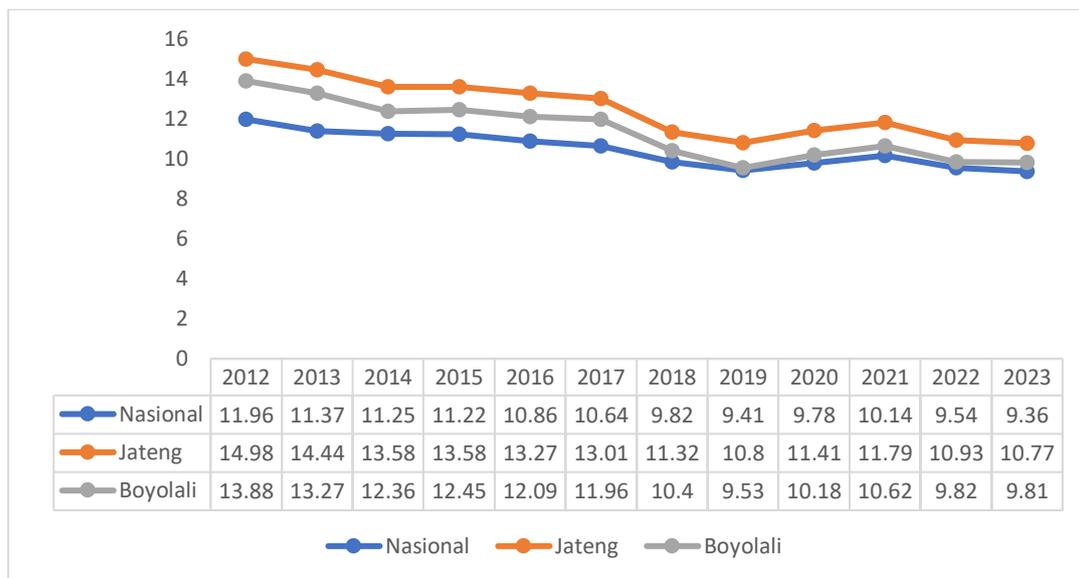


Gambar II. 24 Angka Kemiskinan Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2023 (diolah)

Gambar II. 25 Angka Kemiskinan Tahun 2012-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Angka kemiskinan Kabupaten Boyolali pada periode 2012-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional dan lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah, yaitu pada Tahun 2023 kemiskinan Kabupaten Boyolali adalah 9,81%, Provinsi Jawa Tengah yaitu 10,77% dan nasional sebesar 9,36%. Di Tahun 2015, angka kemiskinan Boyolali naik dari sebelumnya di Tahun 2014 sebesar 12,36 persen menjadi 12,45 persen, yang disebabkan oleh adanya ketidakstabilan harga Bahan Bakar Minyak yang berimbas pada peningkatan harga barang pokok mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kenaikan kemiskinan lainnya terjadi di Tahun 2019 hingga 2021 dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di dunia. Saat ini, kemiskinan di Kabupaten Boyolali berada di bawah angka Provinsi, namun masih di atas angka Nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap-P1*) dan Indeks Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-





masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

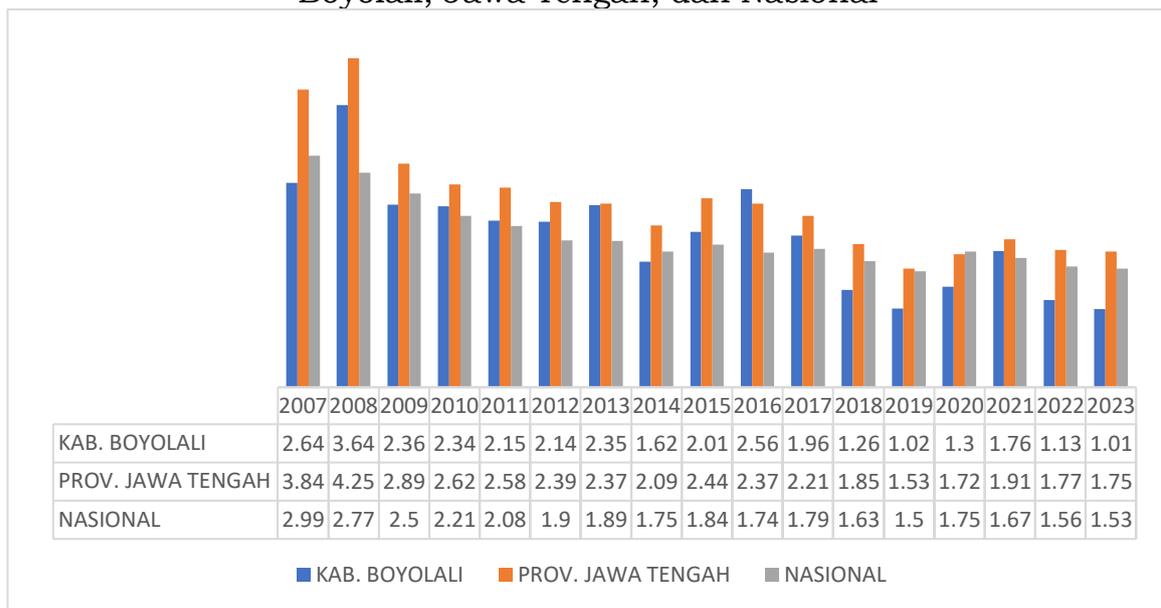
Tabel II. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2006-2023

Indikator	2006	2010	2015	2020	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,78	2,35	2,01	1,3	1,01
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,61	0,71	0,5	0,23	0,18

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2006-2023

Indeks kedalaman kemiskinan dari Tahun 2006-2023 mengalami penurunan yang cukup positif di setiap periodenya. Data terakhir yaitu pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan 1,01%. Turun sebesar 1,77% dari Tahun 2006 sebesar 2,78%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini juga menggambarkan bahwa terdapat perbaikan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Gambar II. 26 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Nasional



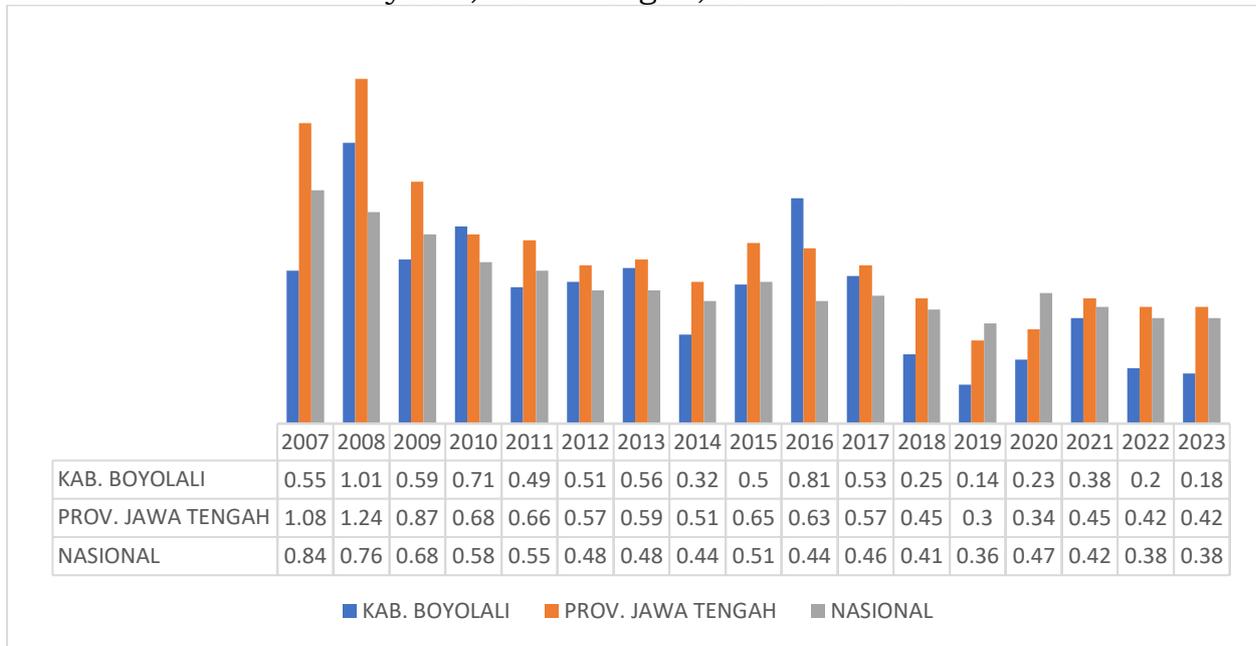
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Indeks kedalaman kemiskinan dari Tahun 2007-2023 mengalami penurunan yang cukup positif di setiap periodenya. Pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Boyolali 1,01. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Boyolali berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 1,75 dan di atas nasional yaitu 1,53. Kedalaman kemiskinan Kabupaten Boyolali tertinggi terjadi di Tahun 2008 sebesar 3,64.





Gambar II. 27 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Indeks keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif dari Tahun 2007-2023. Keparahan kemiskinan terjadi pada Tahun 2010, meningkat 0,1 dari tahun sebelumnya yaitu 0,61. Namun dari Tahun 2010-2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sebesar 0,53 dari Tahun 2010 menjadi 0,18 di Tahun 2023. Data tersebut menunjukkan kesenjangan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan menurun. Hal ini selaras dengan penurunan data kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Boyolali selama 20 (dua puluh) tahun ke belakang.

#### 2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan Upah Minimum Regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.





Indeks implisit PDRB dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan indeks harga yang pada akhirnya dijadikan untuk menghitung inflasi yang terjadi.

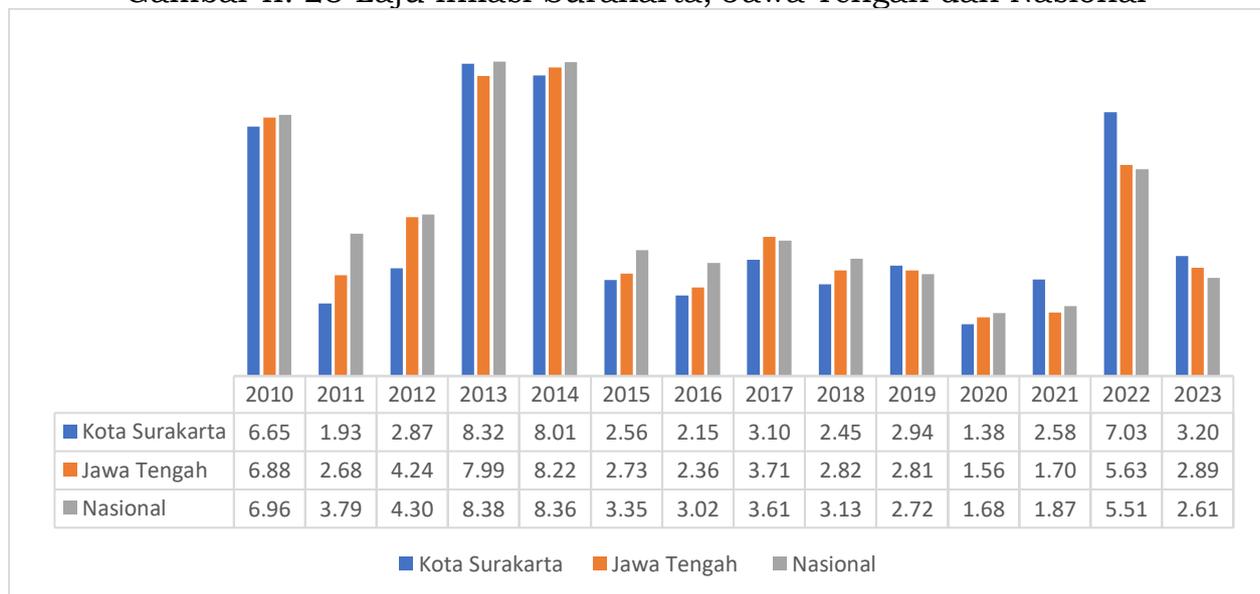
**Tabel II. 29 Laju Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,13	2,04	1,99	1,60	4,49	5,84
B. Pertambangan dan Penggalian	1,09	1,24	2,91	1,00	3,70	2,79
C. Industri Pengolahan	2,85	1,70	2,72	2,91	4,28	4,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,20	0,27	-0,54	-0,43	0,59	3,4
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	1,57	6,00	1,06	1,42	0,3
F. Konstruksi	4,60	3,04	0,33	3,76	7,02	4,23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,16	2,26	1,72	1,70	3,96	3,35
H. Transportasi dan Pergudangan	2,16	3,36	-4,09	1,07	12,04	12,9
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,02	1,49	1,21	1,66	4,13	1,41
J. Informasi dan Komunikasi	0,57	1,31	0,95	0,06	-0,59	0,7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	1,67	-0,05	5,00	9,02	2,06
L. Real Estate	2,83	1,36	0,63	1,03	1,87	1,23
M,N. Jasa Perusahaan	2,34	2,93	2,29	1,30	4,40	3,56
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,32	1,36	1,38	-1,01	2,78	2,43
P. Jasa Pendidikan	2,46	2,55	0,93	1,55	0,59	0,14
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,90	3,08	0,86	1,65	2,24
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,95	0,65	1,23	1,08	4,16	3,13
Produk Domestik Regional Bruto	2,54	1,89	1,30	2,03	4,58	4,30

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2023 (diolah)

Inflasi Kabupaten Boyolali bila dihitung dengan pendekatan indeks harga implisit menunjukkan tingkat inflasi yang variatif selama periode waktu 2018-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu 4,58 dan terendah pada Tahun 2020 yaitu 1,30.

**Gambar II. 28 Laju Inflasi Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional**



Sumber: BPS, 2005-2023





Penentuan inflasi Kabupaten Boyolali mengikuti inflasi Kota Surakarta. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa inflasi di Kabupaten Boyolali berfluktuasi diangka 1,38% - 7,03%. Inflasi terendah terjadi di Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat akibat dampak COVID-19. Jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah dan Nasional, inflasi Kabupaten Boyolali cenderung lebih rendah atau setara dengan inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali memiliki stabilitas harga yang cukup baik, salah satu penyebabnya yaitu ketergantungan yang lebih rendah pada komoditas impor dan fokus pada produksi lokal.

#### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam perencanaan pembangunan, pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiakan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Secara praktis, pembangunan manusia dapat diukur dengan IPM.

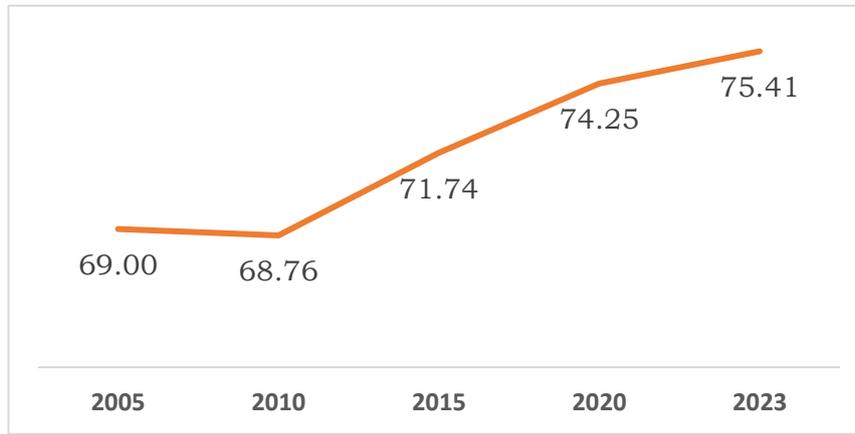
Perhitungan IPM terdiri atas 3 (tiga) aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek perekonomian yang digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Sebagai indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori menurut UNDP, yaitu (1)  $IPM \geq 80$  termasuk kategori sangat tinggi; (2)  $70 \leq IPM < 80$  termasuk kategori tinggi; (3)  $60 \leq IPM < 70$  termasuk kategori sedang; dan (4)  $IPM < 60$  termasuk kategori rendah.





Gambar II. 29 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2023

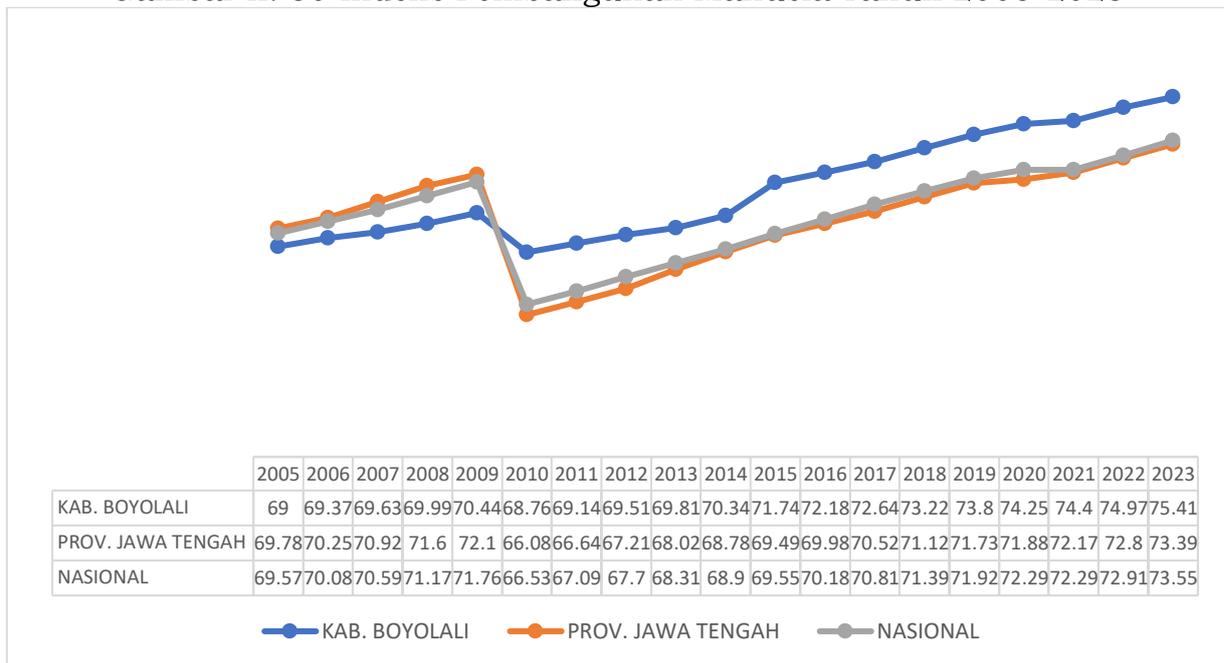


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024 (diolah)

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari Tahun 2005 hingga 2023, meskipun ada sedikit fluktuasi pada awal periode. Pada Tahun 2005, IPM tercatat sebesar 69,00, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 68,76 pada Tahun 2010. Setelah itu, IPM menunjukkan tren peningkatan yang lebih konsisten, mencapai 71,74 pada Tahun 2015. Peningkatan berlanjut pada Tahun 2020 dengan IPM sebesar 74,25, dan mencapai puncaknya pada Tahun 2023 dengan nilai 75,41. Peningkatan IPM ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Kemajuan ini menunjukkan keberhasilan program dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Boyolali, meskipun tetap perlu upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan mempercepat kemajuan ini.

IPM Kabupaten Boyolali pada periode 2005-2009 berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun mengalami peningkatan yang signifikan sejak Tahun 2010-2023 hingga mencapai angka di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar II. 30 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2005-2023; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005-2023; BPS Nasional, 2005-2023;





### 2.2.1.6 Pengangguran

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2005 hingga 2023, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran menurun dari 5,07% pada 2005 menjadi 2,03% pada 2015, menunjukkan perbaikan ekonomi yang signifikan. Namun, dari Tahun 2015 hingga 2020, terjadi peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 5,28%. Meskipun pada 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,05%, fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan yang harus diatasi untuk menjaga stabilitas lapangan kerja di masa mendatang.

Gambar II. 31 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

### 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Aspek kesejahteraan sosial dan budaya berisi tentang capaian-capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Detail tentang analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

#### 2.2.2.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

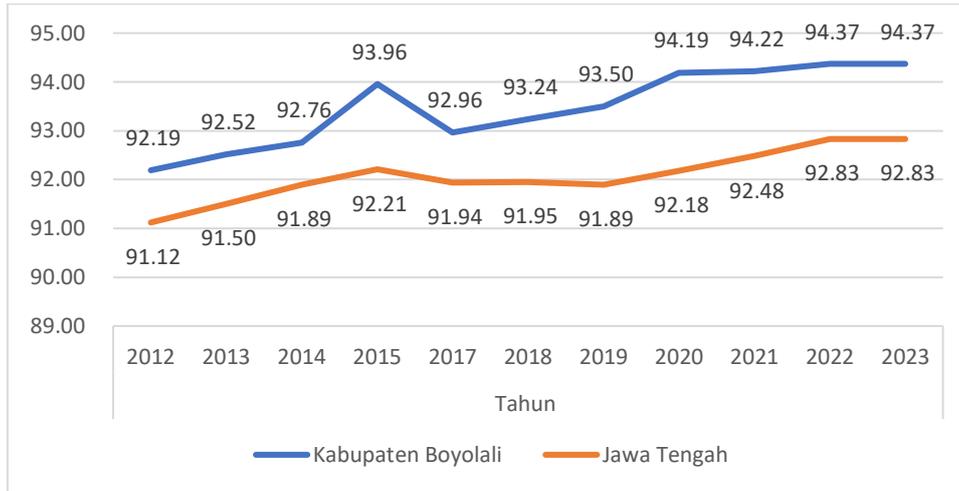
IPG merupakan salah satu indeks yang menunjukkan pencapaian kemampuan dasar pembangunan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks ini hampir serupa dengan IPM namun memperhatikan komponen ketimpangan gender yang mengarah pada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPG sama dengan nilai IPM. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, tren dari IPG di





Kabupaten Boyolali selama Tahun 2012 hingga 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, artinya tingkat ketimpangan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Boyolali lebih rendah dibandingkan tingkat ketimpangan perempuan dan laki-laki provinsi. Pada Tahun 2023 IPG Kabupaten Boyolali yaitu 94,37% sedangkan Provinsi Jawa Tengah yaitu 92,83%.

**Gambar II. 32 IPG Tahun 2012-2023**

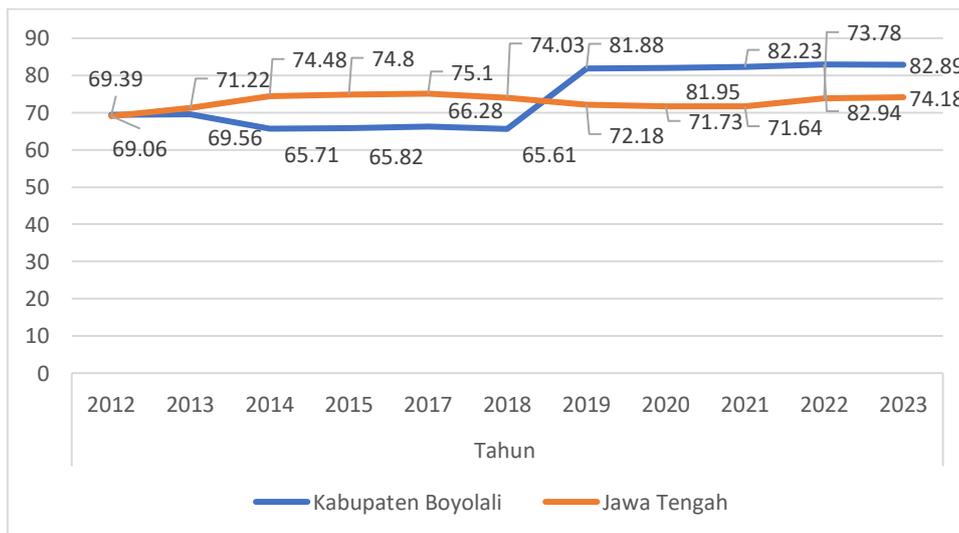


Sumber: BPS, 2024

**b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

IDG adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang seperti parlemen, pejabat senior, manajer, profesional, teknis, dan pendapatan. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Gambar II. 33 IDG Tahun 2012-2023**



Sumber: BPS, 2024

IDG Kabupaten Boyolali dari Tahun 2012-2018 lebih rendah dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2019 terjadi lonjakan angka IDG daerah yaitu dari 65,61% menjadi 81,88% di Tahun 2020, dan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga Tahun 2022 dan turun pada Tahun 2023 senilai 0,05 dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan nilai IDG Jawa Tengah, nilai IDG Kabupaten Boyolali dari Tahun 2012-2018 lebih rendah dari IDG Jawa Tengah. Di Tahun 2019-2023 IDG Jawa Tengah





mengalami penurunan sehingga posisi IDG Jawa Tengah berada di bawah nilai IDG Kabupaten Boyolali.

**c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Nilai IKG yang semakin kecil mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan gender semakin membaik.

Kabupaten Boyolali mulai melakukan perhitungan IKG dari Tahun 2018. Selama 2018-2023 nilai IKG Kabupaten Boyolali terlihat berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia khususnya perempuan di bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi berjalan cukup dinamis. Upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang akan semakin memperkecil ketimpangan gender ini. Nilai IKG tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 0,436%. Pada Tahun 2019 IKG Kabupaten Boyolali berada pada angka 0,312% menurun menjadi 0,306% pada Tahun 2023.

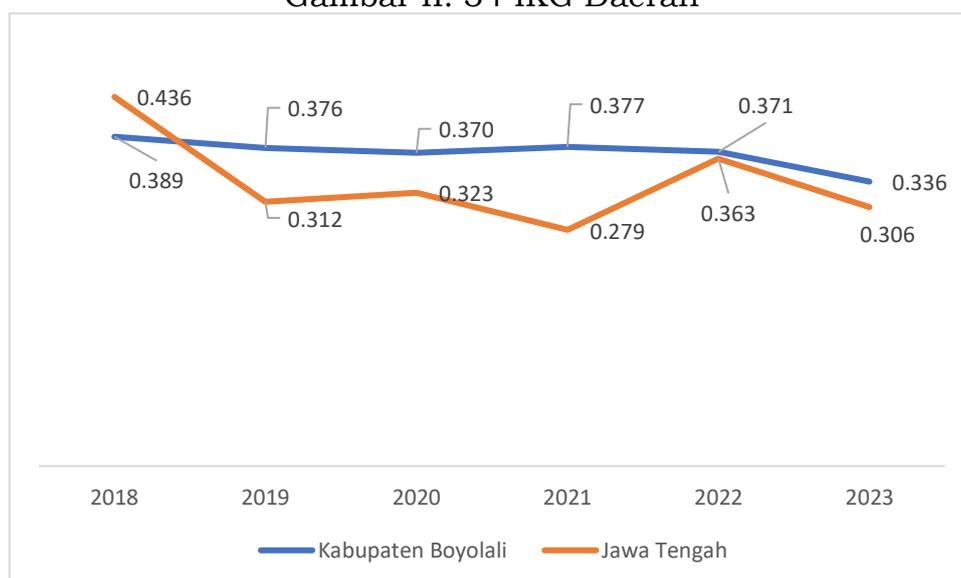
**Tabel II. 30 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Boyolali  
Tahun 2019-2023**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketimpangan Gender	0,436	0,312	0,3230	0,279	0,363	0,306

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Jika dibandingkan dengan IKG Provinsi Jawa Tengah, nilai IKG Kabupaten Boyolali pada Tahun 2018 berada di bawah IKG Jawa Tengah. Namun nilai IKG Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan sehingga posisi IKG Kabupaten Boyolali berada di atas IKG Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar II. 34 IKG Daerah**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**d. Keterlibatan Perempuan di Perlemen**

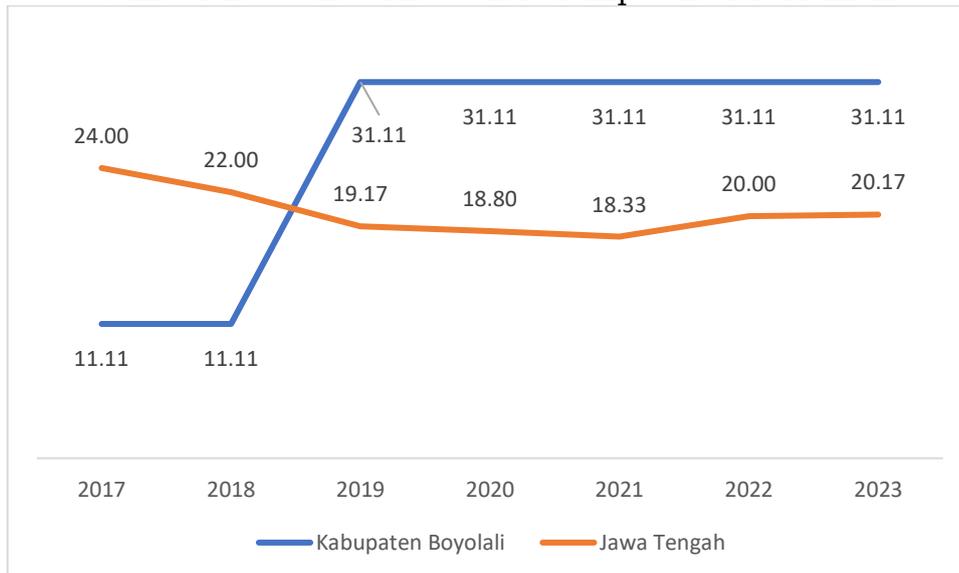
Keterlibatan perempuan di parlemen merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai partisipasi perempuan dalam arena politik. Kehadiran aktif perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung dan pemberdayaan perempuan. Nilai





keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Boyolali mengalami perbaikan yang tinggi di Tahun 2019 yaitu 31,11 dan konsisten hingga Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan nilai keterlibatan perempuan di parlemen Jawa Tengah, nilai keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Boyolali lebih rendah di Tahun 2017-2018, namun di Tahun 2019-2023 nilai keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Boyolali di atas nilai keterlibatan perempuan di parlemen Jawa Tengah.

**Gambar II. 35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen**

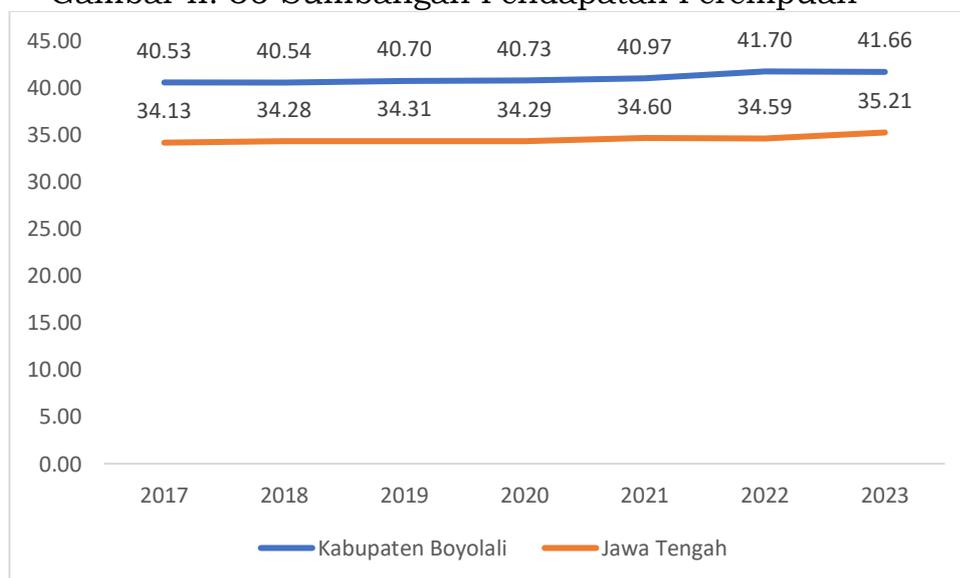


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

**e. Sumbangan pendapatan perempuan**

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan sebuah indikator yang menggambarkan seberapa besar diskriminasi upah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Sumbangan pendapatan perempuan dihitung dari proporsi angkatan kerja perempuan dikalikan rasio upah perempuan terhadap rata-rata upah. Semakin tinggi nilai sumbangan pendapatan perempuan, semakin baik dan merata sebuah perekonomian.

**Gambar II. 36 Sumbangan Pendapatan Perempuan**



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Persentase sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Boyolali pada periode 2017-2023 berkisar diangka 40% artinya masih terdapat kesenjangan pendapatan  $\pm 10\%$  antara laki-laki dan perempuan. Namun jika dibandingkan



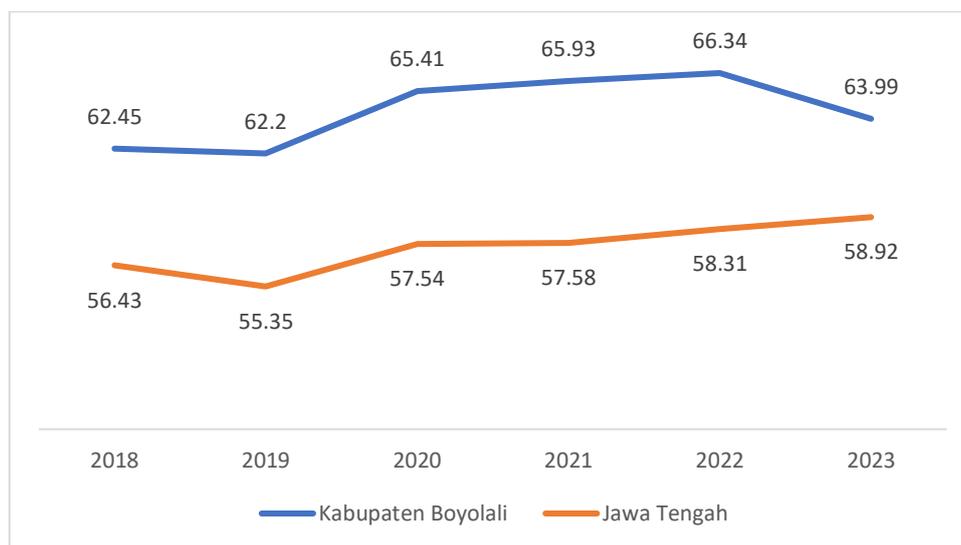


dengan sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Tengah, sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Boyolali jauh lebih baik. Pada Tahun 2023 sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Boyolali adalah 41,66% sedangkan Jawa Tengah 35,21 atau selisih 6,45%.

f. Partisipasi angkatan kerja perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menunjukkan kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan. Berikut adalah rincian TPAK Perempuan di Kabupaten Boyolali.

Gambar II. 37 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

TPAK perempuan Kabupaten Boyolali dari Tahun 2018-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan Jawa Tengah. Pada Tahun 2023 nilai TPAK perempuan Kabupaten Boyolali adalah 63,99% dan Jawa Tengah 58,92%. Dalam periode 2018-2023, TPAK perempuan Kabupaten Boyolali memperoleh nilai >60%, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari total angkatan kerja perempuan (usia 15 tahun – 64 tahun) memiliki status bekerja.

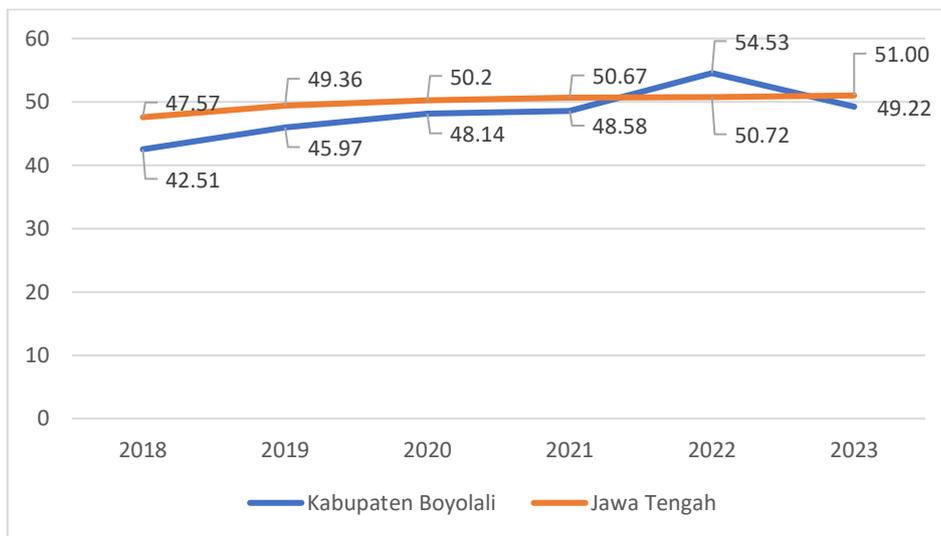
g. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Salah satu dimensi partisipasi ekonomi direpresentasikan dengan perempuan sebagai tenaga profesional yang menduduki suatu jabatan yaitu manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. Berikut adalah rincian perempuan sebagai tenaga profesional.





Gambar II. 38 Perempuan sebagai Tenaga Profesional



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami pertumbuhan yang positif dari Tahun 2018 dan mencapai puncak pada Tahun 2022 yaitu 54,53%. Kemudian di Tahun 2023 yaitu 49,22% atau turun senilai 5,31% dibandingkan dengan Tahun 2022. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Boyolali masih lebih rendah dari persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Jawa Tengah, kecuali di Tahun 2022 Kabupaten Boyolali memperoleh nilai sebesar 54,53% sedangkan Jawa Tengah senilai 50,72%.

#### 2.2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

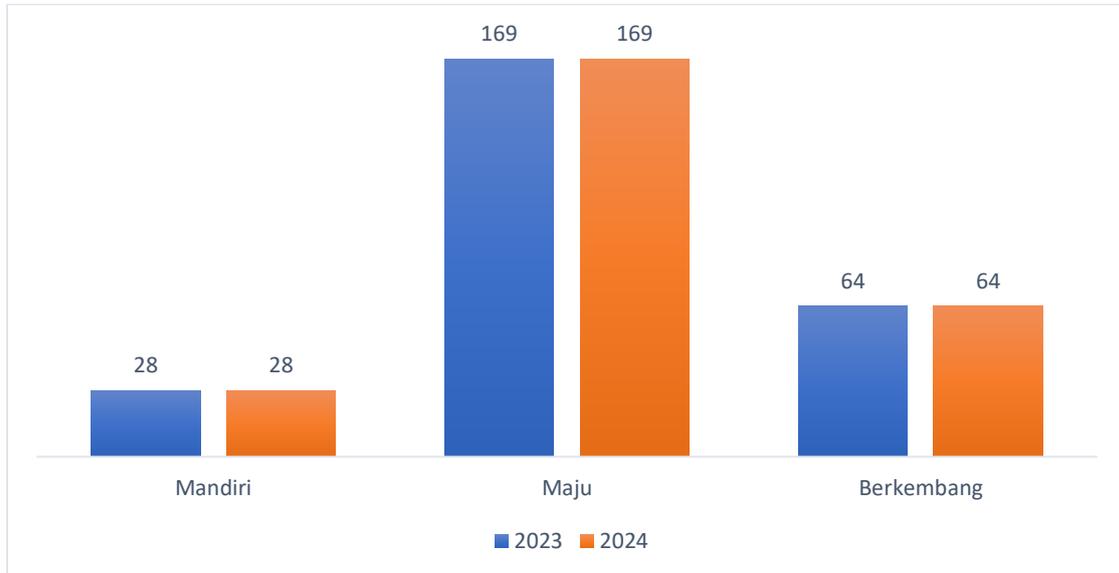
Pemberdayaan masyarakat di Boyolali merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian desa-desa yang ada di wilayah tersebut. Melalui berbagai program dan inisiatif, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam pengembangan potensi lokal, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga desa, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa, menjadikannya lebih tangguh terhadap berbagai tantangan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam menciptakan desa yang lebih mandiri dan sejahtera.

Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Boyolali menjadi salah satu indikator keberhasilan dari program-program pemberdayaan tersebut. Berdasarkan data Tahun 2023 dan Juli 2024, Kabupaten Boyolali telah mencapai prestasi yang membanggakan dengan 28 (dua puluh delapan) desa dikategorikan sebagai Desa Mandiri, 169 (seratus enam puluh sembilan) desa sebagai Desa Maju, dan 64 (enam puluh empat) desa sebagai Desa Berkembang, tanpa adanya desa yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal. Data ini menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan desa di Boyolali, yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program-program tersebut telah berhasil menciptakan desa-desa yang lebih maju dan mandiri, mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.





Gambar II. 39 Indeks Desa Membangun Kabupaten Boyolali Tahun 2023-2024



Sumber: Dispermasdes Kabupaten Boyolali, 2024

### 2.2.2.3 Sosial

Sarana sosial dikelola Dinas Sosial salah satunya adalah Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Rumah Singgah sudah dioperasikan mulai tahun 2019. Dalam mengatasi permasalahan PMKS Dinas Sosial melakukan berbagai kegiatan seperti razia Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), pembinaan dan pelatihan PMKS, pemberian bantuan sosial dan penyuluhan sosial. Dinas Sosial selama ini dengan bekerja sama dengan instansi lain seperti Balai Resos Taruna Yudha Sukoharjo, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Klaten, panti Sosial milik provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait.

Persentase penanganan terhadap PMKS adalah perbandingan jumlah PMKS yang tertangani dengan jumlah PMKS yang ada. Penanganan PMKS Tahun 2020 sebesar 90,54%. Pada Tahun 2021 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 83,7%. Jumlah PMKS pada Tahun 2021 sebanyak 58.331 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 48.803 jiwa. Pada Tahun 2022 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 89,38%. Jumlah PMKS pada Tahun 2022 sebanyak 61.029 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 54.551 jiwa. Pada Tahun 2023 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100%. Jumlah PMKS pada Tahun 2023 sebanyak 53.122 jiwa dan yang menerima bantuan sosial sebanyak 53.122 jiwa Realisasi cukup tinggi karena adanya program dari kementerian Sosial RI yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Elnino dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program yang ada tentunya berdampak positif yaitu dapat meringankan beban keluarga tidak mampu dan meningkatkan kemandirian PMKS di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 31 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Sosial

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	16	16	16	-	
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	87,7	35,77	83,7	-	





No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
3.	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	89,7	35,77	83,7	-	
4.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	-	-	-	175	190
5.	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	-	-	-	200	470
6.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	orang	-	-	-	11	11
7.	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah	orang	-	-	-	190	240
8.	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	-	-	-	645	416
9.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat	orang	-	-	-	655	799
10.	Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	KUBE (orang)	-	-	-	40 (400)	210 (2.100)
11.	Jumlah Dokumen penerima bantuan sosial yang tepat sasaran	Dokumen	-	-	-	2	2
12.	Jumlah warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di Puskesmas/ poliklinik/ Rumah Sakit (Program Kemiskinan)	%	-	-	-	100	100
13.	Jumlah PMKS yang memperoleh pelatihan	orang	-	-	-	89	50
14.	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) sesuai standar	lokasi	-	-	-	1	1
15.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, 2024

Target anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) orang, terealisasi sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) orang sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Pelayanan dasar bahan makanan pokok bagi anak terlantar, penyediaan bantuan peralatan sekolah bagi anak terlantar, dan kegiatan bimbingan sosial bagi anak terlantar.

Target lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) orang, terealisasi sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) orang, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, dan bimbingan keanggotaan dan pemberian bantuan sosial barang, sarana dan prasarana bagi Posyandu Lansia.

Target Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) sebanyak 11 (sebelas)





orang, terealisasi sebanyak 11 (sebelas) orang, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Pembinaan bagi Gelandangan/Pengemis.

Target PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang, terealisasi sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) orang, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Pembangunan atau pemeliharaan Rumah Singgah, Penyediaan permakanan di rumah singgah, Penyediaan sandang dan perlengkapan sehari-hari bagi penghuni rumah singgah, penyediaan peralatan dan sarana atau alat bantu rumah singgah, dan kerja sama dengan lembaga terkait.

Target penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) sebanyak 416 (empat ratus enam belas) orang, terealisasi sebanyak 416 (empat ratus enam belas) orang, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan bantuan kebutuhan pokok (sembako) bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB), Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, Kegiatan pembinaan, pelatihan bagi penyandang disabilitas dan fasilitasi penyelenggaraan HDI, dan Pembinaan dan bantuan sosial barang keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Target Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat adalah 18% dari jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 4.136 (empat ribu seratus tiga puluh enam) orang atau sekitar 744 (tujuh ratus empat puluh empat) orang, terealisasi sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) orang, sehingga persentase capaian sebesar 107%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota, Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dan Peningkatan Kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Target fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 40 (empat puluh) Kelompok Usaha Bersama/KUBE (400 orang), terealisasi sebanyak 210 KUBE (2100 orang), sehingga persentase capaian sebesar 525%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Bantuan sosial bagi KUBE, dan Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan DTKS.

Target dokumen penerima bantuan sosial yang tepat sasaran sebanyak 2 (dua) dokumen, terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial sembako, verifikasi dan validasi data PBI-APPN Non DTKS, dan fasilitasi pelaksanaan PKH.

Target warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di Puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit (Program Kemiskinan) sebanyak 100%, terealisasi sebanyak 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100% (2.135 orang yang mendapatkan pelayanan). Indikator ini dicapai dengan kegiatan bantuan sosial kesehatan sesuai kriteria bagi masyarakat miskin.

Target PMKS yang memperoleh pelatihan sebanyak 50 (lima puluh) orang, terealisasi sebanyak 50 (lima puluh) orang, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pelatihan usaha bagi PMKS.





Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar sebanyak 1 (satu) lokasi, terealisasi sebanyak 1 (satu) lokasi, sehingga persentase capaian sebesar 100%. Indikator ini dicapai dengan kegiatan Pemeliharaan TMPN Kabupaten/Kota.

Target korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 100%, terealisasi sebanyak 100%, sehingga persentase capaian sebesar 100% (618 orang korban bencana). Indikator ini dicapai dengan kegiatan penyediaan persediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial, penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial, penanganan kelompok rentan korban bencana alam dan sosial, layanan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial, peningkatan kemampuan bagi anggota Kampung Siaga Bencana yang berpotensi dalam penanganan bencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi Tagana dalam penanganan bencana.

Pada Tahun 2023 ada 2 (dua) indikator yang capaiannya di atas 100 % yaitu jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial dan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat. Hal ini dikarenakan pada target RPJMD setiap Tahun adalah 40 (empat puluh) KUBE, sedangkan pada akhir RPJMD sebanyak 200 (dua ratus) KUBE, sehingga dilakukan percepatan sehingga melebihi dari target yang ada pada RPJMD. Sedangkan PSKS yang mendapatkan sertifikat adalah dikarenakan PSKS pada Tahun 2022 belum dapat mengikuti peningkatan kapasitas, pada Tahun 2023 dapat mengikuti.

Indikator PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di rumah singgah melebihi target, dapat dijelaskan bahwa rumah singgah mempunyai kapasitas 20 (dua puluh) PM dan pelayanan setiap PM maksimal 7 (tujuh) hari. Sehingga pada Tahun 2023 mendapat alokasi penambahan lokal sebanyak 1 (satu) lokal. Sedangkan indikator penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) melebihi target, dapat dijelaskan penanganan penyandang disabilitas dilakukan dengan pemberian alat-alat bantu bagi disabilitas seperti kursi roda, memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit (dengan bantuan mesin jahit dan etalase). Keberhasilan dalam pencapaian target ini karena program ini didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah. Dukungan pemerintah daerah berupa penyediaan SDM dan anggaran, sedangkan dukungan dari pemerintah pusat berupa kerja sama dengan balai rehabilitasi berupa pembinaan dan penyediaan alat bantu. Sedangkan hambatan dari pelaksanaan program kegiatan ini adalah bervariasinya kebutuhan disabilitas yang harus dipenuhi. Untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnya maka perlu dilakukan pemetaan analisis kebutuhan disabilitas dengan lebih jelas. Selain ketersediaan dana dan SDM juga kerja sama dengan kementerian dan berbagai balai rehabilitasi perlu ditingkatkan.

#### 2.2.2.4 Seni, Budaya, dan Olah Raga

Seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Boyolali. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Boyolali.



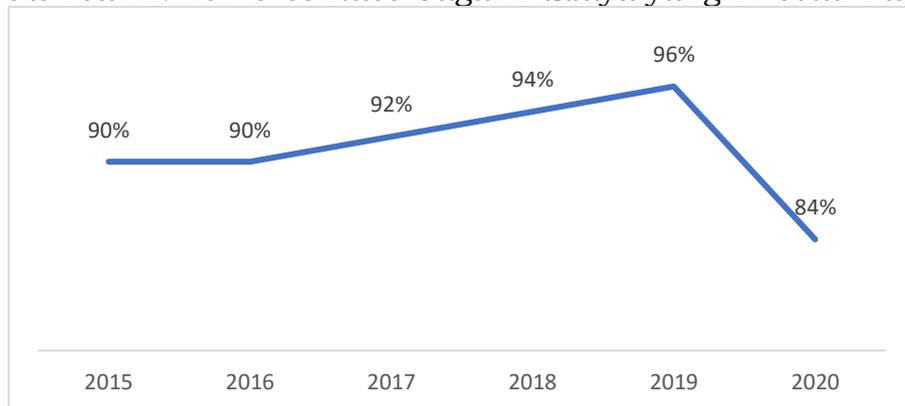


a. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Dengan demikian, budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Adapun budaya yang ada di Kabupaten Boyolali antara lain Sedekah Gunung, Saparan Pengging, Buka Luwur, Padusan Sawit, Padusan Pengging, Padusan Tlatar, Grebeg Sadranan, dan Kirab Budaya.

Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki cagar budaya yang sudah terdaftar dan ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Berikut persentase cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020.

Gambar II. 40 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan



Sumber: Disporapar dan Disdikbud Kabupaten Boyolali, 2024

Capaian kinerja pelestarian cagar budaya Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan selama periode 2016-2019 yakni mencapai 96%. Namun, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,84%. Penurunan tersebut disebabkan karena masih adanya benda-benda cagar alam baru yang belum terdaftar atau belum diketahui kepastiannya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan Kerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang ada di Kabupaten Boyolali maupun di Yogyakarta. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Boyolali memiliki 2 (dua) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Pertama, Tradisi Sebaran Apem Kukus Keong Mas yang digelar setiap bulan Sapar pada penanggalan Jawa. Kedua, Tari Turonggo Seto yang bercerita tentang pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Kedua WBTB tersebut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat karena meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki prestasi di bidang budaya yaitu:

1. Terciptanya kreasi seni tari baru seperti Tari Gedrug Kolo Krido, Tari Sekar Merapi, Tari Gotong Royong, Tari Kusuma Bangsa, Tari Boyolali Tani, Tari Ikan Kreasi Boyolali, Tari Topeng Ireng Mboyolali, Tari Jaran Kepang





Mboyolali, Tari Garuda Nusantara, Tari Soreng, Tari Gugur Gunung Mboyolali. Kreasi tersebut ditampilkan di luar negeri melalui *event* pengiriman Duta Seni dan misi kebudayaan Daerah sejak Tahun 2013-2019;

2. Terciptanya kreasi wayang baru seperti Wayang Religi (grup kesenian/kebudayaan di Kecamatan Andong).

Tabel II. 32 Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2005-2020

Uraian	2005	2010	2015	2020	2023
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	14 kali	35 kali	49 kali	69 kali
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5 sarana	5 sarana	5 sarana	12 sarana	NA

Sumber: *Disporapar dan Disdikbud Kabupaten Boyolali, 2024*

Salah satu upaya pelestarian dan pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin. Jumlah festival seni dan budaya di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan disetiap akhir periode Tahun 2005-2023. Pada Tahun 2005 jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah 8 (delapan) kali kemudian naik menjadi 14 (empat belas) kali di Tahun 2010 dan 49 (empat puluh sembilan) kali di Tahun 2020. Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya terus berlanjut hingga Tahun 2023 terlaksana sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kali. Sedangkan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya konstan sebanyak 5 (lima) sarana dari Tahun 2005-2015, kemudian meningkat menjadi 12 (dua belas) sarana di Tahun 2020. Disisi lain, penyelenggaraan festival seni merupakan aspek penting. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya lokal juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, penyelenggaraan festival seni ke depan harus dikelola yang lebih inovatif sesuai perkembangan kondisi pada masyarakat.

#### b. Olahraga

Olahraga merupakan aspek pembangunan SDM sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan di bidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat di berbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Berikut perkembangan bidang olahraga di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2023.

Tabel II. 33 Perkembangan Capaian Bidang Olahraga

Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peringkat PORDA tingkat Provinsi	14	N/A	17	7	N/A	9	30	17
Jumlah klub olahraga	29	30	31	33	33	33	33	36
Jumlah lapangan olahraga	4	11	11	16	16	17	18	17

Sumber: *Dokumen LKjIP Kabupaten Boyolali, 2023*

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) merupakan penyelenggaraan turnamen olahraga pada level provinsi. Pada Tahun 2017 dan 2020, Provinsi Jawa Tengah tidak menyelenggarakan PORDA, sehingga data peringkat PORDA Kabupaten





Boyolali N/A. Selama periode 5 (lima) tahun (2016-2020), Kabupaten Boyolali berhasil meningkatkan prestasi peringkat PORDA dari peringkat 14 (empat belas) pada Tahun 2016 menjadi peringkat 7 (tujuh) pada Tahun 2019. Keberhasilan tersebut dikarenakan proses manajemen pengelolaan atlit serta menambah keikutsertaan berbagai turnamen untuk meningkatkan bakat saat bertanding. Namun terjadi penurunan pada Tahun 2023 menjadi 17 (tujuh belas) yang merupakan masa penyesuaian setelah pandemi COVID-19 melanda.

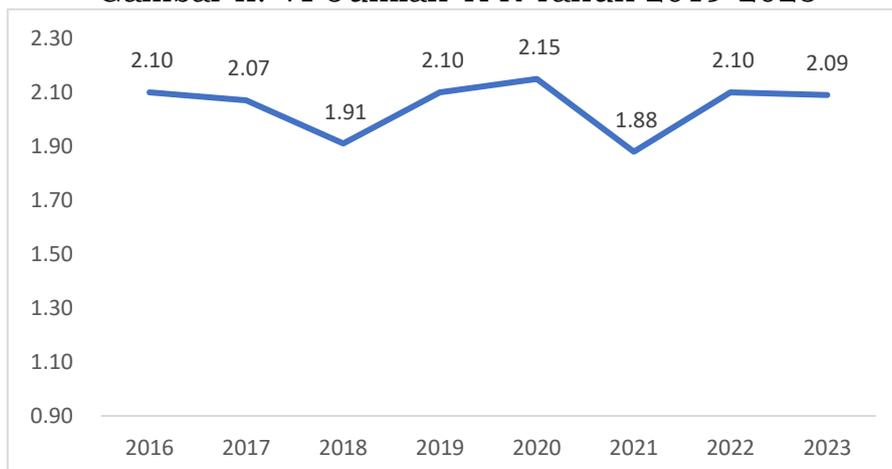
Jumlah klub olahraga di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari Tahun 2016 yaitu 29 (dua puluh sembilan) klub kemudian Tahun 2023 menjadi 36 (tiga puluh enam) klub. Peningkatan tersebut tergolong cukup rendah jika dibanding dengan banyaknya variasi cabang olahraga yang ada. Rendahnya jumlah klub olahraga dikarenakan masih banyaknya klub olahraga yang belum terdaftar ke pengurus cabang dan masih banyak klub olahraga yang pasif dalam berbagai turnamen. Ke depan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah serta keikutsertaan turnamen olahraga pada masing-masing cabang olahraga.

#### 2.2.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

##### a. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya (usia 15-49 tahun). Angka kelahiran total digunakan sebagai indikator keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), membantu pengambilan kebijakan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Gambar II. 41 Jumlah TFR Tahun 2019-2023



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024

Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun total *fertility rate* cenderung stagnan dengan angka tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu 2,15. Ini berarti rata-rata perempuan di Kabupaten Boyolali akan melahirkan dua anak pada masa reproduksinya.

##### b. Cakupan Peserta KB Aktif

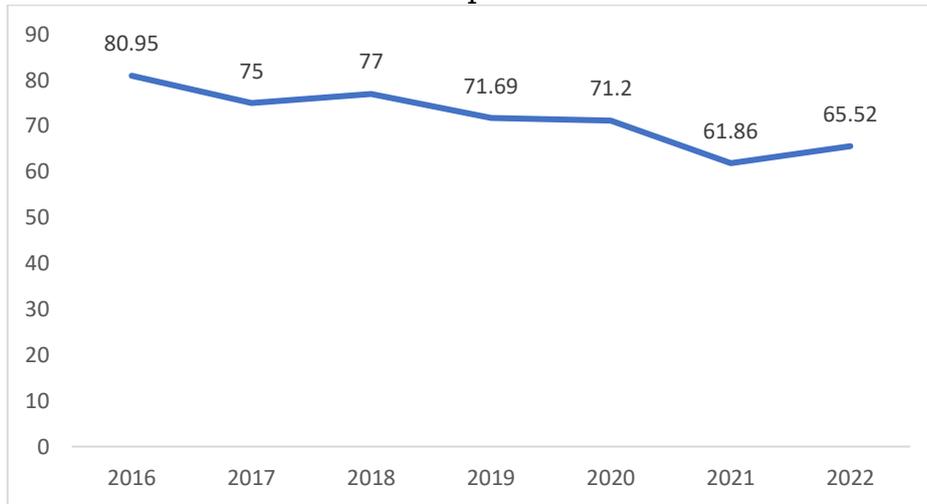
Cakupan peserta KB aktif adalah persentase jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai alat kontrasepsi modern dibagi jumlah PUS dikalikan 100%. Cakupan peserta KB aktif atau *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* merupakan





salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian penduduk.

Gambar II. 42 Cakupan Peserta KB Aktif



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024

Tahun 2019 tercapai sebesar 71,69% dari PUS sebanyak 178.204 dengan jumlah peserta KB aktif 127.748. Tahun 2020 tercapai sebesar 71,20% dari PUS sebesar 168.865 dengan jumlah peserta KB aktif 120.226. Penurunan cakupan peserta KB aktif sejak tahun 2020, disebabkan proses validasi data yang berkelanjutan dengan meminimalisir pencatatan ganda dan pembatasan usia PUS 15 – 49 tahun, untuk mendapatkan data cakupan peserta KB aktif riil.

c. *Unmet Need* KB

*Unmet need* adalah wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan). Dampak dari *unmet need* salah satunya adalah dapat meningkatkan kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Gambar II. 43 *Unmet Need* KB Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022



Sumber: DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 2024

Persentase *unmet need* KB mengalami penurunan pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya pada Tahun 2018 yaitu turun sebesar 1,47%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses bagi PUS yang tadinya tidak terlayani KB padahal ingin ber-KB. Persentase *unmet need* KB tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yaitu 15,79%.

d. Metode Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

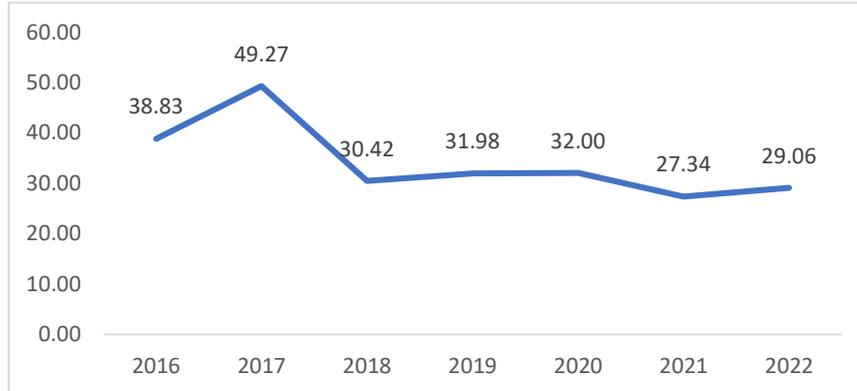
Metode Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang adalah pemakaian alat kontrasepsi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, seperti suntik,





implan, dan IUD (*Intra Uterine Device*). MKJP memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dan memerlukan pemasangan yang hanya dilakukan sekali saja, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pasangan usia subur untuk membatasi kehamilan tanpa harus khawatir dan memikirkan penggunaan setiap hari.

Gambar II. 44 MKJP



Sumber: Bapperida Kab. Boyolali, Data Diolah, 2024

MKJP Kabupaten Boyolali memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu pada Tahun 2016 sebesar 38,83% dan meningkat menjadi 49,27% di Tahun 2017. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 30,42% dan di Tahun 2021 yaitu 27,34%. Persentase ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Boyolali masih sedikit yang menggunakan MKJP ini. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan MKJP antara lain kurangnya informasi MKJP, keterbatasan akses, dan stigma yang terkait dengan pemakaian kontrasepsi jangka panjang.

### 2.3 Aspek Daya Saing

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban, serta kualitas tenaga kerja.

#### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

##### 2.3.1.1 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita





merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

PDRB perkapita Kabupaten Boyolali rata-rata menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Boyolali rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. PDRB per kapita Kabupaten Boyolali mengalami tren positif dimana pada Tahun 2005 berada pada angka 4,93 juta rupiah meningkat menjadi 39,20 juta rupiah.

Gambar II. 45 PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

### 2.3.1.2 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan kemampuan penduduk dalam aspek pengeluaran yang dihitung berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK. Nilai pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Boyolali selama 2010-2023 menunjukkan peningkatan. Nilai selama periode tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2023 pengeluaran per kapita penduduk adalah Rp13.716.000 per orang per tahun, sementara di Provinsi Jawa Tengah adalah Rp11.835.00. Dengan demikian dari aspek ini kondisi daya saing Kabupaten Boyolali dapat disimpulkan lebih baik di wilayah Jawa Tengah.

Tabel II. 34 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribuan/orang/tahun) 2010-2023

Wilayah	2010	2015	2020	2023
Kabupaten Boyolali	10.840	11.806	12.910,00	13.716,00
Jawa Tengah	8.992	9.930	10.930,00	11.835,00

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Pengeluaran rata-rata per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyak anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran kebutuhan rumah tangga bukan kebutuhan usaha. Angka konsumsi pengeluaran rata-rata per kapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga terhadap jumlah penduduk.





Tabel II. 35 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Tahun (Rupiah) 2015-2023

Makanan	2015	2020	2023
Padi-padian	52.582	49.065	61.710
Umbi-umbian	2.065	3.380	5.235
Ikan/ udang/ cumi/kerang	11.088	14.339	17.255
Daging	14.210	14.831	25.046
Telur dan susu	23.573	34.449	33.758
Sayur-sayuran	23.681	36.614	46.977
Kacang-kacangan	14.666	12.982	16.392
Buah-buahan	17.622	20.913	26.842
Minyak dan kelapa	14.072	12.858	14.454
Bahan minuman	16.256	19.742	20.778
Bumbu-bumbuan	8.153	10.757	12.377
Konsumsi lainnya	8.666	8.491	12.296
Makanan dan minuman jadi	91.607	156.943	177.152
Rokok dan tembakau	39.281	61.677	62.784
Jumlah Makanan	337.522	457.040	533.057

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2015-2024

Pengeluaran untuk konsumsi dihitung selama sebulan terakhir. Angka pengeluaran per kapita makanan di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan di setiap akhir periode 2015-2023. Pengeluaran tertinggi ada pada konsumsi makanan dan minuman jadi dan pengeluaran perkapita terendah adalah konsumsi terhadap umbi-umbian walaupun menunjukkan peningkatan jumlah konsumsi disetiap tahunnya.

Tabel II. 36 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2015-2023

Bukan Makanan	2015	2020	2023
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	167.723	229.712	273.083
Aneka barang dan jasa	96.064	141.191	131.584
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	22.506	27.577	22.458
Barang tahan lama	81.649	65.353	55.773
Pajak, pungutan, dan asuransi	14.936	37.655	52.211
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	13.015	22.094	24.061
Jumlah Bukan Makanan	395.893	523.581	559.170

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2015-2024

Total pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan periode 2015-2023 mengalami pertumbuhan yang positif. Pada Tahun 2015 pengeluaran terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu Rp167.723,00 dan yang terendah adalah pengeluaran untuk keperluan pesta





dan upacara/kenduri yaitu Rp13.015,00.

Penurunan pengeluaran terjadi pada pengeluaran untuk barang tahan lama yaitu pada Tahun 2015 sebesar Rp81.649,00 dan turun menjadi Rp65.353,00 di Tahun 2020 dan kembali turun di tahun 2023 mencapai angka Rp55.773,00. Tren pertumbuhan yang sangat positif terjadi untuk pengeluaran pajak, pungutan, dan asuransi yaitu naik sebesar 60,33% dibanding tahun 2015 dan kembali naik mencapai angka Rp52.061,00 di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin patuh membayar pajak dan pungutan lainnya serta terdapat peningkatan pembelian asuransi.

Pengeluaran bukan konsumsi dihitung sebulan dan setahun terakhir. Pengeluaran per kapita non makanan selama periode Tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Pengeluaran terendah pada Tahun 2019 sebesar Rp460.811,00 dan tertinggi pada Tahun 2022 sebesar Rp524.372,00. Pengeluaran terbesar pada pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga. Sedangkan pengeluaran terendah pada keperluan pesta dan upacara.

### 2.3.1.3 Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Untuk melihat ukuran inklusivitas pembangunan ekonomi, dipergunakan satu indeks yang disebut dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI).

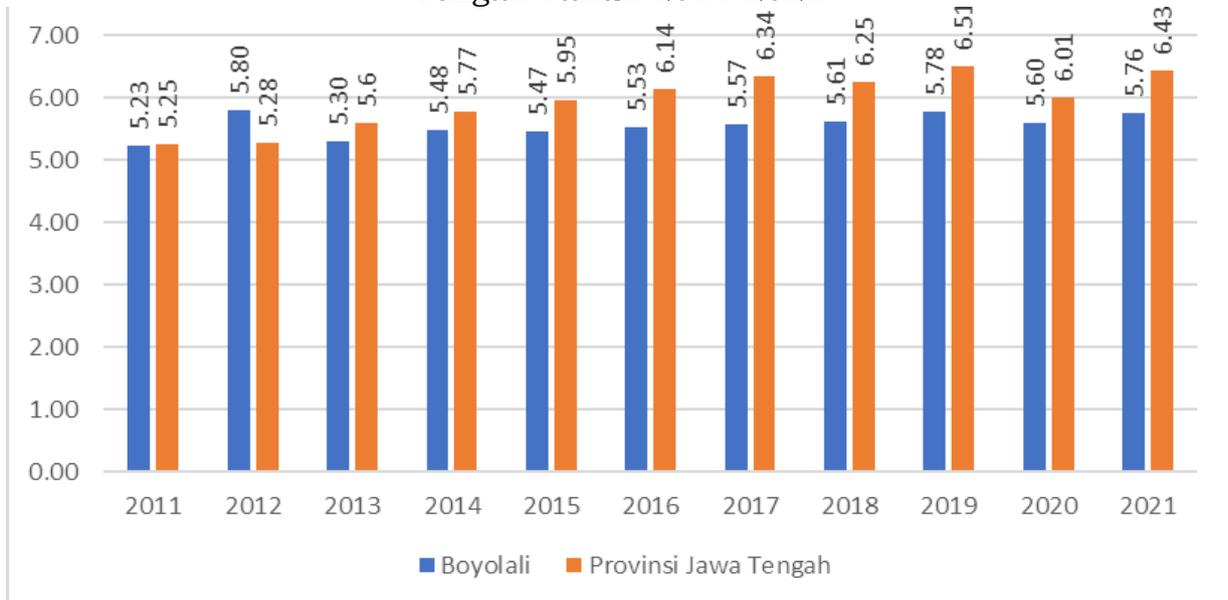
IPEI memiliki 3 (tiga) pilar yaitu pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pilar perluasan akses dan kesempatan. Ketiga pilar tersebut memiliki delapan sub-pilar utama serta 21 (dua puluh satu) indikator yang terangkum menjadi IPEI. Pada prinsipnya, dalam pembangunan ekonomi inklusif pembangunan ekonomi yang dilaksanakan seyogianya mampu mendorong pertumbuhan, meningkatkan pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Nilai IPEI dikelompokkan menjadi 3: kurang memuaskan (skor 1-3), memuaskan (skor 4-7), dan sangat memuaskan (skor 8-10).

Nilai IPEI Kabupaten Boyolali selama 2011-2021 menunjukkan fluktuasi naik turun. Selama periode tersebut hanya pada Tahun 2012 nilai IPEI Kabupaten Boyolali lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sedangkan di periode lain nilainya lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2021 nilai IPEI Kabupaten Boyolali sebesar 5,76 dan masuk dalam kategori “memuaskan”.





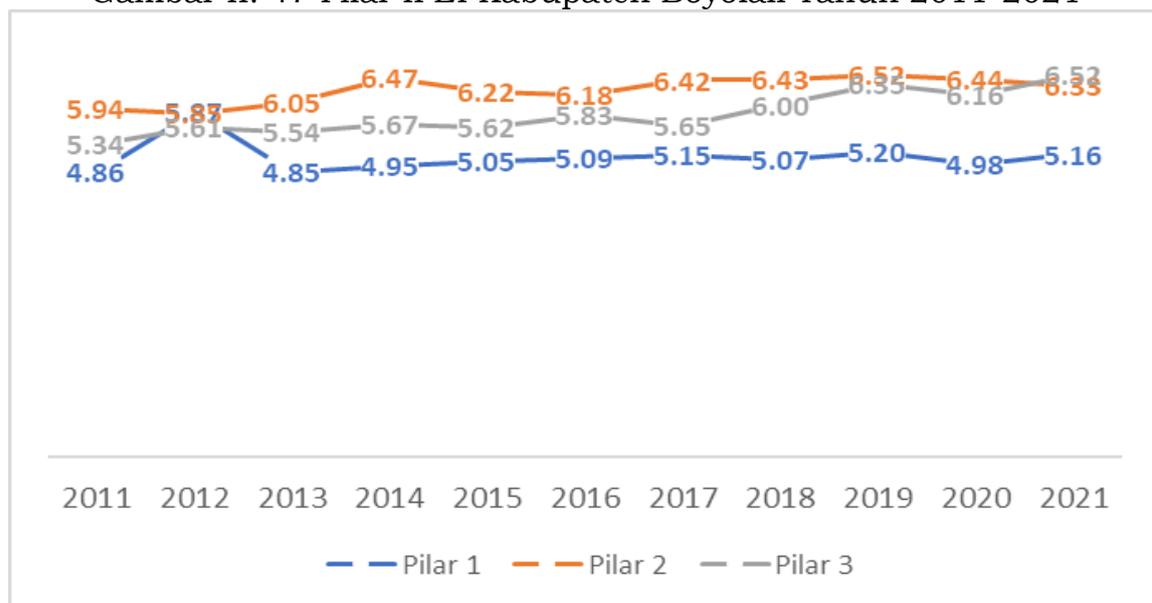
Gambar II. 46 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022

Dari nilai IPEI tersebut apabila dilihat dari kompositnya, Pilar 2 (dua) memiliki nilai yang tertinggi dan yang terendah adalah Pilar 2 (dua). Dengan demikian dalam hal Pilar 1 (satu) yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Kabupaten Boyolali masih memerlukan perhatian. Selain itu di Tahun 2021 nilai indeks Pilar 2 (dua) menunjukkan penurunan dari 6,44 menjadi 6,33 sementara Pilar 1 (satu) dan Pilar 3 (tiga) menunjukkan kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan belum berdampak optimal pada kinerja pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Gambar II. 47 Pilar IPEI Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022

#### 2.3.1.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu daerah atau negara. Biasanya dihitung dengan membandingkan jumlah usaha baru dengan total jumlah usaha dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi rasio





kewirausahaan, semakin tinggi pula tingkat aktivitas kewirausahaan di wilayah tersebut.

Tabel II. 37 Rasio Kewirausahaan Tahun 2005-2023

Uraian	2005	2010	2015	2020	2023
Rasio Kewirausahaan	3,2	3,7	3,2	2,0	3,7

Sumber: Diskopnaker Kabupaten Boyolali, 2024

Berdasarkan data rasio kewirausahaan Kabupaten Boyolali dari Tahun 2005 hingga 2023, terlihat fluktuasi yang cukup signifikan. Rasio kewirausahaan naik dari 3,2% pada Tahun 2005 menjadi 3,7% pada Tahun 2010 dan 2023, menunjukkan peningkatan aktivitas kewirausahaan dalam 5 (lima) tahun tersebut. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada Tahun 2020 menjadi hanya 2, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti situasi ekonomi global atau peristiwa lokal tertentu. Meskipun fluktuatif, upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan rasio kewirausahaan bisa menjadi fokus penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

### 2.3.1.5 Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor pendorong perekonomian Kabupaten Boyolali. Pariwisata didukung dengan ketersediaan jumlah rumah makan, akomodasi, kamar, dan tempat tidur hotel yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel II. 38 Jumlah Rumah Makan/Restoran

Uraian	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah makan/restoran	25	17	28	43	99	24	13	223	132

Sumber: Disporapar Kab. Boyolali, 2024

Tabel II. 39 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Teras	3	2	2	12	8
2	Simo	2	0	0	7	11
3	Mojosongo	8	4	2	16	21
4	Gladagsari	0	0	0	10	1
5	Ngemplak	3	0	0	14	22
6	Karanggede	0	0	1	11	2
7	Andong	0	0	0	6	7
8	Boyolali	13	2	6	38	26
9	Sawit	0	1	0	9	1
10	Kemus	0	1	0	7	0
11	Ampel	2	12	0	3	1
12	Nogosari	0	0	0	6	7
13	Cepogo	0	1	0	12	3
14	Wonosamodro	0	0	0	7	0
15	Klego	2	0	0	4	10
16	Selo	0	0	0	6	0
17	Banyudono	8	1	1	18	6
18	Wonosegoro	1	0	0	17	4
19	Tamansari	0	0	0	1	0





No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
20	Sambi	6	0	0	16	0
21	Musuk	0	0	1	2	2
22	Juwangi	1	0	0	1	0
JUMLAH		49	24	13	223	132

Sumber: Disporapar Kab. Boyolali, 2024

Tabel II. 40 Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur Hotel

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akomodasi	18	22	23	26	27	27
2	Kamar	483	575	8795	8860	8.860	8860
3	Tempat Tidur	669	761	10082	10207	10.207	10207

Sumber: Disporapar Kab. Boyolali, 2024

Tabel II. 41 Jumlah Akomodasi, Kamar, Tempat Tidur Hotel Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023

Kecamatan Subdistrict	Hotel/Hotels		Losmen/Inns		Homestay/Homestay	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1. Selo	1	1	-	-	27	27
2. Ampel	1	1	-	-	32	32
3. Gladagsari	-	-	-	-	-	-
4. Cepogo	1	1	-	-	19	19
5. Musuk	-	-	-	-	-	-
6. Tamansari	-	-	-	-	-	-
7. Boyolali	11	11	-	-	4	4
8. Mojosongo	2	2	-	-	7	7
9. Teras	3	3	-	-	1	1
10. Sawit	-	-	-	-	18	18
11. Banyudono	2	2	-	-	-	-
12. Sambi	-	-	-	-	-	-
13. Ngemplak	5	5	-	-	-	-
14. Nogosari	1	1	-	-	-	-
15. Simo	-	-	-	-	-	-
16. Karanggede	1	1	-	-	2	2
17. Klego	-	-	-	-	-	-
18. Andong	-	-	-	-	-	-
19. Kemusu	-	-	-	-	-	-
20. Wonosegoro	-	-	-	-	-	-
21. Wonosamodro	-	-	-	-	2	2
22. Juwangi	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Boyolali	28	28	0	0	112	112

Sumber: Disporapar Kab. Boyolali, 2024

Tabel II. 42 Pelayanan Bidang Pariwisata Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan wisatawan	orang	598.174	338.760	598.174	695.782	1.162.463
2	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	buah	96	99	106	297	283
3	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan /hotel.	buah	21	22	27	27	27

Sumber: Disporapar Kab. Boyolali, 2024





Tercapainya kunjungan wisatawan pada Tahun 2023 sebesar 1.162.463 orang yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 1.161.615 dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.348 orang. Jumlah ini merupakan jumlah wisatawan yang Tercapainya kunjungan wisatawan pada Tahun 2023 sebesar 1.162.463 orang yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 1.161.615 dan wisatawan mancanegara sebanyak 1.348 orang. Jumlah ini merupakan jumlah wisatawan yang tercatat melalui retribusi dan objek-objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun milik swasta.

Selanjutnya untuk jenis, kelas, dan jumlah restoran di Kabupaten Boyolali semakin berkurang jumlahnya meskipun tidak signifikan. Berkurang menjadi 283 (dua ratus delapan puluh tiga) dari 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) restoran dan rumah makanan dengan alasan tidak bisa berkembang atau beroperasi. Namun variasi hidangan dan menu beragam masih tersedia dalam melayani pola warga masyarakat Kabupaten Boyolali yang terbuka menerima hadirnya rumah makan baru seiring dengan meningkatnya keramaian di beberapa titik di wilayah Kabupaten Boyolali yang juga menyebar di wilayah kecamatan terutama yang mendukung sektor pariwisata.

Sedangkan jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 sama dengan 2022 yaitu 28 (dua puluh delapan) hotel dan penginapan. Untuk Tahun 2023 tercatat 28 (dua puluh delapan) hotel, karena terdapat 1 (satu) buah hotel yang sudah tidak beroperasi namun ada penambahan 1 (satu) buah hotel.

Progres positif dalam ketersediaan restoran dan hotel juga dikarenakan sangat baiknya iklim investasi di Kabupaten Boyolali. Dengan berbagai kemudahan dalam pelayanan perizinan membuka peluang bagi pengusaha untuk membuka usaha restoran maupun hotel sebagai pendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Boyolali.

Hal ini disebabkan karena beberapa objek wisata mengalami beberapa pembenahan baik aksesibilitas maupun amenitasnya. Hal yang tak kalah pentingnya adalah *branding* Kabupaten Boyolali dengan beberapa *event* pariwisatanya dan ikon-ikon Kabupaten Boyolali.

**2.3.1.6 Pertanian**

Sektor pertanian terdiri dari Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

**1. Pertanian**

Rincian capaian kinerja untuk produktivitas tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, dan ubi kayu, serta komoditas tanaman pangan yang lain dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel II. 43 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pertanian Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per ha						
	1. padi sawah	Ku/Ha	58,32	58,95	57,17	58,63	57,34
	2. padi ladang	Ku/Ha	34,97	32,83	-	-	-
	3. jagung	Ku/Ha	53,15	49,2	62,81	56,00	55,59
	4. kedelai	Ku/Ha	10,12	13,74	16,52	13,40	12,82
	5. kacang tanah	Ku/Ha	12,37	11,27	14,87	12,33	12,35
	6. ubi kayu	Ku/Ha	323,37	38,67	357,91	193,05	193,50
	7. ubi jalar	Ku/Ha	48,33	198,1	180,87	177,64	136,79

Sumber: *Dispertan Kab. Boyolali. 2024*





Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Peternakan

Produksi ikan dan produk olahan ikan mulai Tahun 2012-2019 mengalami peningkatan, tetapi pada Tahun 2020-2021 produksi perikanan mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 dan pemerintah memberlakukan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berakibat pada menurunnya pemasaran produk perikanan. Tahun 2021 produk olahan ikan mengalami kenaikan karena pemasaran produk olahan ikan dapat dilakukan secara daring. Tahun 2022-2023 produksi ikan dan produk olahan ikan terus mengalami peningkatan.

Kabupaten Boyolali memiliki keanekaragaman ternak dengan komoditas utamanya sapi potong dan sapi perah. Populasi ternak merupakan faktor utama penunjang pencapaian produksinya. Dari fluktuasi populasi sapi, dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 terjadi penurunan. Mulai terjadi peningkatan pada Tahun 2015 dengan adanya Program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab) pada Tahun 2016. Program ini merupakan gerakan nasional sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya guna lebih mendorong pertumbuhan sapi dan kerbau. Dilanjutkan dengan kegiatan Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri) pada Tahun 2020, sehingga terjadi kenaikan populasi ternak dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Memasuki Tahun 2022 populasi masih stabil, tetapi dengan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dimulai awal Mei 2022 di lanjutkan dengan wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD), sampai awal Tahun 2023. Dampak wabah PMK lebih banyak pada sapi perah sehingga terjadi penurunan yang signifikan sampai 33.439 ekor atau 36%, walaupun pada sapi potong juga terjadi penurunan 8.858 ekor. Untuk wabah LSD dampaknya lebih pada sapi potong dengan penurunan sampai 11.940 ekor. Untuk komoditas lain unggas adalah ayam ras petelur, ayam buras, burung puyuh, dan ras pedaging juga mengalami fluktuasi yang beragam dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini dipengaruhi juga oleh penyakit dan regulasi pemerintah. Tetapi fluktuasi tersebut tidak mempengaruhi Kabupaten Boyolali sebagai penyangga telur di Solo Raya. Untuk komoditas ternak lain beragam dan fluktuatif.



Tabel II. 44 Capaian Aspek Produksi Peternakan Tahun 2012-2023

No	Produksi ternak	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging Sapi (kg)	10.237.400,00	10.125.319,00	9.902.400,00	8.209.230,00	11.361.166,00	11.960.493,00	13.294.281,00	14.147.827,00	14.500.750,00	14.081.221,00	13.897.710,00	13.783.272,80
2	Telur Unggas (kg)	27.115.418,62	27.600.001,14	11.707.836,81	23.462.427,93	27.734.000,00	28.665.464,77	34.608.000,00	28.020.000,00	27.907.000,00	27.006.000,00	27.248.741,04	22.484.079,00
3	Susu (liter)	48.085.223,25	49.421.326,16	45.437.600,00	46.820.176,73	49.900.000,00	49.130.000,00	49.540.000,00	49.988.000,00	48.626.459,14	51.560.000,00	51.962.322,91	38.863.257,00
4	Produksi ikan (ton)	24.773,00	24.773,00	24.464,00	33.597,00	35.346	37.155	37.162	36.975	36.271	36.081	35.494	36.693
5	Produk olahan ikan (ton)	-	-	-	-	65	64	70	99	80	117	213	228

Sumber: Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, 2024

Tabel II. 45 Capaian Aspek Populasi Peternakan Tahun 2012-2023

No.	Jenis Ternak	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong	98.248	98.248	80.092	86.988	95.651	96.066	99.311	106.599	106.765	106.651	97.793	85.853
2	Sapi Perah	88.533	88.533	77.805	86.363	89.844	92.619	92.856	94.088	94.143	94.143	60.704	59.389
3	Kerbau Potong	1.233	1.222	862	841	755	737	745	749	870	861	668	659
4	Kuda	618	602	286	303	302	303	315	326	387	386	318	307
5	Babi	6.672	9.724	3.249	4.776	6.002	6.054	6.523	6.767	6.789	6.789	4.886	4.945
6	Kambing Potong	106.234	109.234	93.626	88.051	89.809	94.392	95.428	101.418	103.639	103.639	88.193	85.727
7	Domba	55.740	56.340	53.872	48.644	49.319	48.987	50.717	55.412	56.079	56.079	52.559	51.985
8	Ayam Ras Petelur Produktif	1.929.302	2.050.257	1.038.513	1.872.923	2.357.886	2.512.773	2.512.941	2.339.364	2.500.441	2.500.441	2.520.000	2.065.714
9	Ayam Ras Pedaging	2.913.350	3.084.291	1.460.420	3.488.943	14.501.873	9.505.564	10.990.245	12.170.494	13.307.908	13.307.908	8.527.844	10.739.366
10	Ayam Buras	1.852.756	1.742.756	725.768	887.706	815.585	792.753	780.255	778.799	788.580	788.580	687.049	466.117
11	Itik	197.357	197.357	139.632	172.056	15.883	167.114	166.687	166.168	167.645	167.645	167.727	163.449
12	Kelinci	4.933	4.933	9.489	7.494	8.727	8.981	9.283	9.577	9.628	9.628	9.188	7.961
13	Burung Puyuh	1.661.898	1.661.898	1.080.968	1.757.380	1.631.290	1,590,613	1,626,643	1,607,551	1.620.120	1.620.120	1.417.509	1.410.691
14	Entog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.083	20.799	23.078
15	Angsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.613	2.081	2.187

No.	Jenis Ternak	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	Merpati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.727	9.947	10.798
17	Sapi Potong Eks Import (BX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	255	245
18	Kerbau Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kambing Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ayam Ras Petelur Afkir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ayam Ras Petelur Pejantan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.238	271.000

Sumber: Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, 2024

### 3. Perikanan

Tabel II. 46 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perikanan  
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi ikan budidaya	Ton	34.845,1	34.092,6	34.180,7	33.881,4	34.022,4
2	Produksi ikan tangkap	Ton	1.600,1	2.223,3	1.899,9	2.612,6	2.671,39
3	Produksi pengolahan perikanan	Ton	99,0	260,1	117,38	212,67	227,92

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Boyolali, 2024

#### a. Produksi Ikan

Produksi ikan secara total, produksi perikanan budi daya ditambah produksi perikanan tangkap dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan produksi, yaitu produksi Tahun 2019 sebanyak 36.445,2 ton, Tahun 2020 sebanyak 36.315,9 ton dan Tahun 2021 sebanyak 36.080,6 ton. Mulai Tahun 2022 produksi ikan mulai meningkat menjadi 36.494 ton. Demikian juga pada Tahun 2023 produksi ikan secara total mengalami peningkatan menjadi 36.693,79 ton. Pada Tahun 2022 produksi ikan mengalami peningkatan karena produksi ikan tangkap mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 712,7 ton sedangkan produksi ikan budidaya mengalami penurunan produksi, yaitu sebesar 299,3 ton. Pada Tahun 2022, Dinas Peternakan dan Perikanan melalui Bidang Perikanan mengalokasikan penguatan modal usaha berupa alat tangkap perikanan untuk kelompok nelayan di wilayah Kecamatan Kemusu, sehingga sarana prasarana penangkapan ikan terpenuhi. Tahun 2023 produksi ikan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap mengalami kenaikan produksi. Perikanan budidaya mengalami peningkatan sebesar 141 ton sedang perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 58,79 ton. Kegiatan nelayan pada penangkapan ikan di perairan darat menyumbang produksi sebesar 7,28% produksi ikan (2.671,39 ton).

#### b. Produksi Olahan Ikan

Produksi olahan ikan mengalami peningkatan hingga Tahun 2020. Sedangkan pada Tahun 2021, produksi pengolahan ikan mengalami penurunan produksi sebesar 142,72 ton atau sebesar 55%, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan produksi olahan ikan sebesar 15,25 ton atau sebesar 7,17 %. Hal ini disebabkan oleh:

- Kegiatan gemar ikan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun, dengan tujuan untuk merangsang kecintaan masyarakat Kabupaten Boyolali akan pentingnya mengkonsumsi ikan bagi kesehatan dan meningkatkan kecerdasan anak.
- Pembinaan rutin dinas, melalui petugas lapangan.

#### 2.3.1.7 Perdagangan

Capaian aspek bidang perdagangan Tahun 2023 nilai bersih ekspor *Free on Board* (FOB) untuk komoditas hasil industri sebesar US\$ 486.310.506,21 dari nilai total ekspor sebesar US\$ 649.862.545,55, jika disandingkan dengan nilai ekspor Tahun 2022 mengalami penurunan 22,45%, sedangkan untuk nilai FOB menurun sebesar 18,62%.

Penurunan ekspor disebabkan kondisi perekonomian dunia melemah karena adanya perang di negara-negara Timur Tengah yang mengakibatkan perekonomian lesu.

**Tabel II. 47 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perdagangan  
Tahun 2019-2023**

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil (000)				
			2012	2015	2020	2022	2023
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	1,50	3,63	-3,72	4,33	5,60
		Juta(Rp)	2.286.534,98	2.567.851,22	3.032.735,37	3.436.543,38	3.629.072,09
		%	14,31	12,94	12,41	12,53	12,42
		Juta(Rp)	2.431.512,79	3.050.289,90	4.057.676,22	4.861.073,00	5.305.304,28
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$				2.611.677.939,71	486.310.506,21
	Ekspor	US \$			280.754.494,77	2.894.689.954,40	649.862.545,55

Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali, 2024

Keterangan:

\* = Data dari BPS (not available)

### 2.3.1.8 Perindustrian

Sebagai wujud dalam rangka meningkatkan daya saing serta pemberdayaan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Boyolali salah satunya dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada IKM sehingga produk dan pemasarannya dapat diterima oleh masyarakat baik lokal maupun nasional sehingga Kabupaten Boyolali dapat menjadi kabupaten yang ramah industri dan berdaya saing. Jenis industri Kabupaten Boyolali setiap tahunnya mengalami peningkatan dari level kecil, menengah, sampai industri besar dari Tahun 2019-2023.

**Tabel II. 48 Data Industri Tahun 2019-2023**

Jenis Industri	2019	2020	2021	2022	2023
Kecil	9.630	9.630	9.750	10.085	10.297
Menengah	90	90	90	92	92
Besar	29	29	29	37	37
Jumlah	9.749	9.749	9.869	10.214	10.426

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali, 2024

Adapun industri kecil dan menengah yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi sehingga mampu mengembangkan usahanya mencapai 685 (enam ratus delapan puluh lima) IKM pada Tahun 2023 serta produk dari IKM yang memperoleh fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Menengah sejumlah 20 (dua puluh) sertifikat, sertifikasi TKDN industri kecil sejumlah 21 (dua puluh satu) sertifikat dan sertifikasi halal sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sertifikat.

Tabel II. 49 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perindustrian  
Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil (000)				
			2012	2015	2020	2022	2023
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	1,50	3,63	-3,72	4,33	5,60
		Juta(Rp)	2.286.534,98	2.567.851,22	3.032.735,37	3.436.543,38	3.629.072,09
		%	14,31	12,94	12,41	12,53	12,42
		Juta(Rp)	2.431.512,79	3.050.289,90	4.057.676,22	4.861.073,00	5.305.304,28
2	Ekspor Bersih Perdagangan	US \$				2.611.677.939,71	486.310.506,21
	Ekspor	US \$			280.754.494,77	2.894.689.954,40	649.862.545,55

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali, 2024

### 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia menjadi komponen dari masyarakat yang berperan penting dalam mencapai pembangunan daerah. Berperan sebagai kelompok sasaran juga sebagai pelaksana pembangunan. Pengembangan SDM diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur. Hal ini guna memberikan kesempatan kepada semua masyarakat untuk berkehidupan layak dan berkompetensi unggul.

#### 2.3.2.1 Pendidikan

SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas dari SDM yang ada, sedangkan kualitas SDM tercermin antara lain dari aspek pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah ke depan memerlukan SDM yang berpendidikan dan berkualitas. Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, bahkan undang-undang mensyaratkan alokasi dana pemerintah sebesar 20% untuk pendidikan.

Di Kabupaten Boyolali proporsi penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas dan berpendidikan terakhir perguruan tinggi hanya 6,53%. Penduduk yang berpendidikan tertinggi SD, SMP, dan SMA sederajat masih mendominasi. Hal ini perlu diantisipasi karena menyangkut kualitas SDM untuk mendukung pembangunan daerah. Bila dalam jangka panjang belum ada perubahan signifikan, sangat mungkin SDM penggerak pembangunan di Kabupaten Boyolali akan diisi oleh masyarakat luar Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 50 Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Tahun 2023

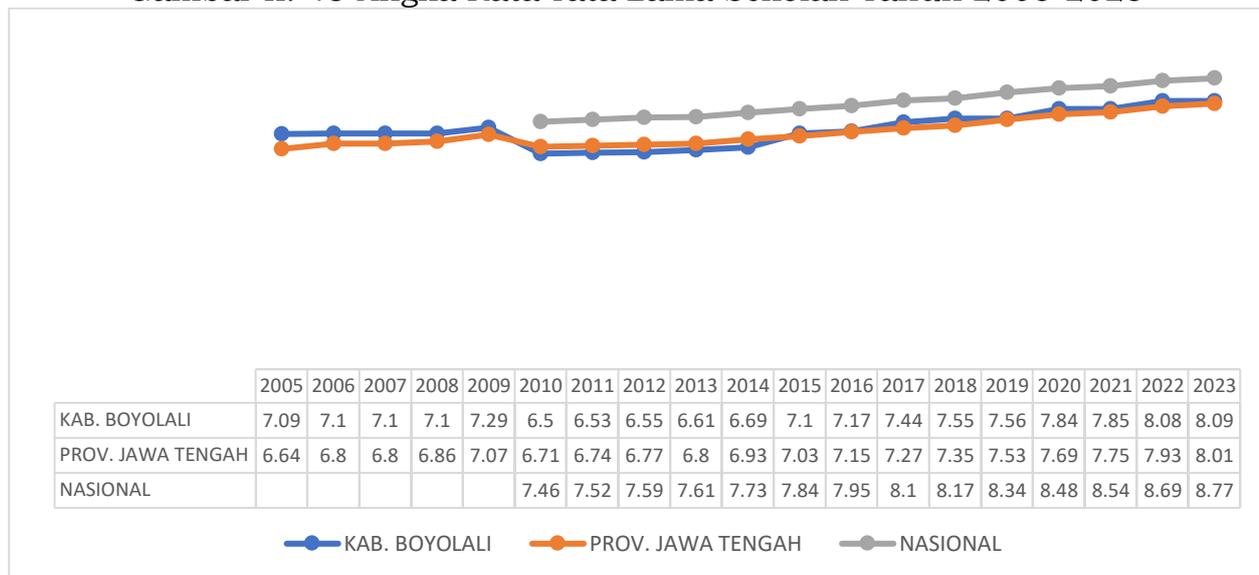
Kabupaten/Kota	Tidak mempunyai Ijazah	SD/MI/ Sederajat	SMP/MTs/ Sederajat	SMA/SMK/MA/ Sederajat	Perguruan Tinggi	Jumlah
Kab. Boyolali	15,62	24,9	25,25	27,7	6,53	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, 2024

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 (lima belas) tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang

dihabiskan oleh penduduk berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS dihitung untuk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 (dua puluh lima) tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar II. 48 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2005-2023

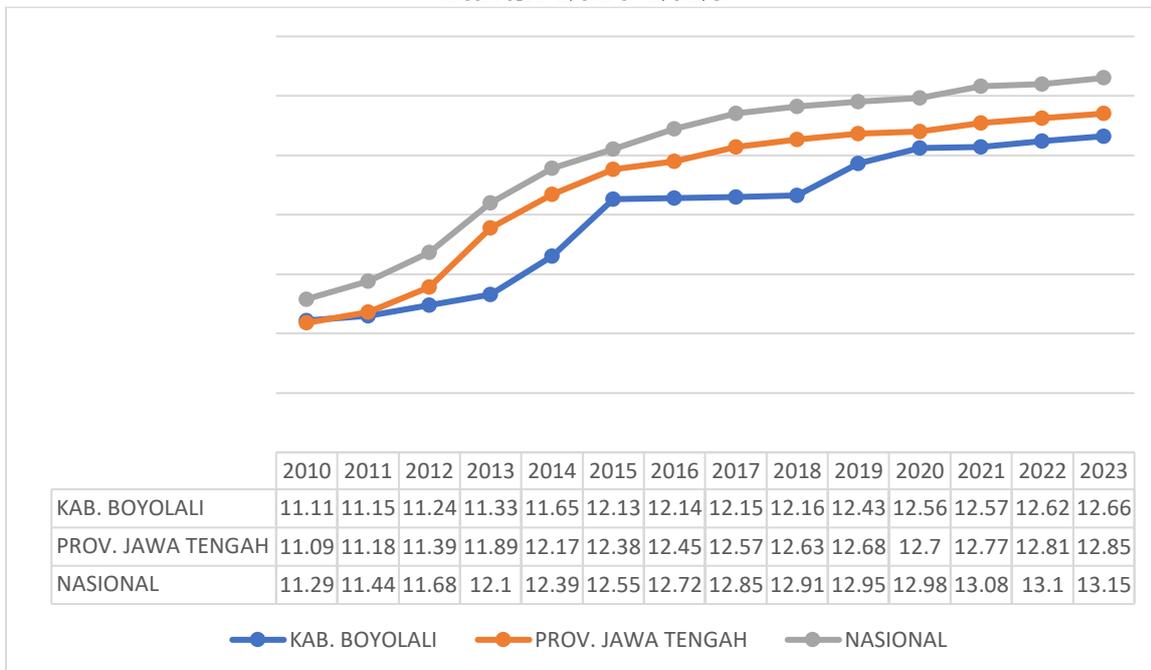


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2005-2023; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005-2023; BPS Nasional, 2010-2023

Selama 20 (dua puluh) tahun terakhir, Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi nilai angka rata-rata lama sekolah. Pada Tahun 2005 nilai ARLS adalah 7,10 dan mengalami penurunan pada Tahun 2010 sebesar 0,6 dibanding Tahun 2005. Pada Tahun 2015 rata-rata lama sekolah yaitu 7,10 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga akhir periode Tahun 2023 yaitu 8,09 tahun.

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, Angka Melek Huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung IPM dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

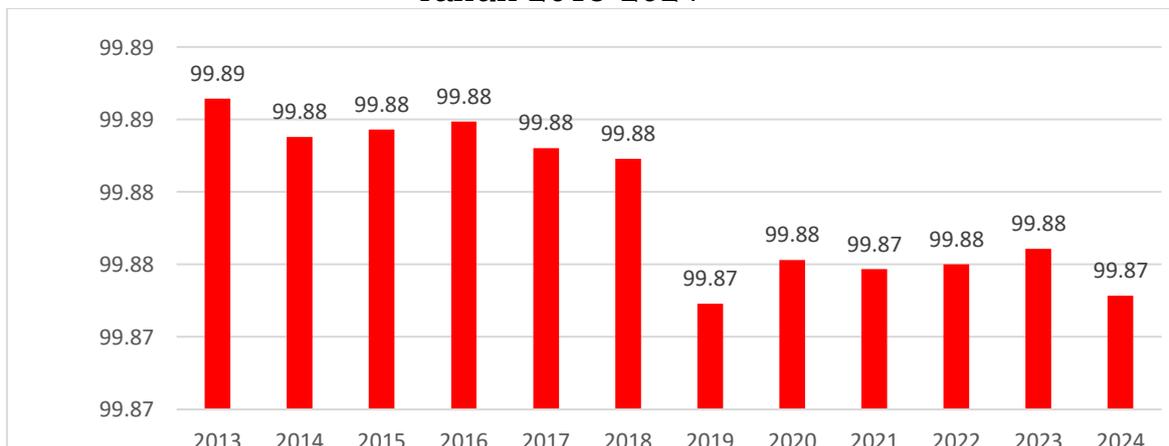
Gambar II. 49 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Boyolali, Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2010-2023; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010-2023; BPS Nasional, 2010-2023;

Angka HLS Kabupaten Boyolali selama akhir periode 2010-2023 selalu mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai HLS yaitu 11,11, kemudian meningkat menjadi 12,13 di Tahun 2015 dan terus meningkat hingga akhir Tahun 2023 mencapai angka 12,66. Nilai HLS >12 menunjukkan bahwa lama sekolah di Kabupaten Boyolali telah mencapai target wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski demikian Angka HLS Kabupaten Boyolali masih lebih rendah jika dibandingkan rata-rata HLS Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 yang mencapai 12,85 tahun. Selain itu, HLS di Kabupaten Boyolali masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 (delapan belas) tahun sehingga Pemerintah Kabupaten Boyolali harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Boyolali.

Gambar II. 50 Proporsi Siswa Kelas 1 yang Menamatkan Sekolah Dasar Tahun 2013-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

Tabel II. 51 Angka Literasi dan Numerasi Tahun 2022-2024

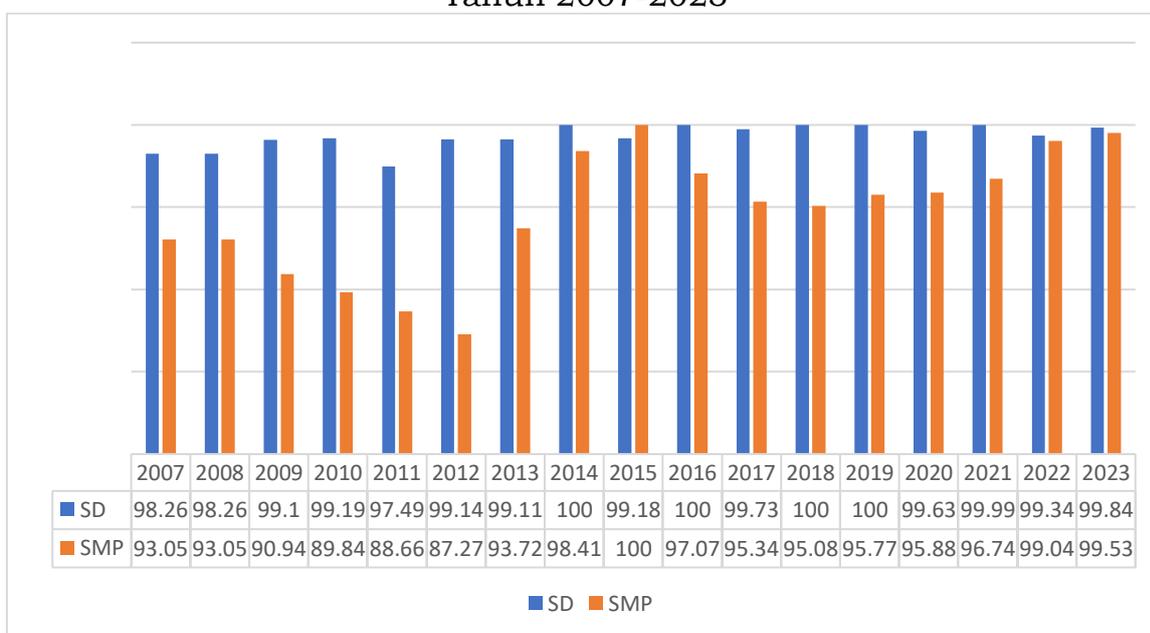
Jenjang	2022		2023		2024	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
SD	1,8	1,62	78,92	67,11	86,14	81,6
SMP	1,87	1,75	78,27	62,15	85,34	83,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting peningkatan pendidikan Kabupaten Boyolali. Literasi merujuk pada kemampuan menulis sedangkan numerasi terhadap kemampuan berhitung masyarakat. Kondisi literasi dan numerasi Kabupaten Boyolali di Tahun 2022 sampai 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik jenjang SD maupun SMP.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap pembinaan dan pengembangan wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada Tahun 2022, Kabupaten Boyolali memperoleh peringkat 3 (tiga) Provinsi Jawa Tengah dalam Pengukuran IPLM dengan skor 95,48. Dengan perolehan angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi.

Gambar II. 51 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

\*Sejak tahun 2017 urusan pendidikan di tingkat SMA/ SMK dikelola oleh Provinsi

APS di Kabupaten Boyolali menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dalam pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) dari Tahun 2007 hingga 2023. Berdasarkan grafik, APS untuk SD selalu tinggi, berkisar antara 98,14% hingga 99,84%, menunjukkan hampir seluruh anak usia SD bersekolah. Sementara itu, APS SMP menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2007 (93,05%) hingga mencapai puncaknya di Tahun 2015 (100%), meskipun terdapat beberapa fluktuasi dalam rentang waktu tersebut. Setelah Tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke provinsi, namun APS SMP tetap relatif stabil di atas 95%. Ini mengindikasikan adanya perhatian serius dalam mempertahankan partisipasi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 52 Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2023

NO	JENJANG	TAHUN								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,019%	0,01%
2	SMP	0,21%	0,09%	0,02%	0,01%	0,09%	0,10%	0,15%	0,01%	0,02%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Angka putus sekolah mencerminkan persentase siswa yang berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data angka putus sekolah di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2015 hingga 2023, tingkat putus sekolah pada jenjang SD relatif sangat rendah dan cenderung stabil di bawah 0,05%, dengan puncak tertinggi sebesar 0,03% pada beberapa tahun. Pada jenjang SMP, angka putus sekolah menunjukkan penurunan signifikan dari 0,21% pada Tahun 2015 menjadi hanya 0,02% pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan peningkatan yang konsisten dalam mempertahankan siswa untuk tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama. Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Boyolali tampaknya berhasil menurunkan angka putus sekolah dalam kurun waktu tersebut.

Tabel II. 53 Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2015-2023

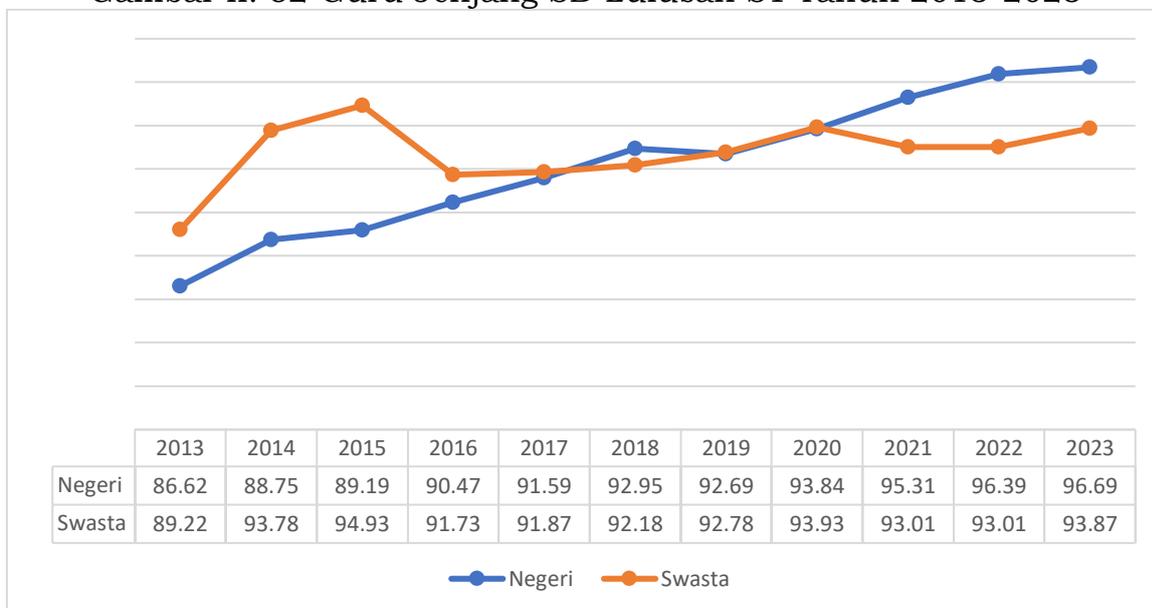
NO	JENJANG	TAHUN								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD	97,67%	98,16%	98,64%	99,75%	99,59%	99,55%	97,50%	99,23%	99,41%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

Angka melanjutkan sekolah mencerminkan persentase siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya setelah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya. Berdasarkan data angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2015 hingga 2023, terlihat bahwa persentase siswa SD yang melanjutkan ke SMP sangat tinggi dan relatif stabil. Dimulai dari 97,67% pada Tahun 2015, angka ini menunjukkan peningkatan dan mencapai puncaknya di 99,75% pada Tahun 2018. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada Tahun 2021 menjadi 97,50%, angka tersebut kembali meningkat menjadi 99,41% pada Tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa hampir semua siswa SD di Kabupaten Boyolali melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat SMP, mencerminkan upaya yang efektif dalam mendorong kelanjutan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah di wilayah tersebut.

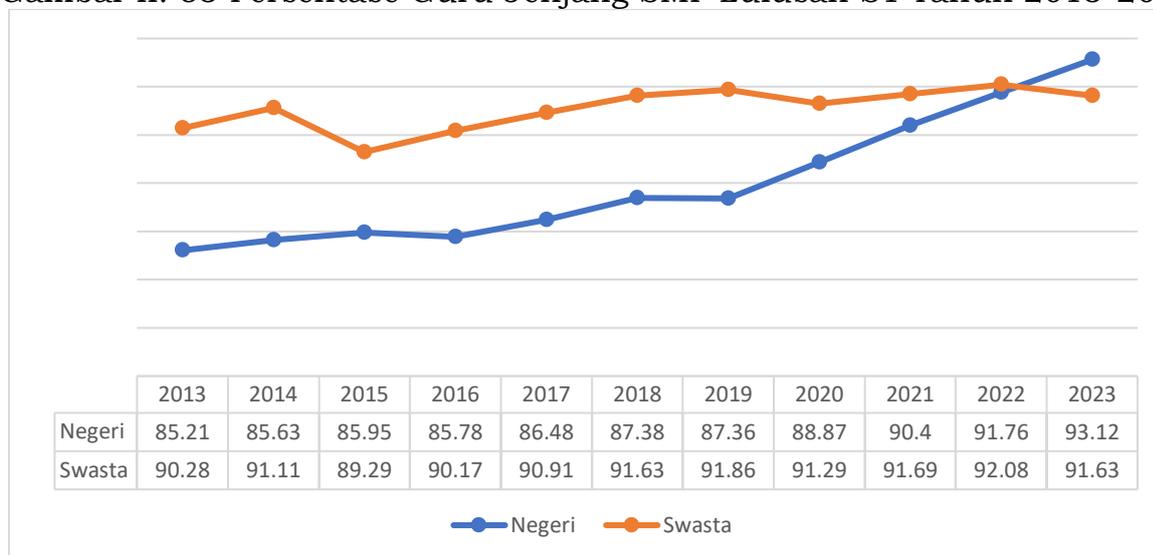
Persentase guru SD dan SMP lulusan S1 di Kabupaten Boyolali menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas pendidikan guru di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Seiring berjalannya waktu, ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah guru yang memiliki gelar S1, baik di jenjang SD maupun SMP. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga pengajar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang diterima oleh para siswa. Dengan semakin tingginya persentase guru yang berpendidikan S1, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Boyolali akan terus mengalami peningkatan, memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan pendidikan di daerah tersebut.

Gambar II. 52 Guru Jenjang SD Lulusan S1 Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 53 Persentase Guru Jenjang SMP Lulusan S1 Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

### 2.3.2.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berelasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumber daya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif.

Pengelolaan kesehatan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup tersebut antara lain tercermin melalui ukuran Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan banyaknya tahun yang



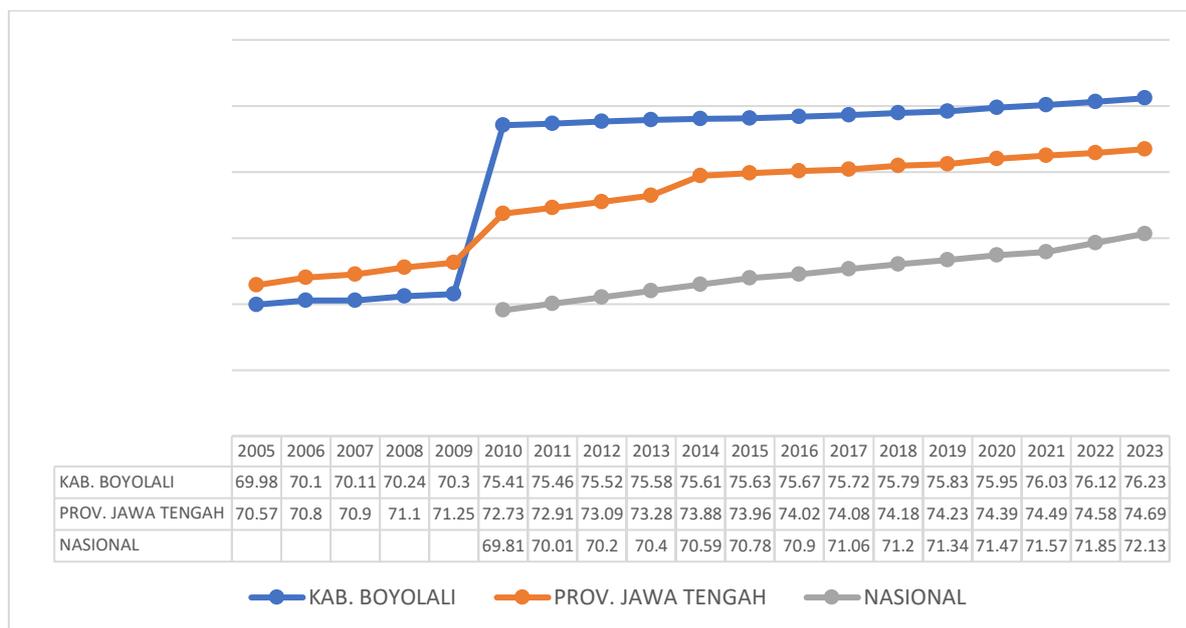
dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Tabel II. 54 Angka Harapan Hidup Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2023

Indikator	Tahun				
	2005	2010	2015	2020	2023
Angka Harapan Hidup	69,98	75,41	75,63	75,95	76,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 54 AHH Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2005-2023; BPS Provinsi Jawa Tengah, 2005-2023; BPS Nasional, 2010-2023

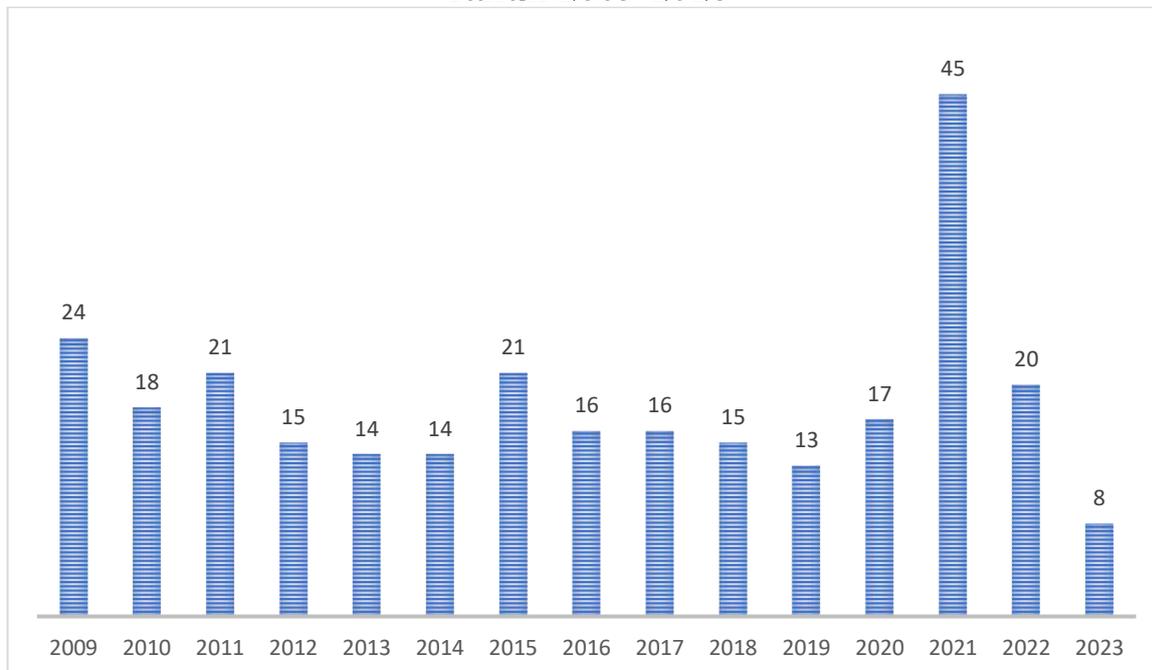
Pada Tahun 2005, AHH di Kabupaten Boyolali adalah sebesar 69,98 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 75,41 tahun pada Tahun 2010. Peningkatan yang cukup tajam ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan AHH yang diadopsi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada periode waktu selanjutnya, AHH di Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun terus meningkat dan pada Tahun 2023 menjadi sebesar 76,23 tahun, yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan AHH Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama, yaitu sebesar 74,69 tahun. AHH sebesar 76,23 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Boyolali dapat menjalani hidup selama 76 (tujuh puluh enam) tahun.

Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Boyolali tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Boyolali termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional di mana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.





Gambar II. 55 Jumlah Angka Kematian Ibu di Kabupaten Boyolali  
Tahun 2009-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2024

Pada tahun-tahun terakhir, kasus kematian ibu di Kabupaten Boyolali sangat memprihatinkan. Dari Tahun 2009 hingga 2023, data ini menggambarkan sebuah pola naik turun yang mencerminkan tantangan serius dalam sistem kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2009, sejumlah 24 (dua puluh empat) kasus kematian ibu. Angka ini menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan di mana banyak wanita meninggal saat hamil, melahirkan maupun nifas. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya, angka tersebut sedikit menurun menjadi 18 (delapan belas) kasus pada Tahun 2010, ini menunjukkan upaya perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Namun, harapan untuk penurunan yang stabil ternyata tidak terjadi. Pada Tahun 2011, angka kembali naik menjadi 21 (dua puluh satu) kasus, menunjukkan adanya tantangan yang terus menerus dalam menanggulangi masalah kematian ibu. Penurunan terjadi pada Tahun 2012 dengan 15 (lima belas) kasus, namun pola naik turun ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2014 mencatatkan 14 (empat belas) kasus, lalu naik lagi menjadi 21 (dua puluh satu) kasus pada Tahun 2015. Pada tahun-tahun berikutnya, pola naik turun tetap berlanjut: 16 (enam belas) kasus pada Tahun 2016, 16 (enam belas) kasus pada Tahun 2017, dan 15 (lima belas) kasus pada Tahun 2018. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki Pelayanan Kesehatan, tantangan besar masih ada.

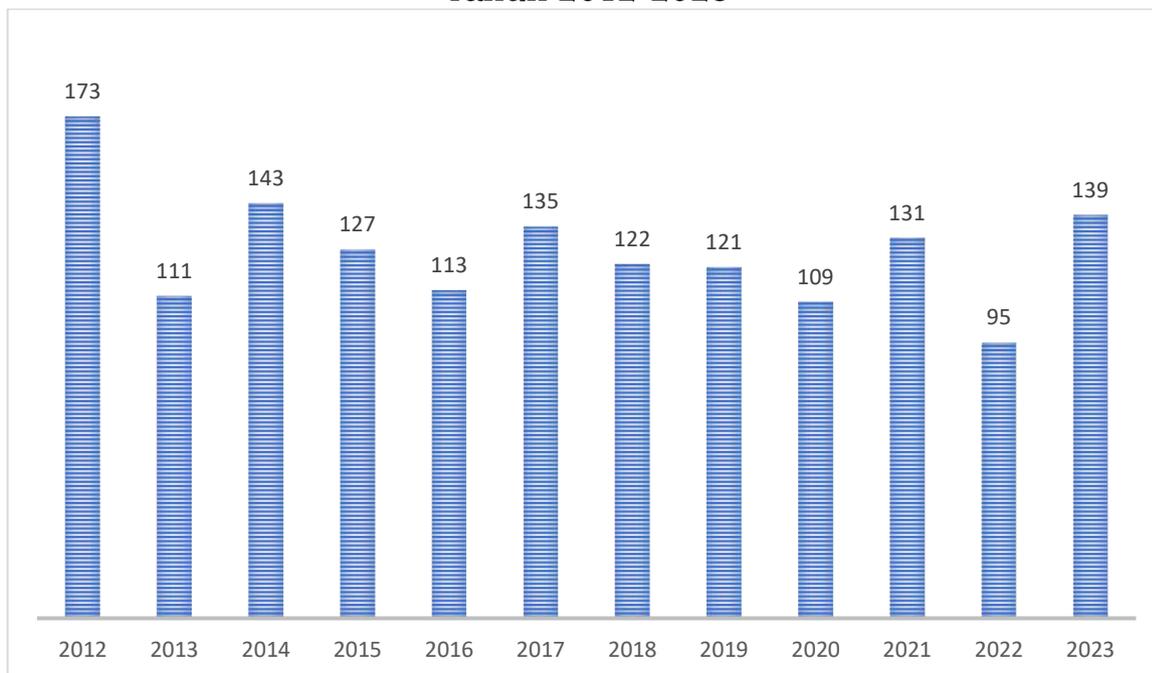
Tahun 2019 mencatat 13 (tiga belas) kasus, menunjukkan sedikit penurunan tetapi belum cukup signifikan untuk mengubah tren jangka panjang. Pada Tahun 2020, angka kembali meningkat menjadi 17 (tujuh belas) kasus, dan pada Tahun 2021, angka tersebut melonjak drastis menjadi 45 (empat puluh lima) kasus. Lonjakan yang sangat besar ini terjadi karena adanya wabah COVID-19.

Tahun 2022 terjadi sedikit penurunan kembali menjadi 20 (dua puluh) kasus, tetapi pada Tahun 2023, angka tersebut turun tajam menjadi 8 (delapan) kasus. Penurunan ini terjadi karena adanya upaya dari berbagai pihak, antara



lain peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, peran organisasi profesi kesehatan, dan juga masyarakat.

Gambar II. 56 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2023



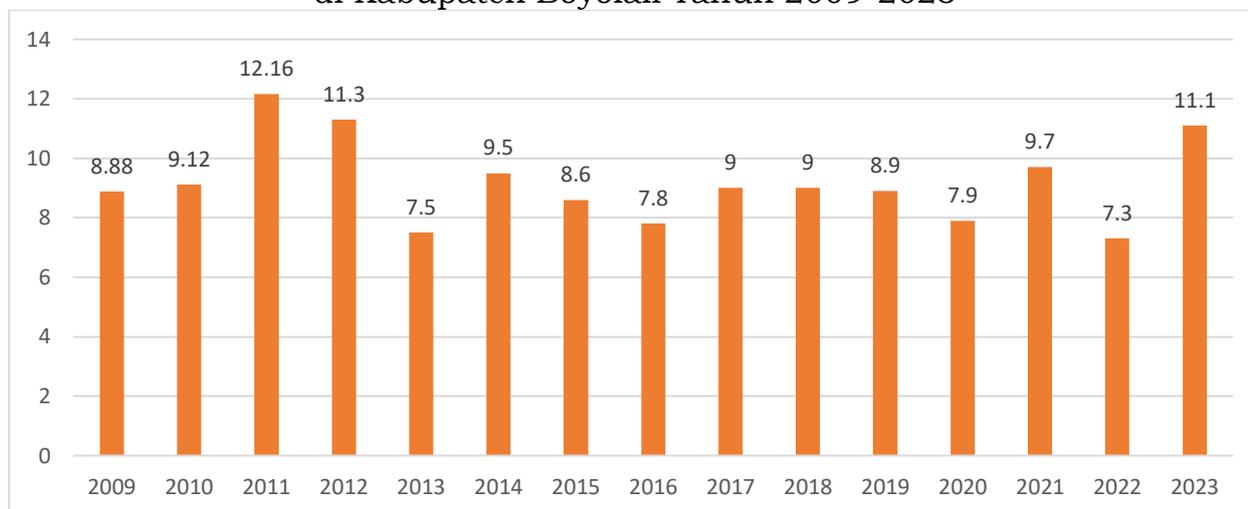
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2024

Pada dasarnya, angka kematian bayi yang naik turun di Kabupaten Boyolali selama periode Tahun 2012 hingga 2023 mencerminkan sebuah tren yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Data yang tercatat menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun, yang memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka kematian bayi.

Pada Tahun 2012, terdapat 173 (seratus tujuh puluh tiga) kasus kematian bayi. Angka ini kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi 111 (seratus sebelas) kasus, sebelum kembali meningkat pada Tahun 2014 menjadi 143 (seratus empat puluh tiga) kasus. Fluktuasi ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya: 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus pada Tahun 2015, 113 (seratus tiga belas) kasus pada Tahun 2016, dan 135 (seratus tiga puluh lima) kasus pada Tahun 2017. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada Tahun 2018 dengan 122 (seratus dua puluh dua) kasus, angka kematian bayi tetap menjadi perhatian serius.

Pada Tahun 2019, data mencatat 121 (seratus dua puluh satu) kasus kematian bayi, yang kemudian sedikit menurun lagi pada Tahun 2020 menjadi 109 (seratus sembilan) kasus. Namun, Tahun 2021 menunjukkan lonjakan kembali dengan 131 (seratus tiga puluh satu) kasus. Tahun 2022 menunjukkan sedikit penurunan dengan 95 (sembilan puluh lima) kasus, namun angka tersebut kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 139 (seratus tiga puluh sembilan) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi angka kematian bayi memerlukan pendekatan yang terus menerus dan komprehensif.

Gambar II. 57 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Boyolali Tahun 2009-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Boyolali, 2024

*Stunting* merupakan satu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis akibat infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021). *Stunting* dihitung dengan menggunakan 2 (dua) metodologi, yakni data elektronik-Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan survei nasional Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)/SKI. Perbedaan ini ada pada sasaran balita, sampel, dan kluster.

Kondisi di Kabupaten Boyolali, pada Tahun 2021, berdasarkan SSGI angka *stunting* sebesar 20,6% dan mengalami penurunan di Tahun 2022 yaitu sebesar 20%. Sedangkan berdasarkan data pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di e-PPGBM, pengukuran pada bulan Desember Tahun 2023 sebesar 8,54%.

Penanganan *stunting* tidak hanya dari sisi intervensi spesifik yaitu pemberian gizi seimbang tinggi protein hewani pada balita dan ibu hamil, pemberian vitamin A pada balita dan ibu nifas, pemberian Fe pada ibu hamil dan remaja putri, dukungan ASI eksklusif dan IMD, pemberian MPASI pada balita gizi kurang dan ibu hamil KEK. Tetapi juga dukungan konvergensi dari Perangkat Daerah terkait berkaitan dengan intervensi sensitif. Demikian juga Kabupaten Boyolali sedang menggalakkan Kabupaten Kota Sehat, perluasan kampung germas, dan aksi bergizi dengan target yang telah ditentukan sehingga angka *stunting* di Kabupaten Boyolali jumlahnya sangat rendah.

Persentase balita *stunting* di Kabupaten Boyolali diatas dari data e-PPGBM untuk angka absolutnya mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebanyak 4.137 balita menjadi 5.020 balita pada Tahun 2023. Upaya pencegahan dan penurunan Balita *stunting* dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif, sehingga mencegah status gizi balita menjadi *stunting*. Intervensi untuk bayi *stunting* yang paling tepat dilakukan sejak janin dalam kandungan sampai pada bayi usia 0-24 bulan (1.000 hari pertama kehidupan).

Berikut ini tabel data Balita *Stunting* di Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023:

Tabel II. 55 Jumlah Balita *Stunting* Tahun 2019-2023

Tahun	Berdasarkan e-PPGBM		Berdasarkan Survey (SKI dan SSGI)
	Jumlah	%	%
2019	4.566	6,7	28,89
2020	4.433	9,25	Tidak ada survey
2021	4.172	8,07	20,7
2022	4.137	7,35	20
2023	5.020	8,54	21,5 (SKI)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2024

Indikator Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan ini ditujukan untuk pembayaran premi Kesehatan bagi masyarakat miskin non PBI, dan pembayaran klaim untuk masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat namun memerlukan perawatan/pengobatan, sehingga masyarakat miskin dapat diringankan beban biayanya bilamana memerlukan pengobatan. Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Boyolali dari Tahun 2019-2023, terus bertambah dan pada bulan Desember Tahun 2023 kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Boyolali sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). Kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar seluruh penduduk Kabupaten Boyolali menjadi peserta Jaminan Kesehatan.

Tabel II. 56 Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2019-2023

Kategori Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Satuan	Hasil				
		2019	2020	2021	2022	2023
PBI APBN	Orang	378.856	418.135	419.577	425.708	445.973
PBI APBD	Orang	74.921	55.184	48.158	53.390	128.377
PPU (Pekerja Penerima Upah)	Orang	259.809	267.582	287.543	310.279	315.563
PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)	Orang	98.012	100.134	105.260	116.907	130.073
BP (bukan Pekerja)	Orang	25.055	23.447	23.993	23.044	28.157
JUMLAH	Orang	836.653	864.482	884.531	929.328	1.048.143
Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan	%	79,5	81,4	82,1	85,77	95,69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2024

Tabel II. 57 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis dan Sarana Kesehatan Tahun 2018 – 2023 (per 100.000 penduduk)

Uraian	Std SNI	2018		2019		2020		2021		2022		2023		
		Jumlah	Rasio											
No.	TENAGA MEDIS													
1	DR SPESIALIS	5.000	151	14,7	102	9,7	170	16,0	152	14,1	156	14,4	147	13,4
2	DOKTER UMUM	5.000	165	16,1	136	12,9	241	22,7	232	21,5	247	22,8	249	22,6
3	DOKTER GIGI	5.000	46	4,5	52	4,9	63	5,9	59	5,5	59	5,4	78	7,1
4	Bidan	2.500	657	64,0	633	60,2	647	60,9	713	66,2	746	68,8	751	68,3
5	Perawat	2.500	1.120	109,2	1.089	103,5	1.154	108,6	1.411	131,0	1.127	104,0	1.165	105,9
	SARANA KESEHATAN													

Uraian	Std SNI	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1 Rumah Sakit	100.000	11	93.276	10	105.187	11	96.578	12	89.768	12	90.294	12	91.640
2 Puskesmas	120.000	26	39.463	26	40.456	25	42.494	25	43.089	25	43.341	25	43.987
3 Apotik	30.000	100	10.260	101	10.415	103	10.314	111	9.705	130	8.335	138	7.969
4 Posyandu	1.250	1.830	560,67	1.854	567,35	1.835	578,94	1.835	587,04	1.851	585,37	1.860	591,23
5 Balai Pengobatan/Klinik	30.000	28	36.644	24	43.828	23	46.190	29	37.145	32	33.860	38	28.939
6 Praktek Dokter	5.000	53	19.359	93	11.310	104	10.215	109	9.883	93	11.651	102	10.781

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2024

Sarana Kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2023 terdiri dari Rumah Sakit (RS) sejumlah 12 (dua belas) dengan rasio 1 (satu) RS melayani 91.640 penduduk, hal ini sudah memenuhi standar 1 (satu) RS melayani 100.000 penduduk; Puskesmas sejumlah 25 (dua puluh lima) Puskesmas dengan rasio 1 (satu) Puskesmas melayani 43.987 penduduk, hal ini sudah memenuhi standar 1 (satu) Puskesmas melayani 120.000 penduduk; Klinik sejumlah 38 (tiga puluh delapan) dengan rasio 1 (satu) Klinik melayani 28.939 penduduk hal ini sudah memenuhi standar 1 (satu) Klinik melayani 30.000 penduduk; Dokter praktek mandiri sejumlah 102 (seratus dua) orang dengan rasio 1 (satu) Dokter melayani 10.781 penduduk hal ini belum memenuhi standar 1 (satu) Dokter praktek mandiri melayani 5.000 penduduk; Posyandu sejumlah 1.860 dengan rasio 1 (satu) Posyandu melayani 592 penduduk hal ini sudah memenuhi standar 1 (satu) Posyandu melayani 1.250 penduduk. Standar diatas menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2004.

### 2.3.2.3 Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel II. 58 Perkembangan TPAK Tahun 2005-2023

Uraian	2005	2010	2015	2020	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,65	76,04	74,68	75,11	74,73
Laki – laki	N/A	N/A	N/A	85,30	85,50
Perempuan	N/A	N/A	N/A	65,41	64,00

Sumber: Diskopnaker, 2024

Berdasarkan data tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2005 hingga 2023, terlihat fluktuasi yang relatif stabil. Meskipun ada sedikit fluktuasi dalam beberapa tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung mempertahankan angka di atas 70%, menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi dalam pasar kerja selama periode tersebut. Meskipun tidak mencatat peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, tingkat partisipasi yang stabil bisa mengindikasikan adanya kestabilan ekonomi dan kebijakan yang mendukung keterlibatan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali.

Tabel II. 59 TPAK Tahun 2023

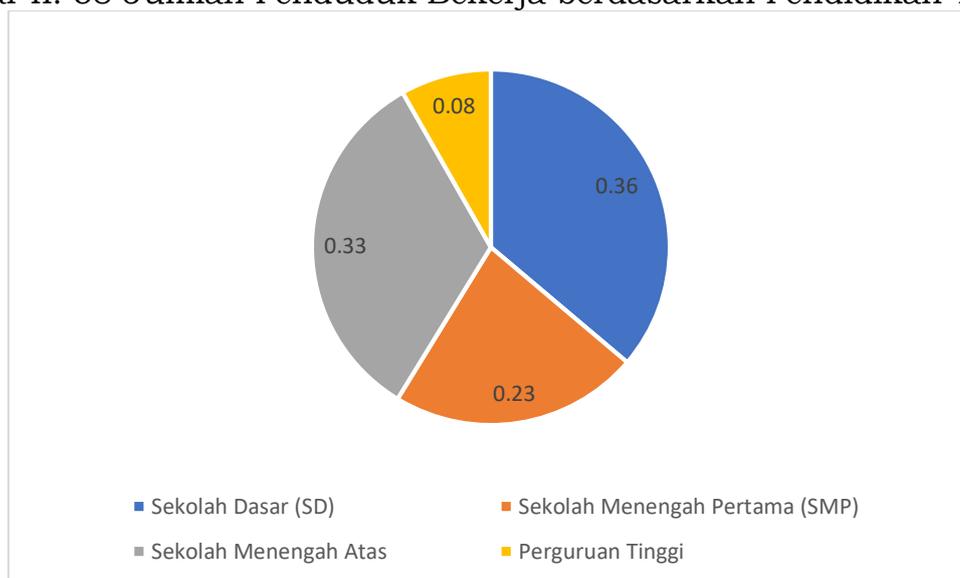
Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (%)	85,50	64,00	74,70
Bukan Angkatan Kerja (%)	14,50	36,00	25,30
Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,50	64,00	74,73

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan di mana TPAK laki-laki pada Tahun 2023 sebesar 85,50%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 64,00%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Boyolali adalah kaum laki-laki. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Boyolali dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Gambar II. 58 Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2024

Penduduk usia kerja di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 adalah 350.327. Dari total jumlah pekerja tersebut 36% merupakan pekerja dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), kemudian 33% diantara berasal dari sekolah menengah atas (SMA), 23% berpendidikan terakhir sekolah menengah pertama (SMP) dan hanya 8% pekerja yang berasal dari perguruan tinggi. Pekerja berpendidikan terakhir perguruan tinggi cenderung menerima upah yang lebih tinggi sedangkan pekerja dengan pendidikan terakhir sekolah dasar

(SD) cenderung memperoleh upah yang relatif rendah. Upah yang diterima oleh masyarakat secara langsung memberikan dampak terhadap perekonomian daerah, oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan upaya di bidang pendidikan agar jumlah pekerja didominasi oleh masyarakat dari jenjang perguruan tinggi.

Aspek kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi hal yang penting untuk mengukur kinerja pelayanan urusan ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2023, UMK Kabupaten Boyolali adalah Rp2.155.172,00. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten lain terutama Kabupaten Sukoharjo dan Klaten, maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali masih lebih rendah.

Gambar II. 59 Perkembangan UMK Tahun 2005-2023

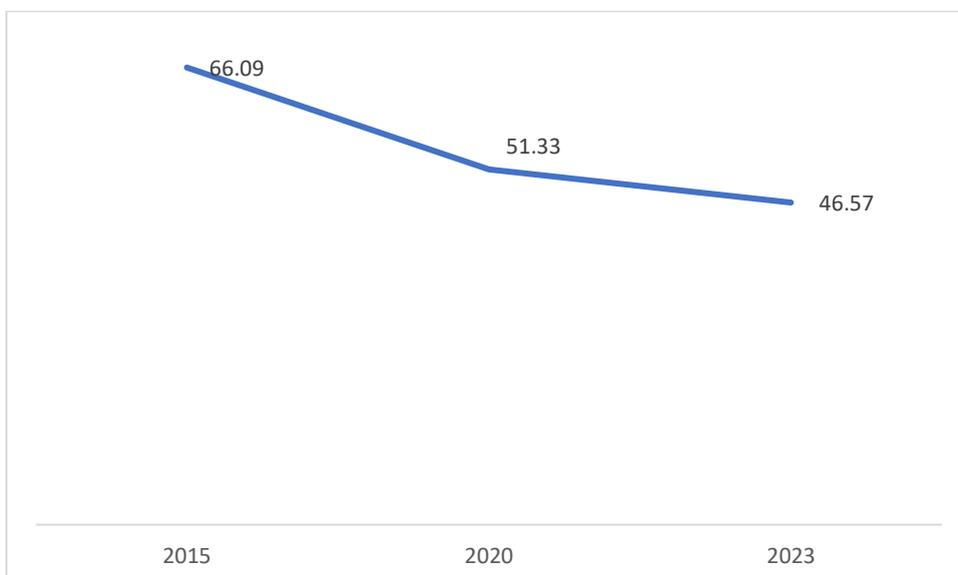


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah., 2024

Secara keseluruhan, kondisi pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali sudah menunjukkan kinerja positif dengan ditandai berkurangnya pengangguran dan semakin tingginya serapan tenaga kerja. Namun demikian, kualifikasi tenaga kerja yang masih didominasi oleh pekerja lulusan SD dan juga serapan tenaga kerja harus menjadi perhatian pada periode perencanaan berikutnya. Selain itu, jauhnya perbedaan kemampuan antar sektor dalam menyerap tenaga kerja juga perlu menjadi bahan perumusan kebijakan daerah dalam sektor perekonomian secara umum.

Aspek ketenagakerjaan dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut ini merupakan rasio ketergantungan di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2023.

Gambar II. 60 Angka Ketergantungan Tahun 2015-2023 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

Grafik angka ketergantungan penduduk usia angkatan kerja terhadap penduduk bukan angkatan kerja tergolong tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan yang cukup baik yaitu 2015, 2020, dan 2023 berturut-turut senilai 66,09%, 51,33% dan 46,57%.

Tabel II. 60 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2005	2010	2015	2020	2023
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,65	76,04	74,68	75,11	74,73
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	Kasus	7	6	6	7	8
3	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	792	14.518	7.144	3.880	7.930
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,07	3,9	2,03	5,28	4,05
5	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2024

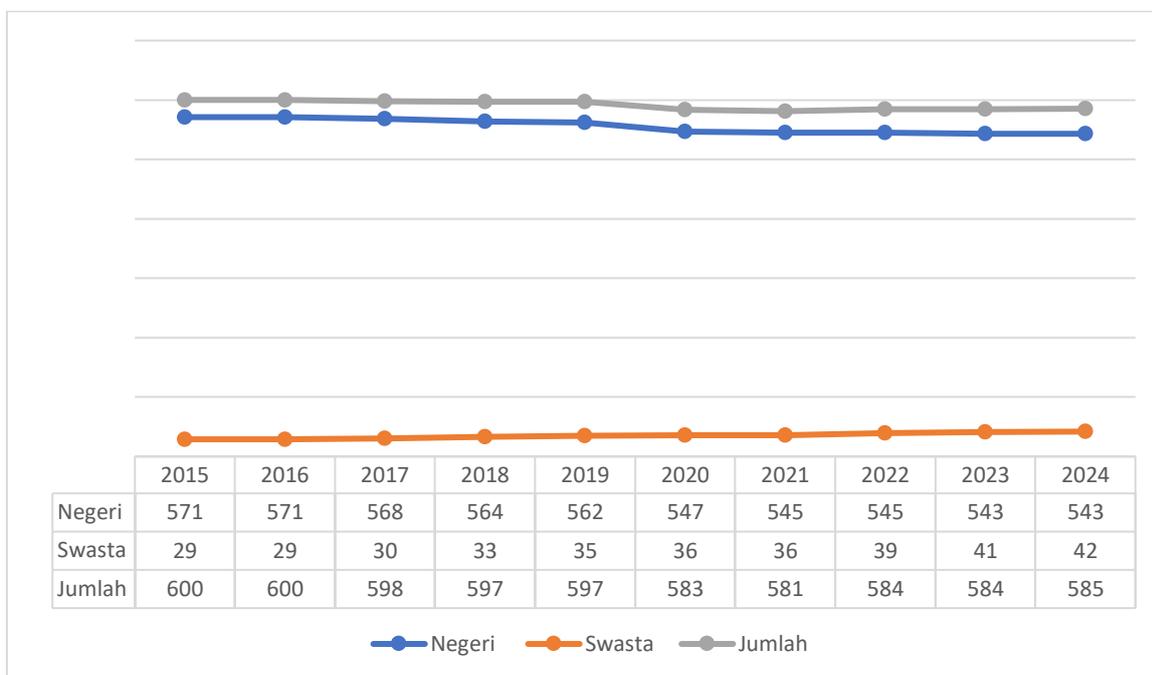
### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur adalah salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena dengan infrastruktur yang baik akan mempermudah kehidupan suatu wilayah. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur juga pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah karena adanya kemudahan aksesibilitas.

#### 2.3.3.1 Pendidikan

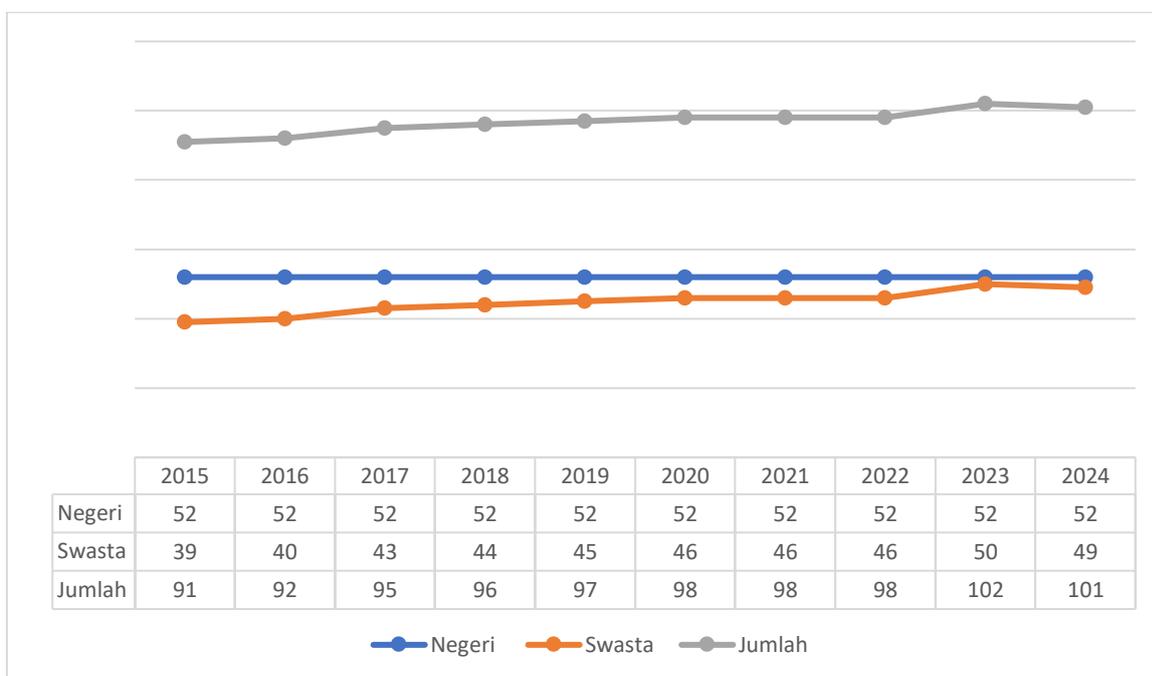
Pendidikan Kabupaten Boyolali menunjukkan upaya yang signifikan dalam pemenuhan infrastruktur, jumlah murid, guru, dan sekolah untuk mencapai pemerataan. Pemerintah daerah telah berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan dengan membangun dan merenovasi sekolah-sekolah, serta menyediakan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang memadai. Gambaran infrastruktur pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar II. 61 Jumlah Sekolah Jenjang SD Tahun 2015-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 62 Jumlah Sekolah Jenjang SMP Tahun 2015-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2024

### 2.3.3.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Salah satu jenis infrastruktur dasar adalah terkait jaringan kelistrikan. Kebijakan tersebut diupayakan agar setiap desa memiliki sumber kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa desa yang masih belum teraliri listrik seperti desa yang berada di bawah lereng gunung. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa adalah terkait lokasi geografis beberapa distrik yang sulit dijangkau atau terhalang kawasan hutan lindung. Upaya lain yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Peningkatan sarana listrik pada Kabupaten Boyolali juga tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan listrik selama periode 2018-2023. Jumlah

pelanggan listrik dari seluruh kelompok pelanggan pada Tahun 2018 yaitu 156.812 dan menjadi 176.297 di Tahun 2023. Kelompok pelanggan listrik terbanyak berasal dari rumah tangga, usaha dan sosial. Di Tahun 2023, kelompok pelanggan rumah tangga sebanyak 167.498 unit, terjadi peningkatan dari Tahun 2022 sebanyak 4.598 unit. Kelompok industri sebanyak 1.205 unit, sosial 6.458 unit dan kantor pemerintahan serta penerangan jalan berturut 463 unit dan 673 unit.

Tabel II. 61 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kelompok Pelanggan

Kelompok Pelanggan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga	141.765	147.537	152.774	157.936	162.900	167.498
Industri	186	338	524	667	872	1.205
Usaha	8.986	9.481	10.251	11.426	12.548	NA
Sosial	5.014	5.304	5.593	5.913	6.193	6.458
Kantor Pemerintahan	375	402	422	443	454	463
Penerangan Jalan	486	524	562	598	630	673
Jumlah	156.812	163.586	170.126	176.983	183.597	176.297

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2024

Dalam hal infrastruktur jalan, secara umum kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Meskipun dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah infrastruktur Kabupaten Boyolali dapat dikategorikan baik, namun beberapa hal masih memerlukan perhatian, seperti air bersih, air layak, dan serta sanitasi layak. Infrastruktur jaringan komunikasi juga memerlukan peningkatan khususnya jaringan 3G dan 2G agar di masa mendatang setiap wilayah di Kabupaten Boyolali mampu mendukung layanan digitalisasi secara lebih optimal.

Tabel II. 62 Jenis Infrastruktur

Infrastruktur	Satuan	Tahun	Jumlah
Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Persen	2022	99,92
Air Aman	Persen	2023	38,96
Air Layak	Persen	2023	96,44
Sanitasi Layak	Persen	2023	96,44
Panjang Jalan	Km	2023	674
Jumlah Kendaraan	Unit	2023	534.990
Jaringan 4G	Desa	2021	236
Jaringan 3G	Desa	2021	27
Jaringan 2G	Desa	2021	4

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah, 2023

Pembangunan jalan menjadi hal penting dalam upaya peningkatan akses antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang baik, maka akan mendorong peningkatan perekonomian penduduk di Kabupaten Boyolali. Dalam kurun waktu 23 (dua puluh tiga) tahun, terjadi peningkatan kualitas jalan yang cukup signifikan di Kabupaten Boyolali. Pada Tahun 2005 panjang jalan kondisi baik adalah 114,4 km kemudian meningkat menjadi 498 km di Tahun 2023. Begitu juga dengan kondisi jalan mantap yaitu pada Tahun 2005 adalah 273,1 km menjadi 559,4 km di Tahun 2023. Berbanding terbalik dengan panjang jalan kondisi rusak ringan, rusak berat dan tidak mantap yang terus berkurang dalam periode 2005-2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya percepatan dari Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan kualitas jalan daerah.

Tabel II. 63 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan

Kondisi Jalan	2005		2010		2015		2020		2023	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Baik	114,4	20,7	259,3	47,0	393,1	71,2	504,7	74,4	498,0	73,9
Sedang	158,7	28,8	90,6	16,4	59,1	10,7	52,9	7,8	61,4	9,1
Mantap	273,1	49,5	349,9	63,4	452,3	82,0	557,6	82,2	559,4	83,0
Rusak Ringan	89,6	16,2	116,9	21,2	39,1	7,1	42,2	6,2	52,6	7,8
Rusak Berat	189,2	34,3	85,1	15,4	60,5	11,0	78,2	11,5	62,0	9,2
Tidak Mantap	278,7	50,5	201,9	36,6	99,6	18,0	120,4	17,8	114,6	17,0
<b>JUMLAH</b>	<b>551,83</b>	<b>100</b>	<b>551,83</b>	<b>100</b>	<b>551,83</b>	<b>100</b>	<b>678,000</b>	<b>100,00</b>	<b>674,000</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DPUPR kabupaten Boyolali, 2024

Total panjang jalan menurut kewenangan mengalami penurunan di Tahun 2023 yaitu 674 km yang sebelumnya sepanjang 678 km. hal ini disebabkan oleh perluasan jalan kewenangan negara sebesar 2,67. Apabila dilihat tingkat kewenangannya, pada Tahun 2023 jalan terpanjang merupakan jalan dengan milik kabupaten/kota sepanjang 674,00 km, sedangkan jalan dengan tingkat kewenangan provinsi sepanjang 49,44 km dan jalan dengan tingkat kewenangan negara sepanjang 38,13 km. Total panjang jalan di Kabupaten Boyolali adalah 761,570 km.

Tabel II. 64 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km)

Tingkat Kewenangan Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Negara	35,46	35,46	35,46	35,46	35,46	38,13
Provinsi	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44
Kabupaten/Kota	678,000	678,000	678,000	678,000	678,000	674,000
<b>JUMLAH</b>	<b>762,900</b>	<b>762,900</b>	<b>762,900</b>	<b>762,900</b>	<b>762,900</b>	<b>761,570</b>

Sumber : DPUPR kabupaten Boyolali, 2024

Dilihat berdasarkan jenis permukaannya pada Tahun 2022, sepanjang 456,85 km jalan di Kabupaten Boyolali memiliki permukaan aspal, sepanjang 46,89 km jalan memiliki permukaan kerikil, dan sepanjang 1,96 km memiliki permukaan tanah. Terjadi penurunan jumlah panjang jalan yang jenis permukaannya aspal pada periode Tahun 2020-2022. Pada Tahun 2020, permukaan jalan aspal memiliki panjang 460,06 km dan meningkat menjadi 468,20 pada Tahun 2021. Sedangkan untuk permukaan jalan kerikil, terjadi penurunan dari 72,48 km pada Tahun 2020 menjadi 47,70 km pada Tahun 2021.

Tabel II. 65 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km)

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	574,24	581,866	460,057	468,19	456,849	487,689
Beton	86,14	79,228	139,793	161,343	172,293	185,051
Kerikil	9,200	11,600	72,480	47,767	46,895	0,000
Tanah	8,420	5,306	5,670	0,700	1,963	1,260
<b>JUMLAH</b>	<b>678,000</b>	<b>678,000</b>	<b>678,000</b>	<b>678,000</b>	<b>678,000</b>	<b>674,000</b>

Sumber : DPUPR kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 63 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Tahun 2015-2023



Sumber : DPUPR kabupaten Boyolali, 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 620/868 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Boyolali bahwa jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 258 ruas jalan dan panjang jalan adalah 668,35 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantab, untuk Tahun 2022 menjadi sebesar 82.86% atau 561,765 km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 678 km.

Tabel II. 66 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum untuk Kondisi Jalan dan Irigasi Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantab	%	77,45	82.52	82.64	82,86	83,00
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab (> 40 km/jam)	Km	525,086	559,460	560,299	561,765	55,430
3	Rasio Jaringan Irigasi	%	84,73	86,98	88,98	60,77	61,54
4	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	8.321,30	8.626,36	8.682,01	6.603	6.947,86

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kab. Boyolali, 2024

Permasalahan sektor Bina Marga di Kabupaten Boyolali antara lain sebagai berikut:

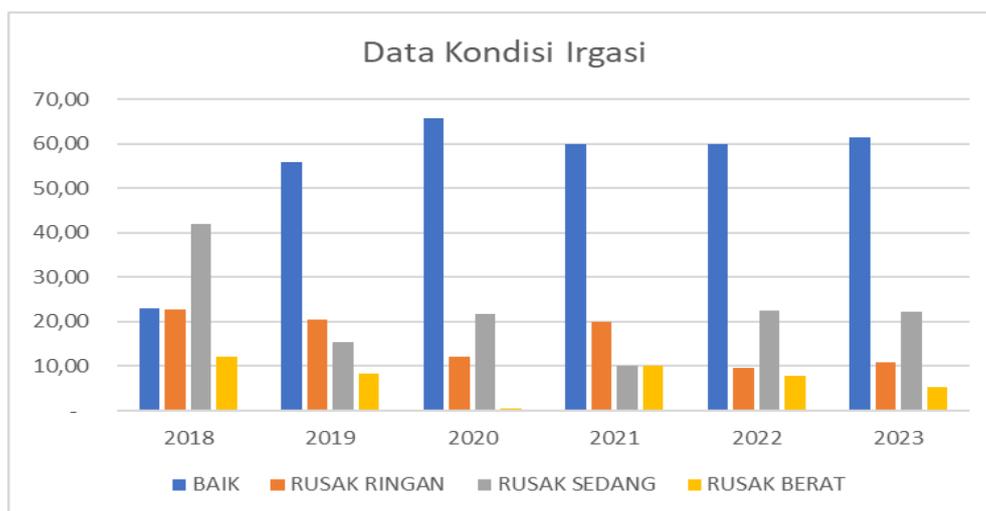
1. tonase angkutan barang yang seringkali melewati batas yang diizinkan sehingga banyak mengakibatkan kerusakan jalan;
2. kebutuhan alokasi anggaran yang cukup besar untuk menangani seluruh infrastruktur jalan dan jembatan; dan
3. pembangunan infrastruktur jalan yang tidak dilengkapi satu kesatuan dengan drainase jalan.

Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Boyolali luasnya: 11.290 ha dengan kondisi baik sampai dengan akhir Tahun 2023 seluas 6.947,86 ha atau 61,54%, kondisi Rusak Ringan seluas 1224,96 ha atau 40,85%, kondisi rusak sedang seluas 2509,76 Ha atau 22,23% sedangkan rusak berat seluas 607,402 ha atau 5,38%. Untuk meningkatkan kondisi jaringan irigasi perlu dilakukan intervensi



berupa rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi bendung, pemeliharaan berkala/rutin jaringan irigasi. Selain guna meningkatkan keterlibatan para petani perlu dilakukan pembinaan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Alokasi anggaran sebagian bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Persentase kondisi Irigasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Gambar II. 64 Data Kondisi Irigasi Tahun 2018-2023



Sumber : DPUPR Kab Boyolali, 2024

Dalam aspek cakupan penggunaan air bersih pada Tahun 2022 terealisasi 94,11% dan pada Tahun 2023 sebesar 96,44%. Peningkatan akses air minum yang berkualitas dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain: peningkatan jaringan perpipaan dan ketersediaan air baku PUDAM, BPSPAM, peningkatan jumlah embung pada daerah yang sulit air, penyediaan sarana prasarana swadaya masyarakat dan pembangunan sumur uji. Selain itu untuk meningkatkan kualitas air dilakukan pengawasan kualitas air baik secara bakteriologis maupun kimiawi.

Tabel II. 67 Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih Tahun 2019-2023

No	Indikator kinerja		Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Perkotaan	Jiwa	309.384	345.065	349.902	355.851	366.366
		%	34,47	35,89	35,33	34,90	34,55
2	Pedesaan	Jiwa	588.062	616.412	640.495	663.891	694.177
		%	65,53	64,11	64,67	65,10	65,45
3	Air Minum Layak	%	90,99	90,5	91,94	94,11	94,44
4	Air Minum Aman	%	32,1	34,13	35,23	38,87	39,83
5	Total Capaian Kab Boyolali	Jiwa	897.446	961.477	990.397	1.019.742	1.060.543
		%	90,99	90,50	91,94	94,11	96,44

Sumber: DPUPR Kab. Boyolali, 2024

Dalam aspek sanitasi akses masyarakat terhadap sanitasi sehat pada Tahun 2022 tercapai sebesar 98,28% dan pada Tahun 2023 terealisasi 98,30%. Peningkatan akses terhadap sanitasi sehat dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah pada DPUPR, kegiatan jambanisasi pada Dinas Kesehatan serta penanganan limbah B3 dan program pengelolaan sampah pada DLH.



Tabel II. 68 Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Tahun 2019-2023

No	Indikator kinerja		Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7
1	Perkotaan	Jiwa	314.054	333.500	338.509	371.649	348.909
		%	32,52	32,02	31,99	34,30	32,28
2	Pedesaan	Jiwa	651.752	707.950	719.637	711.875	732.077
		%	67,48	67,98	68,01	65,70	67,72
3	Sanitasi Layak	%	97,93	98,03	98,26	98,28	98,30
4	Sanitasi Aman	%	25	27,25	27,47	29,19	29,21
5	Total Capaian Kab Boyolali	Jiwa	965.806	1.041.450	1.058.146	1.083.524	1.080.980
		%	97,93	98,03	98,23	98,28	98,30

Sumber: DPUPR Kab. Boyolali, 2024

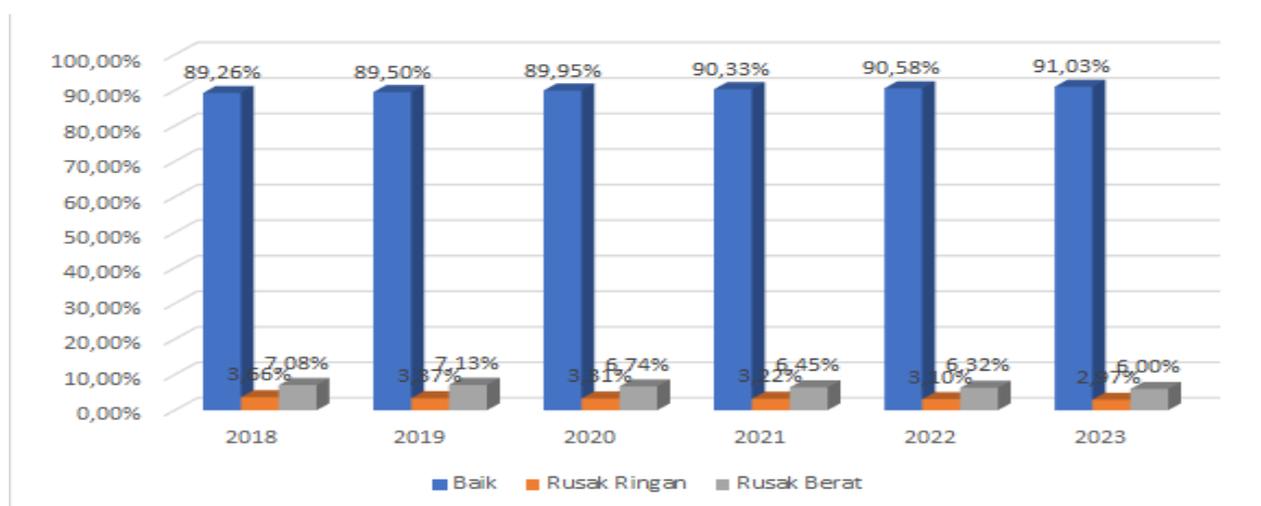
Kondisi bangunan Gedung di Kabupaten Boyolali sampai dengan Tahun 2023 dalam kondisi baik sebanyak 2.348 atau 91,03%, rusak ringan 76 atau 2,97% dan rusak berat 154 atau 6,00%. Gedung yang rusak ringan dapat diperbaiki dengan melakukan pemeliharaan rutin, sedangkan gedung yang rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi atau penggantian Gedung. Selain itu sesuai dengan semangat pelayanan kepada masyarakat dimungkinkan pula membangun gedung baru dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Tabel II. 69 Kondisi Bangunan Gedung Tahun 2018-2023

No	Kondisi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	89,26%	89,50%	89,95%	90,33%	90,58%	91,03%
2	Rusak Ringan	3,66%	3,37%	3,31%	3,22%	3,10%	2,97%
3	Rusak Berat	7,08%	7,13%	6,74%	6,45%	6,32%	6,00%

Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2024

Gambar II. 65 Data Kondisi Bangunan Gedung Tahun 2018-2023



Sumber: DPUPR Kabupaten Boyolali, 2024

### 2.3.3.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara untuk mendirikan rumah bersubsidi sangat sulit karena mahalnnya harga tanah (minimal Rp250.000,00 per m<sup>2</sup>);
2. Banyaknya rumah yang berdiri di atas tanah ilegal, tanah lestari, sempadan jalan, sungai dan lain-lain, sehingga menimbulkan persoalan kawasan seperti munculnya kawasan kumuh di berbagai lokasi; dan
3. Kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan bersih masih sangat rendah, sehingga sering kali membuang sampah di sungai, pinggir jalan dan lain-lain.

Pada tabel di bawah ini disajikan gambaran kinerja Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Boyolali. Pada indikator terwujudnya pembangunan RTLH dari dana DAK dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), realisasi secara umum lebih besar dari target. Indikator terwujudnya pembangunan RTLH dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, secara umum realisasi lebih besar dari target. Demikian juga yang bersumber dari APBD rata-rata realisasi lebih besar dari target.

Tabel II. 70 Gambaran Kinerja RTLH Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	RPJMD									
			Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Terwujudnya Pembangunan RTLH (DAK dan/dan BSPS)	Unit	10	780	10	759	10	659	10	2.481	275	611
2.	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni (APBD Provinsi)	Unit	300	782	360	360	300	360	300	389	275	643
3.	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin (APBD Kab. Boyolali)	Unit	1.000	832	0	0	0	0	1.000	1.000	1.300	1.577
4.	Rasio rumah layak huni	%	87	87,174	88	88,007	89	88,658	89	89,750	90	92.97

Sumber: Disperkim Kabupaten Boyolali, 2024

Penanganan permukiman tidak layak huni di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan memberikan stimulan untuk penanganan rumah tidak layak huni. Sedangkan sumber pendanaan pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD, Dana Desa. Target penanganan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD adalah sebanyak 1.850 unit terdiri dari peningkatan kualitas RTLH di dalam kawasan kumuh sebanyak 100 unit dan peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sebanyak 1.750 unit. Mulai Tahun 2022 ada kegiatan pembangunan rumah baru layak huni diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditargetkan setiap tahun 30 unit. Adapun realisasi peningkatan kualitas RTLH pada Tahun 2023 dalam kawasan kumuh sebanyak 443 unit terdiri dari dana APBN terealisasi sebanyak 104 unit, dana APBD Provinsi Jawa Tengah terealisasi 28 unit, dana APBD 277 unit dan dana desa 34 unit. Realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh terealisasi 2.970 unit terdiri dari dana APBN 507 unit, APBD Provinsi 615 unit, dana APBD 1.300 unit dan dana desa 548 unit, sehingga total

RTLH yang berhasil ditingkatkan kualitasnya 3.413 unit atau 184,49 persen dari target. Untuk pembangunan rumah layak huni bagi MBR terealisasi 30 unit dari target 30 unit atau 100% dari target.

Sedangkan untuk penanganan Kawasan Permukiman sesuai perjanjian kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali Tahun 2023 ditargetkan berkurang seluas 29,19 ha dan 32,47 ha atau 111,24%. Capaian ini melebihi target RPJMD Tahun 2023 seluas 77,85 ha terealisasi 31,72 ha. Dalam rekomendasi *site plan* perumahan, Disperkim mensyaratkan fasilitas umum dan fasilitas sosial minimal 30% yang didalamnya termasuk ruang terbuka hijau (RTH) sebagai salah satu antisipasi dampak dari perubahan iklim.

Penanganan RTLH di Kabupaten Boyolali dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan baru dan peningkatan rumah tidak layak huni bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan target Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 90,75% dan terealisasi 92,97%. Capaian tersebut diperoleh selain dilaksanakan intervensi Peningkatan Kualitas RTLH dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni juga dilaksanakan update data RTLH di Tahun 2023. Sehingga sampai akhir 2023 RTLH di Kabupaten Boyolali masih 7,03% dari total jumlah rumah se- Kabupaten Boyolali sebanyak 322.935 unit atau 22.697 unit.

Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2023, terdapat 2 (dua) layanan SPM Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. Pada Tahun 2023 ada 5 (lima) unit rumah bagi korban bencana yang perlu mendapatkan layanan rehabilitasi atau dibangun kembali. Dari 5 (lima) unit yang perlu mendapatkan layanan terdiri dari 2 (dua) unit rumah yang direhabilitasi dan 3 (tiga) unit rumah yang dibangun kembali. Sehingga Realisasi capaian di Tahun 2022 mencapai 100%.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota. Pada Tahun 2023 ada 30 (tiga puluh) unit rumah yang perlu mendapatkan layanan sesuai rencana aksi dan 30 (tiga puluh) unit rumah sudah mendapat fasilitasi layanan penyediaan rumah layak huni. Sehingga capaian layanan ini mencapai 100%.

Berikut ini tabel gambaran kinerja Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023:

**Tabel II. 71 Gambaran Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh  
Tahun 2019 – 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	RPJMD									
			Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1	Penanganan lingkungan pemukiman kumuh	Ha	1,65	39,77	2,2	43,55	2,75	58,29	5	8,92	10	32,47

Sumber: Disperkim Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 663/773 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020. Sesuai Keputusan Bupati tersebut luasan kumuh di wilayah Kabupaten Boyolali seluas 87,85 Ha, setelah dilakukan intervensi di Tahun 2021, 2022 dan 2023, luasan kumuh berkurang 56,13 ha sesuai Keputusan Bupati terbaru Tahun 2020. Sehingga luasan kumuh tersisa seluas 31,72 ha. Sedangkan di Tahun 2023 target RPJMD 2021-2026 penanganan kumuh seluas 25 ha dan luasan kumuh yang telah ditangani sampai Tahun 2023 seluas 56,13 ha.

Kondisi kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 sebagai berikut: Luas kawasan kumuh 31,72 ha atau 0,0312 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Boyolali yaitu 101.510 ha.

#### 2.3.3.4 Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum yang melewati simpul transportasi terminal, didapat hasil Tahun 2005 sebanyak 19.834.929 orang/tahun, Tahun 2010 sebanyak 12.030.619 orang/tahun, Tahun 2015 sebanyak 6.189.706 orang/tahun. Tahun 2019 sebanyak 1.308.316 orang/tahun dan pada 2020 sebanyak 2.039.270 orang/tahun. Untuk Tahun 2021 sebanyak 1.357.442 orang/tahun. Tahun 2022 sebesar 913.047 orang/tahun sedangkan Tahun 2023 sebesar 1.695.232 untuk jumlah penumpang mengalami kondisi yang cenderung menurun dikarenakan adanya perubahan penggunaan moda transportasi yang sebelumnya menggunakan transportasi umum beralih ke kendaraan pribadi. Rasio Izin Trayek Tahun 2005 sebesar 0,000002, Tahun 2010 sebesar 0,000023, Tahun 2015 sebesar 0,000015 Tahun 2019 sebesar 0,000001, Tahun 2020 sebesar 0,000001, Tahun 2021 sebesar 0,000002, Tahun 2022 sebesar 0,000001 sedangkan untuk Tahun 2023 rasio izin trayek 0 (nol) dikarenakan pada tahun ini tidak ada izin trayek yang dikeluarkan baik itu untuk izin trayek baru maupun pembaharuan izin trayek yang sudah ada.

Jumlah uji KIR angkutan umum tahun awal 2005 sejumlah 714 unit, Tahun 2010 sejumlah 1.198 unit, Tahun 2015 sejumlah 1.596 unit Tahun 2020 sejumlah 1.352 unit, Tahun 2023 sejumlah 643 unit kondisi ini menunjukkan penurunan dikarenakan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya uji kendaraan semakin turun serta iklim usaha yang belum sepenuhnya normal yang disebabkan pandemi COVID-19 mengakibatkan kendaraan minim orderan dan tidak beroperasi sehingga mereka tidak melaksanakan uji kendaraannya.

Jumlah Terminal Bus untuk Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) unit sub terminal, Tahun 2019 ada terdapat pengurangan jumlah sub terminal dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan aset dari Pemerintah Kabupaten Boyolali ke Desa Klewor Kecamatan Kemusu karena tanah tersebut milik Pemerintah Desa Klewor sehingga jumlah sub terminal sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 13 (tiga belas) unit. Untuk bandar udara ada 1 (satu) yaitu Bandara Adi Soemarmo yang terletak di Kecamatan Ngemplak yang pengelolaannya oleh PT. Angkasa Pura.

Persentase angkutan darat Tahun 2005 sebesar 0,0092%, Tahun 2010 sebesar 0,0089%, Tahun 2015 sebesar 0,0235% Tahun 2023 sebesar 0,0011% hal ini menunjukkan penurunan dikarenakan berkurangnya jumlah angkutan umum dan jumlah penumpang.

Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum berdasarkan persentase pada Tahun 2005 sebesar 45%, sedangkan untuk Tahun 2010 sebesar 63%, Tahun

2015 realisasi sebesar 84%, Tahun 2020 sebesar 73 %, Tahun 2023 sebesar 45%. Untuk persentase kepemilikan KIR cenderung menurun dikarenakan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya uji kendaraan semakin turun serta iklim usaha yang belum sepenuhnya normal yang disebabkan pandemi COVID-19 mengakibatkan kendaraan minim orderan dan tidak beroperasi sehingga mereka tidak melaksanakan uji kendaraannya. Angkutan kota dan angkutan umum pedesaan minim penumpang yang akibatnya mereka juga tidak melaksanakan uji kendaraannya juga.

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Tahun 2005 sampai Tahun 2017 selama 40 menit, mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2023 selama 24 menit menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali sudah menggunakan sistem aplikasi SIM PKB sehingga mempercepat waktu pelayanan. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk Tahun 2019 sampai Tahun 2021 tarif retribusi antara Rp35.000,00 sampai Rp55.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, penarikan retribusi menyangkut jasa umum Tahun 2022 dan Tahun 2023 antara Rp85.000,00 sampai dengan Rp105.000,00. Untuk Tahun 2024 uji kendaraan tidak dipungut biaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rasio kendaraan umum layak jalan pada Tahun 2005 sebesar 0,45, Tahun 2010 sebesar 0,63, Tahun 2015 sebesar 0,84, Tahun 2020 sebesar 0,73 sedangkan Tahun 2023 sebesar 0,45. Rasio kendaraan umum layak jalan mengalami penurunan dikarenakan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya uji kendaraan semakin turun serta iklim usaha yang belum sepenuhnya normal yang disebabkan pandemi COVID 19 mengakibatkan kendaraan minim orderan dan tidak beroperasi sehingga mereka tidak melaksanakan uji kendaraannya. Angkutan kota dan angkutan umum pedesaan minim penumpang yang akibatnya mereka juga tidak melaksanakan uji kendaraannya juga.

**Tabel II. 72 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2005-2023**

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil							
			2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang/ Tahun	19.834.929	12.030.619	6.189.706	1.308.316	2.039.270	1.357.442	913.047	1.695.232
2	Rasio ijin trayek	angka	0,000002	0,0000023	0,0000015	0,0000001	0,0000001	0,0000002	0,0000001	0
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	714	1.198	1.596	1.473	1352	974	790	643
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	15	15	15	14	14	14	14	14
5	Angkutan darat	%	0,0092	0,0089	0,0235	0,0614	0,0253	0,0380	0,0366	0,0011
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	45	63	84	80	73	64	53	45

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Hasil							
			2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	40	40	40	24	24	24	24	24
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum JBB < 2.500 JBB 2501-5.000 kg JBB 5.001-7.500 kg JBB 7.501-10.000kg JBB >10.000	Rp	22.500	22.500	30.000	30.000	35.000	35.000	85.000	85.000
			22.500	22.500	35.000	35.000	40.000	40.000	90.000	90.000
			27.500	27.500	40.000	40.000	45.000	45.000	95.000	95.000
			27.500	27.500	45.000	45.000	50.000	50.000	100.000	100.000
			32.500	32.500	50.000	50.000	55.000	55.000	105.000	105.000
9	Pemasangan Rambu-rambu	unit	-	-	151	101	467	186	514	343
10	Rasio kendaraan umum layak jalan	angka	0,45	0,63	0,84	0,80	0,73	0,64	0,53	0,45

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Boyolali, 2024

**Tabel II. 73 Rekap Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2011-2023**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rambu	285	220	114	42	142	136	119	155	86	467	185	505	319
2	RPPJ	12	17	28	-	6	9	11	27	9	-	-	5	23
3	Traffic Light	-	-	-	3	2	2	1	2	1	-	1	-	1
4	Warning Light	2	4	2	-	1	4	12	4	5	-	-	4	-
5	Pagar (meter)	100		185	-	74	37	612	380	240	244		248	224
6	Marka (meter)	2.220	2.750	2.653	2.393	2.776	6.506	5.406	11.799	4.626,50	5.002	3.396	10.133	8.886
Jumlah		4.630	5.003	4.995	4.452	5.016	8.710	8.178	14.385	6.986,5	7.733	5.603	12.917	11.476

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Boyolali, 2024

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2011-2023 menyesuaikan kebutuhan rambu maupun adanya peremajaan rambu yang sudah tidak layak pakai.

### 2.3.3.5 Komunikasi dan Informatika

Terjadi peningkatan kuantitas pelayanan Komunikasi dan Informatika yang signifikan pada periode lima Tahun sejak 2019. Jumlah jaringan komunikasi kondisi awal pada Tahun 2019 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah tower, kemudian melonjak di Tahun 2023 menjadi 321 (tiga ratus dua puluh satu) buah tower. Rasio warung telepon/warung internet terhadap penduduk telah meningkat drastis dari kondisi awal Tahun 2019 sebesar 9% menjadi 15% pada Tahun 2023.

Persentase penduduk yang menggunakan *handphone*/telepon pada Tahun 2019 adalah sebanyak 30% dan pada Tahun 2023 telah melesat menjadi 74,80%. Jumlah website milik Pemerintah Daerah juga telah berlipat ganda dari 22 (dua puluh dua) *website* pada Tahun 2019 menjadi 53 (lima puluh tiga) *website* pada Tahun 2023.

Tabel II. 74 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jaringan komunikasi/Tower	Buah	240	264	290	291	321
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	9	15	15	15	15
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	4	4	4	3	3
4	Persentase penduduk yang menggunakan <i>handphone</i> /telpon	%	30	45	74,32	77,90	74,80
5	<i>Web site</i> milik pemerintah daerah	Site	22	30	50	53	53

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Boyolali, 2024

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah melalui proses penilaian/evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE.

Dalam kurun waktu 2020-2023, Kabupaten Boyolali telah melakukan evaluasi pada Tahun 2020 dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020. Adapun hasil evaluasi SPBE Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel II. 75 Capaian Nilai SPBE Tahun 2020

Domain	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	3.20
Domain Tata Kelola	2.70
Domain Manajemen	1,00
Domain Layanan SPBE	3.43

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Boyolali, 2024

Tahun 2021 nilai indeks SPBE adalah 2,82 (predikat baik) dengan aspek penilaian sebagai berikut:

Tabel II. 76 Capaian Nilai SPBE Tahun 2021

Domain	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	3.20
Domain Tata Kelola	2.70
Domain Manajemen	1,00
Domain Layanan SPBE	3.43

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Kab. Boyolali, 2024

Untuk evaluasi SPBE Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 yang dengan aspek penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Adapun nilai indeks SPBE Tahun 2022 adalah 2,82 (predikat baik) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 77 Capaian Nilai SPBE Tahun 2022

Domain	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	3.20
Domain Tata Kelola	2.70
Domain Manajemen	1,00
Domain Layanan SPBE	3.43

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Boyolali, 2024

Untuk evaluasi SPBE Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 yang dengan aspek penilaian yang sama dengan tahun sebelumnya. Adapun nilai indeks SPBE Tahun 2023 adalah 3.65 (predikat sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 78 Capaian Nilai SPBE Tahun 2023

Domain	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	4.20
Domain Tata Kelola	3.10
Domain Manajemen	2,00
Domain Layanan SPBE	4.39

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Kab. Boyolali, 2024

#### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Boyolali. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif.

##### 2.3.4.1 Perizinan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan panduan terkait proses perizinan di Kabupaten Boyolali. Panduan pelayanan tersebut ditujukan untuk kemudahan akses dan kepastian perizinan bagi kegiatan penanaman modal di Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 503/516 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan berbagai perizinan dalam memulai usaha di Kabupaten Boyolali. Proses perizinan tersebut telah ditampilkan pada situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali di alamat <https://dpmptsp.boyolali.go.id/website/web>. Rincian dan lama proses perizinan yang ada di Kabupaten Boyolali ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel II. 79 Jenis Perizinan dan Lama Perizinan Tahun 2023

No	Jenis Perizinan	Lama Proses Perizinan	Biaya
1	Pelayanan Perizinan dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS RBA)	1 Hari	0
2	Izin Pendirian Sekolah (SD, SMP)	3 Bulan 5 Hari	0
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, Satuan Pendidikan Nonformal lainnya)	30 Hari	0
4	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak/ Kelompok Bermain/ Tempat Penitipan Anak/Satuan Paud Sejenis)	60 Hari	0
5	Surat Keterangan Penelitian	5 Hari	0
6	Izin Praktik Dokter	12 Hari	0
7	Izin Praktik Dokter Mandiri	14 Hari	0
8	Izin Praktik Dokter Spesialis	12 Hari	0
9	Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri	14 Hari	0
10	Izin Praktik Dokter Internship	12 Hari	0



No	Jenis Perizinan	Lama Proses Perizinan	Biaya
11	Izin Praktik Dokter Gigi	12 Hari	0
12	Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri	14 Hari	0
13	Izin Praktik Bidan	12 Hari	0
14	Izin Praktik Bidan Mandiri	14 Hari	0
15	Izin Praktik Perawat	12 Hari	0
16	Izin Praktik Perawat Mandiri	14 Hari	0
17	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	12 Hari	0
18	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri	14 Hari	0
19	Izin Praktik Perawat Anastesi	12 Hari	0
20	Izin Praktik Fisioterapi	12 Hari	0
21	Izin Praktik Fisioterapi Mandiri	14 Hari	0
22	Izin Praktik Akupuntur	12 Hari	0
23	Izin Praktik Akupuntur Mandiri	14 Hari	0
24	Izin Praktik Okupasi Terapis	12 Hari	0
25	Izin Praktik Okupasi Terapis Mandiri	14 Hari	0
26	Izin Praktik Terapis Wicara	14 Hari	0
27	Izin Praktik Terapis Wicara Mandiri	14 Hari	0
28	Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	14 Hari	0
29	Izin Praktik Sanitasi	14 Hari	0
30	Izin Praktik Apoteker	14 Hari	0
31	Izin Praktik Ortetik Prostetik	14 Hari	0
32	Izin Praktik Nutrisionis	14 Hari	0
33	Izin Praktik Eletromedik	14 Hari	0
34	Izin Praktik Perekam Medik dan Informasi Kesehatan	14 Hari	0
35	Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medis	14 Hari	0
36	Izin Praktik Radiografer	14 Hari	0
37	Izin Praktik Refleksionis Optisien	14 Hari	0
38	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	14 Hari	0
39	Izin Praktik Kesehatan Masyarakat	14 Hari	0
40	Izin Praktik Psikologi Klinik	14 Hari	0
41	Izin Praktik Fisikawan Medik	14 Hari	0
42	Izin Tenaga Kesehatan Tradisonal	14 Hari	0
43	Izin Tenaga Keswan dan Kesmavet	14 Hari	0
44	Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat	15 Hari	0
45	Surat Pengantar Balik Nama Kendaraan/Baru	12 Hari	0
46	Kartu Pengawasan	12 Hari	0
47	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	20 Hari (setelah berkas dinyatakan lengkap, benar, sesuai dan pemohon membayar PNBPN di BPN)	0
48	Surat Pengantar Reklame	5 Hari	0
49	Pelayanan Konsultasi dan Informasi	1 Hari	0
50	Pelayanan Pengaduan	14 Hari	0
51	Pelayanan Legalisir	3 Hari	0
52	Pelayanan Pencabutan Izin	7 Hari (dari berkas permohonan diterima lengkap dan benar oleh verifikator).	0
53	Pelayanan Cetak Ulang Izin	3 Hari	0
54	Pelayanan Pendampingan Mandiri OSS	1 Hari	0

Sumber: Lampiran Keputusan Bupati Boyolali Nomor 503/ 236 Tahun 2023





**2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah**

Secara keseluruhan daya saing suatu daerah tercermin melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menggambarkan derajat daya saing suatu daerah melalui 4 (empat) pilar utama yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi dengan total 12 (dua belas) pilar pendukung. Pembentuk daya saing pilar lingkungan terdiri dari 4 (empat) pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, serta kestabilan ekonomi makro); pembentuk pilar SDM terdiri dari 2 (dua) pilar (kesehatan dan keterampilan); pembentuk pilar pasar terdiri dari 4 (empat) pilar (pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar); dan yang terakhir pembentuk pilar ekosistem inovasi terdiri dari 2 (dua) pilar (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi).

Penilaian IDSD awalnya diinisiasi oleh Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 dan dilakukan hingga Tahun 2021. Penilaian IDSD dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan metode *Self-Assessment* oleh masing-masing Kabupaten/kota. Pada Tahun 2022 dan 2023, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengambil alih penilaian IDSD dengan metode penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti BRIN dengan tujuan untuk meningkatkan objektivitas penilaian.

Skala yang digunakan juga mengalami penyempurnaan. Pada Tahun 2018 dan 2019, skala penilaian maksimal IDSD yang digunakan adalah 7 (tujuh), mulai Tahun 2020 skala penilaian maksimal IDSD yang digunakan adalah 5 (lima) dan digunakan hingga saat ini.

Nilai IDSD Kabupaten Boyolali adalah 3,41 pada Tahun 2023 dengan skor terendah pada pilar pasar (pilar 10) dan pilar ekosistem inovasi (dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi). Nilai yang kecil pada pilar-pilar tersebut menggambarkan bahwa pasar di Daerah masih terbatas, iklim usaha belum berjalan dinamis, serta masih rendahnya inovasi yang dilaksanakan dalam tata kelola bisnis. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor daya beli masyarakat serta infrastruktur yang mampu mendukung daya saing daerah seperti jalan, jaringan telekomunikasi, serta infrastruktur pendukung lain.

**Tabel II. 80 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2019-2023**

Uraian	2018 Provinsi (Skala 7)	2019 Provinsi (Skala 7)	2020 Provinsi (Skala 5)	2021 Provinsi (Skala 5)	2022 BRIN (Skala 5)	2023 BRIN (Skala 5)
Indeks Daya Saing Daerah	3,95	5,88	3,23	3,16	3,16	3,41

Sumber: BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan BRIN, 2024

**2.3.4.3 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan aspek Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Satpol PP dan BPBD Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 dapat diketahui bahwa:

1. Capaian cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/kota sesuai target.
2. Capaian cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai target.
3. Capaian cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) sesuai target.
4. Pembinaan oleh PPNS Kabupaten Boyolali dilaksanakan sesuai target.



Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Boyolali diharapkan adanya dukungan dari Kabupaten Boyolali baik dalam bentuk anggaran, jumlah SDM maupun peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui bimbingan teknis, diklat atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas penegakan perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan adanya Penyidik PNS nantinya Penegakan Perda bisa dilaksanakan secara optimal sehingga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan dilaksanakan melalui pembinaan anggota linmas, dan peningkatan kapasitas Satpol PP, pelaksanaan operasi tipiring, pelaksanaan operasi cukai tembakau, dan pelaksanaan operasi PKL dan reklame. Pelaksanaan patroli wilayah, pelaksanaan operasi terpadu, pengamanan lebaran, Natal dan Tahun Baru, dan Pengamanan Giat Umum/ *Car Free Day*.

Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat dilaksanakan melalui penyuluhan dan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi di wilayah Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut berupa sidak dan operasi di lokasi yang disinyalir merupakan tempat mangkalnya Pekerja Seks Komersial (PSK), antara lain di warung remang-remang, panti pijat, karaoke dan tempat-tempat lain yang pantas dicurigai sebagai tempat mangkal PSK. Kegiatan operasi dilaksanakan secara gabungan yang melibatkan unsur dari Kepolisian dan juga jajaran TNI. Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat pada Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali, Tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali, Tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, Tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan, Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan dan Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kegiatan.

Cakupan pelayanan kebakaran dan penyelamatan meliputi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di Kabupaten Boyolali. Pihak-pihak yang dilayani adalah semua warga tanpa terkecuali baik yang berupa perumahan perorangan, tempat usaha perekonomian, instansi pemerintah, instansi swasta dan juga instansi-instansi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali. Untuk mendukung keberhasilan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Boyolali dilaksanakan upaya antara lain: mengadakan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan THL (Tenaga Harian Lepas) Bidang Dakar (Pemadam Kebakaran), pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

Kegiatan untuk cakupan pelayanan kebakaran yang tertangani di wilayah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2017 sebesar 76%, Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 70%, Tahun 2019 cakupan sebesar 69%, Tahun 2020 cakupan sebesar 75%, Tahun 2021 sebesar 75%, Tahun 2022 sebesar 85% dan Tahun 2023 sebesar 65%. Tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) tercapai 21,42 menit.

Capaian pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat antara lain adalah indikator penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun

2017 sebesar 75%, 2018 sebesar 67% dan 2019 sebesar 84%, Tahun 2020 sebesar 100%, Tahun 2021 sebesar 100%, Tahun 2022 sebesar 108% dan Tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sudah mencapai 3 (tiga) patroli dalam satu wilayah kecamatan dari target nilai sebanyak 3 (tiga) kali patroli dalam sehari. Indikator rasio petugas linmas mencapai 1 (satu) orang per-RT dari target nilai 1 (satu) orang setiap RT.

Sementara itu pada aspek penanggulangan bencana pada indikator pembentukan Desa Tangguh Bencana terdapat penambahan sebanyak 3 (tiga) desa pada Tahun 2022, 2 (dua) desa merupakan anggaran APBD Kabupaten Boyolali serta 1 (satu) desa anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada Tahun 2023, terbentuk 2 (dua) desa tangguh bencana lagi, yaitu Desa Karangmojo Kecamatan Klego dan Desa Karangkepho Kecamatan Karanggede.

Pada indikator Cakupan Kejadian Tanggap Darurat yang tertangani pada Tahun 2023 sebesar 100%. Sementara Tingkat Waktu (*Response Time Rate*) dari BPBD sebesar 30%, dihitung dari laporan kejadian bencana masuk hingga petugas sampai ke lokasi kejadian.

Capaian pelayanan aspek ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 81 Aspek Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2023

Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten	100%	75	67	84	100	100	108	100
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x sehari	3	3	3	3	3	3	3
Pembinaan PPNS kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	1 orang	1	1	1	1	1	1	1
Cakupan kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
Cakupan kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	Kegiatan	20	15	20	20	15	30	74
Cakupan pelayanan kebakaran di kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	%	76	70	69	75	75	85	65
Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	%	30	30	30	30	30	57	21,42
Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan Desa/Kelurahan tangguh bencana	Desa	10	13	13	14	14	18	20
Cakupan kejadian tanggap darurat kebencanaan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Penanggulangan Bencana	Menit	30	30	30	30	30	30	30

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Boyolali, 2024

2.3.4.4 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel II. 82 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2005	2010	2015	2020	2023
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	78	81,7	71,62	100	99,69
2	Rasio anak berakte kelahiran	%	60,4	60,1	61,7	93	98,69
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100
4	Kepemilikan KTP	jumlah	642014	663230	697483	793959	820059
5	Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk	%	50,5	55,7	61,74	80	70,19
6	Penerapan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)	sudah/blm	belum	sudah	sudah	sudah	sudah
7	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak	Tidak	Tidak	ada	ada	tidak ada
8	Indikator RPJMD						
	- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	62,8	88,3	71,61	99,69	99,69
	- Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100
	- Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Penduduk usia 0-18	%	66,67	66,5	71,45	84,97	98,69
	- Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	%	52,56	57,34	61,74	66,4	70,19
	- Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	%	100	100	100	8	67,91
	- Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-el	%	0	0	81	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Boyolali, 2024

Rasio penduduk ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila dilihat setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang meningkat untuk memiliki KTP terutama sejak diberlakukan KTP elektronik dengan slogan “SATU ORANG SATU KTP”. Kepemilikan KTP elektronik ini tidak bisa 100% dikarenakan usia pemula selalu ada di setiap saat dan harus memiliki KTP dengan melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk mencapai hal tersebut telah dilaksanakan jemput bola perekaman KTP pemula baik di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu juga dilakukan jemput bola perekaman KTP pada penduduk Marginal (ODGJ, penduduk rentan, lembaga pemasyarakatan maupun panti asuhan) Sedangkan untuk penerapan KTP nasional berbasis NIK dimulai dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang dan sudah terlaksana dengan baik.

Untuk akte kelahiran dalam rangka mencapai sampai dengan 100% telah dilakukan jemput bola baik di sekolah maupun tempat-tempat umum serta dengan kerja sama dengan instansi lain seperti Rumah Sakit Bersalin maupun Bidan Desa.

Ketersediaan database kependudukan tingkat Kabupaten Boyolali sejak Tahun 2022 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan seluruh data tidak bisa diakses di tingkat Kabupaten karena sudah di kunci di SIAK Dirjendukcapil Kemendagri.

Pelayanan Adminduk ditingkat Kecamatan dimulai semenjak Tahun 2011 sampai dengan sekarang yang memudahkan akses layanan Adminduk pada masyarakat ditingkat Kecamatan.

### 2.3.4.5 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif yang ditampilkan berdasarkan *inputing* dan *up dating* di sistem *Online Data System* (ODS) yang sudah dilakukan verifikasi di lapangan. Untuk meningkatkan presentasi koperasi aktif perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. perlu dilakukan peningkatan pembinaan organisasi, kelembagaan, dan usaha koperasi;
2. perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus dan pengelola koperasi; dan
3. pengusulan pembubaran koperasi yang sudah tidak aktif kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Tabel II. 83 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Hasil				
			2005	2010	2015	2020	2023
1	Persentase koperasi aktif	%	28,44	29,01	27,05	28,39	29,42
2	Usaha Mikro dan Kecil	Usaha mikro	37.146	41.142	44.857	49.024	48.362

Sumber: Diskopnaker Kab. Boyolali, 2024

### 2.3.4.6 Penanaman Modal

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki aktivitas ekonomi yang heterogen. Hal ini berkaitan dengan posisi wilayah Kabupaten Boyolali yang dekat dengan 2 (dua) kota besar, yaitu Kota Surakarta dan Kota Semarang. Kabupaten Boyolali memiliki aktivitas ekonomi yang heterogen terlihat dari adanya sektor industri kecil dan menengah, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Aktivitas ekonomi heterogen ini berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di Kabupaten Boyolali. Sebagai contoh, sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Boyolali memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di wilayah ini melalui berbagai program dan kebijakan yang menunjang.

Realisasi investasi di Kabupaten Boyolali relatif mengalami fluktuasi, Meskipun demikian, realisasi investasi melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Realisasi investasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung. Berikut capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023:

Tabel II. 84 Capaian Aspek Pelayanan Bidang Penanaman Modal Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah bidang usaha/proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	2.223	1.283	3.853	7.650	14.186
	PMA	Buah	50	78	61	82	166
	PMDN	Buah	2.173	1.205	3792	7630	14.020

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (Juta)	1.602.525	1.675.461	1.988.107	3.125.294	1.937.439
	PMA	Rp. (Juta)	122.580	74.769	376.618	780.254	293.229
	PMDN	Rp. (Juta)	1.479.945	1.600.692	1.611.489	2.345.050	1.644.210
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp. (Milyar)	Naik 158	Naik 200	Naik 10,7	Naik 734	Turun 700
4	Lama proses perizinan						
	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	hari kerja	7	7	7	-	-
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Hari Kerja				28	28

Sumber: DPMPSTSP Kab. Boyolali, 2024

Guna meningkatkan investasi, Kabupaten Boyolali menjalankan kebijakan teknis untuk memberikan ruang investasi yang kondusif berkelanjutan melalui revisi RTRW. Wilayah Kabupaten Boyolali yang terdapat banyak investasi adalah Kecamatan Mojosongo. Namun, wilayah Kabupaten Boyolali bagian utara masih jarang terdapat investasi. Kecamatan Simo, Karanggede, Kemusu, Wonosegoro, Wonosamodro, dan Juwangi belum banyak terdapat industri besar dengan investasi lebih dari 10 Miliar dan jumlah industri sedang dengan nilai investasi 200 juta – 10 Miliar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Boyolali menetapkan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi di Kabupaten Boyolali bagian utara dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Untuk mempercepat perizinan, Pemerintah Kabupaten Boyolali menjalankan kebijakan nasional *Online Single Submission* (OSS) sejak Agustus 2018. Secara kelembagaan terdapat Tim Teknis Perizinan dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha untuk mendukung kecepatan proses perizinan. Secara kelembagaan terdapat Tim Teknis Perizinan dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha untuk mendukung kecepatan proses perizinan. Kenaikan jumlah bidang usaha yang signifikan pada Tahun 2023 disebabkan karena berlakunya *Online Single Submission* (OSS) maka pelaku usaha semakin dipermudah dalam menambah bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hal ini disebabkan berkembangnya iklim investasi di Kabupaten Boyolali, terjadinya penguatan investasi dengan adanya kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali diantaranya penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali maka kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peluang investasi di Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor peternakan dan industri, menunjukkan potensi pengembalian yang positif. Dengan kekuatan di sektor peternakan, khususnya usaha peternakan sapi perah, investasi ini mengindikasikan pilihan yang berpotensi menguntungkan dan layak dipertimbangkan oleh para investor. Dukungan ini semakin memperkuat posisi Boyolali sebagai daerah berpotensi investasi, membuka

peluang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam hal jumlah bidang usaha dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan. Sedangkan untuk realisasi investasi mengalami fluktuasi. Nilai Investasi pada Tahun 2023 mengalami penurunan karena luasan lahan yang sesuai dengan Kawasan Pengembangan Industri (KPI) semakin berkurang, lahan yang tersedia tidak berada dalam satu hamparan, adanya Lahan Sawah Dilindungi. Realisasi investasi di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir digambarkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel II. 85 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha/Proyek dan Nilai Investasi Tahun 2014-2023

TAHUN	PROYEK	INVESTASI PMA (Rp.)	PROYEK	INVESTASI PMDN (Rp.)	PROYEK	INVESTASI PMA + PMDN (Rp.)
2014	4	620.000.000.000	808	1.170.394.000.000	812	1.855.394.000.000
2015	1	-	941	1.096.545.000.000	942	1.213.545.000.000
2016	4	-	568	1.990.038.854.201	572	1.990.038.854.201
2017	2	268.145.240.000	359	992.585.347.562	361	1.260.730.587.562
2018	25	213.684.800.000	302	1.321.077.052.808	327	1.534.761.852.808
2019	50	122.580.000.000	2.173	1.479.945.458.306	2.223	1.602.525.458.306
2020	78	74.769.180.000	1.205	1.600.692.480.153	1.283	1.675.461.660.153
2021	61	376.618.288.000	3.792	1.611.489.646.178	3.853	1.988.107.934.178
2022	82	780.254.103.942	7.569	2.345.050.397.716	7.651	3.125.304.501.658
2023	166	293.229.180.574	14.020	1.644.210.560.290	14.186	1.937.439.740.864
TW I - 2024	50	50.308.520.031	5.276	555.777.952.252	5.326	606.086.472.283
TOTAL	523	2.799.589.312.547	37.013	15.807.806.749.466	37.536	18.789.396.062.013

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2024

Perkembangan jumlah bidang usaha/proyek di Kabupaten Boyolali selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kenaikan. Kenaikan jumlah bidang usaha/proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor di atas berpengaruh terhadap faktor peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah bidang usaha/proyek. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis melalui *online*, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Kenaikan jumlah bidang usaha yang signifikan dari tahun pelaku usaha semakin dipermudah dalam menambah bidang usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hal ini disebabkan berkembangnya iklim investasi di Kabupaten Boyolali, terjadinya penguatan investasi dengan adanya kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali. diantaranya penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka kemudahan berusaha di Kabupaten Boyolali maka kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tabel II. 86 Perkembangan Jumlah Bidang Usaha /Proyek dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Bidang usaha / Proyek	Akumulasi Jumlah Bidang Usaha/Proyek	Nilai Realisasi Investasi per Tahun (Rp)	Akumulasi Jumlah Investasi (Rp)
2019	2.173	9.824	1.479.945.458.306	10.535.261.518.235
2020	1.205	11.029	1.600.692.480.153	12.135.953.998.388
2021	3.792	14.821	1.611.489.646.178	13.747.443.644.566
2022	7.630	22.451	2.345.050.397.716	16.092.494.042.282
2023	14.186	36.637	1.644.210.560.290	17.736.704.602.572

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2024

Kenaikan jumlah bidang usaha yang signifikan pada Tahun 2023 untuk kategori Penanaman Modal Dalam Negeri disebabkan dengan berlakunya OSS maka pelaku usaha semakin dipermudah dalam menambah bidang usaha sesuai dengan KBLI.

Peningkatan jumlah bidang usaha /proyek PMDN selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boyolali serta adanya kemudahan untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Kenaikan nilai investasi dan jumlah bidang usaha /proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor diatas berpengaruh terhadap faktor jumlah bidang usaha/proyek PMDN. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis lewat *online*, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Tabel II. 87 Perkembangan Investasi PMA Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Proyek	Realisasi Investasi	Investasi Kumulatif
1	2019	50	Rp 122.580.000.000	Rp.2.465.837.631.369
2	2020	78	Rp 74.769.180.000	Rp.2.540.606.811.369
3	2021	61	Rp 376.618.288.000	Rp 2.917.225.099.369
4	2022	20	Rp 780.254.103.942	Rp 3.697.479.203.311
5	2023	166	Rp 293.229.180.573	Rp.3.990.708.383.884

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali, 2024 (dengan kurs 1 US\$ = Rp 13.000)

Peningkatan jumlah bidang usaha/proyek PMA selama 5 (lima) tahun terakhir disebabkan oleh iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Boyolali serta adanya kemudahan untuk berinvestasi di Kabupaten Boyolali. Kenaikan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan listrik serta sarana prasarana pendukung investasi. Berbagai faktor diatas berpengaruh terhadap faktor peningkatan jumlah bidang usaha/proyek PMA. Kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP untuk meningkatkan nilai investasi dan jumlah bidang usaha/proyek diantaranya dengan menyelenggarakan seminar bisnis lewat *online*, mengembangkan potensi unggulan daerah, melakukan koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal serta dengan melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pemerintah Daerah telah menyederhanakan Peraturan Daerah dari 33 (tiga puluh tiga) Perda menjadi 2 (dua) Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Pelayanan Perizinan dan Peraturan Daerah Penanaman Modal. Penyederhanaan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk mempermudah para bidang usaha/proyek, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam menanamkan modalnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP maka DPMPTSP melayani perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha dan perizinan non berusaha.

Selain itu, DPMPTSP juga memberikan layanan inovasi berbasis IT yang intinya bisa memberikan kemudahan kepada para bidang usaha/proyek seperti layanan Perizinan *Online*, Peta Potensi Investasi *Online*, SMS Gateway, *paperless*, *elektronik document*, *Aplikasi Top Screen*, *Geographic Information Sistem Survey* (GIS) serta barcode yang berfungsi untuk mengantisipasi pemalsuan dokumen. Layanan inovasi berbasis IT meliputi:

1. Penerapan sistem aplikasi perizinan, dari *Front Office* sampai *Back Office*;
2. Pemohon bisa mengunduh formulir perizinan di website DPMPTSP;
3. Adanya sarana pengaduan *online* di website DPMPTSP dan melalui SMS di nomor 085725585522;
4. Penerapan Perizinan *Online*, yaitu pemohon bisa mendaftarkan perizinan melalui website DPMPTSP;
5. Penerapan SMS Gateway, yaitu setiap pemohon bisa mengetahui proses perizinan lewat SMS;
6. Penerapan *Touchscreen* Informasi Perizinan;
7. Pengarsipan dokumen secara elektronik (*e-document*);
8. Adanya peta potensi investasi yang memuat potensi investasi di Kabupaten Boyolali yang ada di website DPMPTSP yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
9. Pengaplikasian *Barcode* dalam SK Perizinan;
10. Adanya fasilitas GIS (*Geographic Information System*) dalam menentukan lokasi usaha yang disurvei;
11. Aplikasi Nomor Antrian Bagi Pemohon; dan
12. Adanya TV informasi Pelayanan Perizinan.

Layanan inovasi berbasis IT dilaksanakan di Kabupaten Boyolali yang diresmikan pada tanggal 5 Desember 2022, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Gerai dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) terdiri dari 11 (sebelas) Perangkat Daerah, 9 (sembilan) kementerian, 3 (tiga) BUMN, 2 (dua) BUMD dan 2 (dua) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) jenis pelayanan publik, dengan semboyan “Satu Tempat Banyak Manfaat”. Total pengunjung sampai dengan Desember 2023 sebanyak 42.997 pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 2.4 Aspek Pelayanan Umum

Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa aspek pelayanan umum berisikan kondisi tata kelola

pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Berbagai indeks pendukung tata kelola seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai indeks lain penting untuk dikaji. Di samping itu aspek pelayanan umum pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan juga perlu dikaji sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana ke depan.

#### 2.4.1 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan publik yang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah.

Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Indeks Reformasi Hukum, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Inovasi Daerah (IID), IDSD, dan bentuk indeks lain yang terus dikembangkan.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur atau menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Indeks reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali.

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 (enam) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas).

Selanjutnya IID adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil IID, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemingkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penilaian IID dilaksanakan oleh Kemendagri dimulai pada Tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum Tahun 2018, belum dilaksanakan penilaian IID.

Tabel II. 88 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2017-2023

Tahun	Opini BPK	Indeks Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	Indeks SAKIP	Indeks SPBE	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Inovasi Daerah
2017	WTP	NA	NA	B/61,24	NA	NA	NA
2018	WTP	CC/52,57	NA	B/66,45	2,72	NA	5070
2019	WTP	CC/56,84	NA	B/67,13	2,85	NA	5660
2020	WTP	B/61,72	NA	B/68,75	NA	NA	1265
2021	WTP	B/63,60	NA	B/69,39	2,82	NA	48,89
2022	WTP	B/68,76	72,65	BB/71,44	2,82	4,15 /A-	57,42
2023	WTP	BB/76,94	57,53	B/68,28	3,65	4,01/A-	78,51

Sumber: Bapperida Kabupaten Boyolali, 2024

#### 2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

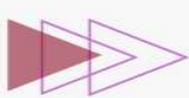
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak setiap warga negara untuk dapat mendapatkan pelayanan dasar. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel II. 89 Rekapitulasi Capaian SPM dari Tahun 2019-2023

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	CAPAIAN SPM 2019	CAPAIAN SPM 2020	CAPAIAN SPM 2021	CAPAIAN SPM 2022	CAPAIAN SPM 2023
KAB. BOYOLALI	63,66	89,59	94,58	96,85	98,77
1 PENDIDIKAN	33,39	64,67	80,54	92,70	94,68
2 KESEHATAN	85,58	77,43	91,84	91,88	97,95
3 PEKERJAAN UMUM	100	98,50	95,09	96,51	100,00
4 PERUMAHAN RAKYAT	0	100,00	100,00	100,00	100,00
5 TRANTIBUMLINMAS	62,99	96,92	100,00	100,00	100,00
6 SOSIAL	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Buku Laporan SPM Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Arah kebijakan dalam kaitannya dengan SPM, telah disusun dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 127 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026 yang terintegrasi dalam dokumen tersebut.

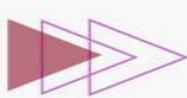


**Tabel II. 90 SPM Bidang Urusan Pendidikan**

MISI KE- 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	99,92.	99,92.	100	92,67	92,67	100	67,56	67,56	100	96,66	96,66	100	97,43	97,43
				Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	96,61	96,61	100	91,01	91,01	100	86,93	86,93	100	93,93	93,93	100	92,79	92,79
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	3,58	3,58	100	10,35	10,35	100	87,13	87,13	100	87,52	87,52	100	93,84	93,84
				Capaian Rata-Rata	100	33,39	33,39	100	64,67	64,67	100	80,54	80,54	100	92,70	92,70	100	94,68	94,68

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026

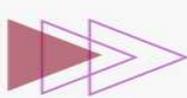




**Tabel II. 91 SPM Bidang Urusan Kesehatan**

MISI KE- 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil	100	95	95	100	93.2	93.2	100	95,46	95,46	100	94,09	94,09	100	97,70	97,70
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	99.7	99.7	100	99,44	99,44	100	95,67	95,67	100	99,87	99,87
				Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	97	97	100	98,7	98,7	100	98,16	98,16	100	96,56	96,56	100	98,39	98,39
				Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	88,6	88,6	100	95,91	95,91	100	93,21	93,21	100	98,10	98,10
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	100	100	100	100	84.9	84.9	100	86,44	86,44	100	79,06	79,06	100	95,70	95,70
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan	100	83	83	100	59.8	59.8	100	86,86	86,86	100	99,94	99,94	100	99,24	99,24
				Persentase warga negara lanjut usia yang mendapat pelayanan kesehatan	100	98	98	100	98.8	98.8	100	99,74	99,74	100	91,9	91,9	100	99,74	99,74



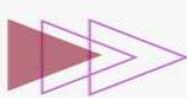


# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

MISI KE- 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%												
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	55	55	100	63.2	63.2	100	91,15	91,15	100	93,42	93,42	100	96,51	96,51
				Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	100	98.57	98.57	100	96,59	96,59	100	99,94	99,94	100	100,00	100,00
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	74	74	100	50.9	50.9	100	85,83	85,83	100	86,55	86,55	100	100,00	100,00
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	48	48	100	35.6	35.6	100	71,48	71,48	100	79,56	79,56	100	90,13	90,13
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100	77	77	100	57.2	57.2	100	94,96	94,96	100	92,69	92,69	100	100,00	100,00
Capaian Rata-Rata					100	85,58	85,58	100	77,43	77,43	100	91,84	91,84	100	91,88	91,88	100	97,95	97,95

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026





**Tabel II. 92 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

MISI KE- 5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	98,50	98,50	100	91,94	91,94	100	95,01	95,01	100	100	100
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	100	98,50	98,50	100	98,23	98,23	100	97,96	97,96	100	100	100
Capaian Rata-Rata					100	100	100	100	98,50	100	100	95,09	95,09	100	96,49	96,49	100	100	100

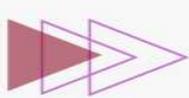
Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026

**Tabel II. 93 SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman**

MISI KE- 5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten	100	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Rata-Rata					100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026



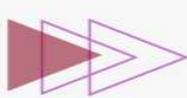


Tabel II. 94 SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

MISI KE- 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023				
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya ketahanan sosial	Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	0,30	0,30	100	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Menurunnya risiko bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	20,68	20,68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	94	94	100	78,2	78,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Capaian Rata-Rata	100	62,99	62,99	100	96,92	96,92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026





Tabel II. 95 SPM Bidang Urusan Sosial

MISI KE- 2	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2019			2020			2021			2022			2023			
					Target	Realisasi	%													
Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya Keberdayaan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Rata-Rata					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026





2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

Menindaklanjuti Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN serta periodisasi RPJPD 2005-2025 akan berakhir pada Tahun 2025. Selanjutnya dalam Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (3) dijelaskan pula bahwa Hasil Evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 mencakup pelaksanaan 4 (empat) periode RPJMD yaitu RPJMD Kabupaten Boyolali periode Tahun 2005-2010, periode Tahun 2011-2015, periode Tahun 2016-2020, dan periode Tahun 2021-2026 (pelaksanaan tahun ke-1/2022). Selain itu, evaluasi juga menyajikan data kuantitatif dan informasi terkait indikator makro pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 masih memiliki sasaran pokok bersifat kualitatif, maka evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD dilakukan dengan mengubah target sasaran pokok pada tiap periode/tahapan dan/atau arah kebijakan yang masih bersifat kualitatif tersebut menjadi data kuantitatif ke dalam indikator yang relevan dan menggunakan hasil evaluasi hasil RPJMD dalam periode 2005 sampai dengan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan evaluasi (tahun-1). Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 diharapkan dapat menjelaskan ketercapaian Visi dan Misi Daerah selama kurun waktu 2005 sampai dengan satu tahun sebelum tahun pelaksanaan evaluasi (tahun 1).

Tabel II. 96 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

Periode Perencanaan	:	2005-2010
Arah Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan;</li> <li>2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha;</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah;</li> <li>4. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;</li> <li>5. Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sekaligus Mendukung Ketahanan Pangan;</li> <li>6. Perwujudan <i>Good Governance</i>;</li> <li>7. Meningkatnya Investasi yang didukung dengan Peningkatan Penguasaan IPTEK bagi Pengembangan Industri serta Pelayanan Perizinan yang Prima dan Kerja Sama Kemitraan; dan</li> <li>8. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bertanggungjawab dan Berkelanjutan.</li> </ol>





<p>Uraian Pencapaian</p>	<p>: 1. Pencapaian kinerja pelayanan dasar pendidikan selama periode Tahun 2005-2009 menunjukkan kinerja positif terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur tingkat pendidikan penduduk yang lulus SLTA dan perguruan tinggi mengalami kenaikan sebesar 9,22% dari 15,68% pada Tahun 2005 naik menjadi 24,90% pada Tahun 2009; dan</li> <li>b. Kondisi prasarana sekolah utamanya tingkat SD yang rusak berat mengalami penurunan sebesar 12,75% dari 819 sekolah pada Tahun 2005 menjadi tinggal 330 sekolah pada Tahun 2009.</li> </ul> <p>2. Pencapaian kinerja pelayanan dasar kesehatan selama periode Tahun 2005-2010 sebanyak 2 (dua) indikator menunjukkan kinerja positif yaitu peningkatan Keluarga Sadar Gizi sebesar 32,60% dari 16,90% pada Tahun 2005 naik menjadi 49,5% pada Tahun 2009 dan penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 2,49/1.000 kelahiran hidup dari 9,70/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2005 turun menjadi 7,21/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2009, sementara 1 (satu) indikator masih belum menunjukkan kinerja positif yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) yang naik 64/100.000 kelahiran hidup dari 121/100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2005 naik menjadi 147/100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2009;</p> <p>3. Keberhasilan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditunjukkan dengan penurunan Angka Pengangguran sebesar 0,53% dari 3,68% pada Tahun 2005 turun menjadi 3,15% pada Tahun 2009.</p> <p>4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah menunjukkan kinerja positif dengan berkurangnya persentase Jalan Rusak Berat sebesar 13,90% dari 50,52% pada Tahun 2005 turun menjadi 36,62% pada Tahun 2009; dan</p> <p>5. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ditunjukkan dengan penurunan Angka Keluarga Miskin sebesar 3,99% dari 32,74% pada Tahun 2005 turun menjadi 28,75% pada Tahun 2009.</p> <p>(Sumber Data: LKPJ AMJ Bupati Masa Bakti 2005-2010 dan BPS, diolah)</p>
<p>Periode Perencanaan</p>	<p>: 2011-2015</p>
<p>Arah Kebijakan</p>	<p>: 1. Kabupaten Boyolali yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Pro Investasi;</p> <p>2. Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertanamnya sikap politik yang demokratis;</p> <p>3. Semakin meningkatnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat serta semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan;</p> <p>4. Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia;</p> <p>5. Semakin meningkatnya ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas;</p> <p>6. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang</p>





	<p>ditandai dengan peningkatan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Semakin meningkatnya investasi daerah yang didukung semakin meningkatnya penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta semakin meningkatnya pelayanan perizinan dan kerja sama kemitraan;</li> <li>8. Semakin meningkatnya ketercukupan lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan daerah;</li> <li>9. Semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah; dan</li> <li>10. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>
<p>Uraian Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian kebijakan Kabupaten Boyolali yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Pro Investasi ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mutu pelayanan yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan usaha menurun sebesar 9,96% dari realisasi 91,14 pada Tahun 2011 turun menjadi 82,06 pada Tahun 2015;</li> <li>b. laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Manufaktur meningkat sebesar 41,68% dari 5,35% pada tahun 2011 naik menjadi 7,58% pada Tahun 2015;</li> <li>c. kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB meningkat sebesar 20,80% dari 13,17% pada Tahun 2011 naik menjadi 15,91% pada Tahun 2015;</li> <li>d. laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menurun sebesar 38,11% dari 12,57% pada Tahun 2011 turun menjadi 7,78% pada Tahun 2015;</li> <li>e. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB meningkat sebesar 9,43% dari 23,76% pada Tahun 2011 naik menjadi 26% pada Tahun 2015;</li> <li>f. laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,19% dari 5,25% pada Tahun 2011 naik menjadi 5,26% pada Tahun 2015;</li> <li>g. PDRB meningkat sebesar 135,88% dari Rp5,24 triliun pada Tahun 2011 naik menjadi Rp12,36 triliun pada Tahun 2015;</li> </ol> </li> <li>2. Pencapaian kebijakan meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertanamnya sikap politik yang demokratis ditunjukkan dengan kinerja angka kriminalitas yang ditangani menurun sebesar 14.89% dari 94% pada Tahun 2011 menjadi 80% pada Tahun 2015.</li> <li>3. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat serta semakin meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak sebesar 131% dari 4,62% pada Tahun 2011 turun menjadi 2% pada Tahun 2015; dan</li> <li>b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurun sebesar</li> </ol> </li> </ol>





	<p>5,14% dari 69,39 pada Tahun 2011 turun menjadi 65,82 pada Tahun 2015.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia ditunjukkan dengan kinerja IPM meningkat sebesar 3,76% dari 69,14 pada Tahun 2011 naik menjadi 71,74 pada Tahun 2015.</li><li>5. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. rasio jalan kabupaten dalam kondisi baik meningkat sebesar 37,26% dari 51,34% pada Tahun 2011 naik menjadi 70,47% pada Tahun 2015; dan</li><li>b. rasio jembatan dalam kondisi baik meningkat sebesar 6,45% dari 92,31% pada Tahun 2011 naik menjadi 98,26% pada Tahun 2015.</li></ol></li><li>6. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. meningkatnya pendapatan perkapita Kabupaten Boyolali sebesar 35,79% dari Rp9,5 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp12,9 juta pada tahun 2015; dan</li><li>b. Nilai Tukar Petani menurun sebesar 1,28% dari 106,8 pada Tahun 2013 menjadi 105,43 pada Tahun 2015.</li></ol></li><li>7. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya investasi daerah yang didukung semakin meningkatnya penguasaan IPTEK bagi pengembangan industri serta semakin meningkatnya pelayanan perizinan dan kerja sama kemitraan ditunjukkan dengan kinerja: persentase peningkatan nilai realisasi investasi sebesar 26,15% dari 19,5% pada Tahun 2011 naik menjadi 24,6% pada Tahun 2015.</li><li>8. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya ketercukupan lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan daerah ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. persentase tingkat pengangguran menurun sebesar 4,44% dari 5,18% pada Tahun 2011 turun menjadi 4,95% pada Tahun 2015;</li><li>b. persentase penduduk miskin menurun sebesar 16,83% dari 14,97% pada Tahun 2011 turun menjadi 12,45% pada Tahun 2015;</li><li>c. Indeks Williamson Kabupaten Boyolali pada Tahun 2011 sebesar 0,056 turun menjadi 0,046 pada Tahun 2015 menunjukkan semakin meratanya pembangunan antarwilayah di Kabupaten Boyolali;</li></ol></li><li>9. Pencapaian kebijakan semakin meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan pembangunan daerah ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 201% dari Tahun 2010-2015 yaitu pada Tahun 2010</li></ol></li></ol>
--	--





		<p>PAD sebesar Rp86.485.635.223 menjadi Rp260.633.637.928 di Tahun 2015;</p> <p>b. meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan menjadi 10,13% telah tercapai dengan meningkatnya proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan sebesar 40,68% dari 8,8% pada Tahun 2011 menjadi 12,38% pada Tahun 2015; dan</p> <p>c. opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) telah tercapai sejak Tahun 2012 dan dapat dipertahankan setiap Tahun sampai dengan Tahun 2015.</p> <p>10. Pencapaian kebijakan semakin pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ditunjukkan dengan kinerja sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan jumlah pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan sebesar 750% dari realisasi kinerja 12 (dua belas) dokumen pada Tahun 2011 naik menjadi 102 (seratus dua) dokumen pada Tahun 2015;</p> <p>b. persentase kasus pelanggaran pelanggaran lingkungan hidup yang tertangani sebesar 100% setiap tahunnya (Sumber data: LKPJ AMJ Bupati Boyolali Masa Bakti 2011-2015, LKjIP Tahun 2015, dan BPS, diolah)</p>
Periode Perencanaan	:	2016-2020
Arah Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneruskan Pro Investasi menuju Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri dan Sejahtera;</li> <li>2. Pemantapan Budaya Pro Investasi;</li> <li>3. Infrastruktur Berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>);</li> <li>4. Pengembangan Daya Saing Daerah Berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>);</li> <li>5. Memacu Produktivitas Daerah yang Ramah Lingkungan dan Cerdas untuk Kesejahteraan Masyarakat; dan</li> <li>6. Kolaborasi Pemasaran Citra (<i>brand</i>) Kabupaten Boyolali.</li> </ol>
Uraian Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberhasilan kebijakan pro investasi menuju Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri, dan Sejahtera serta pemantapan Budaya Pro Investasi ditunjukkan dengan pencapaian kinerja positif beberapa indikator yaitu peningkatan PDRB per kapita sebesar 24,24% dari Rp26.572.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) pada Tahun 2016 naik menjadi Rp33.014.000,00 (tiga puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) pada Tahun 2020 dan Penurunan Persentase Penduduk Miskin sebesar 15,80% dari 12,09% pada Tahun 2016 turun menjadi 10,18% pada Tahun 2020. Sementara terjadinya pandemi pada Tahun 2019-2020 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 76,74% dari 5,33% pada Tahun 2016 turun menjadi -1,24% pada Tahun 2020 dan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 43,87% dari 3,67% pada Tahun 2016 naik menjadi 5,28% pada Tahun 2020.</li> <li>2. Keberhasilan Kebijakan Pengembangan Daya Saing Daerah Berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (<i>Smart City</i>) dan memacu produktivitas daerah yang ramah lingkungan dan cerdas untuk kesejahteraan</li> </ol>





		<p>masyarakat ditunjukkan dengan pencapaian kinerja positif beberapa indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peningkatan skor IPM sebesar 2,87% dari 72,18 pada Tahun 2016 naik menjadi 74,25 pada Tahun 2020;</li> <li>peningkatan skor IPG sebesar 1,32% dari 92,96 pada Tahun 2016 naik menjadi 94,19 pada Tahun 2020; dan</li> <li>peningkatan skor IDG sebesar 23,64% dari 66,28 pada Tahun 2016 naik menjadi 81,95 pada Tahun 2020.</li> </ol> <p>(Sumber Data: LKPJ Bupati 2020, LKjIP Tahun 2020, dan BPS, diolah)</p>
Periode Perencanaan	:	2021-2025 (Capaian sampai dengan Tahun 2022)
Arah Kebijakan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Refocusing</i> Budaya Pro Investasi dalam segenap aspek pembangunan;</li> <li>Pembangunan infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan;</li> <li>Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi;</li> <li>Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya; dan</li> <li>Optimalisasi teknologi informasi dan inovasi untuk mendorong citra investasi dan kemajuan Kabupaten Boyolali.</li> </ol>
Uraian Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya pencapaian kinerjanya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) pada Tahun 2022 sebesar 843, target pada Tahun 2025 sebesar 893, tingkat capaian kinerja sebesar 94,40%;</li> <li>realisasi IPM pada Tahun 2022 sebesar 74,97, target pada Tahun 2025 sebesar 76,83, tingkat capaian kinerja sebesar 97,58%;</li> <li>IDG pada Tahun 2022 sebesar 82,23, target pada Tahun 2025 sebesar 81,99, tingkat capaian kinerja sebesar 100,29%;</li> <li>realisasi angka PMKS pada Tahun 2022 sebesar 61.029, target pada Tahun 2025 sebesar 67.161, tingkat capaian kinerja sebesar 90,87%;</li> <li>realisasi Indeks Risiko Bencana (IRB) pada Tahun 2022 sebesar 130,32, target pada Tahun 2025 sebesar 124,32, tingkat capaian kinerja sebesar 95,17%; dan</li> <li>realisasi Angka Konflik Sosial pada Tahun 2022 sebesar 0, target pada Tahun 2025 sebesar 10, tingkat capaian kinerja sebesar 200%.</li> </ol> </li> <li>Kebijakan optimalisasi teknologi informasi dan inovasi untuk mendorong citra investasi dan kemajuan Kabupaten Boyolali pencapaian kinerjanya ditunjukkan dengan realisasi Indeks <i>Smart City</i> pada Tahun 2022 sebesar 3,15, target pada Tahun 2025 sebesar 3,21, tingkat capaian kinerja sebesar 98,13%.</li> </ol> <p>(Sumber Data: LKPJ Bupati 2022, LKjIP Tahun 2022, BPS, diolah)</p>

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Boyolali, 2005-2025





Tabel II. 97 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Tahun 2005-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan 2005	Capaian pada Tahun berjalan	Pertumbuhan/ Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,76	74,97	6,21
2	Angka Kemiskinan	14,97	9,82	5,15
3	Angka Pengangguran	7,25	4,92	2,33
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,04	6,33	2,29
5	PDRB perkapita	14.738.000	35.941.350	143,87

Sumber: Bapperida Kabupaten Boyolali, diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan capaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Boyolali periode RPJPD Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun berjalan (2022) seluruhnya menunjukkan kinerja positif sebagai berikut:

1. IPM mengalami pertumbuhan sebesar 6,21% dari 68,76 pada Tahun 2005 naik menjadi 74,97 pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah dan Nasional, maka IPM Kabupaten Boyolali pada Tahun 2022 masih lebih baik sebesar 2,18 dan 2,06 poin.
2. Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 5,15% dari 14,97% pada Tahun 2005 turun menjadi 9,82% pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Jawa Tengah, pada Tahun 2022 Kabupaten Boyolali mencatatkan angka yang lebih rendah sebesar 1,11 poin. Sementara jika dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional, Kabupaten Boyolali lebih tinggi 0,25 poin. Angka Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional per September 2022 tercatat sebesar 10,93% dan 9,57%.
3. Pengangguran merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, karena tidak adanya penghasilan yang mencukupi menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga disebut sebagai miskin. Menurunnya pengangguran ditandai dengan menurunnya Angka Pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka. Angka Pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 2,33% dari 7,25% pada Tahun 2005 turun menjadi 4,92% pada Tahun 2022. Angka Pengangguran/Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boyolali pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mencatatkan angka 5,57% dan 5,83%.
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 2,29% dari 4,04% pada Tahun 2005 naik menjadi 6,33% pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, pada Tahun 2022 Kabupaten Boyolali lebih tinggi dari keduanya yang mencatatkan angka yang sama sebesar 5,31%. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta, Kabupaten Boyolali mencatatkan angka tertinggi.
5. Menurut harga berlaku, kenaikan harga dan *output* dari berbagai barang dan jasa dari beberapa sektor ekonomi telah meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama ini selalu menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2022, PDRB perkapita Kabupaten Boyolali tercatat sebesar Rp35,94 juta. Angka





ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 143,87 persen dibandingkan PDRB perkapita Tahun 2005 yang sebesar Rp14,74 juta. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Boyolali masih terpaut jauh, di mana PDRB perkapita Jawa Tengah dan Nasional pada Tahun 2022 mencatatkan angka Rp 42,1 juta dan Rp 71,0 juta.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah pada RPJPD Tahun 2025-2045 agar dapat menetapkan sasaran strategis pembangunan daerah yang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah pada RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan pada upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita dengan tetap berwawasan lingkungan hidup dan meningkatkan upaya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
- 3) Untuk semakin meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten Boyolali, dalam perencanaan pembangunan daerah pada RPJPD Tahun 2025-2045 agar mempertajam penetapan indikator dan target indikator sasaran strategis pembangunan daerah yang berkontribusi besar pada peningkatan capaian kinerja komponen-komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1 Proyeksi Demografi

Penduduk adalah sekumpulan individu yang berdomisili atau tinggal dan menetap di suatu wilayah dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan. Data kependudukan diperlukan dalam merepresentasikan keseluruhan populasi dalam proses sensus penduduk. Tabel 2.124 merupakan hasil proyeksi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2045. Berdasarkan hasil tersebut pada Tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali diproyeksikan berjumlah 1.109.332 penduduk. Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur usia muda 0-4 tahun dengan jumlah 82.726 jiwa. Secara umum, kelompok umur pada usia produktif mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali, dalam rentang umur 15-64 tahun dengan jumlah 752.494 jiwa atau setara dengan 67, 83%. Sedangkan jumlah penduduk usia lanjut usia (>65 tahun) memiliki jumlah yang secara umum cukup sedikit jika dibandingkan dengan usia produktif dengan jumlah 115.872 orang atau setara dengan 10,45%. Sedangkan, dalam kelompok usia muda yang tidak produktif (<14 tahun) secara umum memiliki jumlah yang cukup banyak dengan jumlah 240,966 orang atau setara dengan 21.72%.

Jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali diproyeksikan terus tumbuh hingga berjumlah 1,237,642 jiwa pada Tahun 2045. Hasil proyeksi pada Tahun 2045 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali terbanyak diduduki oleh kelompok umur lebih dari 75 tahun dengan jumlah 85,225 orang. Secara umum hasil proyeksi pada Tahun 2045 menunjukkan bahwa kelompok umur produktif (15-64 tahun) memiliki jumlah yang sangat besar dengan jumlah 801.806 jiwa atau setara dengan 64.78%. Sedangkan, kelompok umur non produktif muda 0-14 tahun berjumlah 232.066 jiwa atau setara dengan 18.75%. Dilihat dari kelompok non produktif usia lanjut (>65 tahun) memiliki





jumlah 203.770 jiwa atau setara dengan 16,46%. Hal ini menjadi indikasi yang baik yang menunjukkan pertumbuhan demografi khususnya pada usia yang produktif cukup baik guna menunjang pembangunan Kabupaten Boyolali secara umum.

**Tabel II. 98 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2045**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	0-4	42195	41306	40227	39081	38319
	5-9	40766	42466	41579	40498	39351
	10-14	40112	41130	42845	41954	40867
	15-19	41920	40277	41305	43031	42137
	20-24	41751	42068	40426	41462	43191
	25-29	42218	41712	42029	40392	41432
	30-34	40536	42094	41594	41911	40278
	35-39	40148	40624	42186	41691	42011
	40-44	40833	40223	40700	42271	41783
	45-49	38015	40494	39896	40378	41944
	50-54	35460	37201	39648	39089	39579
	55-59	31959	34196	35925	38336	37832
	60-64	27248	30006	32181	33880	36215
	65-69	22189	24563	27150	29226	30862
	70-74	15581	18637	20766	23092	24974
	75+	15872	19962	24788	29321	33757
	Jumlah	556803	576959	593245	605613	614532
Perempuan	0-4	40531	39669	38605	37484	36728
	5-9	39018	40747	39885	38814	37688
	10-14	38344	39319	41059	40191	39113
	15-19	39446	38409	39392	41129	40262
	20-24	39432	39447	38415	39399	41133
	25-29	39893	39689	39707	38673	39664
	30-34	39639	40306	40104	40123	39081
	35-39	39959	39842	40515	40315	40331
	40-44	38648	39880	39772	40455	40257
	45-49	37678	38479	39722	39624	40314
	50-54	35078	37283	38102	39354	39272
	55-59	33621	34402	36605	37450	38700
	60-64	29012	32510	33337	35530	36390
	65-69	23672	27369	30775	31654	33810
	70-74	17283	21248	24749	27983	28899
	75+	21275	27128	34688	43016	51468
	Jumlah	552529	575727	595432	611194	623110
Laki laki + Perempuan	0-4	82726	80975	78832	76565	75047
	5-9	79784	83213	81464	79312	77039
	10-14	78456	80449	83904	82145	79980
	15-19	81366	78686	80697	84160	82399
	20-24	81183	81515	78841	80861	84324
	25-29	82111	81401	81736	79065	81096
	30-34	80175	82400	81698	82034	79359
	35-39	80107	80466	82701	82006	82342
	40-44	79481	80103	80472	82726	82040
	45-49	75693	78973	79618	80002	82258
	50-54	70538	74484	77750	78443	78851
	55-59	65580	68598	72530	75786	76532
	60-64	56260	62516	65518	69410	72605
65-69	45861	51932	57925	60880	64672	





Jenis Kelamin	Kelompok Umur	2025	2030	2035	2040	2045
	70-74	32864	39885	45515	51075	53873
	75+	37147	47090	59476	72337	85225
	Jumlah	1109332	1152686	1188677	1216807	1237642

Sumber: Data BPS, 2024

Hasil dari proyeksi penduduk di atas menunjukkan bahwa dalam periode 2025-2045, Kabupaten Boyolali memiliki angka pertumbuhan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang cenderung mengalami sedikit penurunan. Meskipun demikian, secara persentase masih mendominasi jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali. Hal ini perlu menjadi perhatian guna menghadapi bonus demografi Indonesia Emas Tahun 2045 sehingga dominasi usia produktif di Kabupaten Boyolali ini dapat dimaksimalkan guna kemajuan Kabupaten Boyolali.

Di sisi lain usia non produktif muda (0-14 tahun) cenderung mengalami penurunan dan usia lanjut (diatas 65 tahun) cenderung mengalami kenaikan dalam periode Tahun 2025-2045. Hal ini menunjukkan turunnya tingkat kelahiran dan naiknya angka usia non-produktif lanjut usia. Kendati demikian, naiknya usia lanjut mengindikasikan adanya peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang diakibatkan oleh peningkatan kualitas kesehatan. Sehingga untuk mengupayakan hal ini tetap maksimal pemerintah daerah perlu memperhatikan fasilitas dan sarana kesehatan guna memaksimalkan kualitas kesehatan di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan data yang diperoleh dari RTRW, luas wilayah Kabupaten Boyolali 101.510 ha atau 1.015,10 km<sup>2</sup>. Sehingga diperoleh proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Boyolali Tahun 2025 hingga 2045 sebagai berikut:

Tabel II. 99 Proyeksi Kepadatan Penduduk Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
2025	1.109.332	1.015,10	1.092,83
2030	1.152.686	1.015,10	1.135,54
2035	1.188.677	1.015,10	1.170,99
2040	1.216.807	1.015,10	1.198,71
2045	1.237.642	1.015,10	1.219,23

Sumber: Sumber: Data diolah (2024)

## 2.6.2 Sarana dan Prasarana

### 2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Pangan

Analisis kebutuhan pangan dalam hal ini merujuk pada kebutuhan padi/beras. Perhitungan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana dikali dengan indeks konsumsi beras. Menentukan indeks konsumsi beras per tahun mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2014 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015 dan mengacu juga pada Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 124,89 kg/kapita/tahun.





Tabel II. 100 Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi jumlah penduduk	kebutuhan beras (ton)	kebutuhan padi (ton)	kebutuhan luas panen (Ha)
2025	1.109.332	138.544,47	217.018,29	49.322,34
2030	1.152.686	143.958,95	225.499,62	51.249,91
2035	1.188.677	148.453,87	232.540,52	52.850,12
2040	1.216.807	151.967,03	238.043,59	54.100,82
2045	1.237.642	154.569,11	242.119,53	55.027,17

Sumber: BPS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa kebutuhan pangan di Kabupaten Boyolali akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh. Berdasarkan hasil proyeksi pada tabel di atas, diketahui kebutuhan beras di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2025 sebesar 138.544,47 ton dengan kebutuhan luas panen sebesar 49.322,34 ha. Kebutuhan ini diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2045 dengan kebutuhan beras sebesar 154.569,11 ton, dengan kebutuhan luas panen sebesar 55.027,17 ha.

#### 2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air

Air merupakan sumber daya alam yang selalu diperlukan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup. Sebagai akibat dari adanya fenomena alam dan perilaku manusia, keberadaannya makin lama makin sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas, air yang semula merupakan benda sosial berubah menjadi benda ekonomi yang mempunyai nilai tinggi. Air dan sumber daya air juga mempunyai nilai yang sangat strategis karena diperlukan untuk memenuhi berbagai keperluan, seperti pertanian, perumahan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan lain sebagainya. Pengelolaan sumber daya air pada dasarnya berupa pemanfaatan, perlindungan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, dan pengaturan yang bersifat spesifik dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh (hulu-hilir), kualitas-kualitas, berkelanjutan (antar generasi), berwawasan lingkungan dengan wilayah sungai (satu wilayah hidrologis). Sumber daya air terdiri dari air tanah dan air permukaan.

##### 1. Air Tanah

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan masyarakat karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah di kawasan perencanaan, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal agar tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu sendiri. Atas dasar tujuan ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kontinuitas ketersediaan sumber air tanah adalah upaya penjagaan terhadap kawasan resapan air.

Keberadaan dan kelestarian air tanah dipengaruhi oleh aktivitas guna lahan yang ada di atasnya. Air tanah akan mengalami kerusakan apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah muka tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif, sehingga rehabilitasi





atau pemulihannya sulit dilakukan. Untuk mencegah kerusakan air tanah, diperlukan pengaturan pengelolaan air tanah serta mengkonservasi air tanah. Pengaturan pengelolaan air tanah dan konservasi air tanah diperlukan untuk:

- a) Pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan penggunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan karakteristik air tanah yang meliputi ketersediaan, penyebaran, dan potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah.
- b) Konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, kekeringan, dan amblesan tanah. Konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengelolaan kualitas, dan pengendalian pencemaran air tanah.

## 2. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud adalah air yang mengalir di sungai. Air permukaan di kawasan perencanaan digunakan masyarakat untuk keperluan air minum dan pengairan sawah. Pengelolaan kawasan sungai bertujuan untuk konservasi sumber daya air permukaan. Upaya-upaya pengelolaan sungai yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ruang melalui usaha pengaturan penggunaan lahan (*land use*) dan konservasi tanah di kawasan sempadan sungai;
- b) Pengelolaan sumber daya air melalui konservasi, pengembangan, penggunaan dan pengendalian kualitas air; dan
- c) Pengelolaan vegetasi yang meliputi pengelolaan hutan dan jenis vegetasi yang memiliki fungsi produksi dan perlindungan terhadap tanah dan air.

### A. Proyeksi Kebutuhan Air

Proyeksi kebutuhan air didasarkan pada perhitungan kebutuhan air penduduk dari sisi domestik dan non-domestik dengan dilakukan proyeksi dari Tahun 2025-2045. Selain itu, perhitungan kebutuhan air juga didasarkan kebutuhan air lahan dan keperluan air peternakan. Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar sebagai berikut:

1. Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012.
2. Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0.7 – 1 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000.
3. Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000.
4. Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak),babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).





Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Keterangan:

- DA = Total Kebutuhan Air
- N = Jumlah Penduduk
- KHLA = Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak

Tabel II. 101 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik (m <sup>3</sup> /tahun)	Kebutuhan Air Untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (m <sup>3</sup> )	Total Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> )
2025	1.109.332	47.923.142	1.160.722.417	1.208.645.560
2030	1.152.686	49.796.035	1.127.151.241	1.176.947.276
2035	1.188.677	51.350.846	1.093.648.694	1.144.999.541
2040	1.216.807	52.566.062	1.060.146.181	1.112.712.244
2045	1.237.642	53.466.134	1.026.643.651	1.080.109.786

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa kebutuhan air di Kabupaten Boyolali diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada Tahun 2025 kebutuhan air domestik diproyeksikan sebesar 47.923.142 m<sup>3</sup>/tahun dengan kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan sebesar 1.160.722.417 m<sup>3</sup>/Tahun. Angka ini diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2045 dengan kebutuhan air domestik diproyeksikan sebesar 53.466.134 m<sup>3</sup>/tahun dan kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan sebesar 1.026.643.651 m<sup>3</sup>/tahun.

## B. Ketersediaan Air

Ketersediaan air di Kabupaten Boyolali bersumber dari air permukaan seperti air hujan, mata air dan sungai, serta didukung dengan sumber air yang dikelola melalui waduk dan embung. Ketersediaan air tergantung dari kondisi iklim dan juga upaya konservasi air sehingga tidak mudah untuk memprediksikan ketersediaan di waktu mendatang. Pada Tahun 2023 terdata ketersediaan air di Kabupaten Boyolali sebesar 1.204.557.993 m<sup>3</sup>/tahun, diperkirakan meningkat jika perubahan iklim terkendali dan upaya konservasi air dilaksanakan dengan baik sehingga debit mata air dan sumber air lainnya terpelihara.

### 2.6.2.3 Kebutuhan Pengolahan Sampah

#### a. Proyeksi Timbunan Sampah

Sistem pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Boyolali dan masyarakat. Rencana pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

##### 1. Tahap Pengumpulan

Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah dari wadah sampah atau sumber sampah menuju ke TPS/transfer depo. Penyapuan jalan dan selokan termasuk dalam sistem pengumpulan. Sistem pengumpulan sampah di kawasan perencanaan berdasarkan masing-masing lokasi peruntukan lahannya diarahkan sebagai berikut:





- a. Kawasan permukiman  
Untuk kawasan permukiman dapat diterapkan cara pengumpulan dengan pengumpulan individu maupun komunal. Pengelolaannya harus ada keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta (pengembang perumahan) dalam mengelola dan pengadaan sarana sampah di lingkungan permukiman.
- b. Kawasan pasar  
Sampah pasar disapu dan dikumpulkan oleh petugas. Penyapuan dilakukan secara rutin, kemudian diangkut menggunakan gerobak sampah dan dikumpulkan di TPS kontainer pasar.
- c. Kawasan perdagangan dan jasa serta fasum-fasos  
Sampah di daerah komersial dikumpulkan pada tempat sampah yang disediakan dan kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- d. Sampah penyapuan jalan  
Sampah yang dihasilkan dari penyapuan jalan dilakukan baik pemerintah maupun swasta, dengan lingkup pekerjaan penyapuan badan jalan, trotoar, taman kota, pembersihan got-got/selokan. Hal ini terdapat di kawasan perkotaan.

## 2. Tahapan Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan menuju TPS kemudian dikelola ke TPA atau dari sumber sampah langsung ke TPA.

## 3. Tahapan Pemrosesan Akhir

Prinsip pengelolaan akhir adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu sampah Kabupaten Boyolali terletak di:

1. TPA Winong yang terletak di Jl. Magelang - Boyolali, Dusun III, Jelok, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berkapasitas 33.260 m<sup>3</sup> pada akhir Tahun 2023.
2. TPST Karanggede yang terletak di Klimas, Sendang, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berkapasitas 20 m<sup>3</sup>/hari.
3. TPS 3R Dopleng yang terletak di Dopleng, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
4. TPS 3R Jeron Berseri yang terletak di Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>.
5. TPS 3R Tumang yang terletak di Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
6. TPS 3R Pulesari yang terletak di Dusun Pulesari, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
7. TPS 3R Resik Butuh yang terletak di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
8. TPS 3R Kismoyoso yang terletak di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.





9. TPS 3R Rembun yang terletak di Desa Rembun Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
10. TPS 3R Randusari yang terletak di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
11. TPS 3R Tawang Sari yang terletak di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
12. TPS 3R Dibal yang terletak di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
13. TPS 3R Jatirejo yang terletak di Desa Jatirejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
14. TPS 3R Tegalsari yang terletak di Desa Tegalsari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali berkapasitas 6 m<sup>3</sup>/hari.
15. Pusat Daur Ulang (PDU) sampah Kemiri yang terletak di Kelurahan Kemiri Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali berkapasitas 20 m<sup>3</sup>/hari.

Rencana pengembangan sarana persampahan di kawasan perencanaan dihitung berdasarkan standar penyediaan sarana persampahan dan proyeksi pertumbuhan penduduk di kawasan perencanaan. Untuk memperkirakan volume produksi sampah per orang per hari menggunakan standar dari SNI 3242:2008 tentang Pengolahan Sampah Permukiman yaitu untuk Kota Besar 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari, dalam hal ini Kabupaten Boyolali menggunakan standar 2,5 liter/orang/hari dengan asumsi densitas sampah yang diproduksi adalah 0,3 kg/m<sup>3</sup>. Lebih jelas proyeksi kebutuhan prasarana persampahan sebagai berikut:

Tabel II. 102 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.103.855	1.109.332	1.152.686	1.188.677	1.216.807	1.237.642
Proyeksi Timbulan Sampah	108.784,91	109.324,67	113.597,21	117.144,12	119.916,33	121.969,62
Proyeksi jumlah kebutuhan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)	0	1	1	1	1	1

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, proyeksi timbulan sampah oleh Kabupaten Boyolali pada Tahun 2025 berjumlah 109.324,67 kg per tahun dengan total berat sampah 202.453 kg per tahun. Sedangkan kapasitas total seluruh TPA/TPST di Kabupaten Boyolali sebesar 93.075 m<sup>3</sup>, hal ini menunjukkan kapasitas TPA/TPST yang ada dalam kondisi defisit meskipun sampah diolah setiap hari. Hal ini diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada Tahun 2045 Daerah diproyeksikan jumlah sampah yang diproduksi oleh Kabupaten Boyolali pada Tahun 2045 berjumlah 1.129.348 m<sup>3</sup> per tahun dengan total berat sampah 225.870 kg per tahun.

#### b. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali

Pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui kegiatan pengurangan sampah dengan menggunakan Bank Sampah, TPS 3R, pemanfaatan jugangan dan budidaya magot yang dikelola oleh masyarakat.

##### 1. Bank Sampah





Bank sampah merupakan tempat pengelolaan sampah yang paling dekat dan aktif dengan masyarakat. Kabupaten Boyolali berdasarkan data Tahun 2022 memiliki 189 (seratus delapan puluh sembilan) bank sampah dan 1 (satu) bank sampah induk yang berlokasi di Desa Kiringan Kecamatan Boyolali mampu mengurangi sampah sebesar 21.474,55 kg/bulan. Keberadaan bank sampah berperan dalam pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan nilai ekonomis dan juga mendukung kegiatan masyarakat. Bank sampah di Kabupaten Boyolali memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk melalui tahap dekomposisi, serta sampah non-organik seperti plastik, fiber, dan logam dipilah dan dapat dijual dalam bentuk kiloan. Berikut sebaran bank sampah yang terdapat di Kabupaten Boyolali.

**Tabel II. 103 Sebaran Bank Sampah**

No.	Lokasi	Jumlah	Tahun	Nama Bank Sampah
1	Kec. Tamansari	2	2017	Ngudi Rapi 1, Ngudi Rapi 2
		15	2018	Ngudi Rapi 4, Ngudi Resik I, Ngudi Resik 2, Ngudi Resik 4, Ngudi Resik 5, Ngudi Resik 6, Ngudi Resik 7, Ngudi Resik 8, Ngudi Resik 9, Ngudi Resik 10, Ngudi Resik 11, Ngudi Resik 14, Ngudi Resik 15, Ngudi Resik 21, Ngudi Resik 22
		4	2019	Ngudi Maju 1, Ngudi Maju 7, Ngudi Maju 8, Ngudi Maju 9
2	Kec. Musuk	1	2015	Munggur
		5	2016	Gatak RT 04, Gatak RT 05, Gatak RT 06, Gumukreko RT 07, Gumukreko RT 08
		6	2017	Tegalsari, Recosari, Sumber Rejeki, Temu Darling, Kintel, Agni Mandiri
		16	2018	Laskar Pelangi, BS. Sidosari, Trosobo, Ganapalri, Tegalsari Timur, Tegalsari Barat, Watesari Utama, Ngargosari, Watesari, Indahnya Ngargosari, Rejosari, Jonggol, Sidomakmur, Kebon Gulo RT.01, Kebon Gulo RT.02, Kebon Gulo RT.03
		10	2019	Ringin Asri 1, Ringin Asri 3, Berdikari, Ringin Makmur III, Ringin Makmur II, Ringin Makmur I, Tape Uli, Musuk Barat, Musuk Timur, Jambesari
		6	2020	Sido Waras, Sido Waras 2, Ngudi Utomo, Sumber Mulyo, Nusa Indah, Dali Mandiri
		2	2021	AL-BAROKAH, Noyontoko
3	Kec. Cepogo	2	2005	Anggrek, Gunsa 02
		13	2018	Besar Asri, Melati 2, Maju Jaya, Melati, Guyup Rukun, Melati, Sayuk Rukun, Gunsa 03, Gunsa 04, Penting Tlaten, Mulyasari, Wijaya Kusuma, Rumala
		13	2019	Ngudi Sehat, Kupo 02, Anggrek, Sithik Ajek, Mekar Sari, Sekarwangi, KKB Damai, KKS Ceria, KKU Indah, Tumapel, BS "RT 10", BS "RT 08", BS "RT 01"
		13	2020	Sidotopo, Sidosari, Lerep RT.03, Lerep RT.04, Lerep RT.05, Balong RT.06, Margomulyo RT 7, Cabean RT 08, Cabean RT 09, Cabean RT 10, Kunti RT 11, Kunti RT 12, Kedung Banteng RT 13
4	Kec. Boyolali	1	2014	BS "Sehati"
		2	2017	BS "Ngudi Resik", Sajensa Kompak
		1	2018	Berkah Kismobudoyo
		20	2020	Cemara, Srikandi, Resik Becik, Eling Sehat, Mawar Biru, BS "Telasih", BS "Melati", BS "Melati I", BS "Melati II", BS





No.	Lokasi	Jumlah	Tahun	Nama Bank Sampah
				"Melati III", BS "Melati IV", BS "Permata" BS "Kuncup Dahlia", BS "Menur", BS "Barokah", Umbul Rejeki, Berhitung, Idamanku, Sasaran, Basuki Campus
		1	2021	Berkah Mandiri
		6	2022	Pemuda Prisma, Bank Sampah Permata 8, Bank Sampah Permata 1, Bank Sampah Permata 4, Bank Sampah Permata 5, Bank Sampah Permata 3
5	Kec. Teras	2	2020	Dodogan, TPST Dadi Mulyo
		1	2022	Palgunadi
6	Kec. Sawit	1	2016	BS "Sabamas"
		2	2018	BS "Edi Peni", BS "Padhang Sari"
		2	2019	BS "Gawe Resik", BS "Noto Uwuh"
		1	2020	BS "Resik Sehat"
7	Kec. Klego	1	2017	BS "Barokah 06"
		2	2018	BS "Tempel", BS "Mandiri"
		7	2020	Mekar Asri, Serba Guna, Posy. Makmur, Posy. Tentrem, Posy. Rejeki, Posy. Abadi, Posy. Lestari
		1	2021	Tugu Mandiri
8	Kec. Simo	3	2019	BS "Resik", BS "Jambe Indah Berseri", BS "RT 15"
9	Kec. Sambu	1	2019	Klinik Sampah Arsada
10	Kec. Ampel	2	2017	Den Bagus, Lembah Manah
		1	2018	Argo Asri
		3	2020	Permida, Gondang Slamet RT 1, Gondang Slamet RT 2
		2	2021	Sehati, Mumpuni
11	Kec. Banyudono	6	2021	Sedutan, Jetis, Tompen, Gabahan, Manukan, Kiyai Lumut
12	Kec. Karanggede	1	2021	Srikandi Mandiri
13	Kec. Teras	1	2022	Harapan Mulia, Becik Resik
14	Kec. Mojosongo	1	2020	Sekar Maju
		6	2022	Rukun Enteng, Kauman, Sampah Terpisah, Bank Sampah DLH, Bank Sampah Wonosari, Bank Sampah GS 3
15	Kec. Nogosari	2	2022	Margurejo Makmur, Mojo Makmur

Sumber: Dokumen IKPLHD Kabupaten Boyolali 2022

## 2. TPS 3R

TPS 3R merupakan tempat pengelolaan sampah yang menerapkan sistem 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (memanfaatkan kembali) menjadi salah satu sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kabupaten Boyolali memiliki 6 (enam) TPS 3R yang aktif. TPS 3R tersebut dapat mengelola volume sampah harian sebesar 3.459,27 kg/hari sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah di TPA. TPS 3R mengelola sampah dengan memilah jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis atau sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa produk olahan pada kegiatan TPS 3R yaitu kerajinan tangan, pupuk kompos, paving blok, pakan ternak dan budidaya maggot. Selengkapnya persebaran TPS 3R yang aktif di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:





Tabel II. 104 TPS 3R yang Aktif

Nama TPS	Alamat	Daerah Layanan	Volume Sampah Harian (Ton/Tahun)	Produk Olahan
TPS 3R Doplang	RT 03 RW 01 Ds. Doplang, Kecamatan Teras	2 RT (185 KK)	182,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerajinan tangan dari sampah anorganik dan diaper</li> <li>Paving blok</li> <li>Pupuk kompos</li> </ul>
TPS 3R Jeron Berseri	RT 04 RW 02 Desa Jeron, Kecamatan Nogosari	2 Dusun (200 KK)	531,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pupuk kompos</li> </ul>
TPS 3R Tumang	Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo	730 Keluarga	266,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pupuk kompos</li> <li>Kerajinan tangan dari botol plastik</li> </ul>
TPS 3R Pulosari	Dusun Pulosari, Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel	4 RT (200 KK)	259,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakan Ternak</li> <li>Budidaya Maggot</li> </ul>
TPS 3R Resik Butuh	Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo	320 KK	118,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pupuk kompos</li> </ul>
TPS 3R Kismoyoso	Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak	50 KK	19,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pupuk kompos</li> </ul>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2023

#### 2.6.2.4 Proyeksi Daya Tampung Wilayah/Demografi

Konsep daya tampung dalam pendekatan ini merupakan kebalikan dari kepadatan penduduk, namun dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita sebagai berikut:

Tabel II. 105 Standar Konsumsi Lahan per Kapita

No	Populasi	Konsumsi Lahan Per kapita
1	10.000	0,100
2	25.000	0,091
3	50.000	0,086
4	100.000	0,076
5	250.000	0,07
6	500.000	0,066
7	1.000.000	0,061
8	2.000.000	0,057

Sumber: Data diolah (2024)

Kriteria konsumsi lahan per kapita mengacu pada kriteria yang diusulkan oleh Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) dalam tabel di atas. Apabila nilai ambang batas daya dukung lahan tersebut melebihi nilai konsumsi lahan per kapita yang ditentukan maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Tabel tersebut menunjukkan bahwa ukuran penggunaan lahan permukiman untuk ukuran jumlah populasi penduduk tertentu membutuhkan konsumsi lahan dengan luasan tertentu. Semakin besar jumlah penduduk kota maka semakin kecil konsumsi lahan per ha per kapitanya.





Tabel II. 106 Proyeksi Daya Dukung Lahan Tahun 2025-2045

No	Tahun	Luas Lahan Permukiman (Ha)	Jumlah Penduduk	Daya Dukung Lahan
1	2025	101.510,10	1.109.332	0,0915
2	2030	101.510,10	1.152.686	0,0881
3	2035	101.510,10	1.188.677	0,0854
4	2040	101.510,10	1.216.807	0,0834
5	2045	101.510,10	1.237.642	0,0820

Sumber: BPS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, hasil proyeksi daya dukung lahan hingga tahun 2045 dengan asumsi luas lahan tetap dengan luas 101.510,10 ha dan dihitung dengan proyeksi jumlah penduduk menunjukkan nilai daya dukung lahan yang seluruhnya di atas standar kebutuhan lahan 0,061 ha/kapita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hingga Tahun 2045, Kabupaten Boyolali memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan lahan permukiman bagi masyarakatnya.

#### 2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Proyeksi sarana kesehatan adalah suatu metode untuk memprediksi kebutuhan sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan sejenisnya. Proyeksi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta aspek sosial-ekonomi dan demografi. Analisis proyeksi sarana kesehatan dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kesehatan untuk mencapai tujuan yang optimal. Dalam hal ini standar kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel II. 107 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan persatuan sarana		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			luas lantai min. (m <sup>2</sup> )	luas lahan min. (m <sup>2</sup> )		Radius capaian	Lokasi	
1	Posyandu	1250	36	60	0.048	500	Ditengah Kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian
2	Pos Kesehatan Desa	2500	150	300	0.12	1000	Ditengah Kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya	dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	Bidan Praktik Mandiri	30000	1500	3000	0.1	4000	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu	30000	150	300	0.006	1500	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan





No	Jenis sarana	Jumlah penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan persatuan sarana		Standar (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			luas lantai min. (m <sup>2</sup> )	luas lahan min. (m <sup>2</sup> )		Radius capaian	Lokasi	
5	Puskesmas dan Klinik Pratama	120000	420	1000	0.008	3000	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Praktik Mandiri	5000	18			1500	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7	Apotik	30000	120	250	0.025	1500	dapat dijangkau dengan kendaraan umum	

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Berdasarkan ketentuan standar yang mengacu pada SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan di atas, diperoleh perhitungan kebutuhan sarana kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

**Tabel II. 108 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Tahun 2025-2045**

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Sarana Berdasarkan SNI							
			Posyandu	Balai Pengobatan Warga Pos Kesehatan Desa	BKIA/ Klinik Bersalin Bidan Praktik Mandiri	Puskesmas Pembantu	Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan Puskesmas dan Klinik Pratama	Tempat Praktek Dokter Praktik Mandiri	Rumah Sakit	Apotek
1	2025	1.109.332	887	444	37	37	9	222	5	37
2	2030	1.152.686	922	461	38	38	10	231	5	38
3	2035	1.188.677	951	475	40	40	10	238	5	40
4	2040	1.216.807	973	487	41	41	10	243	5	41
5	2045	1.237.642	990	495	41	41	10	248	5	41

Sumber: BPS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini diperlukan untuk memenuhi standar sarana kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada Tahun 2025 kebutuhan sarana kesehatan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan posyandu berjumlah 887;
2. Kebutuhan Balai Pengobatan Warga berjumlah 444;
3. Kebutuhan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)/Klinik Bersalin berjumlah 37;
4. Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 37;
5. Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 9;
6. Kebutuhan Tempat Praktek Dokter berjumlah 222;
7. Kebutuhan apotek berjumlah 37; dan
8. Kebutuhan rumah sakit berjumlah 5.





Kebutuhan akan fasilitas kesehatan akan tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pada Tahun 2045 diproyeksikan akan mengalami kenaikan jumlah kebutuhan sarana kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebutuhan posyandu berjumlah 990;
2. Kebutuhan Balai Pengobatan Warga berjumlah 495;
3. Kebutuhan BKIA/Klinik Bersalin berjumlah 41;
4. Kebutuhan Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 41;
5. Kebutuhan Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan berjumlah 10;
6. Kebutuhan Tempat Praktek Dokter berjumlah 248;
7. Kebutuhan apotek berjumlah 41; dan
8. Kebutuhan rumah sakit berjumlah 5.

#### 2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan daerah. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Terdapat 4 (empat) jenis fasilitas pendidikan menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987, yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak, merupakan fasilitas pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia (5-6) tahun.
2. Sekolah Dasar, merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia antara (6-12) tahun.
3. Sekolah Menengah Pertama, merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan Sekolah Dasar.
4. Sekolah Menengah Umum, merupakan fasilitas pendidikan yang berfungsi sebagai sarana untuk melayani anak-anak lulusan SMP.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Berikut merupakan standar kebutuhan sarana prasarana pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.





Gambar II. 66 Standar Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min. (m <sup>2</sup> )		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 <small>termasuk rumah penjaga 36 m<sup>2</sup></small>	500	0,28 m <sup>2</sup> /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'		

Sumber: SNI 03-1733-1989, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.

Berdasarkan ketentuan standar yang mengacu pada SNI 03-1733-1989, tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota di atas, diperoleh perhitungan kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel II. 109 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tahun 2025-2045

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Sarana Pendidikan Eksisting (2023)				Kebutuhan Sarana Berdasarkan SNI			
		790	584	102	73	887	693	231	231
2025	1.109.332					922	720	240	240
2030	1.152.686					951	743	248	248
2035	1.188.677					973	761	254	254
2040	1.216.807					990	774	258	258
2045	1.237.642								

Sumber: BPS, data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2025 hingga 2045 diproyeksikan mengalami peningkatan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini diperlukan untuk memenuhi standar sarana pendidikan yang dibutuhkan sehingga dapat mendorong kemajuan sumber daya manusia di Kabupaten Boyolali. Pada Tahun 2025 kebutuhan sarana pendidikan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) dibutuhkan sebanyak 887, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 97 unit sekolah;
2. Sekolah Dasar (SD) dibutuhkan sebanyak 693, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 109 unit sekolah;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibutuhkan sebanyak 231, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 129 unit sekolah; dan
4. Sekolah Menengah Umum (SMA dan SMK) dibutuhkan sebanyak 231, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 158 unit sekolah.





Kebutuhan akan fasilitas kesehatan akan tumbuh seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pada Tahun 2045 diproyeksikan akan mengalami kenaikan jumlah kebutuhan sarana kesehatan dengan rincian sebagai berikut.

1. Taman Kanak-kanak (TK) dibutuhkan sebanyak 990 unit sekolah, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 200 unit sekolah;
2. Sekolah Dasar (SD) dibutuhkan sebanyak 774, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 190 unit sekolah;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibutuhkan sebanyak 258, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 156 unit sekolah; dan
4. Sekolah Menengah Umum (SMA dan SMK) dibutuhkan sebanyak 258, sehingga dengan kondisi eksisting pada Tahun 2023 kekurangan 185 unit sekolah.

#### 2.6.2.7 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Ketersediaan energi merupakan salah satu penggerak perekonomian dan pertumbuhan daerah. Salah satu energi yang penting adalah energi listrik, pengelolaan energi listrik yang tepat dapat mendukung perkembangan dan optimalisasi potensi yang dimiliki oleh daerah. Sehingga perencanaan dan pengelolaan energi termasuk energi listrik perlu dilakukan dengan tepat. Dengan pertimbangan tersebut maka kebutuhan akan energi listrik perlu diperkirakan sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola energi listrik.

Dalam hal ini peramalan kebutuhan energi listrik dilihat dari peramalan konsumsi energi listrik di masa yang akan datang. Peramalan ini menggunakan perangkat lunak *Long-range Energy Alternative Planning (LEAP)* untuk meramalkan konsumsi energi listrik dalam periode Tahun 2025 hingga 2045. Sektor konsumsi energi listrik yang diramalkan mencakup sektor rumah tangga, Penerangan dan Jalan Umum (PJU), industri, bisnis, sosial, dan pemerintah.

Metode yang digunakan dalam bagian ini menggunakan model *Business As Usual (BAU)*. Model ini mengasumsikan bahwa tahun akhir proyeksi cenderung memiliki pola pemakaian energi listrik yang sama dengan tahun dasar. Hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan dalam penentuan kebijakan perkembangan dalam pemodelan perkiraan. Perkiraan berjalan konstan tanpa ada kebijakan yang berpengaruh.

Analisis ini mempertimbangkan beberapa variabel seperti Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), jumlah kebutuhan listrik. Data-data variabel tersebut diperoleh dari sumber data sekunder seperti data Badan Pusat Statistik (BPS) dan PLN. Data-data tersebut kemudian diolah dengan perangkat lunak LEAP dengan model BAU sehingga menghasilkan proyeksi sebagai berikut:

Tabel II. 110 Proyeksi Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk	1.090.129	1.109.332	1.152.686	1.188.677	1.216.807	1.237.642
Jumlah Rumah	167.498	180.349	213.681	253.173	299.965	355.404
Jumlah kebutuhan listrik	574.107	758.641	947.119	1.197.471	1.536.478	2.004.840

Sumber: Sumber: Data diolah (2024)





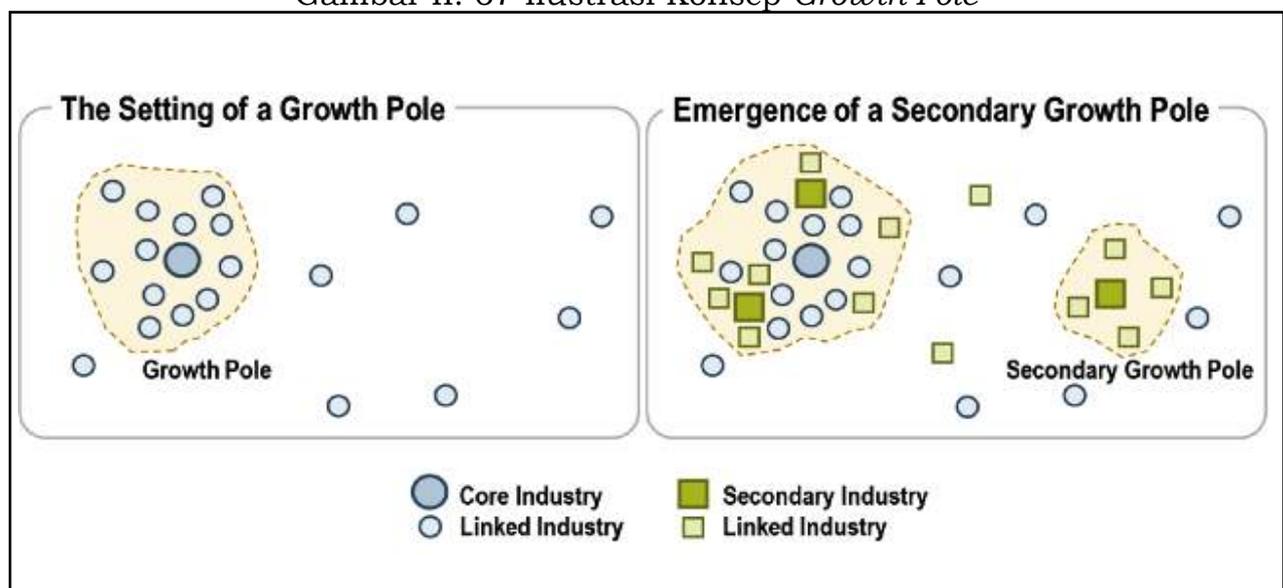
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Dengan rata-rata pertumbuhan jumlah pelanggan sektor rumah tangga sebesar 16,32%. Dengan total pelanggan pada Tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 180.349 pelanggan dan terus tumbuh hingga 355.404 pelanggan pada Tahun 2045.

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan, atau yang dikenal sebagai konsep *growth pole*, adalah kerangka penting dalam memahami dinamika pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Teori *Growth Pole* pertama kali dikembangkan untuk menjelaskan dan menganalisis pola pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks wilayah tertentu, ada pusat pertumbuhan ekonomi yang berfungsi sebagai pendorong perkembangan ekonomi di sekitarnya melalui investasi, inovasi, dan pertumbuhan pesat di sektor-sektor ekonomi tertentu. Pusat-pusat pertumbuhan ini biasanya menjadi fokus utama pengembangan ekonomi, mengintegrasikan sektor-sektor kunci seperti industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang berkembang baik, termasuk sistem transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, mendukung pertumbuhan pusat-pusat ini dan memfasilitasi integrasi kegiatan ekonomi di seluruh wilayah tersebut.

Gambar II. 67 Ilustrasi Konsep *Growth Pole*



Sumber: Buku Pembelajaran Geografi, 1997

Teori *Growth Pole* menyatakan bahwa di suatu wilayah terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan di sekitarnya melalui investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang berkembang pesat. Pusat pertumbuhan ini menjadi fokus pengembangan ekonomi, mencakup sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan jasa. Infrastruktur yang baik, termasuk jaringan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, mendukung pertumbuhan pusat tersebut dan mengintegrasikan aktivitas ekonomi dalam wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Boyolali dapat ditinjau dengan menganalisis wilayah yang memiliki ciri-ciri empiris sebagai pusat pertumbuhan. Pendekatan lain yang sejalan dengan analisis pusat pertumbuhan wilayah adalah mempertimbangkan struktur penataan ruang dan mengidentifikasi kawasan strategis di tingkat nasional, provinsi,





maupun daerah. Kedua aspek ini menjadi landasan hukum untuk menjalankan fungsi wilayah kabupaten sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pusat pertumbuhan juga didefinisikan sebagai hierarki dalam sistem permukiman yang mengikuti jaringan jalan dan kondisi fisik wilayah di Kabupaten Boyolali. Sistem permukiman dikembangkan untuk membentuk struktur perkotaan yang dinamis dan akomodatif, dengan pola pengembangan kota yang berkelanjutan dengan proses pembangunan yang terpadu. Keberadaan perkotaan dalam suatu wilayah kabupaten merupakan barometer perkembangan wilayah secara umum, dengan berbagai karakteristik tertentu yang menjadi pendukung perkembangannya. Untuk itu, perkotaan yang ada harus dikembangkan terintegrasi dengan pola pengembangan wilayah secara umum. Berdasarkan konsep tersebut maka arahan pengembangan pusat pertumbuhan berdasarkan sistem perkotaan dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Hierarki kota-kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah kabupaten;
2. Pusat Pengembangan wilayah perkotaan dengan peningkatan fungsi dan peran kota-kota yang terbentuk dalam sistem perkotaan yang terintegrasi, dalam fungsi utama sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya sesuai dengan hierarki kotanya, untuk membentuk struktur perkotaan yang dinamis dan terintegrasi;
3. Sebagai simpul bagi kesempatan investasi keuangan dan jasa dalam usaha meningkatkan fungsi dan peran kota; dan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah yang lebih memadai.

Selanjutnya rencana dari sistem perkotaan adalah pola hierarki kota dalam sistem distribusi pengembangan wilayah dan rangkaian sistem jaringan sebagai pembentuk struktur kota-kota, dengan 1 (satu) kota utama yaitu Kota Boyolali; 1 (satu) kota berhierarki II yaitu Ampel; 4 (empat) kota berhierarki III yaitu Ngemplak, Mojosongo, Banyudono dan Karanggede; serta 3 (tiga) kota berhierarki IV yaitu Simo, Teras dan Sambu. Sistem ini dirangkaikan dalam pola distribusi, pola sebaran dan pola pelayanan yang saling memperkuat dan dinamis. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja sistem jaringan yang ada terutama dalam pola pelayanan baku bagi pengembangan wilayah dengan wujud membuka sistem jaringan yang lebih memudahkan aksesibilitas antar wilayah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan RPJPD, maka perlu dilakukan penilaian terhadap posisi Kabupaten Boyolali dengan mempertimbangkan konteks nasional dan regional secara konstelatif. Penilaian lebih lanjut bisa dilakukan untuk mengevaluasi pusat-pusat pertumbuhan di dalam skala wilayah administratif Kabupaten Boyolali.

### 2.7.1 Kedudukan Kabupaten Boyolali Secara Regional

Secara regional, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Apabila ditinjau secara tata letak geografisnya, Kabupaten Boyolali memiliki posisi yang strategis dimana wilayah ini berada tepat di tengah jalur nasional yang menghubungkan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dengan salah satu kota destinasi pariwisata terbesar yaitu Kota Surakarta. Dengan begitu, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran krusial dalam ranah provinsi hingga nasional.





Berkaitan dengan kedudukan Kabupaten Boyolali di ranah Provinsi Jawa Tengah, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 bahwa Kabupaten Boyolali memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Selain berperan sebagai salah satu wilayah PKW, Kabupaten Boyolali juga tergabung di dalam salah satu wilayah pengembangan yang ada di Provinsi yaitu wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten).

Lebih lanjut, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah yang strategis di ranah Provinsi Jawa Tengah menyebabkan wilayah ini juga memiliki peran penting di dalam penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, Kabupaten Boyolali termasuk di dalam salah satu wilayah strategis yang ditinjau berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkonsentrasi pada sektor agropolitan (Semarang, Boyolali, Magelang) dan pengembangan kawasan perkotaan Subosukawonosraten.

#### 2.7.2 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Boyolali

Selain kedudukan Kabupaten Boyolali di lingkup Provinsi Jawa Tengah secara umum, pusat pertumbuhan kabupaten juga didasarkan pada hierarki sistem pusat perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali serta kawasan strategis yang ada. Berdasarkan ketentuan normatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Boyolali terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di kawasan perkotaan Boyolali.
- b. PKL yang berada di kawasan perkotaan Ampel.
- c. PPK meliputi:
  1. Kawasan Perkotaan Ngemplak;
  2. Kawasan Perkotaan Mojosongo;
  3. Kawasan Perkotaan Banyudono;
  4. Kawasan Perkotaan Karanggede;
  5. Kawasan Perkotaan Simo;
  6. Kawasan Perkotaan Teras; dan
  7. Kawasan Perkotaan Sambu.
- d. PPL meliputi:
  1. Desa Selo Kecamatan Selo;
  2. Desa Cepogo Kecamatan Cepogo;
  3. Desa Musuk Kecamatan Musuk;
  4. Desa Kemasan Kecamatan Sawit;
  5. Desa Glonggong Kecamatan Nogosari;
  6. Desa Klego Kecamatan Klego;
  7. Desa Andong Kecamatan Andong;
  8. Desa Klewor Kecamatan Kemusu;
  9. Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro;
  10. Desa Juwangi Kecamatan Juwangi;
  11. Desa Gladagsari Kecamatan Gladagsari;

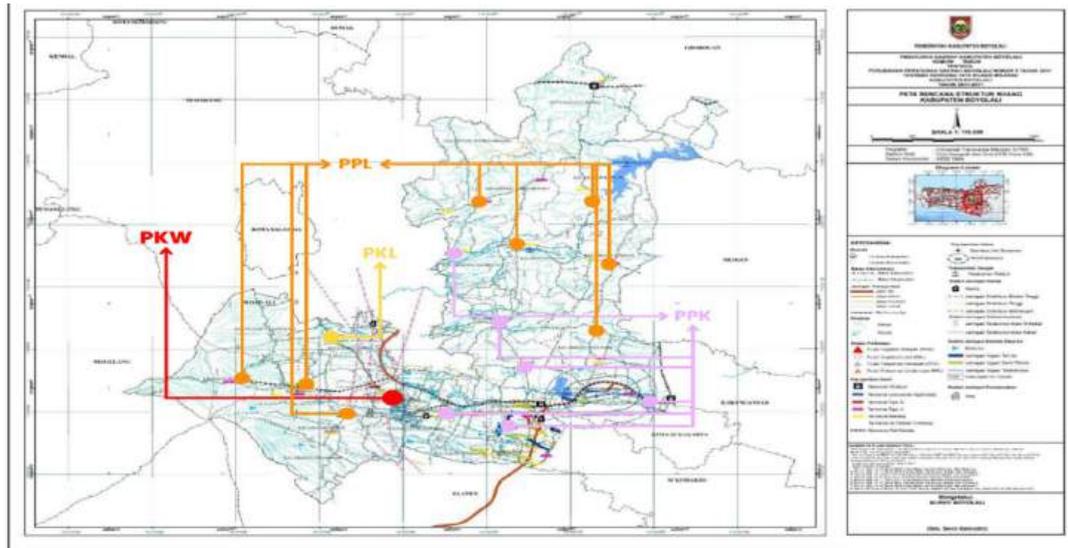




12. Desa Karangkendal Kecamatan Tamansari; dan
13. Desa Garangan Kecamatan Wonosamodro.

Pada tahap pertama, identifikasi terhadap pusat pertumbuhan ditinjau dari sistem pusat pelayanan Kabupaten Boyolali yang tercantum sebagai berikut:

Gambar II. 68 Peta Hierarki Struktur Ruang



Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Selain berfokus pada wilayah yang telah diidentifikasi sebagai pusat kegiatan sesuai dengan rencana struktur ruang Kabupaten Boyolali, perhatian juga dapat diberikan pada kawasan strategis di kabupaten tersebut. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tinggi di lingkup kabupaten.

Kawasan Strategis Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali ditetapkan berupa kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup kawasan unggulan pengembangan ekonomi kabupaten maupun kawasan stimulasi ketertinggalan wilayah. Kawasan yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

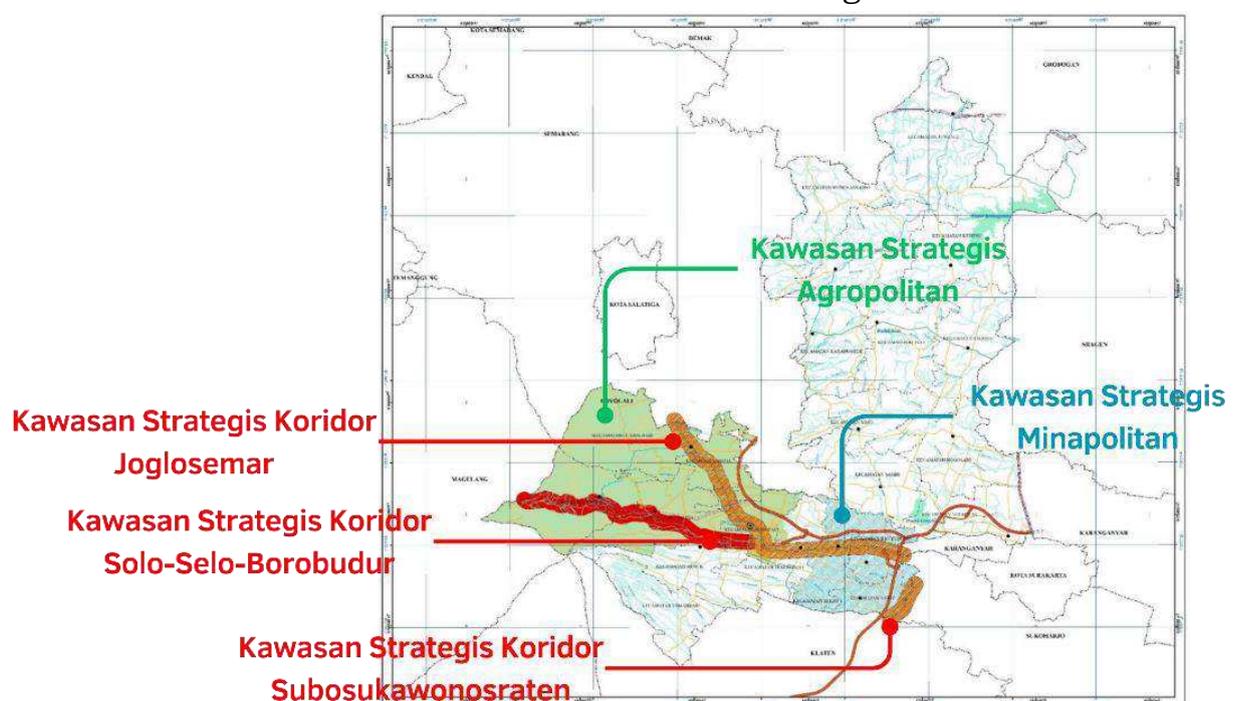
- a. koridor kawasan strategis Subosukawonosraten meliputi:
  1. Kecamatan Banyudono;
  2. Kecamatan Teras;
  3. Kecamatan Ngemplak;
  4. Kecamatan Mojosongo;
  5. Kecamatan Boyolali; dan
  6. Kecamatan Ampel.
- b. jalur kawasan Solo-Selo-Borobudur meliputi:
  1. Kecamatan Banyudono;
  2. Kecamatan Teras;
  3. Kecamatan Mojosongo;
  4. Kecamatan Boyolali;
  5. Kecamatan Cepogo; dan
  6. Kecamatan Selo.
- c. jalur wisata Joglo Semar meliputi:
  1. Kecamatan Sawit;
  2. Kecamatan Banyudono;





3. Kecamatan Teras;
  4. Kecamatan Mojosongo;
  5. Kecamatan Boyolali; dan
  6. Kecamatan Ampel.
- d. kawasan minapolitan meliputi:
1. Kecamatan Teras;
  2. Kecamatan Sawit; dan
  3. Kecamatan Banyudono.
- e. kawasan agropolitan meliputi:
1. Kecamatan Selo;
  2. Kecamatan Ampel;
  3. Kecamatan Gladagsari;
  4. Kecamatan Cepogo; dan
  5. Kecamatan Boyolali.

Gambar II. 69 Kawasan Strategis



Sumber: Data diolah (2024)

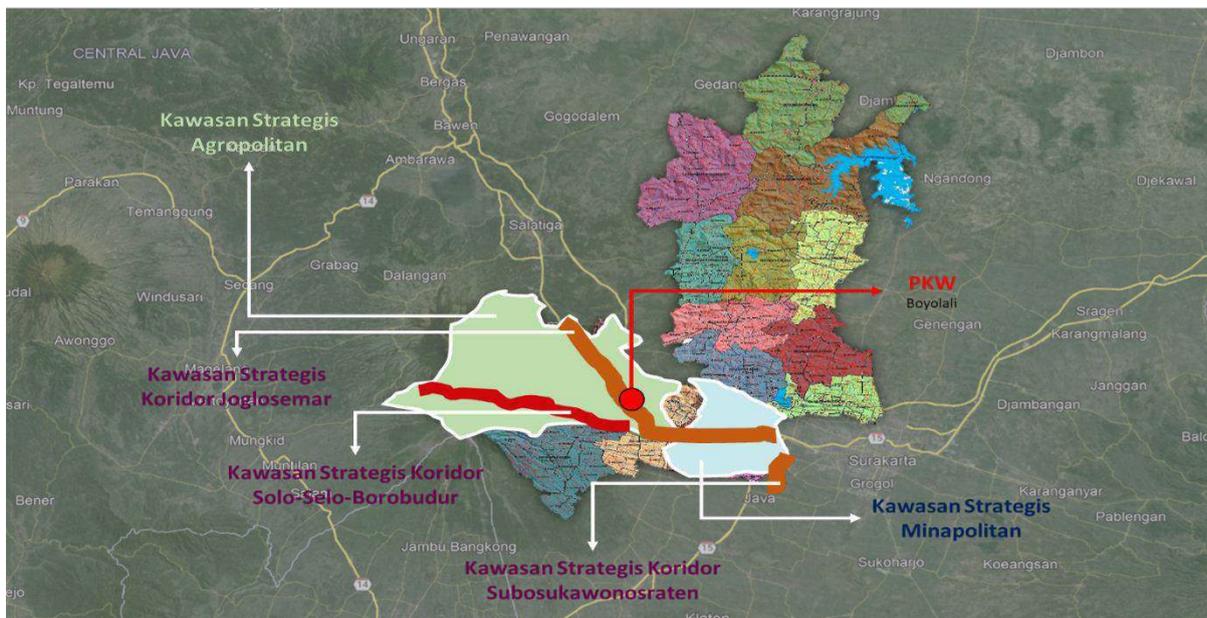
Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali memiliki potensi untuk menjadi pusat pendorong perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti industri pengolahan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Fokus pengembangan kawasan strategis ini adalah pada pemanfaatan sumber daya alam dan produk unggulan daerah, sehingga dapat membantu membangun citra (*branding*) Kabupaten Boyolali.

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.





**Gambar II. 70 Potensi Pengembangan Wilayah**



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Kabupaten Boyolali, dilihat dari aspek penataan ruang yang mencakup struktur ruang dan identifikasi kawasan strategis, umumnya berfokus pada pengembangan sektor pertanian (1) Agropolitan dan Minapolitan, dengan dukungan sektor (2) pariwisata. Secara geografis, pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi pada kawasan pusat kegiatan yang terletak di perkotaan Boyolali. Adapun secara lebih detil fungsi pusat pelayanan dan wilayah pengembangan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 111 Fungsi Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengembangan**

No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
1	PKW	Boyolali	I	a. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten; b. Pusat permukiman; c. Pusat Pendidikan; d. Pusat pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten; e. Pusat transportasi wilayah; f. Pusat pengembangan permukiman perkotaan; g. Daerah pengembangan perdagangan; h. Pusat pengembangan pariwisata; i. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah); j. Pengembangan tanaman buah (alpukat, mangga, jeruk siam, nanas, durian, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka); k. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, tembakau, dan kopi robusta); l. Pengembangan kegiatan peternakan; dan m. Pengembangan kegiatan perikanan.
2	PKL	Ampel	II	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pusat pengembangan kegiatan pendidikan; c. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi; d. Pengembangan industri; e. Pengembangan permukiman; f. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah);





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				<p>g. Pengembangan tanaman buah (alpukat, rambutan, duku, jeruk siam, nanas, durian, pisang, jambu biji, pepaya, mangga, dan nangka);</p> <p>h. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, teh, cengkeh, tembakau, jahe, kopi, dan kapuk randu);</p> <p>i. Pengembangan kegiatan peternakan;</p> <p>j. Pengembangan perikanan;</p> <p>k. Pengembangan kawasan industri; dan</p> <p>l. Pusat pengembangan pariwisata.</p>
3	PPK	Ngemplak	III	<p>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</p> <p>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</p> <p>c. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi;</p> <p>d. Pengembangan budidaya hutan;</p> <p>e. Pengembangan permukiman;</p> <p>f. Pengembangan pusat transportasi - Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai);</p> <p>g. Pengembangan tanaman buah (rambutan, sawo, jambu biji, pepaya, mangga, dan nangka);</p> <p>h. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa dan kencur);</p> <p>i. Pengembangan kegiatan peternakan;</p> <p>j. Pengembangan perikanan;</p> <p>k. Pengembangan kawasan industri; dan</p> <p>l. Pusat pengembangan pariwisata.</p>
		Mojosongo	III	<p>a. Pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten;</p> <p>b. Pusat pengembangan kegiatan pendidikan;</p> <p>c. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi;</p> <p>d. Pengembangan industri kecil;</p> <p>e. Pengembangan permukiman;</p> <p>f. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai);</p> <p>g. Pengembangan tanaman buah (rambutan, duku, durian, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</p> <p>h. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, dan tembakau);</p> <p>i. Pengembangan kegiatan peternakan;</p> <p>j. Pengembangan perikanan;</p> <p>k. Pengembangan industri; dan</p> <p>l. Pengembangan pariwisata.</p>
		Banyudono	III	<p>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</p> <p>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</p> <p>c. Pengembangan industri;</p> <p>d. Pengembangan budidaya hutan;</p> <p>e. Pengembangan permukiman;</p> <p>f. Pengembangan pusat transportasi - Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah);</p> <p>g. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, tembakau, kenanga, kapuk randu, dan kantil);</p>





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pengembangan tanaman buah (alpukat, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>i. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>j. Pengembangan perikanan;</li> <li>k. Pengembangan industri; dan</li> <li>l. pengembangan pariwisata.</li> </ul>
		Karanggede	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pusat pengembangan kegiatan pendidikan;</li> <li>c. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi;</li> <li>d. Pengembangan industri kecil;</li> <li>e. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (alpukat, rambutan, durian, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, dan kapuk randu);</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pusat pengembangan pariwisata;</li> <li>j. Pengembangan perikanan; dan</li> <li>k. Pengembangan industri.</li> </ul>
		Simo	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan pusat transportasi;</li> <li>e. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai);</li> <li>f. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, jambu mete, dan kapuk randu);</li> <li>g. Pengembangan tanaman buah (rambutan, durian, pisang, pepaya, dan mangga);</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pengembangan perikanan; dan</li> <li>j. pengembangan pariwisata.</li> </ul>
		Teras	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan industri;</li> <li>d. Pengembangan permukiman;</li> <li>e. Pengembangan pusat transportasi;</li> <li>f. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah);</li> <li>g. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, tembakau, jambu mete, dan kenanga);</li> <li>h. Pengembangan tanaman buah (rambutan, durian, pisang, jambu biji, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>i. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>j. Pengembangan perikanan; dan</li> <li>k. Pengembangan industri.</li> </ul>
		Sambi	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> </ul>





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan pusat transportasi;</li> <li>e. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai);</li> <li>f. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa dan kencur);</li> <li>g. Pengembangan tanaman buah (rambutan, durian, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pengembangan perikanan;</li> <li>j. Pengembangan industri; dan</li> <li>k. Pengembangan pariwisata.</li> </ul>
4	PPL	Selo	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, dan ubi kayu);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (cengkeh, tembakau, kopi robusta, dan kayu manis);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (jeruk besar, pisang, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri kecil dan kerajinan;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pusat pengembangan pariwisata; dan</li> <li>j. Pengembangan Perikanan.</li> </ul>
		Cepogo	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, kenanga, dan pace);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (durian, pisang, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pengembangan Perikanan; dan</li> <li>j. Pusat pengembangan pariwisata.</li> </ul>
		Musuk	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, kapuk randu, dan sirih);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (alpukat, duku, durian, pisang, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri kecil dan kerajinan;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan; dan</li> <li>i. Pengembangan Perikanan.</li> </ul>
		Sawit	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> </ul>





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi dan jagung);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (tembakau dan kenanga);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan perikanan;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pengembangan pariwisata; dan</li> <li>j. Pengembangan industri.</li> </ul>
		Nogosari	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, dan jambu mete);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (rambutan, nanas, durian, pisang, jambu biji, sawo, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan; dan</li> <li>i. Pengembangan perikanan.</li> </ul>
		Klego	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, dan kacang tanah);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kencur, jahe, kopi robusta, dan jambu mete);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (rambutan, durian, pisang, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri;</li> <li>h. Pengembangan kegiatan peternakan;</li> <li>i. Pengembangan perikanan; dan</li> <li>j. Pengembangan pariwisata.</li> </ul>
		Andong	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat pemerintahan kecamatan;</li> <li>b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;</li> <li>c. Pengembangan permukiman;</li> <li>d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah);</li> <li>e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, dan jambu mete);</li> <li>f. Pengembangan tanaman buah (rambutan, nanas, pisang, jambu biji, jambu air, pepaya, mangga, dan nangka);</li> <li>g. Pengembangan industri;</li> <li>h. Pengembangan perikanan; dan</li> </ul>





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				i. Pengembangan Peternakan.
		Kemusu	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan; c. Pengembangan permukiman; d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah); e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, dan asem); f. Pengembangan tanaman buah (rambutan, nanas, durian, pisang, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, mangga, dan nangka); g. Pengembangan industri; h. Pengembangan kegiatan peternakan; i. Pengembangan perikanan; dan j. Pengembangan pariwisata.
		Wonosegoro	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan; c. Pengembangan permukiman; d. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah); e. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, dan jambu mete); f. Pengembangan tanaman buah (nanas, durian, pisang, dan mangga); g. Pengembangan industri; h. Pengembangan kegiatan peternakan; dan i. Pengembangan perikanan.
		Juwangi	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pusat pengembangan kegiatan pendidikan; c. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi - Pengembangan industri; d. Pengembangan permukiman; e. Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah); f. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa); g. Pengembangan tanaman buah (nanas, pisang, jambu biji, sawo, pepaya, mangga, dan nangka); h. Pengembangan industri; i. Pengembangan kegiatan peternakan; j. Pengembangan perikanan; dan k. Pusat pengembangan pariwisata.
		Gladagsari	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pusat pengembangan kegiatan Pendidikan; c. Pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi; d. Pengembangan industri; e. Pengembangan permukiman; f. Pengembangan pertanian; g. Pengembangan kegiatan peternakan; h. Pengembangan kegiatan perikanan; dan i. Pengembangan pariwisata.
		Tamansari	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan;





No	Sistem Pusat Pelayanan	Kecamatan	Hierarki	Fungsi Pelayanan
				c. Pengembangan permukiman; d. Pengembangan pertanian; e. Pengembangan industri kecil; f. Pengembangan kegiatan peternakan; dan g. Pengembangan Kegiatan Perikanan.
		Wonosamodro	IV	a. Pusat pemerintahan kecamatan; b. Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan; c. Pengembangan permukiman; d. Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, kencur, dan jambu mete); e. Pengembangan kegiatan industri; f. Pengembangan kegiatan peternakan; dan g. Pengembangan Kegiatan Perikanan.

Sumber: RTRW 2011-2031





### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian pelaksanaan pembangunan belum mampu mengatasi beragam permasalahan pembangunan di Kabupaten Boyolali. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan rumusan kebijakan yang disusun dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Boyolali, permasalahan merupakan panggilan untuk tindakan nyata dan kebijakan yang berorientasi pada solusi. Penting bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling mendesak dan merumuskan strategi yang tepat dalam menanggapi tantangan tersebut. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, juga penting untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang makna permasalahan pembangunan daerah, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan identifikasi permasalahan yang tepat akan memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindak lanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Boyolali, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional, nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan, menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

#### **3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Boyolali**

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum kondisi daerah (Bab II) maka dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor dan sebab-akibat yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan bab ini turut memperhatikan prinsip-prinsip analitis dan mengeksplorasi hubungan sebab-akibat dari fenomena saat eksisting dan dampaknya ke masa depan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok jangka panjang Kabupaten Boyolali sebagai berikut.





Gambar III. 1 Permasalahan Pembangunan Jangka Panjang



Sumber: Bapperida Kabupaten Boyolali, 2024

Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka berikut penjabaran permasalahan pokok RPJPD Tahun 2025-2045:

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Boyolali dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi, akuntabilitas, hingga partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan akses informasi publik dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengawasi dan memantau kinerja pemerintah. Selain itu, kurangnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu IRB dan IID. Beberapa indeks ini merupakan indeks yang mampu memberikan gambaran umum kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan data Tahun 2022, IRB Kabupaten Boyolali mencapai predikat “B (Baik)” dan di Tahun 2023 meningkat hingga mencapai predikat “BB”. Merujuk pada capaian IRB tersebut, jika melihat dari Kementerian PAN-RB predikat B memiliki interpretasi bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja. Terlihat masih perlu adanya peningkatan komitmen dalam manajemen kinerja. Dalam penilaian IRB terdapat beberapa indikator penting yaitu pertama, pengawasan yang dilihat pada opini BPK, di Tahun 2023 memperoleh predikat WTP. Kedua, pelayanan publik dengan melihat capaian IPP Tahun 2023 mencapai nilai 4,01 (A-), hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boyolali. Ketiga, terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang dapat dilihat melalui nilai SAKIP, pada Tahun 2023 memiliki predikat B dengan nilai 68,28 yang mengidentifikasi bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam konteks pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merujuk pada kemampuan pemerintah dalam bertanggung jawab atas hasil kerjanya kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang



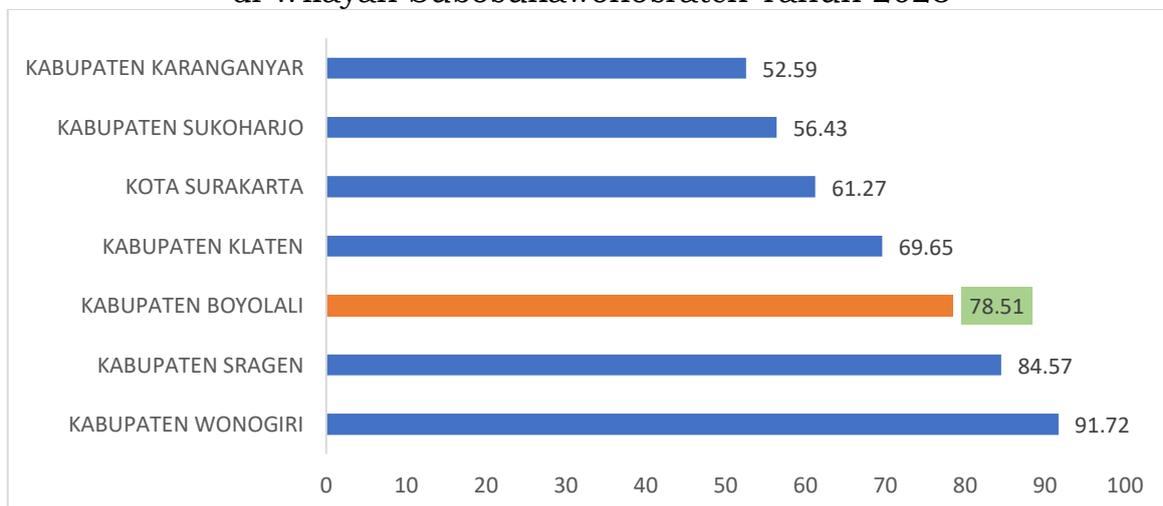


dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang efektif juga dapat menghambat identifikasi dan penyelesaian masalah secara tepat waktu, sehingga menyulitkan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan ini nantinya Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan kinerja, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang anggaran dan program-program pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah, sehingga memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian dari agenda pembangunan yang dilaksanakan secara akuntabel dan responsif. Dengan ini, diharapkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Boyolali perlu adanya inovasi daerah sebagai pendukung dalam Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan menghadirkan solusi kreatif dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang kompleks. Melalui inovasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan teknologi, kerja sama lintas sektor, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, inovasi daerah mampu menciptakan solusi yang relevan dan berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Memahami pernyataan di atas, terkait dengan IID Tahun 2023 dengan capaian nilai sebesar 78,51 dengan kategori “Sangat Inovatif”. Dengan capaian ini, perlu adanya peningkatan dalam implementasi inovasi yang dihasilkan sehingga akan mampu meningkatkan daya saing daerah. Dengan capaian ini, untuk melihat posisi Kabupaten Boyolali perlu adanya perbandingan dengan Kabupaten sekitar yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar III. 2 Perbandingan IID Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, terlihat capaian IID sebesar 78,51 masih di bawah capaian Kabupaten Sragen yang memiliki capaian nilai sebesar 84,57 dan Kabupaten Wonogiri dengan capaian nilai sebesar 91,72. Oleh karena itu,





Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mendorong dan memberikan dukungan yang cukup untuk memfasilitasi proses inovasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

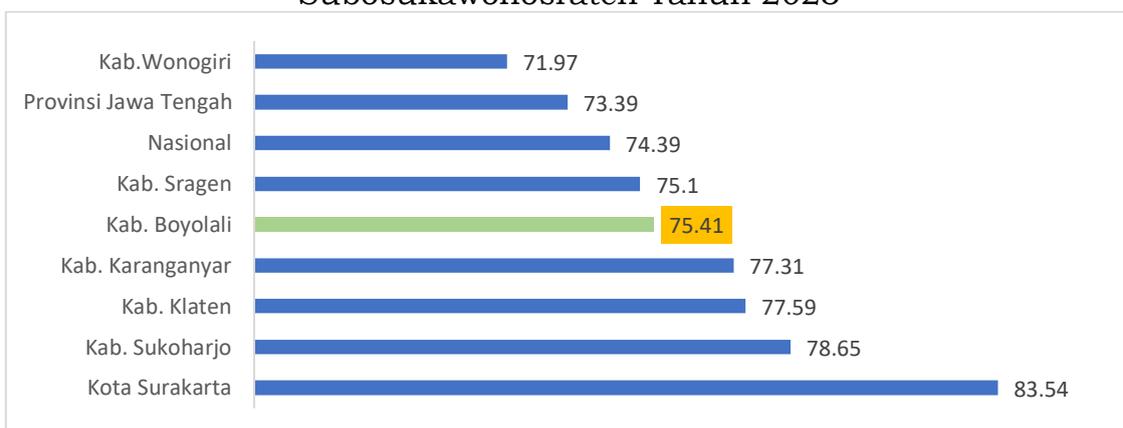
## 2. Belum Optimalnya Peningkatan SDM yang Berkualitas Menuju SDM Unggul

Belum optimalnya peningkatan SDM yang berkualitas menuju SDM unggul di Kabupaten Boyolali dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam pembangunan karena berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam berkontribusi pada ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan, serta kurangnya kesempatan untuk mengakses pelatihan dan pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, rendahnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan SDM yang berkualitas di masyarakat Boyolali. Terkait dengan pembangunan SDM salah satu indikator yang menggambarkan kualitas SDM adalah IPM.

IPM memiliki 3 (tiga) dimensi dalam pengukurannya yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori menurut UNDP, yaitu (1)  $IPM \geq 80$  termasuk kategori sangat tinggi; (2)  $70 \leq IPM < 80$  termasuk kategori tinggi; (3)  $60 \leq IPM < 70$  termasuk kategori sedang; dan (4)  $IPM < 60$  termasuk kategori rendah.

Merujuk hal tersebut, sesuai data BPS IPM Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 mencapai 75,41 dengan kategori Tinggi. Dengan capaian ini, untuk mengetahui posisi Kabupaten Boyolali perlu adanya perbandingan dengan Kabupaten sekitar seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut:

Gambar III. 3. Perbandingan IPM dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

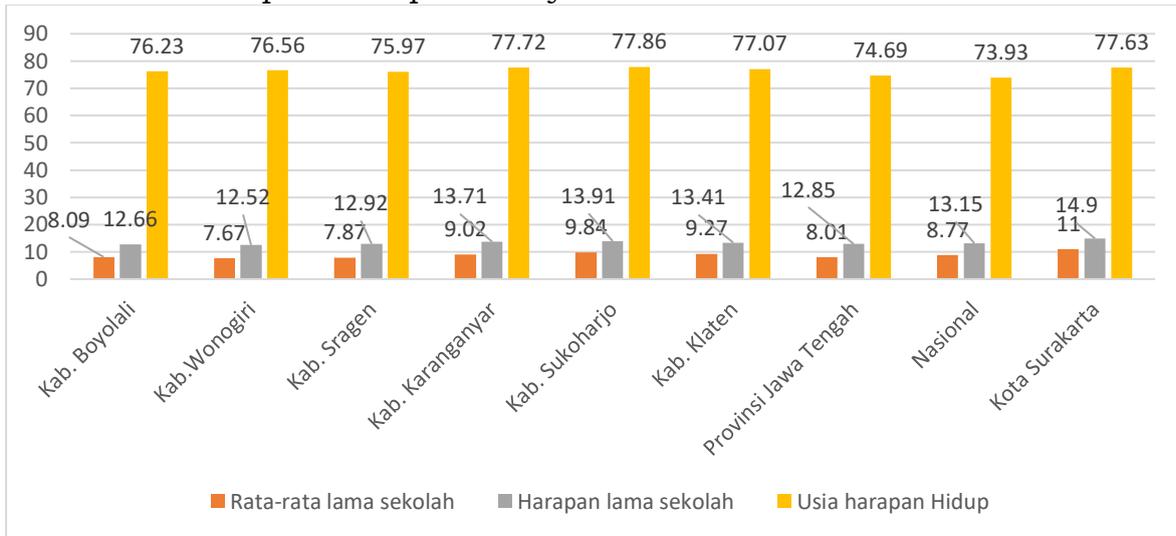
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa capaian IPM Kabupaten Boyolali masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar yang mencapai 77,31. Kemudian lebih mendalam terkait aspek pendidikan yang dilihat dengan indikator rata-rata lama sekolah dengan capaian 8,09, harapan lama sekolah mencapai 12,66 dan angka harapan hidup mencapai 76,23 jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitar terlihat capaian Kabupaten





Boyolali masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten, seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini:

Gambar III. 4. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Dengan penjabaran permasalahan di atas, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM dengan investasi yang lebih besar pada infrastruktur pendidikan dan pelatihan, termasuk penyediaan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas di semua tingkatan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja harus didorong dan didukung secara aktif. Penyadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri juga perlu ditingkatkan melalui kampanye dan program-program sosialisasi yang efektif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan kolaborasi antar *stakeholder*, sehingga nantinya diharapkan peningkatan SDM yang berkualitas dapat tercapai, menjadikan masyarakat Kabupaten Boyolali lebih unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

### 3. Tingginya Potensi Masuknya Kebudayaan Asing yang Tidak Sesuai dengan Kearifan Lokal

Tingginya potensi masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Boyolali menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan budaya. Salah satu masalah yang muncul adalah terkikisnya nilai-nilai tradisional dan identitas lokal yang telah diwariskan secara turun temurun. Kebudayaan asing yang masuk tanpa filter dapat menggeser pola pikir masyarakat, mengubah gaya hidup, serta mengancam keberlangsungan praktik budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

Permasalahan lainnya adalah potensi konflik antargenerasi dan antarbudaya. Ketika kebudayaan asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai lokal diterima oleh sebagian masyarakat, terjadi polarisasi di antara mereka yang mempertahankan tradisi dan mereka yang menerima budaya baru. Hal ini bisa menciptakan ketegangan sosial dan memperlebar kesenjangan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat Kabupaten Boyolali.

Dalam menghadapi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah preventif dan edukatif. Pemerintah setempat dan lembaga sosial budaya perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan kearifan lokal. Selain





itu, pendekatan dialogis antara berbagai pihak, termasuk generasi muda dan komunitas asing, perlu diperkuat untuk mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi yang inklusif. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Boyolali dapat mengelola keberagaman budaya dengan lebih baik, mempertahankan identitasnya, sambil juga membuka diri terhadap kemajuan dan perubahan yang positif.

Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk dapat melestarikan nilai dan budaya ini adalah dengan melakukan peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Boyolali seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya gotong royong, pentas seni, lomba permainan tradisional, pendataan tari, pendataan makanan khas masa lampau, penulisan ulang cerita-cerita rakyat, pelestarian dan penggalan cagar budaya.

#### 4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Dalam Mengembangkan Sektor Unggulan Daerah

Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya dalam mengembangkan sektor unggulan daerah di Kabupaten Boyolali dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kabupaten Boyolali memiliki beragam potensi sumber daya alam, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pengembangan sektor unggulan. Kurangnya infrastruktur pendukung dan aksesibilitas juga menjadi faktor yang menghambat pemanfaatan optimal potensi sumber daya di Kabupaten Boyolali. Beberapa potensi yang dimiliki Kabupaten Boyolali, antara lain:

a. Sektor Pertanian, meliputi sub sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam Boyolali memiliki berbagai potensi pada kategori sebagai berikut:

##### 1. Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Boyolali adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan terdiri atas padi dan jagung. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur, buah, biofarmaka, dan tanaman hias. Sedangkan tanaman perkebunan antara lain tembakau, kopi, dan kelapa.

##### 2. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Boyolali sangat besar, utamanya peternakan sapi yang selama ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali juga dikenal sebagai kota susu dan menjadi salah satu sentra terbesar penghasil susu sapi di Jawa Tengah. Produk turunan sapi selain olahan susu juga olahan daging antara lain abon, dendeng, dan kripik paru. Potensi peternakan tidak hanya pada sapi, tetapi juga ruminansia lain dan unggas.

##### 3. Perikanan

Potensi perikanan Kabupaten Boyolali meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Kabupaten Boyolali memiliki sumber daya perikanan di Waduk Cengklik, Waduk Kedung Ombo, Waduk Bade, sungai, dan kolam-kolam buatan yang kaya akan keanekaragaman hayati perairan. Komoditas tersebut meliputi ikan lele, nila, gurame, dan patin. Selain dijual segar, ikan lele diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan seperti abon, kripik kulit lele, kripik daging lele, aneka macam *frozen food*, dan lain-lain.

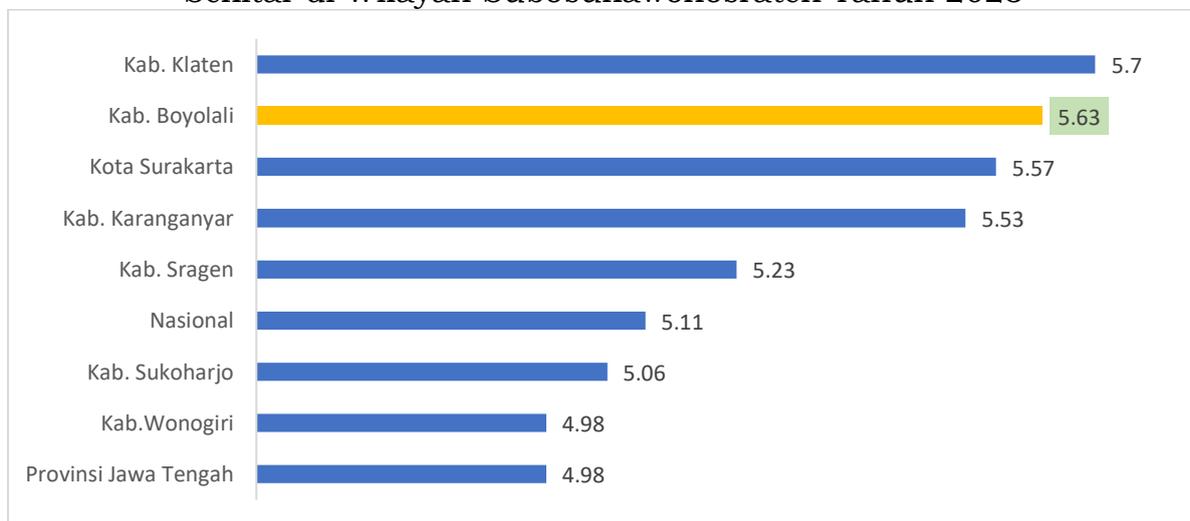




- b. Sektor Pariwisata, Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk gunung, waduk, mata air, dan air terjun, Kabupaten Boyolali menarik banyak wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya. Objek wisata alam antara lain Objek Wisata Waduk Cengklik, Waduk Kedung Ombo, Air Terjun Semuncar, Pemandian Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Masjid Cipto Mulyo, Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu, serta objek wisata buatan seperti Wisata Edukasi Religi Qolbu Boyolali dan Kebun Raya Indrokilo serta wisata kuliner seperti susu segar, soto, dan sambal tumpang.
- c. Sektor Industri, Industri manufaktur banyak berkembang di Kabupaten Boyolali sesuai visi RPJMD 2010-2015 yaitu Kabupaten Boyolali yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, dan Pro Investasi. Selain industri manufaktur berkembang juga industri kecil dan rumah tangga seperti kerajinan tembaga atau kuningan, industri abon, kerajinan wayang dan gamelan, kerajinan kayu, kerajinan sangkar burung, dan kerajinan sapu ijuk.

Dengan penjabaran beberapa sektor potensial di atas, pengembangan potensi daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi masih menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan faktor internal seperti kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi modern juga berkontribusi terhadap belum optimalnya pemanfaatan sumber daya. Ketidakmampuan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi baru mengakibatkan kurangnya daya saing sektor-sektor unggulan di Kabupaten Boyolali di tingkat regional, nasional, maupun global. Selain itu, masalah regulasi dan birokrasi yang kompleks juga dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Belum maksimalnya pengembangan potensi SDA ini terlihat pada indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan kontribusi Kabupaten Boyolali dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Boyolali pada LPE Tahun 2023 mencapai 5,63% dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,33%. Kemudian untuk mengetahui posisi capaian Kabupaten Boyolali perlu adanya perbandingan dengan Kabupaten Sekitar yang terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar III. 5. Perbandingan LPE Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



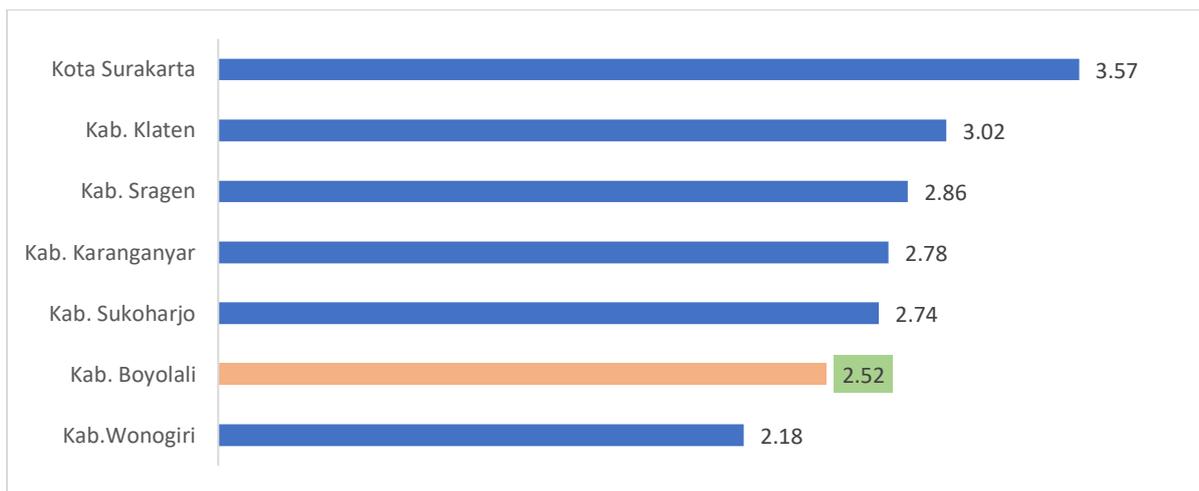
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024





Dengan melihat gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa LPE Kabupaten Boyolali masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten yang mencapai 5,7%. Kemudian berdasarkan data nilai PDRB Kabupaten Boyolali senilai 42.735,55 miliar rupiah di Tahun 2023, memberikan kontribusi sebesar 2,52% terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah. Dengan nilai kontribusi tersebut, perlu adanya perbandingan kabupaten sekitar agar mengetahui posisi capaian Kabupaten Boyolali yang disajikan pada gambar dibawah ini:

**Gambar III. 6. Perbandingan Kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Dengan Kabupaten Sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023**



*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024*

Dengan melihat gambar di atas, terlihat bahwa capaian kontribusi Kabupaten Boyolali masih di bawah Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo. Semakin tinggi nilai PDRB yang dihasilkan, maka kontribusi dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat dipengaruhi kualitas dan daya saing dalam pengelolaan sektor-sektor unggulan, sehingga meningkatkan nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian secara makro yang nantinya akan berdampak pada perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali. Percepatan pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh investasi. Adanya investasi maka perekonomian makro dan mikro akan menggeliat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat mampu tumbuh dengan cepat.

Perkembangan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan dengan nilai investasi masing-masing sebesar Rp122.580.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp74.769.180.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Nilai investasi PMA terbesar yaitu pada Tahun 2022 yaitu Rp780.254.103.942,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah proyek PMA fluktuatif sama seperti nilai investasinya. Jumlah proyek terbanyak ada di Tahun 2023 yaitu 166 (seratus enam puluh enam) proyek sedangkan proyek paling sedikit terjadi pada Tahun 2015 yaitu hanya sebanyak 1 (satu) proyek.

Kemudian investasi yang berasal dari Penanamam Modal Dalam Negeri (PMDN), cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Proyek terbanyak terdapat pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 14.186 (empat belas ribu seratus





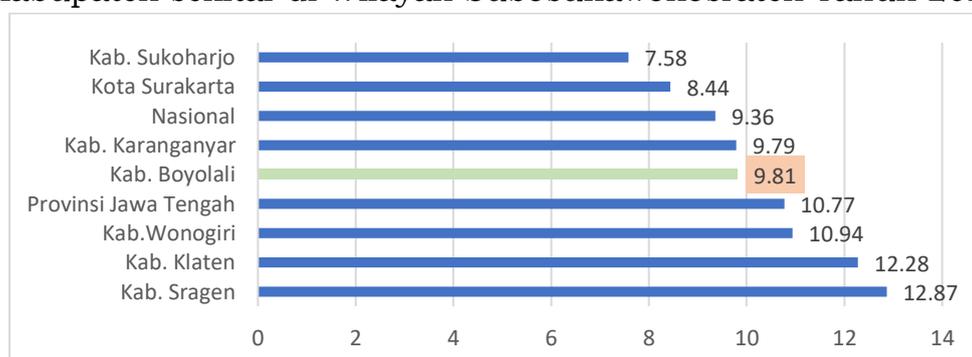
delapan puluh enam) proyek dengan nilai investasi sebesar Rp1.644.210.560.290,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan proyek paling sedikit terjadi pada Tahun 2018 dengan jumlah proyek sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) proyek dengan nilai investasi sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah). Banyaknya jumlah proyek tidak selalu mengindikasikan bahwa nilai investasi proyek tersebut semakin besar. Nilai investasi terbesar ada pada Tahun 2022 yaitu senilai Rp2.345.050.397.716,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh lima miliar lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan nilai investasi terkecil yaitu pada Tahun 2017 dengan besar Rp992.585.347.562,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Memahami permasalahan ini, kedepannya perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan sektor unggulan. Diperlukan perencanaan yang matang, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta investasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan di Kabupaten Boyolali. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi juga penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Dengan ini, nantinya diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

### 5. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali mencerminkan beragam permasalahan yang memengaruhi kualitas hidup penduduk di daerah tersebut. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap lapangan kerja yang layak dan berpenghasilan memadai. Banyak masyarakat Kabupaten Boyolali yang hanya memiliki pendidikan dasar atau menengah rendah, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Memahami permasalahan tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dengan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 mencapai 9,81%. Untuk mengetahui posisi capaian Kabupaten Boyolali perlu adanya perbandingan dengan kabupaten sekitar yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar III. 7. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024





Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Hal ini perlu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas daya saing dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat yang tercermin pada indikator tingkat pengangguran terbuka. Semakin rendah tingkat pengangguran, berarti semakin tinggi tingkat produktivitas masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,05%, untuk mengetahui posisi capaian Kabupaten Boyolali maka perlu adanya perbandingan dengan daerah sekitar yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III. 8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja pada lapangan kerja masih belum maksimal. Kemudian kualitas daya saing tenaga kerja Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan terutama yang sesuai bidang kerja sesuai kebutuhan. Sehingga diharapkan tenaga kerja yang bekerja di wilayah Kabupaten Boyolali akan lebih unggul dibandingkan dengan wilayah sekitar yang nantinya mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar Kabupaten Boyolali.

## 6. Belum Meratanya Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas

Belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas di Kabupaten Boyolali menciptakan sejumlah tantangan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Salah satu permasalahan utama adalah kurang meratanya akses terhadap infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik di berbagai wilayah. Beberapa wilayah di pedesaan masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya minat investasi infrastruktur di wilayah pedesaan.

Salah satu indikator yang mampu merepresentasikan terkait pemenuhan infrastruktur dasar adalah indeks gini. Indeks gini merupakan indikator yang mampu mengukur tingkat kesenjangan/ketimpangan pendapatan antar

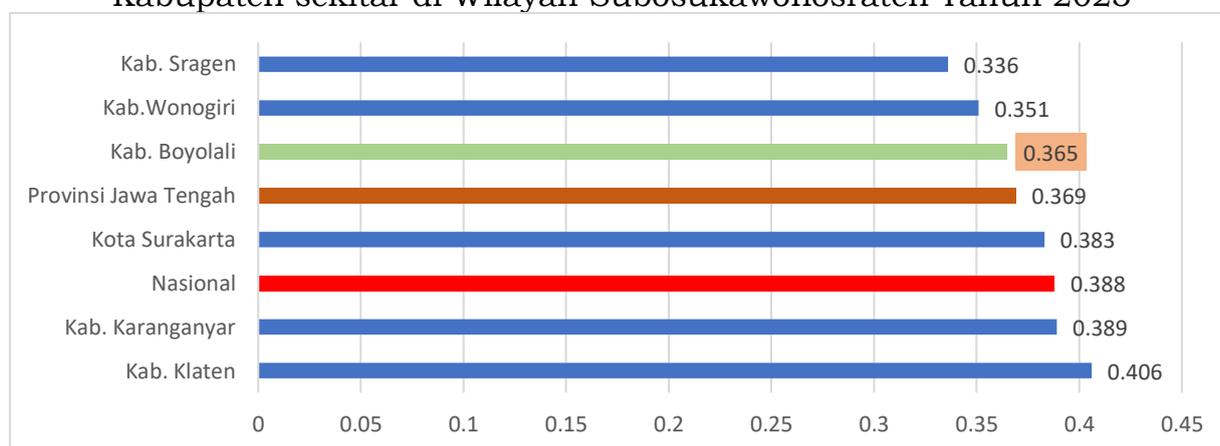




penduduk di suatu wilayah. Hal ini merujuk pada asumsi, bahwa semakin rendah tingkat kesenjangan pendapatan maka diartikan semakin merata pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini mengarah pada semakin meratanya di seluruh wilayah, maka potensi produktivitas masyarakat akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang memadai akan mendukung kemudahan masyarakat dalam beraktivitas.

Dalam penilaian indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, apabila indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna. Jika indeks gini berada pada nilai 0,5-0,7 masuk dalam kategori tinggi, jika indeks gini berada pada nilai 0,3-0,5 masuk dalam kategori moderat/sedang, dan kurang dari 0,3 masuk dalam kategori rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Boyolali indeks gini Tahun 2023 mencapai 0,365 dengan kategori ketimpangan “sedang/moderat”. Kemudian untuk mengetahui posisi capaian Kabupaten Boyolali, maka perlu adanya perbandingan dengan daerah sekitar yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar III. 9. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten sekitar di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas, terlihat indeks gini Kabupaten Boyolali masih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Hal ini disebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur yang belum memadai, terutama di pedesaan. Selain itu, kualitas infrastruktur yang belum memadai juga menjadi masalah serius. Jalan yang masih rusak, sistem air bersih yang tidak stabil, sanitasi yang buruk, dan pasokan listrik yang tidak terjamin menghambat mobilitas, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat investasi dan mengurangi daya tarik untuk pengembangan bisnis. Hal ini juga berdampak pada potensi ekonomi lokal, karena sulitnya akses pasar dan distribusi produk-produk lokal.

Dengan ini, diharapkan adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar. Kemudian peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, serta partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.





**7. Belum Optimalnya Perwujudan Ketahanan Kualitas Lingkungan Hidup**

Perwujudan ketahanan kualitas lingkungan hidup yang belum optimal di Kabupaten Boyolali menghadirkan sejumlah permasalahan yang memengaruhi keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah degradasi lingkungan, terutama di sektor pertanian dan industri. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan, serta pencemaran limbah industri dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, air, dan udara, serta mengancam keberlanjutan SDA yang menjadi basis ekonomi dan kehidupan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan capaian nilai IKLH Kabupaten Boyolali sebesar 61,39 di Tahun 2023 dengan kategori “sedang”, yang mana di dalam pengukurannya terdapat beberapa indeks yaitu, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. Berdasarkan perkembangan data IKLH pada 3 (tiga) tahun terakhir terlihat pada Tahun 2022 IKLH yang mencapai 60,77 mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Tahun 2021 yang mencapai 63,93. Sesuai penjelasan terkait IKLH dapat disimpulkan perlu adanya upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali.

Selain itu, masalah pengelolaan sampah juga menjadi permasalahan serius dalam menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Boyolali. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran akan pentingnya daur ulang, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu segera ditangani untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Kemudian, perubahan iklim juga merupakan ancaman serius bagi ketahanan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali. Perubahan pola cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, dapat mengancam ketahanan pangan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kedepan harapannya perlu adanya optimalisasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, serta kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Permasalahan Kabupaten Boyolali memiliki keterkaitan dengan penggambaran kondisi Kabupaten Boyolali pada bab sebelumnya, yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. 1. Keterkaitan Gambaran Kondisi Kabupaten Boyolali dengan Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan	Gambaran Kondisi Daerah
Aspek Geografi dan Demografi	
Belum Optimalnya Perwujudan Ketahanan Kualitas Lingkungan Hidup	Capaian IKLH Kabupaten Boyolali sebesar 61,39 di Tahun 2023 dengan kategori “sedang”, yang mana di dalam pengukurannya terdapat beberapa indeks yaitu, indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan. IKLH Tahun 2023 belum mencapai nilai maksimal 100 (sangat baik).
	Kondisi timbulan sampah di Kabupaten Boyolali semakin tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk





Permasalahan	Gambaran Kondisi Daerah
	<p>IKP Kabupaten Boyolali Tahun 2021 mencapai 85,14, Tahun 2022 mencapai 85,26, dan Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 87,31. Nilai tertinggi pada indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 adalah pada aspek “Ketersediaan” (91,81) yang menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Boyolali adalah sangat baik. Sementara itu aspek “Keterjangkauan” memiliki nilai terendah (85,24) di antara aspek lainnya. Dengan ini masih adanya permasalahan keterjangkauan bahan pangan di masyarakat Kabupaten Boyolali.</p> <p>Indeks Ketahanan daerah yang masih mencapai 82,00, masih belum mencapai maksimal 100</p> <p>Indeks Risiko Bencana Kabupaten Boyolali masih mencapai 110,60 dengan kategori tinggi, belum mencapai IRBi dengan kategori rendah</p>
Belum Optimalnya Peningkatan SDM yang Berkualitas Menuju SDM Unggul	<p>Dasar piramida yang cukup lebar banyaknya jumlah populasi penduduk usia 0-14 menunjukkan penduduk Kabupaten Boyolali memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua (usia 65-75+)</p>
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>	
Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Dalam Mengembangkan Sektor Unggulan Daerah	<p>LPE Tahun 2005-2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup menarik. LPE pada Tahun 2005 tercatat sebesar 2,45%, kemudian naik di 5 (lima) tahun berikutnya menjadi 2,62%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu pada angka 5,69%, namun pada Tahun 2020 terjadi kontraksi perekonomian secara global yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 sehingga pada Tahun 2020 LPE Kabupaten Boyolali turun drastis hingga -1,24%. Kabupaten Boyolali pada LPE Tahun 2023 mencapai 5,63% dan mengalami penurunan jika dibandingkan capaian Tahun 2022 yang mencapai sebesar 6,33%. LPE Kabupaten Boyolali masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Klaten yang mencapai 5,7%.</p> <p>Pengembangan potensi daerah agar memiliki nilai tambah yang tinggi masih menjadi hambatan. Hal ini dikarenakan faktor internal seperti kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&amp;D) serta kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi modern juga berkontribusi terhadap belum optimalnya pemanfaatan sumber daya</p> <p>PDRB Kabupaten Boyolali senilai Rp42.735,55 miliar di Tahun 2023, memberikan kontribusi sebesar 2,52% terhadap nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah. capaian kontribusi Kabupaten Boyolali masih di bawah Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar</p> <p>Perkembangan investasi yang berasal dari PMA di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan dengan nilai investasi masing-masing sebesar US\$8,2 juta dan US\$ 5,1 juta. Nilai investasi PMA terbesar yaitu pada Tahun 2022 sebesar US\$ 54,3 juta</p>
Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	<p>Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2023 mencapai 9,81%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta.</p> <p>Berdasarkan data BPS Kabupaten Boyolali indeks gini Tahun 2023 mencapai 0,365 dengan kategori ketimpangan “sedang/moderat”. Indeks gini Kabupaten Boyolali masih</p>





Permasalahan	Gambaran Kondisi Daerah
	tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri Laju inflasi Kabupaten Boyolali memiliki perkembangan yang fluktuatif.
Belum Optimalnya Peningkatan SDM yang Berkualitas Menuju SDM Unggul	IPM Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 mencapai 75,41 dengan kategori Tinggi. IPM Kabupaten Boyolali masih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar yang mencapai 77,31.
	Dari aspek Pendidikan yang dilihat dengan indikator rata-rata lama sekolah dengan capaian 8,09, harapan lama sekolah mencapai 12,66, dan angka harapan hidup mencapai 76,23 jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten sekitar terlihat capaian Kabupaten Boyolali masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.
	Berdasarkan data BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,05%. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Boyolali masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo
	Nilai IKG tertinggi terjadi pada Tahun 2018 yaitu 0,436. Pada Tahun 2019 IKG Kabupaten Boyolali berada pada angka 0,312 menurun menjadi 0,306 pada Tahun 2023.
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2020 menurun hingga mencapai 84% dibandingkan capaian Tahun 2019 yang mencapai 96%.
	Penurunan capaian bidang olahraga pada peringkat PORDA tingkat provinsi di Tahun 2019 mencapai 7.
<b>Aspek Daya Saing</b>	
Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	PDRB per kapita Tahun 2023 masih mencapai 39,20 masih dibawah Kabupaten Sukoharjo (49,87) dan Kabupaten Klaten (39,92).
	Nilai IPEI Kabupaten Boyolali selama 2011-2021 menunjukkan fluktuasi naik turun. Selama periode tersebut hanya pada Tahun 2012 nilai IPEI Kabupaten Boyolali lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sedangkan di periode lain nilainya lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2021 nilai IPEI Kabupaten Boyolali sebesar 5,76 dan masuk dalam kategori “memuaskan”.
Belum Optimalnya Peningkatan SDM yang Berkualitas Menuju SDM Unggul	Angka rata-rata lama sekolah di Tahun 2023 masih mencapai 8,09 belum mencapai nilai maksimal 15 tahun.
	Angka harapan lama sekolah mencapai 12,66, belum mencapai nilai maksimal 18 tahun.
	Angka harapan hidup di Tahun 2023 mencapai 76,23 belum mencapai nilai maksimal 85 tahun.
	Belum optimalnya capaian tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih mencapai 74,73.
	Jumlah penduduk bekerja sebagian besar memiliki pendidikan terakhir SD ke bawah sebanyak 237,644 orang (42%).
Angka ketergantungan daerah di Tahun 2023 masih mencapai 46,57%	
Belum Meratanya Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Panjang jalan rusak Tahun 2023 mencapai 52,6 km dan rusak berat 62,0 km.





Permasalahan	Gambaran Kondisi Daerah
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>	
Belum Optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks IRB Tahun 2023 masih mencapai kategori BB belum mencapai kategori AA.
	Indeks SPBE masih mencapai 3,65, belum mencapai nilai maksimal 5.
	Indeks pelayanan publik mencapai 4,01 belum mencapai nilai maksimal 5.
	Indeks inovasi daerah mencapai 78,51 (sangat inovatif) belum mencapai batas maksimal hingga nilai 100.
	Capaian SPM pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan karena belum mencapai 100%.

Sumber: Data diolah (2024)

### 3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan/atau tantangan serta menjadi peluang bagi suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dalam uraian ini dikelompokkan berdasarkan isu strategis di tingkat global, isu strategis tingkat nasional, dan isu strategis tingkat regional/daerah.

#### 3.2.1. Isu Strategis Level Global

##### 3.2.1.1. *Sustainable Development Goals (SDG's)* Sebagai Kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*)

*SDG's* merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada *MDG's* (*Millenium Development Goals*), *SDG's* memiliki 5 (lima) pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 (tiga) tujuan di Tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai 3 (tiga) tujuan tersebut, disusunlah 17 (tujuh belas) tujuan global berikut ini:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;





11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 (tujuh belas) tujuan global dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target sebagaimana tertuang dalam agenda *SDG's* dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan pada Kabupaten Boyolali. Untuk itu, Kabupaten Boyolali ikut serta berperan aktif dalam mengimplementasikan agenda-agenda *SDG's* tersebut.

### 3.2.1.2 Isu Megatren

Isu Megatren Global 2045 merupakan serangkaian perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi di dunia dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Perubahan-perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Isu ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali. Beberapa isu dari Megatren Global 2045 yang relevan untuk pembangunan di Kabupaten Boyolali meliputi:

Gambar III. 10 Megatren Global 2045



Sumber : RPJPN 2025-2045





### 1. Bonus Demografi Global

Perkembangan demografi global memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari *World Population Prospects*, jumlah penduduk global pada Tahun 2022 diperkirakan mencapai 7 miliar jiwa, dengan proyeksi peningkatan hingga mencapai 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Pertumbuhan ini menimbulkan berbagai tantangan penting, seperti ketahanan sumber daya alam, urbanisasi cepat, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pada Tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali diperkirakan akan mencapai 1.237.642 jiwa. Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu memastikan pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Boyolali dapat mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang dimiliki, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sehingga dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berdaya saing dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

### 2. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi memberikan Kabupaten Boyolali peluang untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Namun, seiring dengan keuntungan ini, tantangan seperti keamanan siber dan peningkatan aktivitas judi *online* juga memerlukan perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data pribadi dan institusional dari ancaman kejahatan siber yang semakin canggih. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi *online* dan mempromosikan penggunaan teknologi secara etis. Dengan mengintegrasikan digitalisasi pemerintahan dengan strategi keamanan siber yang kuat, Kabupaten Boyolali dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pemerintahan yang modern dan aman dari ancaman teknologi.

Tantangan lain yang muncul adalah peningkatan kapasitas SDM yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi revolusi digital. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus memberikan perhatian khusus pada pembangunan SDM yang mampu menguasai teknologi baru, mempromosikan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi, dan adaptif terhadap perubahan teknologi yang cepat. Dengan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan teknologi, Kabupaten Boyolali dapat mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan meraih peluang dari era digital yang terus berkembang.

### 3. Urbanisasi Dunia

Pada periode 2025-2045, Kabupaten Boyolali akan menghadapi tantangan besar akibat pergerakan urbanisasi global. Urbanisasi yang merupakan migrasi penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan, dipicu oleh peluang ekonomi, akses yang lebih baik terhadap layanan seperti pendidikan dan kesehatan, serta





gaya hidup perkotaan. Dampaknya termasuk pertumbuhan pesat di kota, peningkatan kepadatan populasi di wilayah perkotaan, perkembangan infrastruktur, dan perubahan sosial serta ekonomi. Meski urbanisasi bisa membawa peluang bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keragaman budaya, namun terdapat tantangan seperti krisis perumahan, kemacetan lalu lintas, kesenjangan sosial-ekonomi, serta tekanan pada SDA dan lingkungan hidup. Untuk mengatasi ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu fokus pada perencanaan pembangunan yang komprehensif dan efektif, peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih baik, serta pelestarian lingkungan.

Selain itu, dalam menghadapi arus urbanisasi global, Kabupaten Boyolali juga perlu memperhatikan dampak ketenagakerjaan asing. Dengan meningkatnya arus migrasi tenaga kerja dari luar negeri, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus siap mengelola dan menyambut tenaga kerja asing dengan baik. Ini mencakup penyusunan regulasi yang jelas dan adil serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal juga penting agar mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja global. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Boyolali dapat menjadi daerah yang menarik bagi investasi asing dan tenaga kerja internasional, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 4. Konstelasi Perdagangan

Pada periode 2025-2045, Kabupaten Boyolali perlu mengoptimalkan potensi dari pergeseran kontribusi negara-negara berkembang dalam ekonomi global, yang telah memacu pertumbuhan perdagangan internasional. Dengan mayoritas aktivitas ekonominya terkait dengan sektor pertanian, pariwisata, dan industri, Kabupaten Boyolali memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan kerja sama dalam produksi internasional. Meningkatkan inovasi ekonomi dan memperluas pasar ekspor akan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi ini, yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekspor dan impor, jaringan transportasi yang efisien, dan fasilitas logistik terpadu. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri juga penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, kebijakan yang mendukung kemitraan ekonomi dengan dunia internasional akan membantu membuka akses pasar baru bagi produk Kabupaten Boyolali. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Boyolali dapat memperkuat perannya dalam perdagangan internasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi.

#### 5. Pergeseran Tata Kelola Keuangan

Pada periode 2025-2045, Kabupaten Boyolali akan menghadapi pergeseran signifikan dalam tata kelola keuangan sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi. Kondisi ini mempercepat keuangan internasional dengan mengacu pada tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. *Central Bank Digital Currency* (CBDC) merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi





stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan melalui perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)* seperti transaksi digital (QRIS, *e-money*, *e-wallet*), *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, termasuk munculnya bank digital. Transformasi ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali, namun juga membawa tantangan baru dalam pengaturan keuangan daerah. Untuk itu, peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi dan SDM menjadi sangat penting.

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Penerapan teknologi dalam sektor keuangan dapat membantu optimalisasi pengelolaan anggaran, transparansi, dan akuntabilitas seperti pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, dengan meningkatnya penggunaan teknologi, muncul pula risiko baru yang perlu diantisipasi, seperti keamanan data dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi guna memastikan tata kelola keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dalam era ekonomi digital.

Dalam merencanakan RPJPD Tahun 2025-2045, fokus pada isu pergeseran tata kelola keuangan dan peningkatan investasi menjadi sangat penting. Pembangunan yang efektif harus mengintegrasikan teknologi keuangan yang canggih dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus berperan aktif dalam memfasilitasi transisi ini, dengan mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai dan membentuk regulasi yang mampu mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh teknologi baru. Melalui peningkatan investasi dalam sektor teknologi dan pendidikan, Kabupaten Boyolali dapat mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era digital.

## 6. Perubahan Iklim

Dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, Kabupaten Boyolali diproyeksikan menghadapi tantangan serius terkait lingkungan, dengan timbulan sampah mencapai 225.870 kg per tahun. Aktivitas ekonomi yang meningkat di Kabupaten Boyolali ini berpotensi memperburuk pemanasan global dan degradasi lingkungan. Untuk mengantisipasi dampak pemanasan global, Kabupaten Boyolali perlu mengadopsi perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga meminimalisir efek negatif pemanasan global, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Pentingnya isu pemanasan global telah tercermin dalam komitmen global melalui Pakta Iklim Glasgow pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, Tahun 2021. Pakta ini mencakup upaya untuk menghentikan penggunaan batu bara, menjaga suhu bumi, dan mempercepat mitigasi krisis iklim. Bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Boyolali, implementasi Pakta Iklim Glasgow memegang peranan penting dalam menanggulangi krisis iklim dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan deforestasi. Dalam RPJPD Tahun 2025-2045, fokus pada isu perubahan iklim menjadi krusial. Kabupaten Boyolali harus





mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam strategi pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap pemanasan global.

Pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali 2022, isu transisi energi menjadi salah satu isu prioritas yang menghasilkan kesepakatan yang tertuang pada Deklarasi Pemimpin terutama poin 11 dan 12. Poin 11 menangani perubahan iklim dan krisis energi dan poin 12 menuju masa depan yang berkelanjutan. Dalam dua poin itu, dinyatakan pentingnya mencapai *net zero emission* atau nol emisi karbon pada 2060.

#### 7. Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali disertai dengan persaingan dalam pemanfaatan SDA, seperti kebutuhan energi. Proyeksi konsumsi listrik di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 2.004.840 MWH. Pertumbuhan jumlah penduduk dan persaingan ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya persaingan dalam pemanfaatan SDA. Penyebabnya meliputi peningkatan permintaan, kemajuan teknologi, keterbatasan sumber daya alam, serta ketidakpastian terkait perubahan lingkungan. Untuk mengatasi intensitas persaingan pemanfaatan SDA, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menerapkan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang adil, pemanfaatan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan SDA, serta kerja sama daerah untuk mendorong penggunaan sumber daya yang bijak dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Boyolali dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### 8. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Pada Tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Boyolali diperkirakan mencapai 1.237.642 jiwa, dengan angka ketergantungan sebesar 54,36%. Dampak dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi perlu diantisipasi dengan memperhatikan tantangan terkait pertumbuhan kelas menengah. Kelas menengah merupakan segmen sosial ekonomi yang berada di antara kelompok atas dan kelompok bawah dalam masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah sering kali dianggap sebagai indikator positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, ancaman ketidakseimbangan dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Meskipun kelas menengah bertumbuh, ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin. Pemerintah Kabupaten Boyolali harus mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, potensi kelas menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga Kabupaten Boyolali dapat berkembang menjadi daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.





### 3.2.2 Isu Strategis Level Nasional

#### 3.2.2.1 Pengaruh Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah pada Tahun 2030 melalui capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) menargetkan untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem sendiri didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang setara dengan US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan konsep Perhitungan Kemiskinan Absolut yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menggunakan definisi tersebut, pada Maret 2023 tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan mencapai 1,12% atau 2,72 juta jiwa.

Upaya percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem sudah menjadi agenda prioritas pemerintah. Pada 4 Maret 2021, Presiden memberikan arahan dalam strategi percepatan pengentasan kemiskinan, agar kemiskinan ekstrem pada Tahun 2024 dapat mencapai 0%. Target capaian ini menjadi 6 (enam) tahun lebih cepat jika dibandingkan dengan target SDG's. Diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan sasaran.

#### 3.2.2.2 Percepatan Penanganan *Stunting*

Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada Tahun 2021 menjadi 14% pada Tahun 2024. Strategi penurunan angka *stunting* juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan persentase sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka *stunting* di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Kebijakan penurunan *stunting* dituangkan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan dan pencegahan *stunting* serta pemantauan pertumbuhan pada balita *wasting*, *underweight*, *weight faltering* dan pemantauan status gizi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Pemberian Makanan Tambahan berbahan pangan lokal juga diberikan kepada balita dengan masalah gizi tersebut dan juga ibu hamil KEK dan risiko KEK. Kegiatan lain yang dilakukan dalam pencegahan *stunting* yaitu Gerakan Aksi Bergizi bagi para remaja baik siswa tingkat SMP dan SMA. Selain itu dalam peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan pelatihan kompetensi 25 (dua puluh lima) kecakapan kader dan pelatihan *cooking class* dalam penyiapan makanan tambahan berbasis pangan lokal.

Upaya lain yang diamanatkan Peraturan Presiden tersebut adalah menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.





### 3.2.2.3 Peningkatan Reformasi Birokrasi

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia mencoba untuk menerapkan birokrasi yang baik demi tewujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Namun dalam praktiknya efektivitas pelaksanaan birokrasi masih belum sesuai dengan harapan. Birokrasi yang seharusnya mempermudah masyarakat justru malah membuat masyarakat kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dalam mengurus sesuatu pada instansi pemerintah. Ketidakjelasan prosedur, biaya yang tinggi, dan kualitas pelayanan yang buruk merupakan permasalahan birokrasi yang membuat masyarakat semakin kebingungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan aparatur dalam mengendalikan birokrasi yang cepat berkembang. Reformasi birokrasi dipahami sebagai upaya berkelanjutan yang pada setiap tahapannya memberikan perbaikan menuju birokrasi yang lebih baik, melalui evaluasi dan penilaian tahunan yang diharapkan dapat menghasilkan tindakan nyata untuk perubahan dan perbaikan.

### 3.2.2.4 Pemenuhan Swasembada Pangan Nasional

Swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat. Upaya memfokuskan pembangunan nasional diharapkan dapat memicu pembangunan di bidang lain. Komoditas tanaman pangan juga merupakan salah satu bagian utama dari sektor pertanian. Komoditas dari tanaman pangan harus diupayakan tersedia dalam kondisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Komoditi ini berperan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok karbohidrat masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan. Untuk dapat mewujudkan swasembada pangan yang baik, pemerintah tentu harus dapat bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat petani di Indonesia agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Kekuatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan semakin memperkuat ketahanan pangan dan menjadi kebutuhan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Sewajarnya, pemerintah dalam mengelola swasembada pangan memperhatikan kebutuhan masyarakat petani dengan membayar hasil panen sesuai dengan kinerja para petani. Selain itu, untuk mewujudkan swasembada pangan mandiri bagi masyarakat Indonesia, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap harga pangan dalam negeri. Harga pangan yang tinggi akan dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi subjek dalam sistem ketahanan pangan nasional.

### 3.2.2.5 Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Peningkatan Persaingan Global

Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari *Total Factor Productivity (TFP)* Indonesia selama Tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode Tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang





tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

### 3.2.2.6 Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28% dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81%), Thailand (1,31%) dan Malaysia (1,04%) pada Tahun 2020.

### 3.2.2.7 Kualitas Pendidikan SDM yang Masih Rendah

Hal ini antara lain disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, jumlah guru profesional dengan kompetensi tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke seluruh daerah dan satuan pendidikan. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Tercatat baru 5 (lima) perguruan tinggi yang berhasil masuk dalam peringkat top 500 (lima ratus) dunia. Tantangan cukup besar terdapat pada aspek produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja. Dalam hal komposisi penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan, mayoritas hanya lulusan SMP/MTs sederajat ke bawah (59,88%), sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97%, dan berpendidikan tinggi 10,15%.

### 3.2.2.8 Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama di dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### 3.2.2.9 Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas

Kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatan secara optimal untuk peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.2.10 Belum Meratanya Akses Jaminan Sosial

Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran jaminan sosial masih rendah.

### 3.2.2.11 Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta Secara Merata di Seluruh K/L/D

Hal ini menjadikan suksepsi pengisian jabatan strategis di instansi pemerintah menjadi terhambat, tidak terpetakannya talenta terbaik, rendahnya kinerja dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), kuatnya mentalitas silo, serta rendahnya budaya dan etos kerja. Sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud, yang ditandai dengan disparitas atau kesenjangan





penghasilan ASN antar instansi yang menyebabkan sulitnya mempertahankan talenta ASN terbaik.

#### 3.2.2.12 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan (*brown economy*). Timbulan limbah B3 yang tercatat terus meningkat hingga mencapai 74 juta ton pada Tahun 2022.

#### 3.2.2.13 Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Rendahnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. UMKM dan Koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah.

#### 3.2.2.14 Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik

Integrasi ekonomi politik yang belum optimal mengakibatkan keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 57,8% terhadap PDB Tahun 2022, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

### 3.2.3 Isu Strategis Daerah Jawa Tengah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka isu strategis daerah Jawa Tengah 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai berikut:

#### 3.2.3.1 Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam





rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

### 3.2.3.2 Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan, serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

### 3.2.3.3 Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (peningkatan inklusivitas layanan transportasi yang memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan.





#### 3.2.3.4 Keberlanjutan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu ini berkaitan dengan kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian SDA untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila SDA dan lingkungan hidup dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestariannya. Dengan terjaganya SDA dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

#### 3.2.3.5 Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing SDM yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing SDM Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial.

#### 3.2.3.6 Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jati Diri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

#### 3.2.3.7 Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan





akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

#### 3.2.4 Telaahan KLHS RPJPD

Pembangunan Kabupaten Boyolali yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalamnya. Adapun dalam pengembangannya dengan memanfaatkan SDA berpotensi menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kebijakan lingkungan hidup dirumuskan dan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 15 disebutkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sehubungan dengan akan disusunnya RPJPD Tahun 2025-2045, maka perlu dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perubahan RPJMD dan perubahan RPJPD. KLHS RPJPD sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJPD dan Rancangan Awal RPJPD. KLHS RPJPD yang memuat skenario tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mewarnai substansi rencana pembangunan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Boyolali. Dengan demikian dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan integrasi KLHS dapat menjadi pedoman bagi pengembangan Kabupaten Boyolali khususnya dan diharapkan dalam kaitan yang lebih luas, mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

##### A. Analisis capaian daerah terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Boyolali sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) indikator. Sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator termasuk dalam indikator yang tidak sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah di Kabupaten Boyolali. Sehingga jumlah indikator yang akan dikaji dalam KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) indikator. Analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Kabupaten Boyolali menghasilkan nilai yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kriteria pencapaian TPB yaitu SST, SBT, TBC dan TAD sebagai berikut:

1. indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 95 (sembilan puluh lima) indikator (48%);
2. indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) sejumlah 24 (dua puluh empat) indikator (12%);
3. indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (TBC) sejumlah 49 (empat puluh sembilan) indikator (25%); dan
4. indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 31 (tiga puluh satu) indikator (16%).





B. Hasil analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Kabupaten Boyolali pada masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

1. pilar sosial sebagian besar merupakan kriteria SST sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator yang didominasi oleh TPB 3 (tiga) sebanyak 13 (tiga belas) indikator;
2. pilar ekonomi sebagian besar merupakan kriteria SST sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator yang didominasi oleh TPB 17 (tujuh belas) sebanyak 10 (sepuluh) indikator;
3. pilar lingkungan sebagian besar merupakan kriteria SST sebanyak 16 (enam belas) indikator yang didominasi oleh TPB 6 (enam) sebanyak 9 (sembilan) indikator; dan
4. pilar hukum dan tata kelola sebagian besar merupakan kriteria SST sebanyak 12 (dua belas) indikator yang didominasi oleh TPB 16 (enam belas) sebanyak 12 (dua belas) indikator.

C. Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 untuk periode pertama adalah sebagai berikut:

1. penurunan ketersediaan dan kualitas air;
2. perlunya peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim;
3. perlunya pengendalian alih fungsi lahan;
4. perlunya peningkatan pengelolaan limbah domestik dan non domestik;
5. masih perlunya upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana;
6. perlunya peningkatan ketahanan pangan daerah; dan
7. perlunya peningkatan pengelolaan persampahan.

D. Rekomendasi dirumuskan sebagai upaya dalam pencapaian target TPB adalah sebagai berikut:

1. skenario tanpa upaya tambahan, hasil rekapitulasi skenario TPB tanpa upaya tambahan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) indikator (48%) dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) indikator;
2. skenario dengan upaya tambahan, hasil rekapitulasi skenario TPB tanpa upaya tambahan sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) indikator (37%) dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) indikator; dan
3. skenario TPB ketersediaan data (tidak ada data), rekapitulasi skenario TPB ketersediaan data sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator (16%) dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) indikator.

Dalam rangka memastikan bahwa isu strategis KLHS RPJPD harus diakomodir dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan ini perlu adanya penyelarasan antara isu strategis KLHS dan isu strategis RPJPD, seperti yang disajikan pada gambar sebagai berikut:





Gambar III. 11 Penyelarasan Isu Strategis KLHS dan Isu Strategis RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah (2024)

Dengan melihat penyelarasan di atas, antara isu strategis KLHS dan isu strategis RPJPD Tahun 2025-2045 terlihat bahwa sebagian besar isu strategis KLHS sudah relevan di dalam isu strategis RPJPD Tahun 2025-2045. Hal ini menunjukkan bahwa isu strategis KLHS sudah diakomodir dalam isu strategis RPJPD Tahun 2025-2045.

### 3.2.4 Telaahan RTRW Kabupaten Boyolali

Arah RTRW Kabupaten Boyolali dijelaskan dalam dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031.

#### 3.2.4.1 Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali

Dokumen RTRW merupakan dokumen perencanaan spasial sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan utama terkait pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini, RTRW dan Rencana Pembangunan Kabupaten Boyolali, yang mencakup RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD bersifat komplementer satu dan lainnya.

Selanjutnya, evaluasi terhadap keselarasan dan integrasi antara RTRW dan RPJPD Tahun 2025-2045 dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dari penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang untuk mengetahui

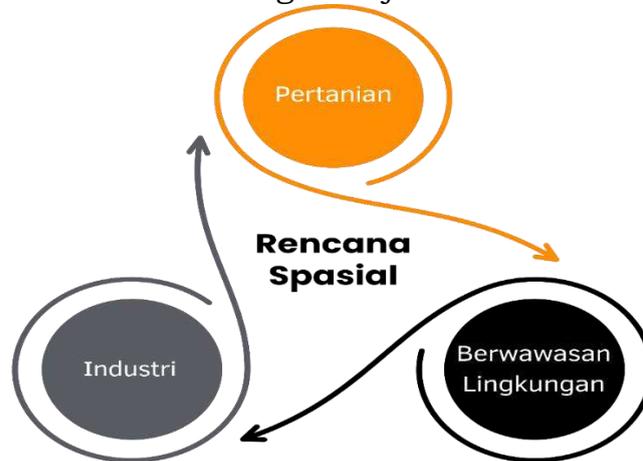




indeks pemanfaatan ruang. Dalam konteks RTRW Kabupaten Boyolali, tujuan dari penataan ruang di Kabupaten Boyolali tersebut dijabarkan sebagai berikut: “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri yang Berwawasan Lingkungan”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Boyolali, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Boyolali menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian serta industri yang berwawasan lingkungan. Arah pengembangan tersebut tentunya tidak terlepas dari potensi kewilayahannya yang ada, baik secara geografis alamiah maupun dari perkembangan geografi-ekonomi kewilayahannya yang terus berkembang sejauh ini.

Gambar III. 12 Kerangka Tujuan Penataan Ruang



Sumber: Analisis RTRW 2011-2031

Dalam hal harmonisasi dokumen perencanaan spasial dan non spasial, prinsip penerapan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Boyolali, yang harus dirancang secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Boyolali tidak hanya berfokus pada aspek spasial, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan baik ke dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Adapun secara general, kerangka rencana dan arahan pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan

Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

- membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
- meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat dan Udara

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara adalah:

- mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
  - mengoptimalkan pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
  - mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang;
  - mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
- dan





- e. menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan bandar udara.
3. **Pengendalian dan Pelestarian Kawasan Lindung**  
Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung adalah:
  - a. memulihkan fungsi lindung;
  - b. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
  - c. menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun; dan
  - d. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
4. **Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Pertanian**  
Strategi pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian adalah:
  - a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
  - c. mengembangkan irigasi pertanian;
  - d. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
  - e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
  - f. mengoptimalkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - g. mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pengoptimalan Produktivitas Kawasan Perikanan**  
Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan perikanan adalah:
  - a. mengoptimalkan produktivitas kawasan perikanan; dan
  - b. mengembangkan kawasan perikanan ramah lingkungan.
6. **Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**  
Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri adalah:
  - a. mengembangkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar;
  - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
  - c. pengembangan kawasan industri tidak berada pada lahan pertanian.
7. **Pengembangan Kawasan Pariwisata**  
Strategi pengembangan kawasan pariwisata adalah:
  - a. mengembangkan destinasi pariwisata; dan
  - b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
8. **Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara**  
Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah:
  - a. mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
  - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
9. **Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**  
Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;





- b. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
- c. mengembangkan kawasan minapolitan.

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kabupaten Boyolali untuk memastikan bahwa tujuan RTRW dalam mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri yang Berwawasan Lingkungan dapat tercakup dalam kesiapan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kabupaten Boyolali.

#### 3.2.4.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

Rencana struktur ruang wilayah adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Adapun rencana pengembangan sistem jaringan prasarana terdiri atas:

##### 1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi guna mendukung tujuan penataan wilayah kabupaten terwujud, antara lain rencana pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan terminal penumpang dan terminal barang, pengembangan jembatan timbang, rencana pengembangan sistem jaringan kereta api, serta rencana sistem jaringan transportasi udara.

##### 2. Rencana pengembangan sistem jaringan energi

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Kecamatan Juwangi, pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Kedungombo yang berada di Kecamatan Kemusu, pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Rendah, Gardu Induk, serta terdapat juga pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas.

##### 3. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Boyolali terdiri atas jaringan tetap dan jaringan bergerak, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bergerak dengan upaya pengelolaan tower/*Base Transceiver Station* serta peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum.

##### 4. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa:

- a. pengembangan sumber air meliputi pengembangan waduk (Waduk Cengklik, Waduk Bade, Waduk Kedungombo), pengembangan embung dan *check dam* pemanfaatan dan pelestarian mata air, serta air tanah pada CAT; dan
- b. pengembangan prasarana sumber daya air, yang meliputi rencana pengembangan jaringan irigasi, sistem pengendali banjir dan jaringan air baku untuk air bersih.

##### 5. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:

- a. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- c. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

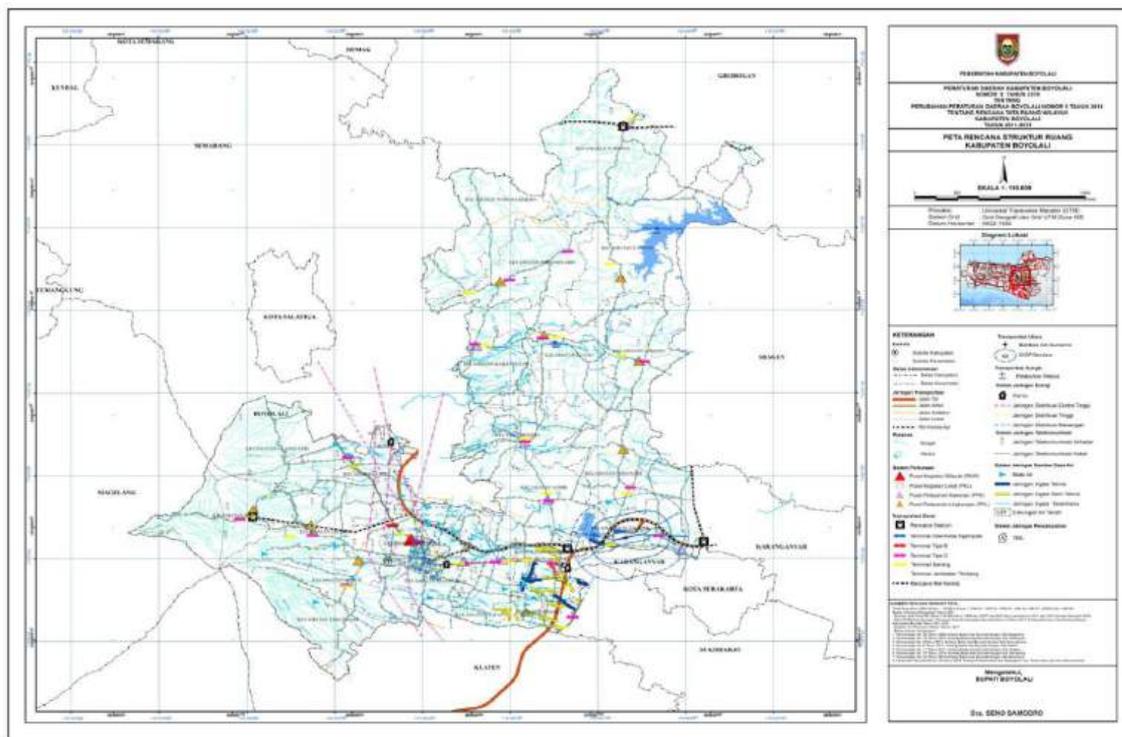




- d. pengembangan sistem jaringan persampahan;
- e. pengembangan jaringan drainase; dan
- f. Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.

Berikut ini merupakan Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Boyolali:

Gambar III. 13 Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: RTRW 2011 – 2031

### 3.2.4.3 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

Rencana pola ruang kabupaten adalah sebuah kerangka konsep yang bersifat normatif yang mengatur cara pengelolaan dan penggunaan ruang di tingkat kabupaten. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan menyatu. Inti dari teori ini adalah penetapan kebijakan-kebijakan mengenai penggunaan lahan, pengembangan sektor-sektor utama, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten. Pada tabel berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Boyolali.

Tabel III. 2 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	48.618
2	Kawasan Perlindungan Setempat	9.770
3	Kawasan Konservasi	3.694
4	Kawasan Rawan Bencana	-
5	Kawasan Lindung Geologi	-
6	Kawasan Cagar Budaya	15,08

Sumber: RTRW 2011 – 2031





**Gambar III. 14 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung (ha)**



Sumber: RTRW 2011 – 2031

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Boyolali, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yaitu seluas 48.618 ha dan kemudian disusul oleh kawasan perlindungan setempat seluas 9.770 ha.

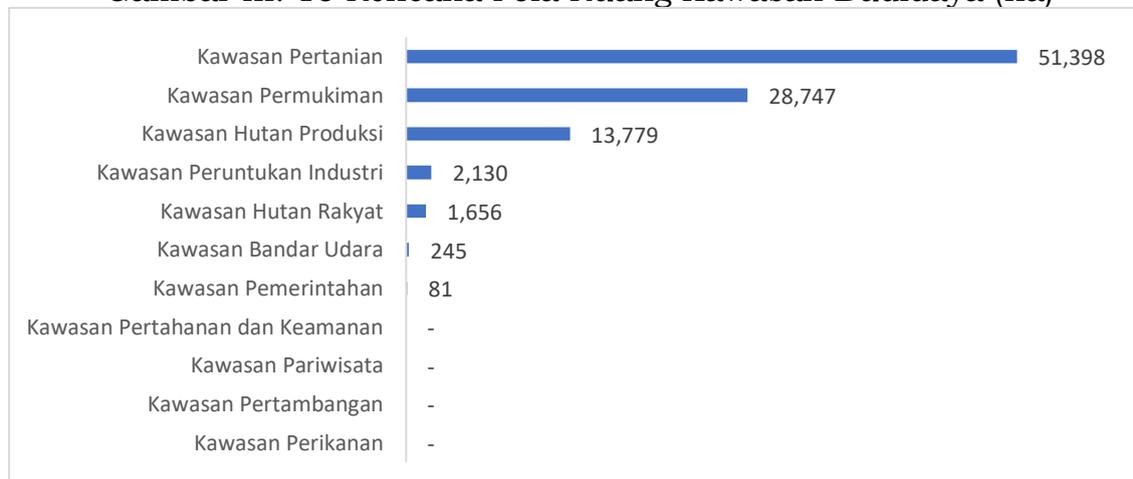
Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Boyolali adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Boyolali berdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang RTRW.

**Tabel III. 3 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya**

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	13.779
2	Kawasan Hutan Rakyat	1.656
3	Kawasan Pertanian	51.398
4	Kawasan Perikanan	-
5	Kawasan Pertambangan	-
6	Kawasan Peruntukan Industri	2.130
7	Kawasan Pariwisata	-
8	Kawasan Permukiman	28.747
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
10	Kawasan Pemerintahan	81
11	Kawasan Bandar Udara	245

Sumber: RTRW 2011 – 2031

**Gambar III. 15 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya (ha)**



Sumber: RTRW 2011 – 2031





Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya alokasi-  
alokasinya secara geografis adalah sebagai berikut:

1. Alokasi pola ruang kawasan pertanian seluas 51.398 ha yang berlokasi di seluruh kecamatan:
  - a. Lahan Pertanian Basah seluas  $\pm$  21.134 ha  
Selo, Ampel, Cepogo, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, dan Wonosamodro.
  - b. Lahan Pertanian Kering seluas  $\pm$  15.644 ha terdapat di seluruh kecamatan.
  - c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 20.694 ha
    - 1) LP2B seluas  $\pm$  16.500,99 ha  
Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Wonosamodro; dan
    - 2) Cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan mencapai 4.193 ha.
  - d. Kawasan Pertanian Hortikultura  
Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
  - e. Kawasan Perkebunan seluas  $\pm$  14.620 ha
    - 1) perkebunan cengkeh dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Karanggede, dan Kecamatan Klego
    - 2) perkebunan tembakau dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, dan Kecamatan Juwangi;
    - 3) perkebunan kopi robusta dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Klego;
    - 4) perkebunan kopi arabika dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk;
    - 5) perkebunan khina dibudidayakan berada di Kecamatan Selo;
    - 6) perkebunan kayu manis dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, dan Kecamatan Ampel;
    - 7) perkebunan kelapa dibudidayakan meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Juwangi;
    - 8) perkebunan teh dibudidayakan meliputi Kecamatan Selo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, dan Kecamatan Musuk;





- 9) perkebunan kapuk randu dibudidayakan meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Klego;
  - 10) perkebunan kenanga dibudidayakan meliputi Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, dan Kecamatan Banyudono;
  - 11) perkebunan jambu mete dibudidayakan meliputi Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sambu, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, dan Kecamatan Wonosegoro;
  - 12) perkebunan kantil dibudidayakan meliputi Kecamatan Musuk, Kecamatan Teras, dan Kecamatan Banyudono;
  - 13) perkebunan asem dibudidayakan meliputi Kecamatan Sambu, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Andong, Kecamatan Klego, dan Kecamatan Wonosegoro;
  - 14) perkebunan tebu dibudidayakan berada di seluruh kecamatan;
  - 15) perkebunan lada dibudidayakan meliputi Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Sambu, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, dan Kecamatan Karanggede; dan
  - 16) potensi pengembangan budidaya jenis komoditas perkebunan lain di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan Peternakan
- 1) Kawasan peternakan
    - a) ternak besar meliputi ternak sapi potong, sapi perah, dan kerbau, yang berada di luar kawasan perkotaan di seluruh kecamatan;
    - b) ternak kecil meliputi kambing, domba, babi, kelinci, yang berada di seluruh kecamatan;
    - c) ternak kecil khusus babi meliputi Kecamatan Cepogo, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, dan Kecamatan Juwangi; dan
    - d) unggas meliputi itik, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, burung puyuh, berada di seluruh kecamatan.
  - 2) Rumah Potong Hewan (RPH)
    - a) RPH ruminansia di Kecamatan Ampel dan Klego;
    - b) rumah potong babi di sentra produksi ternak babi; dan
    - c) rumah potong unggas di seluruh kecamatan sentra produksi ternak unggas.
2. Alokasi pola ruang kawasan permukiman seluas 28.747 ha
- a. Permukiman Perkotaan seluas 8.834 ha  
Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
  - b. Permukiman Pedesaan seluas 19.913 ha  
Selo, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.

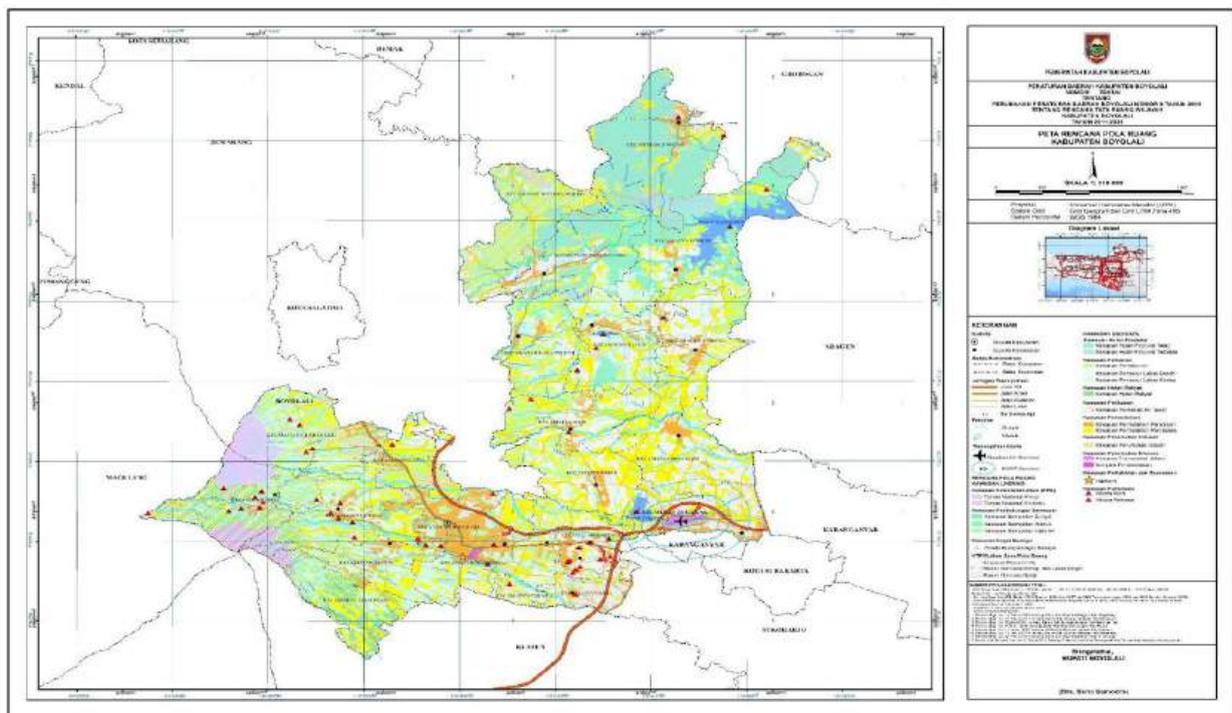




3. Alokasi pola ruang kawasan hutan produksi seluas 13.779 ha
  - a. Hutan produksi tetap seluas 12.596 ha  
Kecamatan Andong, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Klego, Kecamatan Simo, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Wonosamodro
  - b. Hutan produksi terbatas seluas 1.183 ha  
Kecamatan Klego, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan Wonosamodro.
4. Kawasan Peruntukan Industri seluas 2.130 ha, meliputi: Kecamatan Ampel, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Sambu, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Klego, Kecamatan Andong, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Juwangi, Kecamatan Gladagsari, dan Kecamatan Wonosamodro.

Berikut ini merupakan Peta Pola Ruang Kabupaten Boyolali, baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Gambar III. 16 Peta Rencana Pola Ruang



Sumber: RTRW 2011 – 2031

Dari hasil identifikasi dan tinjauan di atas, baik berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Boyolali, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengarah pada pengembangan kawasan pertanian dan pengembangan aneka industri antara lain kegiatan agropolitan dan minapolitan. Pengembangan ini akan diperkuat oleh penentuan alokasi lahan di kawasan pertanian dan industri yang dicanangkan dalam RTRW, serta didukung oleh pengembangan KSK pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada sektor pariwisata.

### 3.2.5 Isu Strategis Daerah

Isu strategis level regional atau daerah menjadi isu Kabupaten Boyolali dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Isu Strategis ini didapatkan dari elaborasi isu internasional dan nasional. Isu strategis merupakan hal





penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak di masa depan. Telah dilakukan identifikasi isu strategis Kabupaten Boyolali yang tersaji pada narasi di bawah ini:

#### 3.2.5.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

MPP Kabupaten Boyolali menciptakan tatanan pemerintahan yang inovatif di Kabupaten Boyolali, dimana sejak hadirnya MPP Kabupaten Boyolali telah mampu mengembangkan 186 (seratus delapan puluh enam) layanan dari 27 (dua puluh tujuh) instansi pada Tahun 2022. Capaian ini mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan layanan publik. Inovasi ini harus terus dikembangkan dengan memperhatikan dinamika tata kelola pemerintahan, terlebih dunia telah memasuki era *Society 5.0*.

Dinamika tata kelola Pemerintah Kabupaten Boyolali dihadapkan pada tantangan dan peluang, seperti kompleksitas isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan kapasitas respon dan inklusivitas. Selain itu, perubahan yang cepat dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan data dan *cybersecurity*. Melalui hal tersebut, dapat dikembangkan implementasi *Artificial Intelligence*, analisis *Big Data*, dan *Integrated System* sehingga mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengambilan keputusan serta *hospitality* pelayanan publik. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Boyolali berupaya membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, dan adaptif untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali.

#### 3.2.5.2. SDM yang Berdaya Saing dan Berkarakter

IPM Kabupaten Boyolali di Tahun 2023 sebesar 75,41 di Tahun 2023 dengan kategori tinggi menjadi modal Kabupaten Boyolali untuk menciptakan SDM yang berdaya saing dan berkarakter dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Boyolali mampu mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas untuk menghadapi tantangan global serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Boyolali sebagai Kabupaten Investasi menyadari pentingnya penanaman modal dalam pengembangan SDM sebagai kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya berbagai pusat kawasan industri, Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat mengembangkan berbagai program pelatihan, pendidikan, program vokasi, untuk mempersiapkan SDM yang mampu memenuhi kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

SDM berdaya saing dan berkarakter tidak hanya mengenai aspek teknis dan keterampilan saja, tetapi juga melibatkan potensi kekayaan budaya dan kesenian dalam membangun karakter yang kuat pada generasi muda. Keberagaman budaya, kesenian, dan kearifan lokal di Kabupaten Boyolali merupakan aset yang berharga dalam membentuk kepribadian yang tangguh dan kreatif pada anak muda.

Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu berupaya membangun sinergi antara dunia pendidikan, pariwisata, industri, dan pemerintah untuk memastikan bahwa kurikulum dan pelatihan yang diselenggarakan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, juga memadukan pengembangan SDM yang berdaya saing dengan pemanfaatan potensi budaya, kesenian, dan kearifan lokal. Melalui kolaborasi dan pendekatan holistik, diharapkan akan tercipta





ekosistem yang mendukung pengembangan SDM yang berdaya saing, berkarakter, kreatif, serta memiliki kebanggaan akan warisan budaya Kabupaten Boyolali. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali, dengan tetap mempertahankan jati diri dan identitas budaya.

#### 3.2.5.3. *Aging Population* sebagai dampak Bonus Demografi

*Aging Population* merupakan salah satu dampak dari bonus demografi yang dapat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik di Kabupaten Boyolali. Ketika bonus demografi mulai menua dan memasuki usia pensiun, akan terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang memerlukan layanan kesehatan dan sosial yang lebih intensif. Hal ini dapat menimbulkan beban besar bagi sistem kesehatan dan keuangan daerah, serta menghambat penyediaan ketersediaan layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Boyolali tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan dan kompetensi teknis, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menyesuaikan infrastruktur kesehatan dan sosial dengan perubahan demografi yang terjadi. Ini melibatkan pengembangan SDM yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh populasi yang menua, serta kemampuan untuk mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk menanggapi perubahan tersebut. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan SDM, Kabupaten Boyolali dapat mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan *Aging Population* dan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

#### 3.2.5.4. Transformasi Perekonomian Daerah sebagai Dampak Restrukturisasi Ekonomi

Transformasi perekonomian daerah sebagai dampak restrukturisasi ekonomi di Kabupaten Boyolali mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut dalam mengadaptasi diri terhadap perubahan struktural ekonomi yang terjadi baik secara lokal maupun global. Struktur ekonomi Kabupaten Boyolali yang didominasi oleh industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan memungkinkan adanya perubahan skala besar yang dikarenakan berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, atau perubahan preferensi konsumen. Kabupaten Boyolali sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih besar, juga terpengaruh oleh dinamika ini. Transformasi ekonomi daerah dapat mengakibatkan perubahan dalam pola produksi, lapangan kerja, dan sektor-sektor yang dominan dalam perekonomian. Transformasi ekonomi di Kabupaten Boyolali dapat mencakup peralihan dari sektor pertanian tradisional ke sektor pertanian, industri atau jasa yang lebih modern. Hal ini dapat didukung dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan promosi investasi dalam semua sektor yang memiliki potensi pertumbuhan. Selain itu, transformasi ekonomi juga memerlukan penyesuaian dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kabupaten Boyolali harus mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari restrukturisasi ekonomi, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan bagi masyarakat lokal.





#### 3.2.5.5. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali menjadi prioritas penting mengingat tingkat kemiskinan sebesar 9,81% di Tahun 2023. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, upaya untuk mengurangi kemiskinan harus tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Kabupaten Boyolali harus mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang spesifik, baik terkait dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, penguatan infrastruktur kesehatan, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, serta dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja, dapat menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Selain itu, program-program bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan juga dapat membantu meringankan beban kemiskinan bagi masyarakat yang paling rentan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, Kabupaten Boyolali dapat merumuskan strategi yang holistik dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan lebih efektif, serta menciptakan kondisi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

#### 3.2.5.6. Ketimpangan Pembangunan dan Pendapatan

Ketimpangan pembangunan dan pendapatan di Kabupaten Boyolali, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi masalah utama. Meskipun Kabupaten Boyolali telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa bidang pembangunan, namun masih terdapat disparitas yang signifikan antara wilayah-wilayah dengan tingkat pembangunan yang tinggi dan rendah. Kondisi ini ditandai dengan nilai indeks gini sebesar 0,37 di Tahun 2023. Secara empiris telah terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah, di mana beberapa daerah memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sementara daerah lain masih mengalami keterbatasan dalam hal tersebut. Untuk mengatasi ketimpangan ini, Kabupaten Boyolali harus mengimplementasikan kebijakan dan program yang berfokus pada inklusi sosial dan ekonomi. Hal ini termasuk mengalokasikan anggaran yang merata untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang masih tertinggal mendapatkan prioritas dalam lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan, serta akses terhadap layanan publik yang berkualitas. Selain itu, penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, promosi kewirausahaan, dan pengembangan sektor ekonomi lokal juga dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mengatasi ketimpangan pembangunan dan pendapatan, serta menciptakan kondisi yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

#### 3.2.5.7. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah belum meratanya pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas. Adanya kesenjangan infrastruktur terlihat dari gap





kepadatan penduduk di Tahun 2023, dimana kepadatan penduduk Kecamatan Juwangi sebesar 374,29 penduduk per km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Kecamatan Boyolali 2.547,66 penduduk per km<sup>2</sup>. Tidak hanya masih menghadapi tantangan dalam menyediakan infrastruktur dasar yang memadai di seluruh wilayah, tetapi juga keterbatasan akses air bersih yang berkualitas. Sebagian daerah mungkin telah memiliki infrastruktur yang baik, namun masih terdapat daerah lain yang masih kekurangan akses terhadap infrastruktur tersebut, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Kabupaten Boyolali perlu mengadopsi pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah strategis yang diperlukan adalah alokasi anggaran yang merata untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas manajemen proyek dan pengawasan pembangunan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat membantu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan efektif. Selain itu harus dilakukan investasi dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pemeliharaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan, serta program-program untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan di antara masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Boyolali dapat mengatasi masalah ketidakmerataan dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan meningkatkan kualitas air secara keseluruhan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat menikmati akses yang setara terhadap layanan infrastruktur yang penting untuk kehidupan sehari-hari.

#### 3.2.5.8. Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Masifnya bencana tanah longsor, kekeringan, dan banjir di Kabupaten Boyolali mengindikasikan adanya perubahan iklim di Kabupaten Boyolali. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Boyolali menjadi sangat penting dalam RPJPD Tahun 2025-2045 selama 20 (dua puluh) tahun, sekaligus komitmen untuk mencapai *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan aksi perubahan iklim. Seperti daerah lain dalam menghadapi dampak yang semakin nyata dari perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu, pola curah hujan yang tidak teratur, dan bencana alam yang lebih sering terjadi. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem. Dalam rangka RPJPD Tahun 2025-2045, Kabupaten Boyolali perlu merumuskan kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk mengintegrasikan aspek-aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam semua sektor pembangunan. Kebijakan dan strategi ini meliputi penerapan pembangunan rendah karbon, pengembangan infrastruktur tahan iklim, peningkatan sistem peringatan dini untuk bencana alam, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan promosi pola hidup yang ramah lingkungan. Selain itu, Kabupaten Boyolali harus berkomitmen untuk mencapai *SDG's*, termasuk target-target yang terkait dengan aksi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi kerentanan terhadap bencana, dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kondisi emisi gas rumah kaca di Kabupaten Boyolali berdasarkan data Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional ([wesbsite signsmart.menlhk.go.id](http://wesbsite.signsmart.menlhk.go.id)) menunjukkan bahwa adanya peningkatan emisi pada





Tahun 2018 yaitu 718,6 Gg/CO<sub>2</sub> menjadi 1.273,00 Gg/CO<sub>2</sub> di Tahun 2021. Adapun pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.052,04 Gg/CO<sub>2</sub>. Kondisi dipengaruhi oleh beberapa sektor diantaranya Energi, IPPU (*industrial process and production use*), Pertanian, Kehutanan dan Limbah. Pada Tahun 2022 emisi GRK didominasi sektor energi sebesar 672,26 Gg/CO<sub>2</sub> dan sektor pertanian sebesar 668,67 Gg/CO<sub>2</sub>. Pada sektor energi besarnya emisi dipengaruhi oleh penggunaan listrik dan transportasi, sedangkan pada sektor pertanian dipengaruhi oleh budidaya padi, N<sub>2</sub>O dari tanah yang dikelola, penggunaan urea, pengapuran, pembakaran biomassa, dan ternak.

Dengan mengintegrasikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pencapaian *SDG's* dalam RPJPD Tahun 2025-2045, Kabupaten Boyolali harus dapat memastikan bahwa pembangunan daerah berkelanjutan, inklusif, dan tahan iklim dapat tercapai. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

#### 3.2.5.9. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Potensi Kebencanaan

Penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan potensi kebencanaan di Kabupaten Boyolali merupakan tantangan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat setempat karena Kabupaten Boyolali rentan terhadap berbagai bencana alam akibat kondisi geografis dan faktor-faktor lingkungan. Kebakaran, banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor adalah beberapa bencana yang sering terjadi di Kabupaten Boyolali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta praktik-praktik pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta perubahan tata guna lahan, dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana-bencana tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang efektif. Hal ini termasuk pengembangan sistem peringatan dini yang handal, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dalam perencanaan dan penanganan bencana, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi kebencanaan dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga risiko terjadinya bencana dan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat dapat diminimalkan.

#### 3.2.5.10. Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Sejak Dini

Peningkatan ketahanan sosial budaya masyarakat sejak dini di Kabupaten Boyolali merupakan langkah yang penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan budaya lokal dan harmoni sosial. Salah satu pendekatan efektif adalah melalui penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Dengan memasukkan mata pelajaran yang mengajarkan tentang kearifan lokal, tradisi, dan nilai-nilai sosial budaya dalam pembelajaran, anak-anak dapat tumbuh dengan memahami dan menghargai warisan budaya





mereka sendiri, serta mengembangkan rasa saling menghormati dan toleransi terhadap keberagaman budaya. Ketahanan sosial budaya di Kabupaten Boyolali semakin terkikis dengan adanya penurunan pelestarian benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan, serta jumlah kegiatan seni budaya yang diselenggarakan. Hal ini perlu adanya perhatian dalam melestarikan kebudayaan lokal, sehingga akan memberikan kekuatan dalam pertahanan sosial budaya dalam masyarakat Kabupaten Boyolali. Kemudian, melalui kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan *workshop*, masyarakat Kabupaten Boyolali dapat diikutsertakan dalam upaya memperkuat identitas budaya mereka dan membangun jaringan sosial yang kuat di antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, perempuan, dan kelompok minoritas, dalam kegiatan yang mempromosikan keberagaman budaya, kesadaran akan pentingnya menjaga dan memperkaya warisan budaya lokal dapat ditanamkan secara lebih efektif. Upaya kolaboratif ini penting untuk memastikan bahwa ketahanan sosial budaya di Kabupaten Boyolali tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks.

Secara singkat, isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Boyolali untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan seperti pada tabel berikut:

Tabel III. 4 Penentuan Isu Strategis

No.	ISU STRATEGIS
<b>ISU STRATEGIS LEVEL GLOBAL</b>	
1	<i>Sustainable Development Goals (SDG's)</i> sebagai Kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium ( <i>Millenium Development Goals</i> )
2	Bonus Demografi Global
3	Perkembangan Teknologi
4	Urbanisasi Dunia
5	Konstelasi Perdagangan
6	Pergeseran Tata Kelola Keuangan
7	Perubahan Iklim
8	Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
9	Pertumbuhan Kelas Menengah ( <i>Middle Class</i> )
<b>ISU STRATEGIS LEVEL NASIONAL</b>	
1	Pengaruh Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2	Percepatan Penanganan <i>Stunting</i>
3	Peningkatan Reformasi Birokrasi
4	Pemenuhan Swasembada Pangan Nasional
5	Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Peningkatan Persaingan Global
6	Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)
7	Kualitas Pendidikan SDM yang Masih Rendah
8	Tata Kelola Pemerintahan
9	Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas
10	Belum Meratanya Akses Jaminan Sosial
11	Belum Terimplementasinya Manajemen Talenta secara Merata di Seluruh K/L/D
12	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
13	Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi
14	Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik
<b>ISU STRATEGIS DAERAH JAWA TENGAH</b>	





No.	ISU STRATEGIS
1	Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
2	Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
4	Keberlanjutan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penanggulangan Bencana
5	Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6	Kekuatan Budaya sebagai Karakter dan Jati Diri Masyarakat
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
ISU STRATEGIS LEVEL DAERAH	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis
2	SDM yang Berdaya Saing dan Berkarakter
3	<i>Aging Population</i> sebagai Dampak Bonus Demografi
4	Transformasi Perekonomian Daerah sebagai Dampak Restrukturisasi Ekonomi
5	Percepatan Pengentasan Kemiskinan
6	Ketimpangan Pembangunan dan Pendapatan
7	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
8	Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
9	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Potensi Kebencanaan
10	Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Sejak Dini

Sumber: Data diolah (2024)





**BAB IV  
VISI DAN MISI DAERAH**

Sejalan dengan Visi Nasional Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan, serta searah dengan visi Provinsi Jawa Tengah yaitu Jawa Tengah Penumpu Pangan dan Industri yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan, maka penciptaan visi Kabupaten Boyolali 2045 juga tidak terlepas benang merahnya dari visi nasional dan provinsi. Dengan tetap memperhatikan potensi Kabupaten Boyolali berupa pertanian, peternakan, dan kawasan industri, begitu pula berbagai masalah pokok yang mencakup ekonomi, SDM, infrastruktur, birokrasi, dan lingkungan, serta tidak luput memperhatikan isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Boyolali ke depan.

Berdasarkan hasil partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan Kabupaten Boyolali 2045 maka menghasilkan simpulan dari harapan masyarakat, serta memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Jawa Tengah serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka kerangka logis perumusan visi Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar IV. 1 Kerangka Visi RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah (2024)

Dari gambar di atas didapatkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali 2025-2045 adalah:

“Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kabupaten Boyolali memiliki banyak keunggulan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam perencanaan jangka panjang antara lain:

1. Pertanian dan Agribisnis: Kabupaten Boyolali terkenal sebagai daerah agraris yang subur. Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dengan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan unggulan di Kabupaten Boyolali adalah padi dan jagung. Tanaman hortikultura terdiri dari sayur, buah, biofarmaka, dan tanaman hias. Sedangkan tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Boyolali diantaranya tembakau dan kopi. Jika pertanian dilihat dalam arti luas, termasuk di dalamnya peternakan memiliki potensi sangat besar utamanya sapi yang selama ini menjadi ikon Kabupaten Boyolali, ruminansia lain dan unggas, serta sektor perikanan. Hal ini memberikan





kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan daerah dan negara. Selain berperan dalam penyediaan bahan pangan, peran strategis sektor pertanian dalam pembangunan ke depan adalah menopang perekonomian Kabupaten Boyolali, dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Boyolali cukup tinggi, serta berperan penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk Kabupaten Boyolali.

2. Pusat Industri: Kabupaten Boyolali juga memiliki sektor industri yang berkembang, terutama dalam industri kreatif dalam pembuatan kerajinan tangan, seperti kerajinan tembaga, kuningan, batik, tenun, dan anyaman. Industri ini memberikan lapangan kerja bagi banyak penduduk setempat dan mempromosikan keahlian tradisional.
3. Pariwisata: Kabupaten Boyolali memiliki potensi pariwisata yang besar. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, termasuk gunung, mata air, dan air terjun, Kabupaten Boyolali menarik banyak wisatawan domestik dan internasional setiap tahunnya. Objek wisata alam seperti, Objek Wisata Waduk Cengklik, Waduk Kedung Ombo, Waduk Bade, Air Terjun Semuncar, Pemandian Umbul Pengging, Umbul Tlatar, Taman Nasional Gunung Merapi, dan Taman Nasional Gunung Merbabu, serta objek wisata buatan seperti Wisata Edukasi Religi (WER) Qolbu Boyolali dan Kebun Raya Indrokilo serta wisata kuliner seperti susu segar, soto, dan sambal tumpang yang menambah daya tariknya.
4. Infrastruktur: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus meningkatkan infrastruktur daerah, termasuk jaringan jalan dan transportasi, irigasi pertanian, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
5. Keragaman Budaya: Kabupaten Boyolali kaya akan warisan budaya dan tradisi, termasuk seni pertunjukan, musik, tarian, dan festival. Hal ini mencerminkan keragaman etnis dan budaya di wilayah tersebut, serta menciptakan identitas yang kuat bagi masyarakat Kabupaten Boyolali.

Potensi di berbagai sektor yang bisa dikembangkan oleh Kabupaten Boyolali memerlukan investasi karena investasi merupakan katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan meningkatkan pendapatan. Dengan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali serta didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan berbagai kemudahan perizinan dan insentif bagi investor, termasuk penyederhanaan proses birokrasi dan pemberian insentif pajak.

Tema khusus Kabupaten Boyolali dalam perencanaan jangka panjang adalah sebagai Kabupaten Ramah Investasi. Ramah investasi merupakan kondisi terjadinya kemudahan dan keamanan investasi di Kabupaten Boyolali dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas melalui pencapaian Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Ramah investasi tidak hanya berfokus pada aspek perekonomian, tetapi juga dalam memajukan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial budaya, tata kelola pemerintahan, hingga kelestarian lingkungan. Ruang lingkup investasi ini melibatkan peran investor baik dalam maupun luar





daerah, nasional maupun internasional, serta potensi unggulan Kabupaten Boyolali melalui UMKM.

Manfaat Ramah Investasi membawa dampak positif bagi masyarakat luas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja baru, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta dukungan dan pembinaan terhadap UMKM akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain tema khusus sebagai Kabupaten Ramah Investasi, dalam visi tersebut terdapat 5 (lima) pokok visi, yaitu maju, SDM unggul, berbudaya, sejahtera, dan berkelanjutan, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pemilihan tema khusus dan pokok visi telah diselaraskan dengan rekomendasi Evaluasi RPJPD 2005-2025, yaitu peningkatan capaian kinerja indikator makro pembangunan daerah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mempertahankan sasaran strategis pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan sumber daya manusia. Masing-masing kata tersebut memiliki penjelasan pokok visi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Penjelasan Pokok Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045

Maju	Maju diartikan dengan meningkatkan daya saing masyarakat, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Boyolali melalui peningkatan birokrasi serta memantapkan basis ekonomi melalui pemanfaatan dan pelibatan potensi serta sumber daya lokal melalui IPTEK dan inovasi daerah dengan memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Boyolali, serta memperhatikan stabilitas ekonomi makro yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Pemantapan birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta meningkatkan keamanan wilayah sebagai upaya kondusifitas iklim investasi di Kabupaten Boyolali.
SDM Unggul	SDM Unggul diartikan dengan meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Boyolali. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Boyolali melalui peningkatan layanan kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas, sehingga pembangunan manusia yang berakhlak terpuji, cerdas, sehat, kompeten dan unggul dapat terwujud.
Berbudaya	Menjaga tatanan nilai luhur masyarakat Kabupaten Boyolali dalam menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan berkualitas dengan tetap mempertahankan nilai budaya lokal melalui pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter serta pendekatan keluarga sehingga menciptakan manusia yang <i>tepo seliro</i> dan memiliki <i>subasito</i> .
Sejahtera	Kesejahteraan ditandai dengan masyarakat memiliki cukup sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu juga mencakup kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai. Hal ini bermuara pada pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali.





Berkelanjutan	Pembangunan yang memiliki orientasi pada interaksi lingkungan alam, sosial, dan ekonomi dalam mendukung kehidupan masyarakat sejahtera dengan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana, meningkatkan kemandirian air dan pangan Kabupaten Boyolali sehingga mampu mempertahankan kualitas hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
---------------	---

Berdasarkan penetapan tema-tema melalui pokok visi di atas, berikut ini adalah penyelarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 tertera dalam tabel berikut:

Tabel IV. 2 Penyelarasan Visi RPJPD dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

VISI RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH	VISI RPJPD KAB/KOTA
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan
a. Maju, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya saing</li> <li>- Modern</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Mandiri</li> <li>- Tangguh</li> <li>- Aman</li> </ul>	a. Maju meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daya saing</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Adaptif</li> <li>- Aman</li> <li>- Tangguh</li> <li>- Ekonomi Unggul</li> </ul>
	b. SDM Unggul meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berakhlak terpuji</li> <li>- Cerdas</li> <li>- Sehat</li> <li>- Kompeten</li> </ul>
	c. Berbudaya meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemajuan kebudayaan</li> <li>- Pendidikan karakter</li> <li>- Pendekatan keluarga</li> </ul>
	d. Sejahtera meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makmur</li> <li>- Mandiri</li> </ul>
b. Berkelanjutan, meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>- Risiko bencana</li> </ul>	e. Berkelanjutan meliputi substansi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>- Adaptasi Iklim</li> <li>- Kemandirian air dan pangan</li> <li>- Tangguh bencana</li> </ul>
c. Tema khusus: Penumpu pangan dan industri nasional	f. Tema khusus: Kabupaten Ramah Investasi

Sumber: Data diolah (2024)

Penyelarasan ini merupakan komitmen Kabupaten Boyolali dalam mendukung cita-cita Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan menjadi penopang keberhasilan Jawa Tengah. Ukuran keberhasilan cita-cita Jawa Tengah tertera dalam sasaran visi Provinsi Jawa tengah yang dipedomani oleh Kabupaten Boyolali. Adapun sasaran dari visi Kabupaten Boyolali yang selaras dengan Provinsi Jawa tengah dijabarkan dalam tabel IV.2 berikut:



Tabel IV. 3 Keselarasan Sasaran dan Indikator visi RPJPD dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045						RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045									
No	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Sasaran	No	Pokok Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Sasaran			
				2025	2045						2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Peningkatan pendapatan per kapita	a. PDRB per Kapita	Rp. Juta	48,53-48,66	230,77-276,24	1	Maju	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Boyolali	a. PDRB per Kapita	Rp. Juta	42,93-43,23	76,65	118,60	160,56	193,98-227,83
		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	65,3	592,13										
		c. Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	33,88-34,06	35,84-36,65				b. Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	31,59	33,59	34,95	36,21	38,03
		d. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	12,7	7,2				c. Nilai investasi tahunan berskala nasional PMA/PMDN	Rp. Juta	1.883.317 (2022)	2.258.317	2.633.317	3.008.317	3.383.317
2.	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan	%	8,67-9,17	0,00-0,50	2	Sejahtera	Menurunnya Kemiskinan di Boyolali	a. Tingkat Kemiskinan	%	8,58-9,08	6,92-6,44	4,76-4,29	2,6-2,15	0,00-0,44
		b. Rasio Gini	Angka	0,373-0,381	0,301-0,345				b. Rasio Gini	Angka	0,365	0,36	0,355	0,34	0,335
		c. Kontribusi PDRB Provinsi	%	8,01	6,82				c. Kontribusi PDRB Kabupaten	%	2,39	2,51	2,66	2,81	2,99
		d. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,05	90										
3.	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	a. Kapasitas Institusi	Angka	4,4	4,84	3	Maju	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Boyolali	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,23	79	81	83	85

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045						RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045										
No	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Sasaran	No	Pokok Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline	Sasaran				
				2025	2045						2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a. Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,7	4	SDM Unggul Berbudaya	Meningkatnya Kualitas SDM di Boyolali	a. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,97	77,47	79,97	82,47	84,97	
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	a. Penurunan intensitas emisi GRK	%	0,32	82,75	5	Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Boyolali	a. Penurunan emisi GRK Kumulatif	tonCO2eq	2.323.172	5.575.095	12.078.940	21.834.708	34.842.398	

Sumber: Data diolah (2024)



Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk mewujudkan visi “Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dengan fokus pada peningkatan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas SDM dan daya saing Kabupaten Boyolali serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tujuan tersebut juga mencakup pencapaian kesejahteraan menyeluruh, baik secara ekonomi maupun sosial, guna memberikan dampak positif pada kehidupan penduduknya. Masyarakat bisa menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak kelaparan, menikmati pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas serta merata, dan mampu mengimplementasikan kesetaraan gender. Pembangunan dilakukan dengan mempertahankan kualitas hidup saat ini dan di masa mendatang secara berkelanjutan serta resiliensi terhadap bencana. Pentingnya kelangsungan pembangunan juga ditekankan dengan menitikberatkan pada prinsip berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kabupaten Boyolali bertekad menjadi sebuah wilayah yang maju, SDM unggul, berbudaya, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai landasan untuk pembangunan masa depannya.

Visi Kabupaten Boyolali 2045 tentu tidak dapat berdiri sendiri, maka dibentuklah 7 (tujuh) misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

Misi 1: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas

Misi pertama menyiratkan suatu upaya untuk mengukuhkan atau memperkuat struktur ekonomi. Meningkatkan nilai dan pertumbuhan ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi dan sumber daya lokal berbasis inovasi dan teknologi dengan dukungan iklim berinvestasi yang kondusif untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan. Struktur ekonomi yang hendak dibangun merujuk pada organisasi atau susunan sistem ekonomi Kabupaten Boyolali yang mencakup berbagai sektor baik primer, sekunder, maupun tersier untuk dikelola secara optimal agar struktur tersebut lebih kuat dan efisien untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global. Sektor primer mencakup semua aktivitas ekonomi yang langsung menggunakan sumber daya alam. Sektor sekunder mencakup semua aktivitas ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi melalui proses manufaktur dan konstruksi. Sektor tersier mencakup semua aktivitas ekonomi yang menyediakan jasa daripada barang fisik.

Struktur ekonomi didasarkan pada potensi unggulan yang berarti menggunakan potensi sumber daya yang menjadi keunggulan yang dimiliki Kabupaten Boyolali. Potensi unggulan dapat berupa sumber daya alam, keahlian khusus masyarakat, atau sektor industri tertentu yang dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rangka penerapan ekonomi berkelanjutan, yaitu dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau sumber daya secara berlebihan. Dengan kata lain, misi pertama ini merujuk pada usaha untuk memperkuat struktur ekonomi dengan menggunakan potensi unggulan yang berkualitas dan dapat dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan wilayah Kabupaten Boyolali.





Misi 2: Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai, Berkualitas, dan Merata dalam Upaya Mendukung Pengembangan Wilayah

Meningkatkan ketersediaan dan pemenuhan sarana prasarana berkualitas yang mampu mendorong pemerataan antar wilayah agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta berpedoman pada kebijakan penataan ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata penting dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pengembangan wilayah. Infrastruktur yang disediakan harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat. Infrastruktur yang memadai dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang disediakan memiliki standar mutu yang tinggi. Infrastruktur yang berkualitas tidak hanya tahan lama tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi penggunaannya serta menciptakan efisiensi terutama dalam penggunaan dana publik. Di samping itu, upaya pemerataan wilayah perlu dilakukan melalui program digitalisasi untuk meningkatkan akses dan memperluas cakupan jaringan.

Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh semua masyarakat. Dengan kata lain, misi tersebut menyampaikan urgensi untuk menyediakan fasilitas dan prasarana yang cukup, berkualitas tinggi, dan merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari strategi pengembangan Kabupaten Boyolali. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang baru, meningkatkan konektivitas, dan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali.

Misi 3: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas

Meningkatkan penyelenggaraan layanan pemerintahan modern, responsif, berintegritas, transparan dan akuntabel, inovatif dalam mewujudkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, yang didukung *Information Technology* (IT) serta menciptakan stabilitas dan kondusivitas wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan standar tinggi dan kualitas yang baik. Kualitas pemerintahan mencakup efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, dalam memberikan layanannya, pemerintahan harus mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan, aspirasi, dan perubahan dalam masyarakat. Pemerintahan yang responsif cenderung lebih terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat. Adopsi ide-ide baru, teknologi, atau pendekatan yang kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan dengan penuh integritas, yaitu kejujuran, keadilan, dan moralitas dalam setiap tindakan. Pemerintahan yang berintegritas membangun kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, misi tersebut mencerminkan aspirasi untuk memiliki pemerintahan yang efisien, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, inovatif dalam penyelenggaraan tugasnya, dan dijalankan dengan integritas tinggi. Tujuan ini menciptakan lingkungan pemerintahan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali secara menyeluruh.





#### Misi 4: Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berdaya Saing

Upaya untuk menciptakan masyarakat maju yang unggul dan berkualitas (berakhlak terpuji, cerdas, dan sehat), serta memiliki daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya yang memiliki potensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan kemajuan bangsa. Dalam konteks SDM yang unggul, hal ini mencerminkan aspirasi untuk meningkatkan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan individu, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian juga aspek unggul yang akan diwujudkan dalam bentuk individu yang memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam hal keahlian teknis maupun *soft skills*. Dengan dimilikinya SDM Kabupaten Boyolali yang unggul, diharapkan memiliki daya saing baik di tingkat lokal, nasional, atau bahkan global. SDM yang unggul memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau masyarakat secara umum.

#### Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya

Ruang lingkup ketahanan sosial budaya adalah ketahanan keluarga, gender, serta budaya. Maksud dari misi terkait ketahanan sosial budaya adalah upaya untuk membangun dan mempertahankan daya tahan suatu masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan sosial serta budaya. Ketahanan sosial budaya melihat kemampuan daerah untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya mereka sambil tetap adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Selain itu upaya lainnya dengan tetap memperhatikan pelestarian warisan budaya, pemberdayaan komunitas maupun keluarga, peningkatan kesadaran melalui pendidikan, serta penghargaan terhadap keberagaman dan inklusivitas. Dengan memperkuat jaringan sosial dan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, masyarakat dapat beradaptasi dan berinovasi tanpa kehilangan esensi budayanya, merujuk pada diterapkannya nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Boyolali. Peran pemerintah juga penting dalam mendukung kebijakan yang mendukung ketahanan sosial budaya, memastikan bahwa warisan budaya dapat diteruskan dan tetap relevan bagi generasi mendatang.

#### Misi 6: Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan

Misi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini dimaknai bahwa setiap masyarakat di Kabupaten Boyolali memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana yang layak, dan kesempatan kerja serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga mencapai kualitas hidup yang baik.

#### Misi 7: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Responsif terhadap Bencana

Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemanfaatannya, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Upaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan cara yang tidak merusak ekosistem atau keberlanjutan sumber





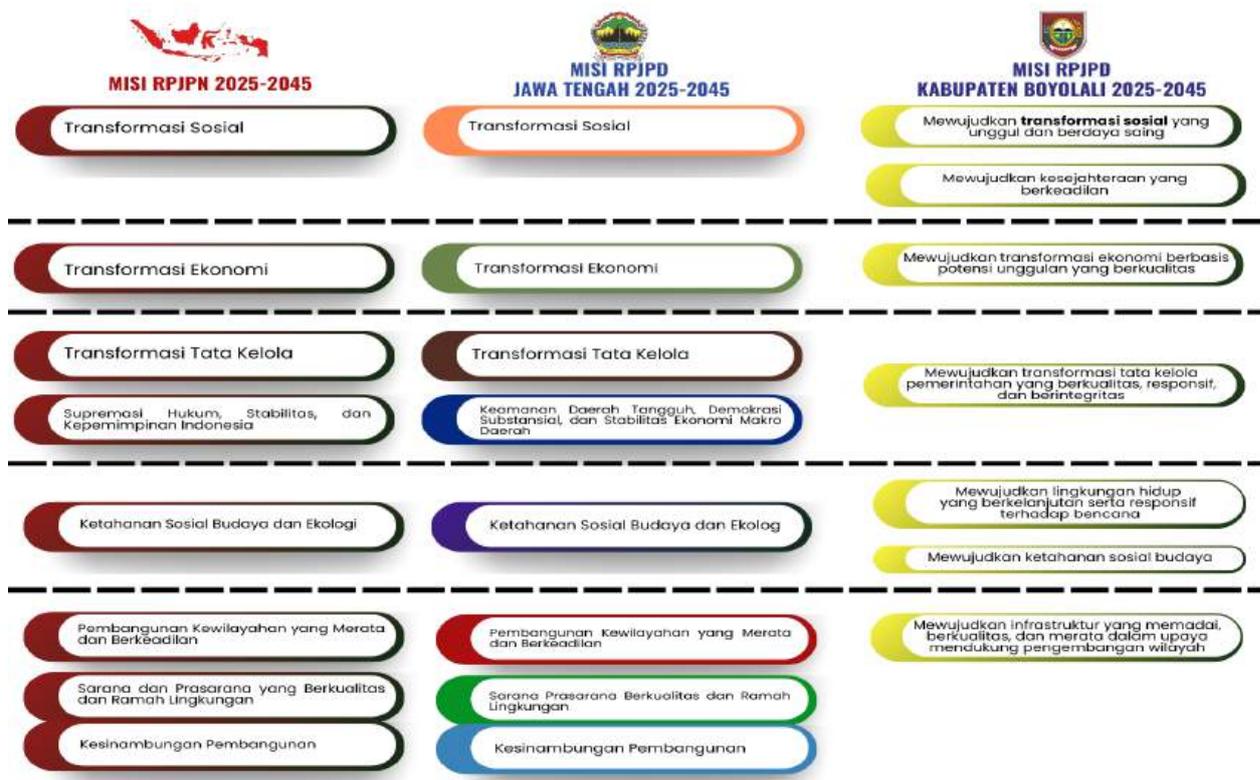
daya alam. Ini mencakup tindakan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan untuk jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang. Disamping melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara optimal, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap kejadian bencana alam atau potensi bahaya lainnya yang dapat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Responsivitas ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan darurat untuk meminimalkan kerugian. Menggarisbawahi bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya harus berkelanjutan dalam jangka panjang, tetapi juga mampu merespon perubahan kondisi, termasuk kejadian bencana. Ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam strategi pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, misi tersebut mencerminkan kebutuhan untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga responsif terhadap situasi darurat seperti bencana alam. Pendekatan yang holistik seperti ini penting untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan kesiapsiagaan terhadap peristiwa yang dapat mengancam lingkungan dan kehidupan manusia.

Upaya pelestarian lingkungan melalui pengelolaan lahan yang berkelanjutan diharapkan tidak hanya mempertahankan ketersediaan air yang bersih dan cukup, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya. Selain itu, upaya peningkatan produktivitas pertanian lokal juga dapat memperkuat ketahanan pangan melalui diversifikasi dan kemandirian dalam penyediaan makanan bagi masyarakat. Dengan demikian, integrasi strategi pelestarian lingkungan tidak hanya mendukung ketahanan air, tetapi juga berkontribusi pada upaya Kabupaten Boyolali untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi RPJPD selaras dengan misi Provinsi Jawa Tengah, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar IV. 2 Keselarasan Misi RPJPD, dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah (2024)

**BAB V  
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Arah kebijakan merupakan langkah awal dalam mewujudkan visi misi pada masa pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang diuraikan menjadi prioritas pada tahapan/periode RPJPD. Dari arah kebijakan, visi misi yang telah disusun kemudian diterjemahkan masing-masing dalam pembangunan 5 (lima) tahunan melalui sasaran pokok. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungannya dengan visi dan misi jangka panjang dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Arah kebijakan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang kemudian akan dilakukan pentahapan selama 5 (lima) tahunan dan diterjemahkan dalam sasaran pokok yang merupakan dasar dalam melihat keadaan sesungguhnya berdasarkan kesesuaian indikator kinerja yang harus dicapai.

**5.1 Arah Kebijakan Daerah**

Arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Boyolali merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, di mana setiap tahapan dapat memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi Kabupaten Boyolali. Adapun tema pentahapan arah kebijakan diuraikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar V.1

Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045



Sumber: Data diolah (2024)

Tahap implementasi RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap sesuai dengan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan, sebagai berikut:

1. Tahap I (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi  
Pada tahap ini, Kabupaten Boyolali fokus untuk memperkuat fondasi atau dasar pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Upaya ini melibatkan perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Penguatan fondasi bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat dan berkelanjutan bagi perkembangan wilayah, mencakup aspek-aspek pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan.
2. Tahap II (2030-2034): Percepatan Transformasi  
Tahap percepatan menandakan langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di Kabupaten Boyolali.



Fokus pada inovasi, investasi strategis, dan percepatan proyek-proyek pembangunan kunci menjadi bagian dari tahap ini. Upaya percepatan bertujuan untuk mencapai visi dan misi dengan lebih cepat, efisien, dan memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

3. Tahap III (2035-2039): Pemantapan Transformasi

Tahap pemantapan menunjukkan usaha untuk mengukuhkan atau memperkuat pencapaian yang telah dihasilkan pada tahap penguatan fondasi. Pada tahap ini, pembangunan melibatkan upaya untuk menjaga dan meningkatkan keunggulan yang sudah ada, baik dalam hal ekonomi, budaya, maupun ketahanan masyarakat. Pemantapan juga dapat mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan inovasi untuk memperkuat posisi Kabupaten Boyolali.

4. Tahap IV (2040-2045): Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Perwujudan visi Kabupaten Boyolali pada Tahun 2045 menggambarkan pencapaian visi dan misi yang telah disusun. Pada titik ini, diharapkan Kabupaten Boyolali telah menjadi wilayah ramah investasi yang maju, SDM unggul, berbudaya, sejahtera dan berkelanjutan sesuai dengan aspirasinya. Ini mencakup perkembangan ekonomi yang pesat, kelestarian budaya dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat yang merata. Perwujudan visi pada Tahun 2045 mencerminkan hasil dari kesinambungan dan konsistensi upaya yang dilakukan pada tahap penguatan fondasi, pemantapan, dan percepatan sebelumnya.

Arah kebijakan menjadi panduan strategis yang mengarahkan suatu rencana pembangunan pada visi dan misi terbagi menjadi 4 (empat) tahap periode pembangunan. Arah kebijakan Kabupaten Boyolali dirumuskan untuk mencapai misi-misi yang mengarah pada transformasi pembangunan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pembangunan, keberhasilan pembangunan jangka panjang memiliki arah kebijakan yang disesuaikan dengan misi Kabupaten Boyolali. Arah kebijakan Kabupaten Boyolali dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yang masing-masing dibagi dalam 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

5.1.1 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan yang Berkualitas

Transformasi ekonomi dilakukan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian di suatu daerah. Transformasi ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sektor unggulan dan potensial melalui peningkatan kualitas hingga konektivitas untuk memastikan perekonomian tumbuh secara inklusif. Arah kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:



Gambar V. 2

Arah Kebijakan Misi-1 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)

a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dapat diarahkan pada “Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan”. Meningkatkan produktivitas serta mutu komoditas unggulan bertujuan untuk meningkatkan hasil dan daya saing produk pertanian dalam arti luas di Kabupaten Boyolali. Langkah ini melibatkan adopsi teknologi modern yang ramah lingkungan, praktik pertanian yang berkelanjutan melalui pertanian organik dan agroforestri, dan pengembangan varietas unggul melalui pengelolaan tanah yang efektif. Selain itu, perlunya meningkatkan kompetensi serta regenerasi petani milenial untuk menyegarkan sektor pertanian dengan kehadiran generasi muda yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan semangat inovatif dengan pelatihan, pendidikan, dan program regenerasi untuk memastikan keberlanjutan pertanian dan mewujudkan penerapan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Penguatan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya lokal mencakup pengembangan usaha pengolahan di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan memperhatikan praktik bisnis ramah lingkungan. Penguatan daya saing produk hasil kerajinan dapat dilakukan melalui inovasi dan kreativitas. Selain itu, penguatan sektor pariwisata dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pariwisata yang sudah ada dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung wisata hingga pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi wisata. Hal ini mendukung peningkatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menambah nilai tambah pada produk lokal.

Penerapan program akselerasi sertifikasi ketenagakerjaan guna mengimbangi pesatnya arus investasi yang masuk ke Kabupaten Boyolali. Dengan menerapkan program akselerasi sertifikasi ketenagakerjaan, Kabupaten Boyolali berusaha untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri dan investasi yang masuk, menciptakan peluang kerja yang lebih baik, serta dapat memberikan peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian dan melakukan diversifikasi pangan untuk mencapai keamanan pangan, mendukung ketahanan pangan dan memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat.



b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dapat diarahkan pada “Percepatan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan”. Percepatan transformasi ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berkelanjutan dengan melibatkan integrasi nilai tambah dalam rantai produksi, dari pengolahan hingga pemasaran. Hal ini dilakukan dengan memprioritaskan praktik berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga mendukung lingkungan dan menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan untuk komunitas pertanian dan industri terkait.

Dukungan kewirausahaan pada produk hasil kerajinan menjadi upaya dalam memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Hal ini meliputi pemberian program pelatihan kepada para pengrajin dalam hal manajemen bisnis berkelanjutan dan kewirausahaan, serta mendorong promosi produk hasil kerajinan. Selain itu, penguatan sektor pariwisata dapat dilakukan dengan melibatkan pengembangan destinasi yang menarik, pembangunan infrastruktur pariwisata, dan strategi promosi yang terencana. Dengan menciptakan pengalaman wisata yang holistik dan berkelanjutan, dapat meningkatkan daya tarik destinasi, meningkatkan penerimaan wisatawan, dan memberikan manfaat ekonomi serta pelestarian budaya di Kabupaten Boyolali. Penguatan infrastruktur pendukung investasi serta perluasan potensi investasi dan pengembangan pusat industri di Kabupaten Boyolali yang mencakup peningkatan jaringan transportasi, penyediaan energi yang handal, dan pengembangan konektivitas digital sehingga dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar daerah dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi dengan distribusi yang merata.

Adanya digitalisasi produk lokal yang menghadirkan revolusi dalam cara memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan produk yang lebih inovatif, dan memberikan pengalaman konsumen yang lebih terhubung. Hal ini selaras dengan pembangunan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di mana pengusaha dan pekerja bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Melalui dialog terbuka, dukungan untuk inovasi, dan peningkatan kondisi kerja, kita dapat membangun fondasi bagi produktivitas yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali.

c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dapat diarahkan pada “Pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan”. Adanya komitmen untuk memajukan sektor pertanian melalui penerapan inovasi dan teknologi serta metode budidaya yang modern, dan pertanian berbasis teknologi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam sektor pertanian, seiring dengan perkembangan teknologi. Promosi peluang investasi konvensional dan digital secara masif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali.

Pengembangan perekonomian hasil kerajinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, serta penerapan ekonomi sirkular. Pengombinasian penggunaan *platform online*, melalui *website e-commerce*,





media sosial, dan *marketplace online*, dan *offline*, serta penerapan desain produk yang ramah lingkungan dapat meningkatkan visibilitas produk hasil kerajinan secara luas. Dukungan dalam kolaborasi melalui pasar seni dan acara komunitas dapat dilakukan untuk memperluas jaringan distribusi dan pasar. Meningkatkan akses dan infrastruktur wisata unggulan secara berkelanjutan yang menekankan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur di sekitar destinasi wisata unggulan dengan memperhatikan keberlanjutan. Dengan meningkatkan fasilitas dan konektivitas, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas pengalaman wisata, sambil memastikan bahwa dampaknya terhadap lingkungan dan budaya lokal tetap berkelanjutan. Selain itu, penguatan pusat-pusat industri komoditas unggulan mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan potensi sektor industri. Dengan meningkatkan kapasitas dan efisiensi pusat-pusat industri yang mengolah komoditas unggulan, langkah ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, serta mendukung penerapan ekonomi berkelanjutan.

#### d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dapat diarahkan pada “Perwujudan ekonomi kerakyatan menuju SDM Boyolali berpendapatan tinggi”. Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang maju dan tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan stabil. Langkah-langkah untuk mencapai hal ini termasuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, investasi dalam infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Boyolali dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mewujudkan hal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Boyolali yang sejahtera dengan angka kemiskinan stabil dan angka pengangguran yang cenderung menurun untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Boyolali. Langkah-langkah konkret untuk mencapai hal ini melibatkan program-program ekonomi inklusif, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Boyolali diharapkan dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dan pengurangan tingkat kemiskinan serta pengangguran. Selain itu, terciptanya sinergitas pendanaan pemerintah dan nonpemerintah dapat dilakukan dengan melibatkan pembentukan kemitraan dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga nonpemerintah lainnya. Sinergitas pendanaan ini dapat memperluas sumber daya yang tersedia untuk pembangunan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan.

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dapat diarahkan pada “Perwujudan ekonomi kerakyatan menuju SDM Boyolali berpendapatan tinggi”. Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang maju dan tangguh dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan stabil. Langkah-langkah untuk mencapai hal ini termasuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial, investasi dalam infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi, Kabupaten





Boyolali dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Boyolali yang sejahtera dan angka pengangguran yang menurun. Langkah-langkah konkret untuk mencapai hal ini melalui program-program ekonomi inklusif, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, terciptanya sinergitas pendanaan pemerintah dan nonpemerintah dapat dilakukan dengan melibatkan pembentukan kemitraan dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga nonpemerintah lainnya. Sinergitas pendanaan ini dapat memperluas sumber daya yang tersedia untuk pembangunan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan.

### 5.1.2 Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai, Berkualitas, dan Merata dalam Upaya Mendukung Pembangunan Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang memadai bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah yang inklusif di Kabupaten Boyolali. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar, berupa jalan, jembatan, akses terhadap air dan kelistrikan, hingga tersedianya jaringan telekomunikasi secara merata dan berkeadilan. Arah kebijakan untuk mendukung perwujudan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 3  
Arah Kebijakan Misi-2 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)

#### a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dapat diarahkan pada “Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah”. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur berkualitas ke seluruh wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, berupa listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi, hingga seluruh pelosok Kabupaten Boyolali. Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah serta optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air dapat membantu mempercepat penyediaan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Boyolali.





**b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)**

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dapat diarahkan pada “Percepatan penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah”. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi penggunaan jaringan irigasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan irigasi dengan mengintegrasikan teknologi dan manajemen yang canggih. Dengan demikian, pertanian di Kabupaten Boyolali dapat memanfaatkan air secara optimal dalam upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Penyediaan air bersih dan air minum yang aman bagi masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan pembangunan infrastruktur air yang andal dan program pemeliharaan untuk memastikan pasokan air yang cukup dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Selain itu, tersedianya akses sanitasi sehat bagi semua rumah di Kabupaten Boyolali serta optimalisasi pengelolaan air limbah melalui pembangunan sistem sanitasi yang komprehensif, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyakit, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan aman.

Optimalisasi wilayah pemukiman dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mencakup penerapan sistem energi yang efisien, manajemen limbah pintar, dan layanan publik yang terkoneksi untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang cerdas dan berkelanjutan. Selain itu, adanya relokasi rumah warga yang berada dalam kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Serta, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru mencerminkan strategi untuk merangsang pembangunan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Dengan meningkatkan konektivitas fisik dan kualitas digital, langkah ini dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing wilayah.

**c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)**

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dapat diarahkan pada “Penguatan infrastruktur pendukung perkembangan ekonomi unggulan”. Perluasan infrastruktur dasar (listrik, gas, air bersih, dan jaringan telekomunikasi) hingga ke seluruh Kabupaten Boyolali yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Pentingnya menjaga konsistensi dalam perencanaan tata ruang, sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan wilayah. Dengan menjaga tata ruang yang konsisten, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan, mencegah konflik tata ruang, dan menciptakan lingkungan yang terorganisir dan berkelanjutan. Serta, peningkatan konektivitas di tingkat global untuk mendorong ekspansi global di pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sudah berkembang. Dengan meningkatkan konektivitas global, termasuk infrastruktur transportasi, dan teknologi informasi, langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi ekspansi bisnis dan investasi di tingkat internasional, menghasilkan peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing daerah di pasar global.





d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai dapat diarahkan pada “Perwujudan sarana prasarana publik yang berkualitas dan berkeadilan”. Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur dan energi. Melalui program pemerataan, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk memastikan bahwa setiap daerah mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap infrastruktur yang terintegrasi, meliputi jaringan transportasi, air bersih, dan energi, dengan berfokus pada keberlanjutan dan kualitas yang tinggi. Pengentasan kawasan pemukiman kumuh menjadi 0% (nol persen) dapat dilakukan melalui program perumahan yang terjangkau, rehabilitasi kawasan kumuh, dan penyediaan fasilitas infrastruktur dasar. Dengan menghilangkan kawasan permukiman kumuh, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas hidup penduduk, memberikan lingkungan yang lebih sehat, dan menciptakan kawasan perkotaan yang terorganisir dengan baik.

5.1.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Responsif, dan Berintegritas

Transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Transformasi tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang responsif, berintegritas, menciptakan ketenteraman dan ketertiban, serta daya saing daerah. Arah kebijakan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 4  
Arah Kebijakan Misi-3 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah, 2024

a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola dapat diarahkan pada “Peningkatan digitalisasi pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional”. Hal ini dilakukan dengan mendorong penguatan pemanfaatan, riset, dan inovasi daerah di Kabupaten Boyolali. Fokus pada penguatan pemanfaatan, riset, dan inovasi daerah mencerminkan upaya untuk memajukan pembangunan Kabupaten Boyolali melalui penggunaan teknologi, penelitian, dan inovasi. Hal





ini melibatkan dorongan terhadap proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang dapat meningkatkan daya saing dan potensi Kabupaten Boyolali secara keseluruhan.

Adanya upaya penguatan manajemen pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi dapat mendorong peningkatan implementasi digitalisasi dalam pemerintahan. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, pemantauan, dan pengelolaan keuangan secara holistik. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan Kabupaten Boyolali yang berintegritas.

Peningkatan terhadap pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan teknologi informasi. Hal ini dilakukan dengan mendorong peningkatan pengawasan dalam pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pendekatan sistem merit dan teknologi informasi mencerminkan langkah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik.

Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk penguatan aspek pemerintahan digital pada pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Boyolali. Hal ini berfokus pada digitalisasi layanan publik dan audit SPBE yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat aspek pemerintahan digital. Penggunaan teknologi informasi dalam audit SPBE diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali.

#### b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dapat diarahkan pada “Percepatan peningkatan tata kelola kelembagaan menuju akuntabilitas kinerja pemerintahan”. Hal yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya percepatan transformasi tata kelola, yaitu kelembagaan yang kolaboratif untuk mengintegrasikan berbagai sektor dan lembaga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan menciptakan kolaborasi antarlembaga, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, efisiensi, dan efektivitas dalam menyusun kebijakan serta menjalankan program pembangunan dalam mewujudkan kelembagaan yang berintegritas di Kabupaten Boyolali.

Pemerataan pelayanan publik berbasis teknologi informasi hingga ke seluruh wilayah di Kabupaten Boyolali. Hal ini berfokus pada pemerataan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap wilayah di Kabupaten Boyolali mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik yang modern dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi di seluruh wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendekatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan, serta mendukung transformasi digital di tingkat lokal. Selain itu, adanya penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan, penyebaran, dan pemantauan regulasi sehingga dapat menciptakan efisiensi. Penyederhanaan regulasi ini bertujuan untuk





menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan memudahkan masyarakat dalam memahami serta mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, perlunya penguatan pengawasan dan penegakkan hukum perlu untuk dilakukan terhadap aksi-aksi yang berkaitan dengan tindakan korupsi di Kabupaten Boyolali.

Pentingnya ketersediaan SDM ASN yang kompetitif melalui peningkatan kualitas, keterampilan, dan kompetensinya. Langkah ini melibatkan program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing ASN dalam memberikan pelayanan publik. Dengan SDM yang kompetitif, diharapkan pemerintahan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Kabupaten Boyolali.

#### c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola dapat diarahkan pada “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas”. Hal ini dapat diwujudkan melalui kelembagaan yang adaptif dimana mencerminkan kemampuan suatu lembaga untuk berubah dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan, perubahan kebijakan, dan tuntutan zaman. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dan responsivitas dalam struktur dan tata kelola organisasi, memastikan bahwa lembaga tersebut mampu mengatasi perubahan dan tetap relevan dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kesejahteraan, proporsionalitas, dan kompetensi SDM aparatur sipil negara mencerminkan perhatian pada faktor kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Dengan menciptakan kondisi sejahtera dan mendukung pengembangan kompetensi langkah ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Kabupaten Boyolali.

Arah kebijakan transformasi untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan pada tahap ketiga Tahun 2035-2039 adalah sebagai berikut:

#### d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi tata kelola dapat diarahkan pada “Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional”. Hal ini dapat dilihat melalui terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Langkah-langkah untuk mencapai hal ini dengan peningkatan sistem teknologi informasi, pelatihan pegawai pelayanan, dan peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan. Dengan pelayanan publik yang prima, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang efektif dan responsif.

Tercapainya regulasi yang responsif, adaptif, dan taat asas dengan menetapkan standar untuk regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah untuk mencapai ini melibatkan proses perencanaan regulasi yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan regulasi yang adaptif dan taat asas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan hukum yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keadilan sosial. Selain itu,





fokus pada tata kelola mencerminkan upaya untuk membangun sistem pengelolaan yang transparan, integritas, dan mampu bekerja secara efektif dalam kolaborasi. Langkah-langkah untuk mencapai ini termasuk penguatan mekanisme pengawasan, promosi etika dan integritas di dalam pemerintah, serta memfasilitasi kerja sama antarlembaga. Dengan tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan. Adanya praktik pemerintah yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dapat memberikan kepastian hukum yang baik sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang ramah terhadap investasi di Kabupaten Boyolali.

Melalui transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercipta masyarakat sipil yang mandiri di Kabupaten Boyolali. Hal ini mencerminkan aspirasi untuk membangun masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Langkah-langkah untuk mencapai ini dapat melibatkan program pelatihan, penyediaan informasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan masyarakat sipil yang mandiri, diharapkan adanya partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan dan pemantauan kinerja pemerintah.

#### 5.1.4 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Unggul dan Berdaya Saing

Transformasi sosial dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Kabupaten Boyolali yang maju. Transformasi sosial dapat dilakukan dengan memastikan ketersediaan akses terhadap pendidikan berkualitas secara inklusif dan kesehatan yang merata. Arah kebijakan untuk mendukung transformasi sosial di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 5  
Arah Kebijakan Misi-4 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)

##### a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi sosial dapat diarahkan pada “Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas”. Pemerataan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di semua wilayah di Kabupaten Boyolali. Upaya ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap wilayah di Kabupaten Boyolali memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan dan layanan





kesehatan yang berkualitas sehingga menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan masyarakat secara merata.

Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang merata di Kabupaten Boyolali. Hal ini berfokus pada distribusi yang merata dari tenaga pendidik dan kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komunitas di Kabupaten Boyolali dapat menikmati manfaat dari keberadaan tenaga profesional tersebut, mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini dapat diperkuat dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dengan memastikan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memiliki keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern.

Penguatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan dimana masyarakat diberdayakan dengan informasi yang diperlukan untuk memahami dan mengapresiasi pentingnya pendidikan dan kesehatan, membangun kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat secara paripurna yang bertujuan mencakup penyediaan layanan jaminan kesehatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Boyolali dapat mengakses perawatan medis yang diperlukan, serta pemenuhan hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak.

#### b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi sosial dapat diarahkan pada “Akselerasi pemerataan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas”. Akselerasi dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Boyolali dapat dilakukan melalui digitalisasi pendidikan yang mengubah cara belajar dan mengajar, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, dan adaptif. Dengan memberikan akses global terhadap pengetahuan, pendidikan digital mempersiapkan generasi masa depan dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia modern. Hal ini didukung dengan penguatan teknologi informasi dalam pelayanan dan penanganan kesehatan di mana tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga merampingkan proses diagnosis dan perawatan untuk memastikan akses yang lebih cepat dan efektif bagi masyarakat.

Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melibatkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit dan perubahan perilaku, kita dapat menciptakan fondasi kuat untuk kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dapat tercipta pengembangan dan perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali.

#### c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi sosial dapat diarahkan pada “Pemantapan SDM yang unggul dan berdaya saing”. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi





langkah yang menekankan urgensi penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama. Fokus pada upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata dan pendidikan yang berkualitas.

Fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja mencerminkan upaya untuk menyelaraskan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui program pelatihan dan pengembangan, langkah ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dengan mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, langkah ini bertujuan untuk memberikan keamanan finansial dan perlindungan terhadap risiko bagi pekerja, memastikan kesejahteraan mereka selama masa kerja.

**d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)**

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan transformasi sosial dapat diarahkan pada “Perwujudan SDM yang unggul dan berdaya saing”. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Boyolali yang unggul dan berdaya saing melibatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta dukungan untuk sektor ekonomi lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara iklim investasi pada sektor pendidikan, melalui tersedianya program pengembangan keterampilan serta pendidikan vokasi, dan pada sektor kesehatan. Selain itu, memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif di Kabupaten Boyolali menunjukkan terwujudnya transformasi sosial yang menyeluruh.

**5.1.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya**

Perwujudan ketahanan sosial budaya dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Perwujudan masyarakat yang berkarakter dilakukan melalui pemajuan kebudayaan, penguatan pendidikan karakter, peningkatan keluarga yang berkualitas, serta pemerataan peran gender dalam bermasyarakat. Arah kebijakan untuk mendukung perwujudan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 6  
Arah Kebijakan Misi-5 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)





a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dapat diarahkan pada “Pemenuhan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga sejahtera”. Untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berbudaya dan berkarakter, dapat dilakukan melalui optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia, optimalisasi pemenuhan hak anak, serta peningkatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di Kabupaten Boyolali. Pembangunan kebudayaan bertujuan untuk melestarikan warisan budaya, mengembangkan kreativitas dan ekspresi seni, serta meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya yang positif di Kabupaten Boyolali. Selain itu, peningkatan kualitas keluarga sejahtera mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hubungan antar anggota keluarga sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan dalam keluarga.

b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dapat diarahkan pada “Percepatan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga sejahtera”. Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda. Kebudayaan yang kuat dapat membentuk dasar bagi identitas suatu daerah dan memperkaya kehidupan sosial masyarakatnya. Keluarga yang sejahtera mampu memberikan lingkungan yang stabil dan mendukung untuk perkembangan anggotanya. Serta, peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Upaya-upaya ini menjadi penting untuk mendorong akselerasi masyarakat Kabupaten Boyolali yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya.

c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dapat diarahkan pada “Pemantapan pembangunan kebudayaan berorientasi pada pengembangan sosio kultural”. Pengembangan sosio-kultural mencakup berbagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan aspek-aspek sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk pengembangan nilai-nilai, norma, institusi sosial, serta praktik budaya yang berdampak pada kehidupan sehari-hari individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui apresiasi terhadap keanekaragaman budaya dan menghormati hak-hak budaya dari berbagai kelompok dalam masyarakat melalui forum atau komunitas yang terpadu, adanya inisiatif untuk merawat bahasa, seni, musik, tarian, dan warisan budaya lainnya yang penting bagi identitas kolektif suatu komunitas, serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sosio-kultural. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Boyolali dapat tumbuh dan berkembang dalam cara yang mendukung dan memelihara keanekaragaman budaya serta memastikan inklusi sosial yang adil dan berkelanjutan.





d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya dapat diarahkan pada “Perwujudan masyarakat Boyolali yang berbudaya dan berkarakter”. Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter merupakan cita-cita yang menggambarkan suatu daerah yang memiliki kesadaran yang kuat akan nilai-nilai budaya dan moral yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui masyarakat yang memiliki nilai budaya tinggi dan adanya forum serta komunitas yang aktif dalam pelestarian budaya serta didukung oleh peran dan kerja sama pemerintah. Masyarakat yang berbudaya dan berkarakter bukanlah hasil dari proses yang singkat atau mudah, melainkan merupakan hasil dari komitmen kolektif untuk membangun komunitas yang harmonis, inklusif, dan bermartabat. Dengan menghargai warisan budaya dan moral yang positif, masyarakat dapat memperkuat identitas kolektif untuk mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan keberanian yang diperlukan.

5.1.6 Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkeadilan

Perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan berkualitas. Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Salah satunya adalah kemiskinan ekstrem yang merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga hidup dengan pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan atau pendapatan per kapita suatu daerah. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,02 dengan indeks keparahan kemiskinan adalah sebesar 0,18. Sehingga, diperlukan upaya untuk mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Kesejahteraan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan perlindungan masyarakat yang merata dan berkesinambungan. Arah kebijakan untuk mendukung kesejahteraan yang berkeadilan di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 7

Arah Kebijakan Misi-6 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)

a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat diarahkan pada “Pemenuhan kehidupan masyarakat





yang layak”. Perlindungan sosial menjadi hal yang penting untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adanya optimalisasi jaminan sosial yang universal bertujuan untuk menyediakan layanan jaminan yang komprehensif serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali. Hal ini berkaitan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan jaminan perlindungan sosial yang berkeadilan dapat mendukung upaya terwujudnya kehidupan masyarakat yang layak.

**b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)**

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat diarahkan pada “Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas”. Adanya program pelatihan keterampilan dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat yang memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dapat meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana dasar, meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang layak, listrik, jalan, dan transportasi publik yang memadai, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Dengan begitu, dapat tercipta masyarakat yang berkehidupan layak dan berkeadilan untuk mendukung penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

**c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)**

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat diarahkan pada “Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas”. Adanya integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi dan program ketenagakerjaan dapat mendorong pencapaian dampak kesejahteraan yang lebih holistik. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, fokus pada pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang dapat merespons kebutuhan lokal. Dengan memahami konteks daerah, langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial. Hal ini juga dapat mendorong terwujudnya manusia, keluarga, dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan serta mampu berpartisipasi aktif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali.

**d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)**

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dapat diarahkan pada “Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan”. Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan individu untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua. Upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, termasuk antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok sosial dan





ekonomi yang berbeda di Kabupaten Boyolali. Selain itu, program-program yang berkelanjutan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil. Dengan memprioritaskan keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan pemenuhan hak asasi manusia, masyarakat dapat berkembang secara menyeluruh dan memberikan manfaat yang adil dan berkesinambungan.

#### 5.1.7 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Responsif terhadap Bencana

Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, dan kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui pembangunan yang ramah lingkungan, pemanfaatan energi yang optimal dan efisien, hingga pengelolaan lingkungan untuk menciptakan wilayah yang berketahanan bencana. Arah kebijakan untuk mendukung perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:

Gambar V. 8  
Arah Kebijakan Misi-7 Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah (2024)

##### a. Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029)

Pada tahap pertama, arah kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan pada “Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana”. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mengindikasikan upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga dan alat kebijakan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, kemandirian pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Peningkatan kapasitas ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.

Peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampai ke level desa. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan manajemen sampah secara holistik, mencakup peningkatan kapasitas pengangkutan sampah, promosi praktik 3R, dan pelibatan masyarakat desa dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Boyolali. Adanya penguatan dalam regulasi serta





pengawasan aktivitas sekitar daerah aliran sungai menunjukkan kesadaran akan pentingnya regulasi yang kuat dan pengawasan aktif terhadap aktivitas di sekitar daerah aliran sungai untuk melindungi ekosistem sungai, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Optimalisasi dalam pemanfaatan aliran sungai serta pemanfaatan waduk dapat mendorong peningkatan ketahanan air dan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali. Ketahanan energi dapat ditingkatkan melalui tersedianya akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau, terutama di daerah pedesaan melalui jaringan listrik maupun infrastruktur yang memadai.

Peningkatan informasi dan edukasi kebencanaan, serta penanggulangan bencana menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait risiko bencana, langkah-langkah mitigasi, dan respons yang tepat saat terjadi bencana. Komunikasi yang efektif, penyediaan informasi yang jelas, dan program edukasi yang terarah menjadi kunci dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Serta, peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana yang berkelanjutan dan berbasis risiko. Peningkatan kualitas perencanaan ini melibatkan pertimbangan serius terhadap daya dukung lingkungan, kapasitas daya tampung, keberlanjutan hutan, perlindungan spesies dilindungi, serta evaluasi risiko bencana untuk menciptakan penggunaan lahan yang optimal dan aman.

#### b. Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034)

Pada tahap kedua, arah kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan pada “Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana”. Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga untuk menciptakan ekonomi sirkular dengan fasilitas yang terintegrasi. Selain itu, peningkatan teknologi deteksi dini bencana mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman bencana. Dengan memanfaatkan teknologi modern berupa sensor, pemantauan satelit, dan sistem informasi geografis, langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi bencana dan memberikan peringatan kepada masyarakat dengan lebih cepat. Peningkatan teknologi ini dapat meminimalkan dampak bencana, meningkatkan evakuasi, dan menyelamatkan nyawa dari ancaman bencana alam dan perubahan iklim di Kabupaten Boyolali.

Adanya efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan air dan energi dapat meningkatkan ketahanan sumber daya di Kabupaten Boyolali. Optimalisasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung air dan energi secara terpadu dari hulu ke hilir dapat meningkatkan kelestarian air dan energi di Kabupaten Boyolali. Selain itu, pemanfaatan aliran air sebagai sistem irigasi pertanian yang modern dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Boyolali.

#### c. Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039)

Pada tahap ketiga, arah kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan pada “Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana”. Hal ini dapat dicapai melalui pengurangan risiko pencemaran lingkungan di Kabupaten Boyolali, pemanfaatan penerapan energi bersih serta energi





terbarukan, serta meningkatkan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan dan di perdesaan di Kabupaten Boyolali.

Adanya diversifikasi dan hilirisasi pertanian dalam arti luas dapat mendorong kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali. Hal ini dapat dilakukan melalui praktik-praktik konservasi tanah, melalui pemulihan lahan dan penghijauan, yang membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan mempertahankan kelembaban tanah. Dengan begitu, dapat terwujud kelestarian air dan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali. Pemulihan lahan dapat mengembalikan keberlanjutan lingkungan dan mendorong kemampuan adaptasi lingkungan terhadap bencana dan perubahan iklim.

#### d. Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2045)

Pada tahap akhir pembangunan jangka panjang, arah kebijakan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat diarahkan pada “Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana”. Fokus pada terwujudnya ketangguhan masyarakat mencerminkan kesadaran akan risiko bencana dan keinginan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut. Langkah-langkah termasuk program pelatihan, penyusunan rencana tanggap darurat, dan peningkatan infrastruktur yang tahan bencana untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan efektif dan tangguh menghadapi bencana alam.

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas menekankan kepentingan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Langkah-langkah untuk mencapainya melibatkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, pengelolaan limbah yang bijaksana, dan pembangunan infrastruktur hijau. Dengan lingkungan yang berkualitas, masyarakat dapat menikmati kesehatan yang lebih baik dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan polusi. Mengembangkan infrastruktur penyediaan air yang beragam, termasuk sumber air permukaan (bendungan dan embung) dan air tanah, untuk memastikan pasokan air yang andal sepanjang tahun. Dengan menerapkan energi bersih dan pengembangan infrastruktur air yang memadai, dapat mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan air serta pelestarian lingkungan.

Sumber daya hayati yang termanfaatkan sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Langkah-langkah melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengembangan sistem pangan lokal. Dengan cara ini, dapat memastikan bahwa sumber daya hayati termanfaatkan secara bijaksana dan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju pencapaian *net zero emission* yang melibatkan pengurangan emisi melalui penggunaan energi bersih, kebijakan ramah lingkungan, dan pengembangan teknologi berkelanjutan. Dengan menuju *net zero emission*, dapat berkontribusi pada upaya global untuk memitigasi dampak perubahan iklim.



Secara ringkas, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Boyolali terangkum dalam tabel berikut ini:

**Tabel V. 1**  
**Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali**  
**Tahun 2025-2045**

VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berkbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN					
Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berkbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas	Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan	Perwujudan ekonomi kerakyatan menuju SDM Boyolali berpendapatan tinggi
	Mewujudkan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Penguatan infrastruktur pendukung perkembangan ekonomi unggulan	Perwujudan sarana prasarana publik yang berkualitas dan berkeadilan
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja ASN yang adaptif dan profesional	Percepatan peningkatan tata kelola kelembagaan menuju akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional
	Mewujudkan transformasi sosial yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas	Akselerasi pemerataan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas	Pemantapan SDM yang unggul dan berdaya saing	Perwujudan SDM yang unggul dan berdaya saing
	Mewujudkan ketahanan sosial budaya	Pemenuhan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga sejahtera	Percepatan pembangunan kebudayaan dan kualitas keluarga sejahtera	Pemantapan pembangunan kebudayaan berorientasi pada pengembangan sosio kultural	Perwujudan masyarakat Boyolali yang berbudaya dan berkarakter
	Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan	Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak	Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas	Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas	Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana

Sumber: Data diolah (2024)

## 5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang merupakan kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke 20 (dua puluh). Sasaran pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi Kabupaten Boyolali serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan. Dalam penentuan sasaran pokok perlu memperhatikan sasaran visi dan arah pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045.



Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan. Indikator yang digunakan merupakan indikator makro yang menggambarkan kinerja pada *level impact*, sehingga merefleksikan kedalaman perencanaan jangka panjang yang lebih memberikan arahan umum pembangunan. Indikator yang digunakan dapat merujuk pada indikator yang terdapat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan disesuaikan dengan muatan lokal Kabupaten Boyolali.

#### 5.2.1. Terwujudnya Struktur Ekonomi Berkualitas yang Produktif dan Inklusif

Transformasi ekonomi di Kabupaten Boyolali dilakukan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian melalui pemanfaatan sektor unggulan dan sektor potensial. Pemanfaatan sektor unggulan dan potensial memiliki tujuan untuk menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan inklusif. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Inovasi, dan produktivitas ekonomi dapat diwujudkan melalui peningkatan produktivitas dan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dapat diwujudkan melalui penciptaan nilai tambah produk-produk lokal menuju persaingan pada pasar global sehingga dapat tercipta pemerataan di Kabupaten Boyolali. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dapat diwujudkan melalui dukungan kemudahan permodalan perekonomian di Kabupaten Boyolali, terutama pada kewirausahaan. Penerapan Ekonomi Berkelanjutan dapat diwujudkan melalui penerapan perekonomian yang berorientasi keberlanjutan, seperti inovasi dalam teknologi bersih dan penerapan ekonomi sirkular. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar dan menciptakan perekonomian yang berkelanjutan yang produktif dan inklusif. Perwujudan transformasi ekonomi di Kabupaten Boyolali diwujudkan melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi untuk memperkuat produktivitas sektor unggulan dalam rangka mendukung hilirisasi. Adanya integrasi ekonomi domestik dan global serta peningkatan stabilitas ekonomi makro dilakukan untuk mendukung pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kapasitas perekonomian untuk menciptakan perekonomian daerah yang produktif dan inklusif.

Sasaran pokok Terwujudnya Struktur Ekonomi Berkualitas yang Produktif dan Inklusif dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, serta Penerapan Ekonomi Berkelanjutan. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: Meningkatkan produktivitas serta mutu komoditas unggulan; pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah; percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan; percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal; pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif; penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata buatan,





wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif; penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha; peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif; penguatan peran koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai industri melalui peningkatan akses ke sumber daya; penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; penyediaan fasilitas jaminan sosial, fasilitas pelatihan, dan sarana prasarana pendukung bagi tenaga kerja; peningkatan produktivitas BUMD; mendorong penguatan pemanfaatan, riset, dan inovasi daerah; penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif; perluasan potensi investasi dan pengembangan pusat industri di Kabupaten Boyolali; penguatan potensi ekonomi lokal; penyediaan jalur transportasi yang berkualitas keseluruh wilayah desa di Kabupaten Boyolali; peningkatan akses pasar melalui sosialisasi platform digital dalam pemasaran dan efisiensi rantai distribusi kebutuhan pokok; peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; penguatan pengendalian inflasi daerah; perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas; penerapan pembangunan rendah karbon melalui penerapan kebijakan ramah lingkungan, dan pengembangan teknologi berkelanjutan.

Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya transformasi ekonomi pada Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:



Tabel V. 2  
Sasaran Pokok Misi-1 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terwujudnya struktur ekonomi berkualitas yang produktif dan inklusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	31,59	31,59	33,4	35,21	38,03
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,73	3,7	4,66	5,62	6,32
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	1347	1700	2100	2500	3000
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,9	4,25	4,62	5,02	5,77
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,28	2,33	2,33	2,33	6,38
		Kapabilitas Inovasi	Angka	3,49	3,66	3,87	4,08	4,29
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,92 - 3,62	3,62 - 3,31	3,31 - 2,70	2,70 - 2,09	2,09 - 1,79
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,82	70,82	74,82	78,82	82,7
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	88,25	88,5	88,75	89	89,25
		Return on Aset (ROA) BUMD	%	2	2,01	2,05	2,06	4,44
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Rp Juta	42,93-43,23	76,65	118,60	160,56	193,98-227,83
	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,32-19,52	19,76	21,01	22,26	23,32-25,52	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	21,15	22,93	24,71	26,49	28,27
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,65	0,44	0,44	0,44	0,52	
	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,65	1,44	1,63	1,82	2,44	
	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,52	1,3	1,34	1,54	2	
Penerapan Ekonomi Berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2eq	2,323,172	5,575,095	12,078,940	21,834,708	34,842,398	

Sumber: Data diolah, 2024



### 5.2.2. Terwujudnya Infrastruktur Pembangunan yang Merata, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan

Pemerataan infrastruktur di Kabupaten Boyolali dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan sarana prasarana yang merata, berkualitas, dan ramah lingkungan. Perwujudan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan memperhatikan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta transformasi digital. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dapat diwujudkan melalui tersedianya akses rumah tangga yang layak, seperti air minum dan sanitasi, serta tersedianya infrastruktur dasar untuk meningkatkan konektivitas di Kabupaten Boyolali. Transformasi Digital dapat diwujudkan melalui pemenuhan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung terpenuhinya akses rumah tangga akan internet. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dapat mendorong pembangunan sosial hingga ekonomi yang inklusif di Kabupaten Boyolali menuju pengembangan dan pemerataan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Sasaran pokok Terwujudnya Infrastruktur Pembangunan yang Merata, Berkualitas, dan Ramah Lingkungan dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: Optimalisasi Wilayah Pemukiman Berbasis *Smart-City*; pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar desa; penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa; peningkatan infrastruktur kelengkapan jalan melalui pembangunan rambu-rambu lalu lintas, penerangan jalan, marka jalan, trotoar, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya; pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi) hingga seluruh Kabupaten Boyolali; Peningkatan infrastruktur pengolahan limbah; percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi; percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh wilayah Boyolali; peningkatan utilitas dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan strategis.



Tabel V. 3  
Sasaran Pokok Misi-2 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terwujudnya infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, dan ramah lingkungan	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	7,28	17,24	27,2	37,16	44,44
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	75,31 (2023)	94	96	98	100
		Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83	84,12	85,12	86,12	87,12
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	89,33	89,33-90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-96,00
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	32,05	47,54	63,03	78,51	94
	Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	74,25	74,5	74,75	75	75,25

Sumber: Data diolah, 2024



### 5.2.3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas. Daerah mengupayakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini dilakukan melalui Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif melalui pelayanan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kinerja profesional yang bersih dan berlandaskan pelayanan dilakukan untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Ketenteraman dan Ketertiban diwujudkan melalui penguatan lembaga hukum untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya aksi kriminalitas sehingga tercipta kondusivitas wilayah. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah diwujudkan melalui penguatan infrastruktur dan inovasi daerah untuk mendukung investasi di Kabupaten Boyolali. Dengan begitu, diperlukan keterlibatan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kondusivitas wilayah untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan bersih di Kabupaten Boyolali. Sasaran pokok Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif, Ketenteraman dan Ketertiban serta Daya Saing Daerah. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan. Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; mendorong penguatan pemanfaatan, riset, dan inovasi daerah; penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi; penguatan manajemen pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi; peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja yang berbasis sistem merit dengan perteknologi informasi; peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; penguatan integritas melalui pendidikan etika dan nilai-nilai integritas, peran keluarga dan lingkungan sosial, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas, memberikan keteladanan, penguatan hukum dan sistem pengawasan dan penguatan keterlibatan masyarakat; penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas; penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah; peningkatan produktivitas serta mutu komoditas unggulan (pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri) dengan melibatkan adopsi teknologi modern. Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya transformasi tata kelola di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:



Tabel V. 4  
Sasaran Pokok Misi-3 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,23	79	81	83	85
		Indeks Reformasi Hukum	Angka	65,1	71.03.00	77,5	83,8	90
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,85	3,25	3,5	3,75	4
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,1	4,25	4,35	4,45	5
		Indeks Integritas Nasional	Angka	89,95	90	93	96	98,08
	Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	N/A	13	11	11	0
	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41 (2023)	3,6	3,8	4	4,2

Sumber: Data diolah, 2024



#### 5.2.4. Terwujudnya Produktivitas SDM Boyolali yang Unggul

Transformasi sosial dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang unggul untuk mendukung produktivitas dan peningkatan daya saing masyarakat. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan secara merata, seperti penyesuaian kurikulum pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan formal dan nonformal, serta mendorong perwujudan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Kesehatan untuk semua diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan fasilitas kesehatan yang berkeadilan dan merata di Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara keseluruhan. Sehingga, dapat terwujud peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, berakhlak terpuji, sehat, dan cerdas dalam mencapai masyarakat yang unggul di Kabupaten Boyolali.

Sasaran pokok Terwujudnya Produktivitas SDM Boyolali yang Unggul dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif dan Kesehatan untuk semua. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: percepatan wajib belajar 13 (tiga belas) tahun; pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi; pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman dari bencana; penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta, karakter, dan agama, *digital literacy*, dan kondisi lokal Boyolali; penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik; peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; cepat tanggap dalam penanggulangan krisis kesehatan melalui serangkaian upaya yang meliputi kegiatan prakrisis kesehatan, tanggap darurat Krisis Kesehatan, dan pascakrisis kesehatan; perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap; penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan; pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*; percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular. Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya transformasi sosial pada Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:



Tabel V. 5  
Sasaran Pokok Misi-4 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Terwujudnya produktivitas SDM Boyolali yang unggul	Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
		Literasi Membaca SD/Sederajat	%	65,26	68,82	72,32	77,88	81,36
		Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	61,2	64,85	76,08	84,21	90,17
		Numerasi SD/Sederajat	%	56,28	66,65	75,85	86,71	96,78
		Numerasi SMP/Sederajat	%	38,06	44,48	58,62	72,46	85,01
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,24	8,56	8,98	9,02	9,48
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	14,82	15,22	15,88	16,06
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,28	7,22	8,16	9,09	10,03
		Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	94,91	95,28	96,66	97,28	100
	Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,48	76,99	78,04	80,19	82,74
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	10	7	4	2
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,24	10	8	6	4,76
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )	%	90	90	92	95	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> )	%	90	90	92	93	95
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95.33	96	97	98	99.5

Sumber: Data diolah, 2024



#### 5.2.5. Terwujudnya Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Beradab

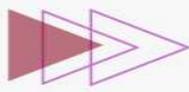
Ketahanan sosial budaya dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Hal ini dilakukan melalui penguatan penumbuhan karakter, norma, dan nilai budaya terhadap masyarakat melalui keluarga yang berkualitas serta pemanfaatan gender secara adil. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter diwujudkan melalui dukungan dalam pembangunan kebudayaan khas daerah untuk mendorong kelestarian kearifan lokal di Kabupaten Boyolali. Selain itu, adanya pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini dapat menggambarkan suatu daerah yang memiliki kesadaran yang kuat akan nilai-nilai budaya dan moral yang positif. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif diwujudkan melalui peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga serta peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Boyolali yang inklusif. Adanya perlindungan terhadap kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak dapat meningkatkan ketahanan sosial budaya di Kabupaten Boyolali.

Sasaran pokok Terwujudnya Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Beradab dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter dan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: Penguatan penanaman nilai-nilai budaya sejak dini dengan edukasi budaya mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil; internalisasi kurikulum kebudayaan di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya pada anak-anak sekolah; pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan akses mudah ke buku dan sumber bacaan serta menyediakan aplikasi membaca ebook yang mudah diakses dan menarik bagi berbagai usia; peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan

Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya ketahanan sosial budaya di Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:





Tabel V. 6  
Sasaran Pokok Misi-5 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terwujudnya pembangunan sosial budaya masyarakat yang beradab	Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	76	81	86	91	96
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	38,11	00.07	00.09	00.14	54,16
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	131.383	132.854	134.375	135.950	137.719
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	22,46	24,46	25,68	28,32	32,49
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,13	0,7	1,26	1,83	2,39
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,32-64,77	68,11	72,41	77,71	79,64-80,2
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,34 - 0,33	0,32	0,30	0,28	0,22 - 0,13

Sumber: Data diolah, 2024





#### 5.2.6. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Boyolali Menuju Kesejahteraan yang Berkesinambungan

Perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan di Kabupaten Boyolali dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan untuk mengupayakan terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan melalui perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan Sosial yang Adaptif diwujudkan melalui peningkatan jaminan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan masyarakat, serta mendukung upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sehingga, dapat tercapai penurunan angka kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan di Kabupaten Boyolali.

Sasaran pokok Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Boyolali Menuju Kesejahteraan yang Berkesinambungan dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Perlindungan Sosial yang Adaptif. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat yang dapat menanggulangi dampak ekonomi yang merugikan dan dengan menerapkan satu sistem data kependudukan digunakan untuk fondasi data; perluasan penyediaan bantuan sosial terpadu melalui bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan; perluasan penyediaan jaminan sosial melalui jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua; inovasi penanganan masalah kesejahteraan dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain; penanganan masalah Rumah Tidak Layak Huni; penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan yang berkesinambungan pada Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:



Tabel V. 7  
Sasaran Pokok Misi-6 Kabupaten Boyolali

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat Boyolali menuju kesejahteraan yang berkesinambungan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	8,58-9,08	6,92-6,44	4,76-4,29	2,6-2,15	0,00-0,44

Sumber: Data diolah, 2024



### 5.2.7. Terciptanya Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Responsif Terhadap Bencana

Ketahanan ekologi dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana serta perubahan iklim. Kabupaten Boyolali mengupayakan terciptanya ketahanan ekologi melalui peningkatan lingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan air, energi, dan kemandirian pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Lingkungan Hidup Berkualitas diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terintegrasi, seperti dengan menerapkan pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampai ke level desa serta upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan diwujudkan melalui optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya serta pemanfaatan aliran air sebagai sistem irigasi pertanian yang modern dapat meningkatkan kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim diwujudkan melalui penguatan fisik kewilayahan melalui revitalisasi lahan, mitigasi bencana, edukasi kebencanaan dan perubahan iklim, serta peningkatan teknologi deteksi dini bencana mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap ancaman bencana di Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan melalui pemerataan pembangunan yang berlandaskan wawasan lingkungan sehingga tercipta kelestarian lingkungan. Kabupaten Boyolali juga melakukan peningkatan wawasan terhadap ketahanan dan mitigasi dari bencana melalui upaya mitigasi dan konservasi di Kabupaten Boyolali. Selain itu, adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat meningkatkan ketahanan air dan energi serta kemandirian pangan di Kabupaten Boyolali.

Sasaran pokok Terciptanya Pembangunan yang Berkelanjutan Serta Responsif Terhadap Bencana dijabarkan melalui arah pembangunan antara lain Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketahanan Air, dan Kemandirian Pangan, serta Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Setiap arah pembangunan dijabarkan dalam arah kebijakan untuk mencapai indikator utama pembangunan.

Arah kebijakan untuk mencapai arah pembangunan dan mencapai target indikator utama pembangunan tersebut antara lain: peningkatan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; peningkatan kapasitas angkut sampah serta memperkuat pelaksanaan 3R Sampai ke Level desa; memperkuat regulasi serta pengawasan aktivitas sekitar daerah aliran sungai; pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dari hulu ke hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga untuk menciptakan ekonomi sirkuler dengan fasilitas terintegrasi; pengurangan pencemaran lingkungan; penanganan limbah yang terkelola dengan baik; peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan; peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi; penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi; penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan asuransi pertanian; penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian; peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan; peningkatan ketahanan





pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; peningkatan efisiensi penggunaan jaringan irigasi dengan mengintegrasikan teknologi dan manajemen yang modern; pembangunan infrastruktur air yang andal dan program pemeliharaan untuk memastikan pasokan air yang cukup dan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali; optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah rawan air; peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan dan penanggulangan bencana; peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, lingkungan hidup, serta risiko bencana; pengembangan sistem peringatan dini yang handal; peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Indikator utama pembangunan yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan pada Kabupaten Boyolali dijabarkan sebagai berikut:



Tabel V. 8  
Sasaran Pokok Misi-7 Kabupaten Boyolali

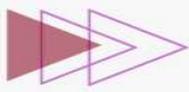
SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
					TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Terciptanya pembangunan yang berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,39	71,48	72,83	74,19	75,82
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,75	43,33	58,27	73,61	90
	Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	%	10,77	8,81	6,85	4,88	2,92
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	87,92	89,055	90,19	91,325	92,46
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian	%	97,13	97,27-97,81	97,95-98,5	98,63-99,18	100
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	61,54	64,1	66,4	68,6	70,9
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	125,26 - 124,49	116,83-114,77	108,40-105,05	99,97-95,33	91,53 - 85,61

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel V. 9

Matriks Visi, Misi, Tema Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok, dan Indikator Utama Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Boyolali Tahun 2025-2045

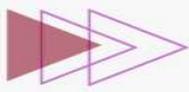
VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan									
			ARAH KEBIJAKAN												
Kabupaten Boyolali Ramah Investasi yang Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Maju (Ekonomi)	Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas	Penguatan kualitas produksi sektor unggulan dan hilirisasi produk daerah berbasis investasi yang berkeadilan	Percepatan transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan	Pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan	Perwujudan ekonomi kerakyatan menuju SDM Boyolali berpendapatan tinggi	Terwujudnya struktur ekonomi berkualitas yang produktif dan inklusif	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	31,59	31,59	33,4	35,21	38,03
									Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,73	3,7	4,66	5,62	6,32
									Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	1347	1700	2100	2500	3000
									Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,9	4,25	4,62	5,02	5,77
									Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,28	2,33	2,33	2,33	6,38
									Kapabilitas Inovasi	Angka	3,49	3,66	3,87	4,08	4,29
									Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,92 - 3,62	3,62 - 3,31	3,31 - 2,70	2,70 - 2,09	2,09 - 1,79
									Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	66,82	70,82	74,82	78,82	82,7
									Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	88,25	88,5	88,75	89	89,25
									Return on Aset (ROA) BUMD	%	2	2,01	2,05	2,06	4,44
									Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Rp Juta	42,93-43,23	76,65	118,60	160,56	193,98-227,83
									Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,32-19,52	19,76	21,01	22,26	23,32-25,52
									Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PDRB)	%	21,15	22,93	24,71	26,49	28,27								
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,65	0,44	0,44	0,44	0,52								



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan									
ARAH KEBIJAKAN															
								Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,65	1,44	1,63	1,82	2,44	
								Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	1,52	1,3	1,34	1,54	2	
							Penerapan Ekonomi Berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK kumulatif	tonCO2- eq	2,323,172	5,575,095	12,078,940	21,834,708	34,842,398	
Maju (Infrastruktur)	Mewujudkan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan merata dalam upaya mendukung pengembangan wilayah	Penguatan infrastruktur pendukung perkembangan ekonomi unggulan	Perwujudan sarana prasarana publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan	Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Desa Mandiri	%	7,28	17,24	27,2	37,16	44,44	
								Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	75,31 (2023)	94	96	98	100	
								Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83	84,12	85,12	86,12	87,12	
								Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	89,33	89,33-90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-96,00	
								Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	32,05	47,54	63,03	78,51	94	
								Transformasi Digital	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	74,25	74,5	74,75	75	75,25
Maju (Tata Kelola)	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik berbasis pemberdayaan kinerja aparatur sipil negara yang adaptif dan profesional	Percepatan peningkatan tata kelola kelembagaan menuju akuntabilitas kinerja pemerintahan	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berintegritas	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,23	79	81	83	85	
								Indeks Reformasi Hukum	Angka	65,1	71.03.00	77,5	83,8	90	
								Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,85	3,25	3,5	3,75	4	
								Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,1	4,25	4,35	4,45	5	
								Indeks Integritas Nasional	Angka	89,95	90	93	96	98,08	
								Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	N/A	13	11	11	0
Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,41 (2023)	3,6	3,8	4	4,2								
SDM Unggul	Mewujudkan transformasi sosial yang	Peningkatan pelayanan pendidikan dan	Akselerasi pemerataan kualitas	Pemantapan SDM yang	Perwujudan SDM yang	Terwujudnya produktivitas	Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen							





# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan									
			ARAH KEBIJAKAN												
		unggul dan berdaya saing	kesehatan menuju masyarakat berkualitas	pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju masyarakat berkualitas	unggul dan berdaya saing	unggul dan berdaya saing	SDM Boyolali yang unggul		tingkat nasional (seluruh jenjang):						
									Literasi Membaca SD/Sederajat	%	65,26	68,82	72,32	77,88	81,36
									Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	61,2	64,85	76,08	84,21	90,17
									Numerasi SD/Sederajat	%	56,28	66,65	75,85	86,71	96,78
									Numerasi SMP/Sederajat	%	38,06	44,48	58,62	72,46	85,01
									Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,24	8,56	8,98	9,02	9,48
									Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	14,82	15,22	15,88	16,06
									Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,28	7,22	8,16	9,09	10,03
									Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	94,91	95,28	96,66	97,28	100
								Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,48	76,99	78,04	80,19	82,74
									Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	13	10	7	4	2
									Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	12,24	10	8	6	4,76
									Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )	%	90	90	92	95	100
									Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> )	%	90	90	92	93	95
									Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,33	96	97	98	99,5
	Berbudaya	Mewujudkan ketahanan	Pemenuhan pembangunan kebudayaan	Percepatan pembangunan kebudayaan	Pemantapan pembangunan kebudayaan	Perwujudan masyarakat Boyolali yang	Terwujudnya pembanguan sosial	Pemajuan Kebudayaan dan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa	%	76	81	86	91	96

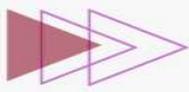




# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET				
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)	
			Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan										
			ARAH KEBIJAKAN													
		sosial budaya	dan kualitas keluarga sejahtera	dan kualitas keluarga sejahtera	berorientasi pada pengembangan sosio kultural	berbudaya dan berkarakter	budaya masyarakat yang beradab	Pendidikan Karakter	daerah/ seni budaya dan mengarusutama-kan kebudayaan							
									Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	38,11	00,07	00,09	00,14	54,16	
									Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	131.383	132.854	134.375	135.950	137.719	
									Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	22,46	24,46	25,68	28,32	32,49	
									Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,13	0,7	1,26	1,83	2,39	
								Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,32-64,77	68,11	72,41	77,71	79,64-80,2	
									Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,34 - 0,33	0,32	0,3	0,28	0,22 - 0,13	
	Sejahtera	Mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan	Pemenuhan kehidupan masyarakat yang layak	Percepatan kehidupan masyarakat yang layak dan berkualitas	Pemantapan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkualitas	Perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat Boyolali menuju kesejahteraan yang berkesinambungan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan	%	8,58-9,08	6,92-6,44	4,76-4,29	2,6-2,15	0,00-0,44	
	Berkelanjutan (lingkungan)	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup yang	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup yang	Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terciptanya pembangunan yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	70,39	71,48	72,83	74,19	75,82	
									Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,75	43,33	58,27	73,61	90	





# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

VISI	POKOK VISI	MISI	TEMA PEMBANGUNAN				SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE 2025	TARGET			
			Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)						Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Boyolali Maju, SDM Unggul, Berbudaya, Sejahtera, dan Berkelanjutan									
ARAH KEBIJAKAN															
		tan serta responsif terhadap bencana	serta responsif terhadap bencana	berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	berkelanjutan serta responsif terhadap bencana	serta responsif terhadap bencana	serta responsif terhadap bencana	Ketahanan Air dan Kemandirian Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> )	%	10,77	8,81	6,85	4,88	2,92
									Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	87,92	89,055	90,19	91,325	92,46
									Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	97,13	97,27-97,81	97,95-98,5	98,63-99,18	100
									Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	61,54	64,1	66,4	68,6	70,9
								Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	125,26 - 124,49	116,83-114,77	108,40-105,05	99,97-95,33	91,53 - 85,61

Sumber: Data diolah, 2024



## BAB VI PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RPJPD Tahun 2025–2045 memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan yang disertai dengan indikator (kuantitatif) untuk masing-masing sasarannya dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Tersedianya RPJPD Tahun 2025–2045 merupakan instrumen yang digunakan untuk memastikan adanya keselarasan (harmonisasi) agenda pembangunan pada tingkat nasional – Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali. Di samping itu, RPJPD Tahun 2025–2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Hal penting lainnya adalah RPJPD Tahun 2025–2045 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, serta menjadi acuan bagi penyelenggaraan program-program pembangunan di Kabupaten Boyolali. RPJPD Tahun 2025–2045 juga akan menjadi panduan bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun pembangunan 5 (lima) tahunan dalam kontestasi politik. Setidaknya terdapat 4 (empat) periode kepemimpinan daerah yang akan dikontestasikan, yaitu periode RPJMD 2025-2029, RPJMD 2030-2034, RPJMD 2035-2039, dan RPJMD 2040-2045. Visi dan misi yang akan diusung harus mempedomani tahapan pembangunan yang dinyatakan dalam RPJPD.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan RPJPD Tahun 2025–2045, maka pelaksanaan RPJPD dapat memperhatikan kaidah pelaksanaan:

### 1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan.

Keberhasilan RPJPD Tahun 2025–2045 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi, dan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Konsistensi pendanaan adalah memastikan bahwa sumber pendanaan stabil dan berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

### 2. Sistem insentif.

Sistem insentif untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya,

### 3. Kerangka pengendalian

Pengendalian dan evaluasi yang berkala akan membantu mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, sementara manajemen risiko yang efektif akan meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul.

4. Pengendalian dan evaluasi pembangunan

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang melalui pemantauan supervisi dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara berkala.

5. Manajemen risiko

Penyusunan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, sehingga memerlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif. Pengendalian perencanaan dilakukan pada pelaksanaan jangka menengah dan jangka pendek daerah.

6. Mekanisme perubahan

Mekanisme perubahan yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

7. Komunikasi publik

Komunikasi publik yang efektif memastikan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memberikan masukan dan merasa memiliki pembangunan yang berlangsung di daerahnya.

8. Peningkatan kapasitas pembiayaan

Pembangunan Kabupaten Boyolali 2025-2045 memerlukan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam kegiatan pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi dari sektor swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta skema *Public Private Partnership* (PPP). Inovasi tersebut dapat mengakselerasi pembangunan yang inklusif dan merata dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

9. Manajemen investasi

Manajemen investasi di Kabupaten Boyolali mengelola dana secara efektif untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Fokusnya adalah memprioritaskan sektor strategis, mengoptimalkan anggaran, dan bermitra dengan swasta guna memastikan setiap investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hal ini memerlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang bertujuan untuk mencapai indikator sasaran visi maupun sasaran pokok yang menjadi komitmen untuk dicapai di Tahun 2045.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT